

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-6
1.3 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika RKPD	I-10
 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.....	 II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-61
2.4 Aspek Daya Saing.....	II-187
2.5 Inovasi Daerah	II-196
2.5 Permasalahan Pembangunan	II-206
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	 III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6
 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	 IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV-7
4.3 Sinkronisasi RKPD Tahun 2025 dengan Arahan Pengembangan Wilayah	IV-25
4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS).....	IV-40
4.5 Program Inovasi Daerah.....	IV-45
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 V-1
5.1 Kerangka Pendanaan.....	V-1
5.2 Program Pendukung Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V-2
5.3 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).....	V-4
5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025	V-28



***RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025***

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

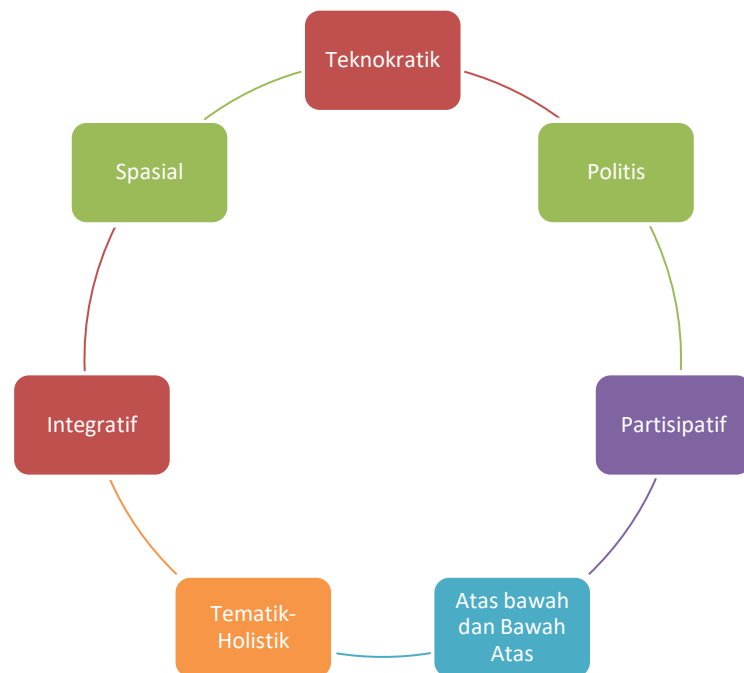
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun, dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen perencanaan yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, juga berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah, dan diselaraskan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Arah kebijakan RPJMD pada tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025. Arah kebijakan pada tahun 2025, adalah Pemantaban daya saing SDM dan penguatan Reformasi birokrasi serta pemajuan nilai-nilai budaya. Upaya pengiatan reformasi birokrasi yang mulai dijalankan pada tahun sebelumnya, kembali menjadi fokus pembangunan pada tahun 2025. Perbedaannya adalah pada tahun 2025 merupakan tindaklanjut dari peletakan pondasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 1.1 Pendekatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Berdasarkan prosesnya, penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Penjelasan dari pelaksanaan masing-masing pendekatan dari sisi proses dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan teknokratik** dilakukan dengan menyusun rancangan awal menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dilaksanakan melalui forum Musrenbang RKPD.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RKPD dan memperoleh masukan dari Pokok-pokok Pikiran DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota, provinsi, hingga nasional.

Secara substansi penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik dan integratif serta pendekatan spasial. Tema prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dijabarkan kedalam perencanaan yang menyeluruh sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

1. Pendekatan Tematik-Holistik

Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan. Holistik adalah penjabaran tematik program Kepala Daerah ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan. Pendekatan Holistik-Tematik yaitu pendekatan penyusunan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur /bagian /kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2. Intergratif

Integratif adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Kepala Daerah yang dilihat dari peran perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan. Pendekatan integratif yaitu pendekatan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

3. Spasial

Spasial adalah penjabaran program Kepala Daerah dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. Pendekatan spasial yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

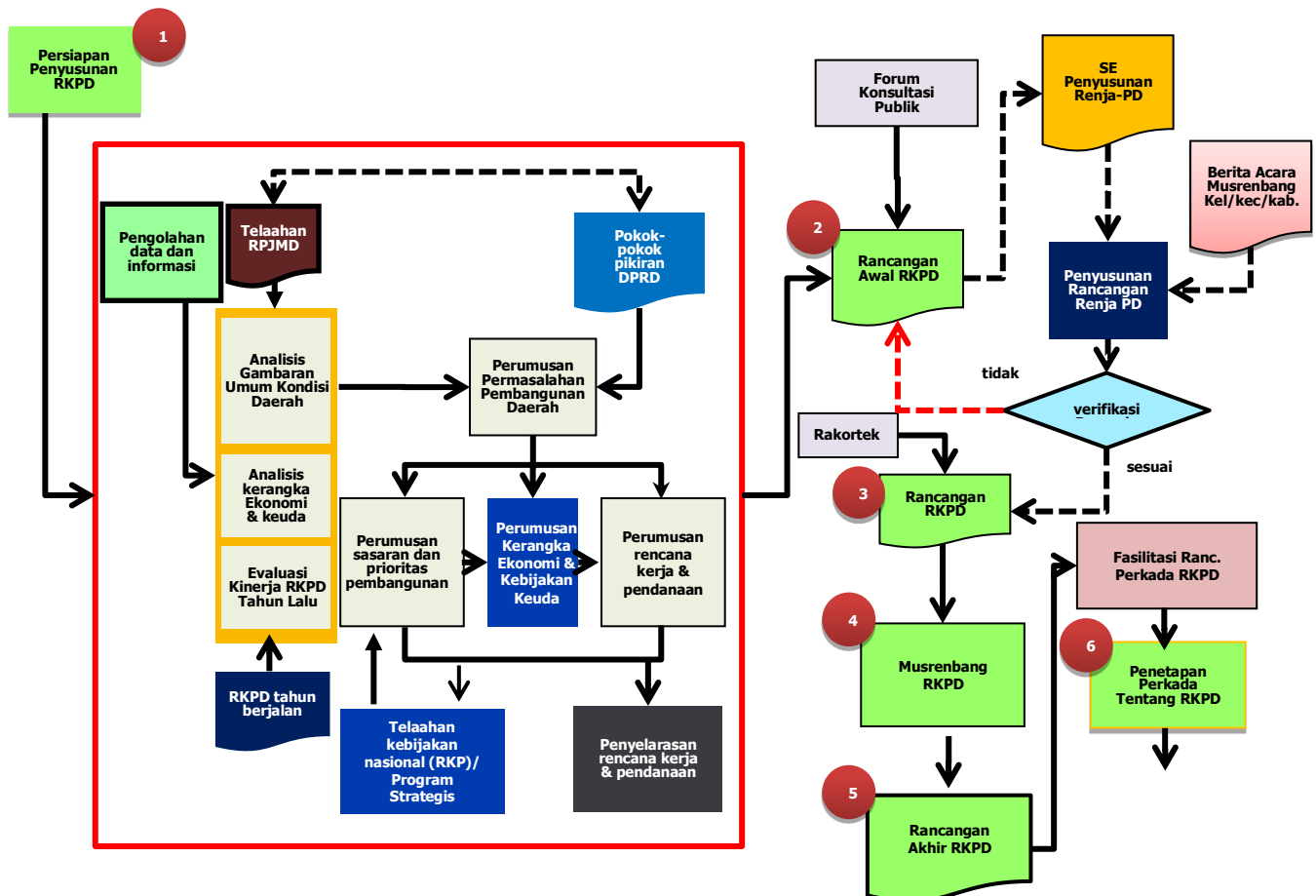
RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui *e-Planning*. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 secara ringkas terlihat pada Gambar 1.2 berikut ini.



Gambar 1.2 Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2025

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 meliputi sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Pembentukan Tim dan Sub Tim Penyusun dokumen RKPD Tahun 2025, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahap selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD sesuai dengan sistematika penyajian rancangan awal.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan meliputi: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD di Kabupaten Grobogan meliputi tahapan Persiapan, Musrenbangdes/kel, Musrenbang RKPD di kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD kabupaten. Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD, dalam rangka: menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; menyepakati prioritas pembangunan Daerah; menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak, secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir RKPD bertujuan untuk



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dan dikirim kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD tahun 2025

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan, penetapan dan pengundangan.

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substansial RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Secara normatif RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025. Secara operasional RKPD memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Secara faktual RKPD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12).
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana beberapa kali telah dimutakhirkan, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
 19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12).

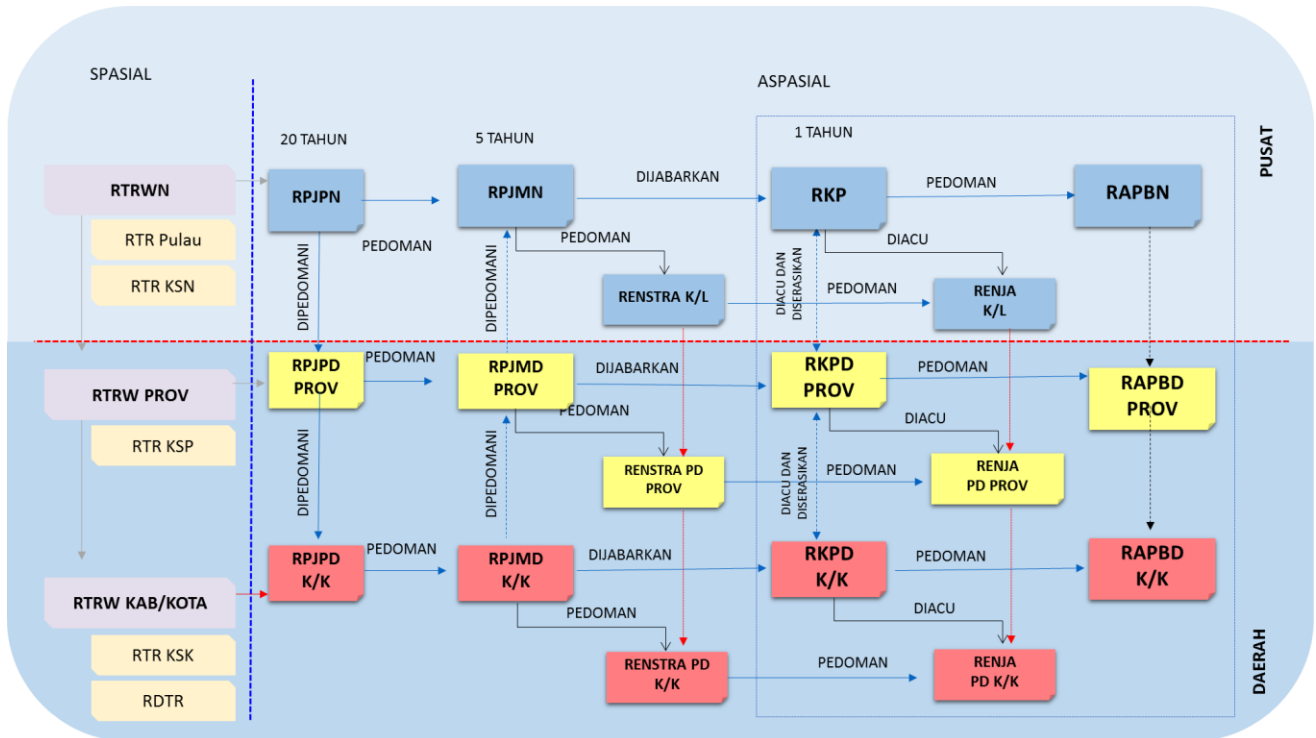
1.3. Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Grobogan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.3 berikut ini.



Gambar 1.3 Diagram Hubungan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1 Maksud

Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan menyediakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah:

- Menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025
- Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.5. Sistematika RKPD

Sistematika rancangan awal RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab ini berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah, strategi dan arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Grobogan

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran RPJMD, dan rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini menguraikan tentang perumusan program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025; program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan perincian program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025.

Bab VII Penutup

Bab ini berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025, dan harapan Kepala Daerah terhadap hasil yang diinginkan dari implementasi dokumen RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

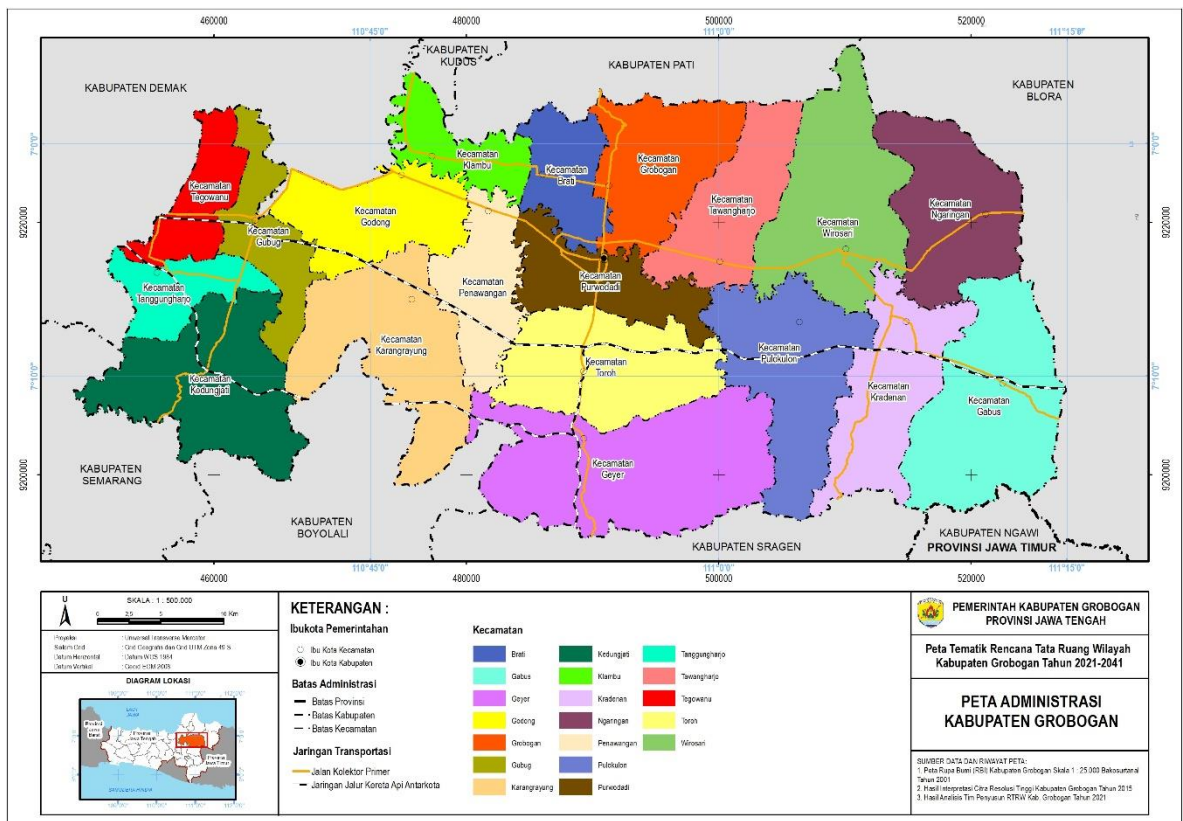
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.2.1.2 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Grobogan berdasarkan surat dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Nomor 135/2441/BAK perihal Penyampaian Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Tengah, tercatat seluas 2.023,85 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap.



Sumber: Peta Dasar RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Grobogan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 273 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah RT dan RW sebanyak 9.096 RT dan 1.756 RW. Luas Kabupaten Grobogan tercatat seluas 2.023,85 km². Kecamatan terbesar adalah kecamatan Geyer dengan luas 203,88 km², sedangkan kecamatan yang terkecil kecamatan Klambu dengan luas 51,98 km². Peta Wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar 2.1 dan wilayah administrasi Kabupaten Grobogan menurut kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

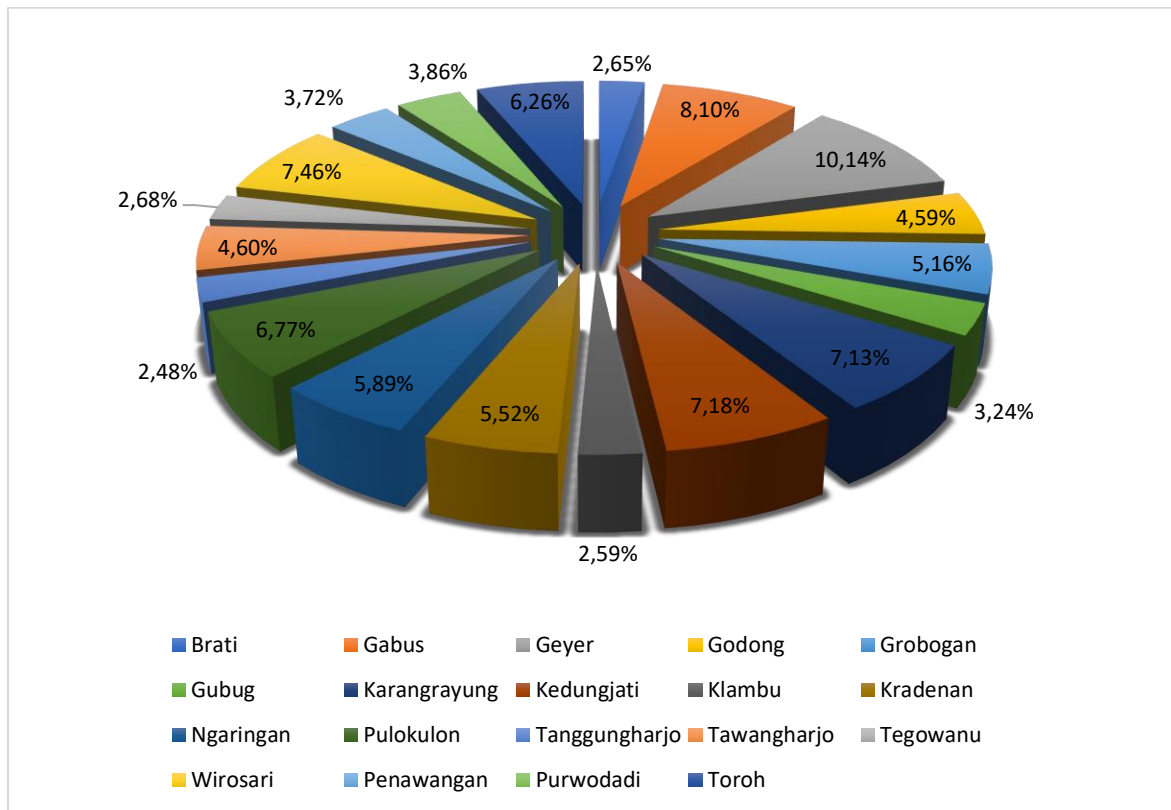
Tabel 2.1
Wilayah Administrasi Kabupaten Grobogan Menurut
Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Desa	Dusun	RT	RW	Luas Wilayah (Km ²)*
1	Kedungjati	0	12	76	322	82	145,45
2	Karangrayung	0	19	100	593	107	144,39
3	Penawangan	0	20	71	460	85	75,39
4	Toroh	0	16	118	884	153	126,78
5	Geyer	0	13	102	507	101	203,88
6	Pulokulon	0	13	112	672	126	138,34
7	Kradenan	0	14	79	549	96	111,56
8	Gabus	0	14	87	544	99	163,84
9	Ngaringan	0	12	78	396	92	119,22
10	Wirosari	2	12	86	509	94	150,81
11	Tawangharjo	0	10	58	348	73	93,23
12	Grobogan	1	11	52	448	80	104,67
13	Purwodadi	4	13	104	915	157	78,21
14	Brati	0	9	51	279	57	53,42
15	Klambu	0	9	44	185	47	51,98
16	Godong	0	28	86	511	103	93,10
17	Gubug	0	21	62	463	105	65,37
18	Tegowanu	0	18	54	244	56	54,25
19	Tanggungharjo	0	9	31	267	43	49,96
Kabupaten Grobogan		7	273	1.451	9.096	1.756	2.023,85

Sumber : Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan

2.2.1.3 Letak dan Kondisi Geografis

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara $110^{\circ} 32'$ - $111^{\circ} 14'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan, dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak

2.2.1.4 Kondisi Topografi

Kondisi topografi rata-rata adalah datar untuk bagian tengah dari Kabupaten Grobogan, sedangkan untuk bagian utara dan selatan berupa pegunungan kapur dan perbukitan yang membujur dari barat ke timur (Pegunungan Kendeng Utara dan Kendeng Selatan).



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Secara topografi Kabupaten Grobogan terbagi ke dalam lima (5) kelompok yaitu:

- Daerah dataran rendah, berada pada kemiringan lereng antara 0 – 3 %, tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan, dengan luas keseluruhan 42,52% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah dataran, berada pada kemiringan lereng antara 3 – 8 %, dengan luas keseluruhan 27,01% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah dataran sampai perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 8 – 15 %, dengan luas keseluruhan 21,46% dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah perbukitan, berada pada kemiringan lereng antara 15 – 40 %, dengan luas keseluruhan 8,69 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
 - Daerah pegunungan, berada pada kemiringan lereng antara > 40 %, dengan luas keseluruhan 0,32 % dari luas wilayah Kabupaten Grobogan.
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

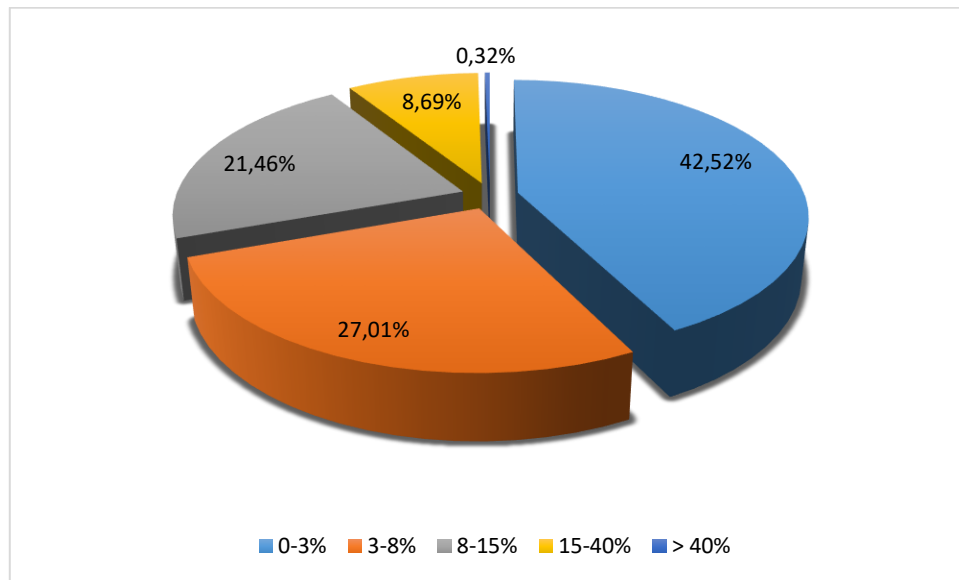
Tabel 2.2
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Menurut Kelerengannya

No.	Kecamatan	0-3%	3-8%	8-15%	15-40%	> 40%	Jumlah
1	Brati	3.096,02	259,73	765,00	1.092,37	128,83	5.341,95
2	Gabus	4.508,08	3.945,58	4.540,63	3.256,62	133,52	16.384,43
3	Geyer	238,31	8.142,60	11.206,08	790,79	10,52	20.388,30
4	Godong	9.309,69	-	-	-	-	9.309,69
5	Grobogan	3.429,61	3.335,58	1.592,13	1.864,96	244,76	10.467,04
6	Gubug	5.678,38	20,49	741,40	96,26	-	6.536,53
7	Karangrayung	5.049,69	4.675,86	4.069,28	644,18	-	14.439,01
8	Kedungjati	1.048,23	4.123,83	6.505,51	2.867,83	-	14.545,41
9	Klambu	3.162,46	-	141,20	1.823,99	70,10	5.197,75
10	Kradenan	5.532,39	1.973,50	2.215,94	1.434,14	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.872,85	7.106,69	942,28	-	-	11.921,82
12	Penawangan	6.637,65	438,44	463,29	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	7.375,14	2.975,50	2.762,82	720,78	-	13.834,23
14	Purwodadi	7.820,60	-	-	-	-	7.820,60
15	Tanggunharjo	1.866,37	1.854,71	869,67	404,95	-	4.995,69
16	Tawangharjo	2.531,84	4.858,41	973,88	928,28	30,59	9.323,00
17	Tegowanu	5.425,00	-	-	-	-	5.425,00
18	Toroh	6.103,34	2.987,23	2.862,48	691,31	33,93	12.678,29
19	Wirosari	3.363,25	7.959,41	2.787,39	970,76	-	15.080,81
	Jumlah	86.048,89	54.657,57	43.439,00	17.587,22	652,24	202.384,92
	Persentase	42,52%	27,01%	21,46%	8,69%	0,32%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



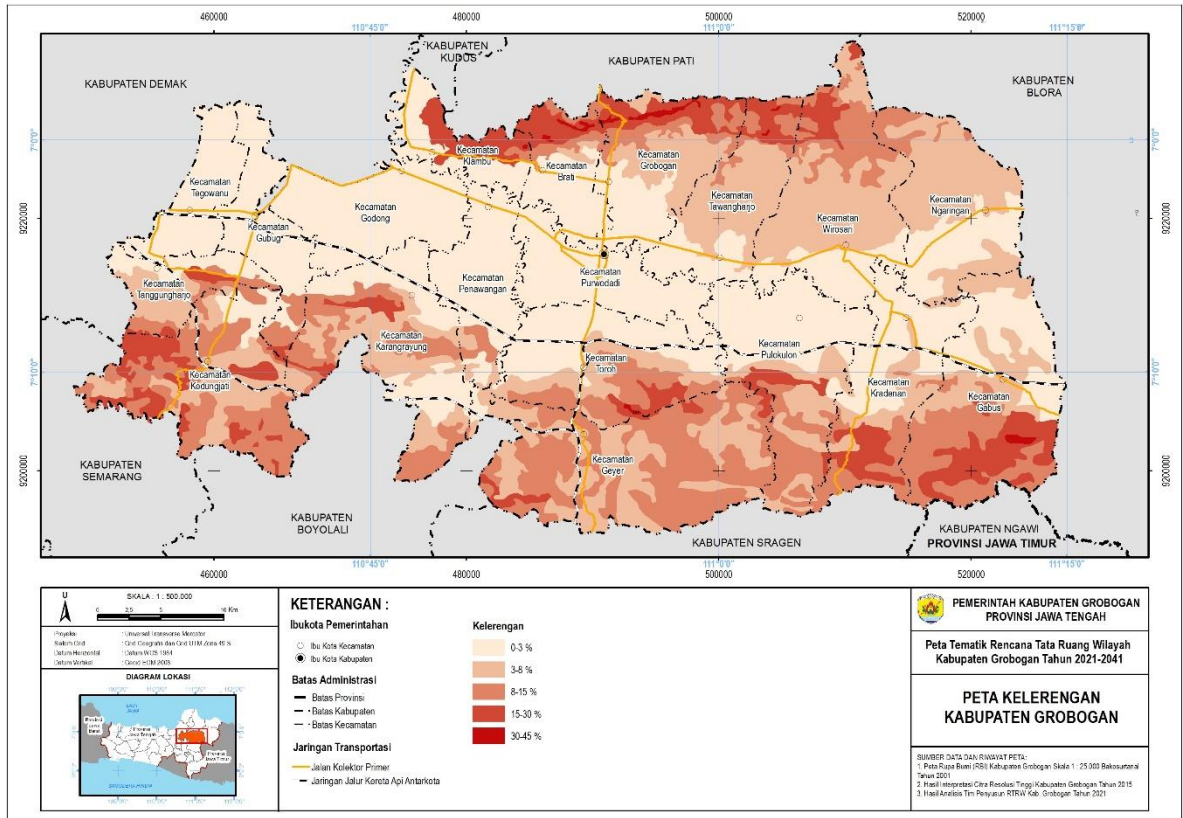
Sumber: Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.3. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Kelereng Tanahnya

Pada Gambar 2.2 mengilustrasikan kondisi kelereng di Kabupaten Grobogan. Secara garis besar ketinggian di Kabupaten Grobogan bervariasi, bagian utara dan selatan Kabupaten Grobogan merupakan bagian dengan ketinggian yang bervariasi (cenderung memiliki ketinggian besar) sedangkan bagian tengah Kabupaten Grobogan merupakan bagian dari ketinggian yang sama (cenderung lebih rendah dari bagian utara dan selatan).



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

Gambar 2.4. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Grobogan

2.2.1.5 Geologi

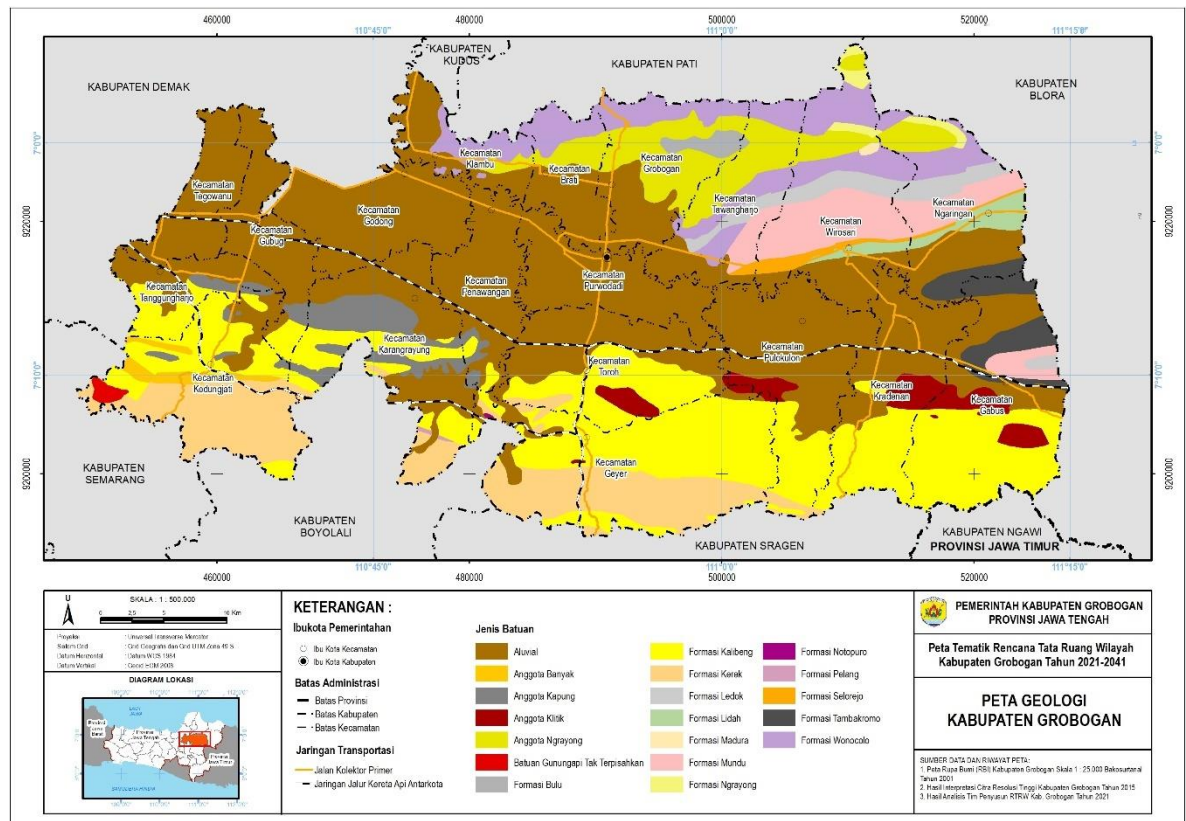
Mengutip dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan, kondisi geologi yang terdapat di Kabupaten Grobogan meliputi Aluvium, Hasil Gunung Api Tak Teruraikan, Miosen Fasies Batu Gamping, Miosen Fasies Sedimen, Pliosen Fasies Batu Gamping, Pliosen Fasies Sedimen dan Plistosen Fasies Sedimen.

Wilayah Kabupaten Grobogan secara umum memiliki jenis tanah alluvial, regosol dan latosol. Jenis tanah alluvial dicirikan oleh adanya perlapisan yang disebabkan oleh proses pengendapan dan bukan proses pembantukan tanah. Tanah alluvial ini secara umum berasal dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Tanah ini biasanya ditemukan di lahan yang sering terkena banjir atau merupakan hasil endapan bahan-bahan koluvial akibat angkutan dari daerah atasnya. Jika diukur dari tingkat kesuburan, tanah alluvial ini termasuk ke dalam tanah subur yang memiliki tingkat kesuburan bervariasi mulai dari rendah hingga tinggi. Jenis tanah ini cocok untuk kawasan budidaya khususnya untuk daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pertanian bahan–bahan makanan. Jika dilihat dari karakteristik jenis tanah ini, maka dapat dilihat bahwa kondisi tanah yang ada mendukung untuk adanya kegiatan pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten Grobogan ini mulai dari permukiman hingga pertanian. Sedangkan jenis tanah regosol mempunyai produktifitas rendah. Jenis tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Grobogan untuk keperluan pertanian dan perkebunan. Jenis tanah latosol dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik. Jenis grumosol ini merupakan tanah pertanian, perkebunan dan hutan. Serta tanah jenis mediteran ini merupakan tanah tegalan dan ladang.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan 2021-2041

Gambar 2.5. Peta Geologi Kabupaten Grobogan

2.2.1.6 Hidrologi

Sungai di Kabupaten Grobogan berdasarkan Dokumen IKPLHD Kabupaten Grobogan yang dimuat dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan sebanyak 32 sungai. Data sungai dapat dilihat pada tabel berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.3
Sungai Di Kabupaten Grobogan

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m ³ /dtk)	Debit Min (m ³ /dtk)
1	Lusi	78	120	55	8-12	1068	(-)
2	Serang	83	100	40	4-5	368	(-)
3	Jajar Baru	7,5	15	8	5-7	220	(-)
4	Jajar Lama	15,5	12	8	8-10	67	(-)
5	Glugu	10	65	12	10-12	150	(-)
6	Ngantru	15	25	8	5-7	48	(-)
7	Coyo	11,5	70	20	8-12	125	(-)
8	Gaji	12	50	14	8-12	120	(-)
9	Teleng	11,5	19	7	4-7	35	(-)
10	Senthe	15	30	14	5-10	52	(-)
11	Tuntang	48	90	40	10-12	1020	(-)
12	Jragung	16	25	7	4-6	140	(-)
13	KB.1	10,5	45	8	4-5	67	(-)
14	KB.15	9,5	35	8	4-5	58	(-)
15	Kliteh	7	25	7	4-5	14	(-)
16	Tirto	8,5	30	10	6-7	52	(-)
17	LarikTanjang	9	12	4	4-6	18	(-)
18	Peganjing	13	25	7	4-7	118	(-)
19	Cangkring	6	20	7	3-5	24	(-)
20	Jambanagn	15	20	7	4-7	47	(-)
21	Monggot	6,5	35	14	6-12	54	(-)
22	Jangkung	6,5	32	14	6-10	48	(-)
23	Gempol	4,5	35	12	6-8	20	(-)
24	Lembayung	4	20	9	3-5	15	(-)
25	Corot	8,5	35	10	4-7	38	(-)
26	Galiran	6	15	4	3-7	18	(-)
27	Tambakselo	8,5	25	8	6-9	25	(-)
28	Sambirejo	7,5	18	7-10	6-10	15	(-)
29	Tanjung	7,8	10	4-10	4-8	18	(-)
30	Grasak	8	12	4-10	4-8	10	(-)
31	Tempuran	4	25	8-10	4-7	18	(-)
32	Medang	8	30	8-10	7-12	65	(-)

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kabupaten Grobogan dilewati oleh tiga DAS yaitu DAS Jragung, DAS Juwana, DAS Serang dan DAS Tuntang. Kondisi masing-masing DAS tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Grobogan

Nama DAS	Nama Satuan Wilayah Pengelolaan (SWP)	Nama Sub DAS	Panjang (m)	Luas (Ha)
DAS Jragung	Bodri Jragung	Sub DAS Jragung Wonokerto	311.931	11.985
		Sub DAS Klampok	167.650	180
		Sub DAS Trimo	83.825	676
DAS Juwana	Juwana	Sub DAS Landaraguna	169.224	664
		Sub DAS Sukosungging	146.107	255
		Sub DAS Wates	122.330	33
DAS Serang	Serang	Sub DAS Coyo	440.754	14.264
		Sub DAS Gareh	446.892	23.617
		Sub DAS Geyer	512.147	13.767
		Sub DAS Glugu	444.263	16.675
		Sub DAS Ingasajar	129.530	2.176
		Sub DAS Karangboyoy	346.902	863
		Sub DAS Kedungwaru	146.519	5.229
		Sub DAS Lanang	239.537	5.682
		Sub DAS Medang	299.496	23.045
		Sub DAS Ngantru	385.318	9.072
		Sub DAS Peganjing	513.349	15.167
		Sub DAS Tirto	388.629	16.011
		Sub DAS Uter	276.010	1.845
DAS Tuntang	Tuntang	Sub DAS Bancak	83.825	2.106
		Sub DAS Blorong	128.882	2.304
		Sub DAS Jajar Hulu	279.133	18.557
		Sub DAS Temuireng	231.718	8.845
		Sub DAS Tuk Bening T. Hulu	167.650	3.677
		Sub DAS Tuntang Hilir	408.374	6.448

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kondisi Kabupaten Grobogan berada di daerah Cekungan Air Tanah seluas 82.390 Ha dan daerah diluar CAT seluas 120.765 Ha.

2.2.1.7 Klimatologi

Klimatologi berhubungan dengan iklim yang merupakan rata-rata cuaca pada waktu yang lama dalam wilayah yang cukup luas. Faktor klimatologis yang berperan dalam penentuan pemanfaatan lahan adalah suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, angin, dan tekanan udara. Perubahan iklim pada suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan pemanfaatan yang yakni pada kegiatan budidaya pertanian dan lingkungan yang lebih luas.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kabupaten Grobogan memiliki tipe iklim D, hal ini dikarenakan letak Kabupaten Grobogan yang berada di antara Daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo Hulu. Dengan tipe tersebut maka kondisi iklim di Kabupaten Grobogan bersifat 1 s/d 6 bulan kering dan 1 s/d 6 bulan basah dengan suhu minimum 26°C.

Berdasarkan pengukuran curah hujan yang dilakukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Grobogan di sejumlah titik stasiun pengamatan, didapatkan bulan Januari dan Maret 2021 mempunyai hari hujan paling banyak yaitu selama 16 hari, sedangkan curah hujan tertinggi ada di bulan april 2021 yaitu sebesar 322 mm.

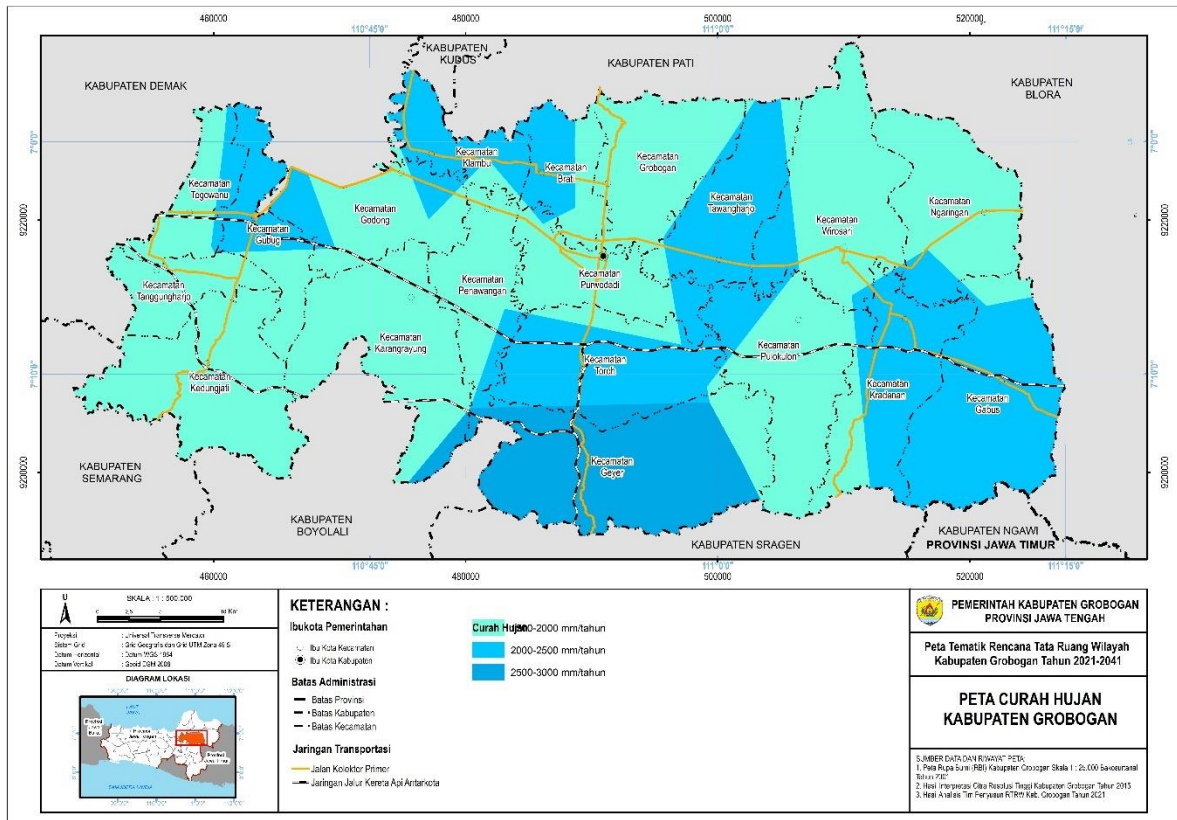
Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan (mm) per Tahun di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2022

NO	KECAMATAN	Curah Hujan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kedungjati	1.909	1.362	1.513	2.021	1.639	1.452
2.	Karangrayung	1.866	1.707	1.535	2.403	1.785	1.801
3.	Penawangan	2.032	1.430	1.425	2.578	2.526	2.846
4.	Toroh	2.308	1.981	2.110	2.701	2.623	2.392
5.	Geyer	2.633	1.608	2.431	3.886	4.274	2.778
6.	Pulokulon	1.991	1.385	1.600	1.971	2.164	3.164
7.	Kradenan	2.355	2.055	1.796	2.094	2.421	3.376
8.	Tawangharjo	1.922	1.734	2.012	2.281	2.309	2.213
9.	Ngaringan	1.948	1.858	1.557	2.081	1.588	2.431
10.	Wirosari	1.735	1.666	1.429	1.702	2.628	2.601
11.	Gabus	2.272	1.625	1.894	2.074	2.464	3.398
12.	Grobogan	2.094	1.521	934	1.996	2.431	2.376
13.	Purwodadi	1.727	1.554	1.433	2.055	2.650	2.198
14.	Dinpertan TPH	1.992	1.938	1.956	2.225	0	0
15.	Brati	2.255	1.323	934	2.180	3.070	1.622
16.	Klambu	2.358	1.895	2.052	2.356	2.810	2.406
17.	Godong	1.934	1.570	1.725	2.183	1.956	1.950
18.	Gubug	1.939	1.767	2.153	2.606	2.916	2.590
19.	Tegowanu	1.824	1.407	2.011	2.099	2.171	2.670
20.	Tanggungharjo	1.884	1.500	1.552	2.286	1.654	1.425
21.	BB Ngambak	1.885	1.471	1.561	2.276	0	0
Rata-Rata		2.041	1.636	1.696	2.288	2.194	2.405

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.6. Peta Curah Hujan Kabupaten Grobogan

Rata-rata hari hujan per bulan Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 adalah 8 hari, sedangkan rata-rata curah hujan per bulan tercatat 141 mm. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rata-Rata Hari Hujan per Bulan dan Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan Tahun 2016-2022

Tahun	Rata-Rata Hari Hujan Per Bulan (hari)	Rata-Rata Curah Hujan Per Bulan (mm)
2016	8,91	164,05
2017	10,5	178,8
2018	10,6	170,1
2019	8,8	136,3
2020	8,2	141,9
2021	8,2	141,9
2022	8	141

Sumber :BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.2.1.8 Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Grobogan memiliki kawasan rawan bencana yang meliputi sebagai berikut:

1. Rawan bencana banjir

Pada umumnya banjir merupakan suatu kondisi tergenangnya suatu area karena melimpahnya air sungai akibat tidak tertampungnya air oleh badan sungai karena suatu sebab atau air yang masuk sungai melebihi kapasitas tampung normal badan sungai atau pada kondisi tertentu akibat adanya kerusakan pada tanggul sungai sehingga air melimpas keluar dari badan sungai.

Banjir yang terjadi Kabupaten Grobogan disebabkan antara lain:

- a. Curah hujan yang tinggi saat musim hujan;
- b. Meluapnya sungai/tanggul kurang tinggi;
- c. Saluran drainase yang tidak berfungsi dengan sedimentasi maupun kegiatan penyempitan saluran;
- d. Tanggul sungai/saluran mudah jebol/rusak;
- e. Penggundulan hutan; dan
- f. Disamping itu jebis tanah yang tidak mudah meresap air juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.

Tabel 2.7
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Banjir

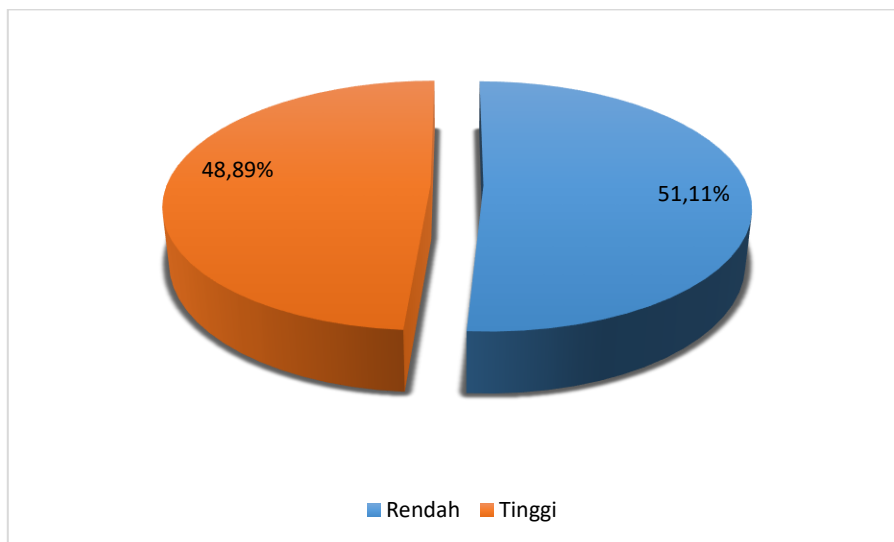
No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
1	Brati	2.240,74	3.101,22	5.341,95
2	Gabus	8.762,88	7.621,55	16.384,43
3	Geyer	19.920,49	467,82	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	7.095,31	3.371,73	10.467,04
6	Gubug	1.008,53	5.528,00	6.536,53
7	Karangrayung	8.454,61	5.984,40	14.439,01
8	Kedungjati	14.311,52	233,89	14.545,41
9	Klambu	1.092,24	4.105,51	5.197,75
10	Kradenan	4.294,72	6.861,26	11.155,98
11	Ngaringan	7.183,72	4.738,11	11.921,82
12	Penawangan	-	7.539,38	7.539,38
13	Pulokulon	5.264,69	8.569,54	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggunganharjo	3.131,23	1.864,47	4.995,69
16	Tawangharjo	5.912,58	3.410,42	9.323,00
17	Tegowanu	1,75	5.423,25	5.425,00



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Rendah	Tinggi	Jumlah
18	Toroh	4.247,89	8.430,40	12.678,29
19	Wirosari	10.518,19	4.562,62	15.080,81
	Jumlah	103.441,05	98.943,87	202.384,92
	Persentase	51,11%	48,89%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

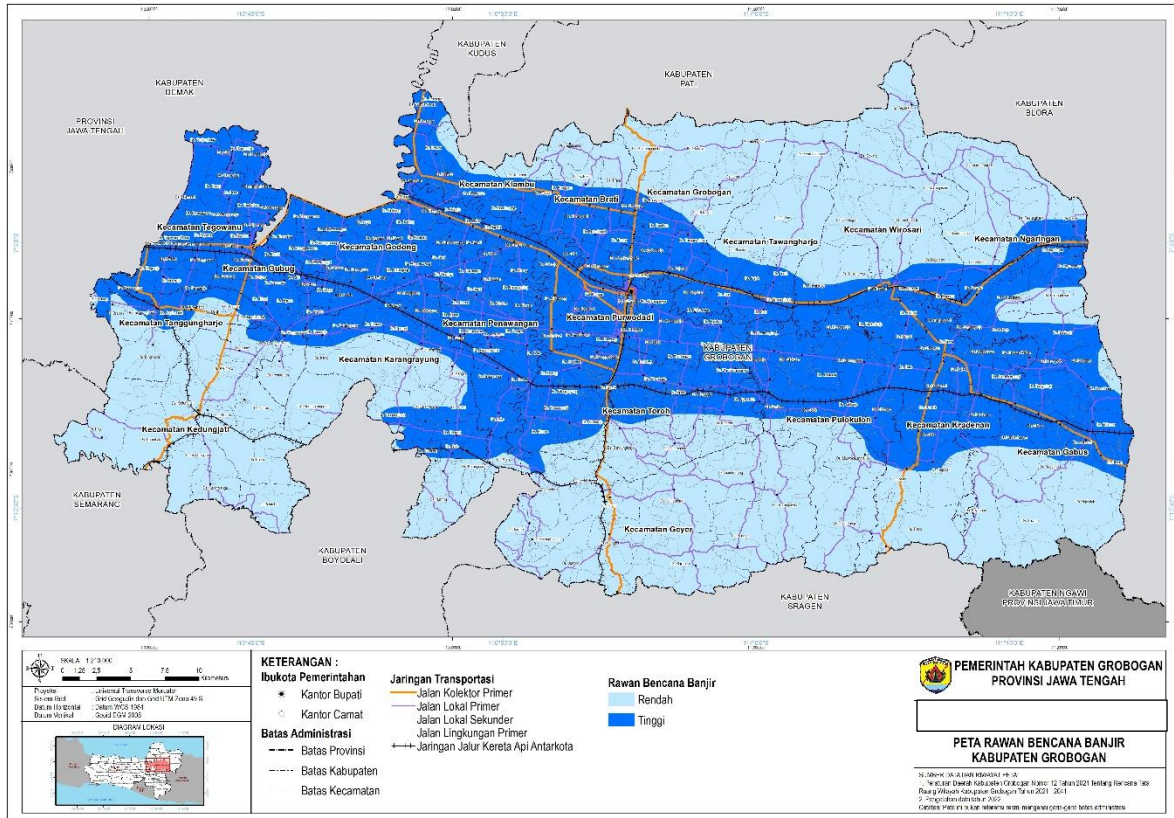


Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.7. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Banjir



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan 2021-2041.

Gambar 2.8. Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan

2. Gempa bumi

RTRW Kabupaten Grobogan menyebutkan bahwa Kabupaten Grobogan memiliki rawan bencana gempa bumi dengan kategori mulai dari agak rendah hingga tinggi. Sebaran gempa bumi menurut kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Gempa Bumi

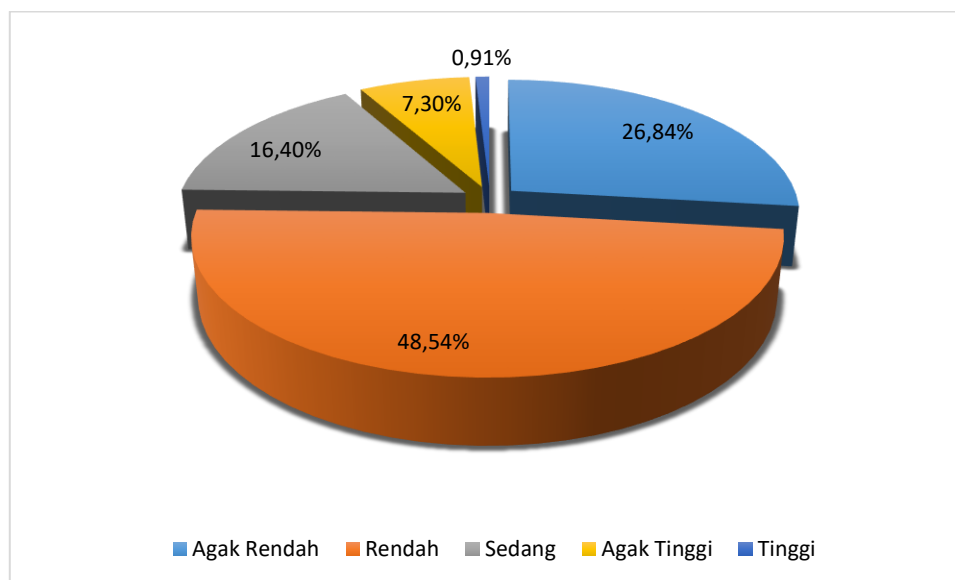
No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
1	Brati	726,47	-	3.776,04	839,45	-	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	-	-	-	16.384,43
3	Geyer	-	20.388,30	-	-	-	20.388,30
4	Godong	14,26	-	5.876,75	3.418,68	-	9.309,69
5	Grobogan	3.457,33	-	5.919,37	1.090,34	-	10.467,04
6	Gubug	1.543,37	-	2.206,16	2.140,23	646,77	6.536,53



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Agak Rendah	Rendah	Sedang	Agak Tinggi	Tinggi	Jumlah
7	Karangrayung	8.949,25	4.593,21	896,55	-	-	14.439,01
8	Kedungjati	11.261,50	3.026,31	257,60	-	-	14.545,41
9	Klambu	-	-	1.549,32	3.648,43	-	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	0,00	-	-	11.155,98
11	Ngaringan	3.503,44	7.972,10	446,29	-	-	11.921,82
12	Penawangan	4.671,72	1.106,07	1.761,59	-	-	7.539,38
13	Pulokulon	-	13.834,23	0,00	-	-	13.834,23
14	Purwodadi	5.025,42	2.348,23	446,94	-	-	7.820,60
15	Tanggunharjo	822,34	-	4.168,89	4,46	-	4.995,69
16	Tawangharjo	6.959,73	214,72	2.148,55	-	-	9.323,00
17	Tegowanu	-	-	1.026,12	3.204,46	1.194,42	5.425,00
18	Toroh	556,78	12.121,51	-	-	-	12.678,29
19	Wirosari	6.834,87	5.096,35	2.719,51	430,09	-	15.080,81
	Jumlah	54.326,48	98.241,44	33.199,68	14.776,14	1.841,19	202.384,92
	Persentase	26,84%	48,54%	16,40%	7,30%	0,91%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.9. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Gempa Bumi



3. Tanah Longsor

Tabel 2.9
Luas Wilayah (Ha) Kabupaten Grobogan Berdasarkan Rawan Bencana Tanah Longsor

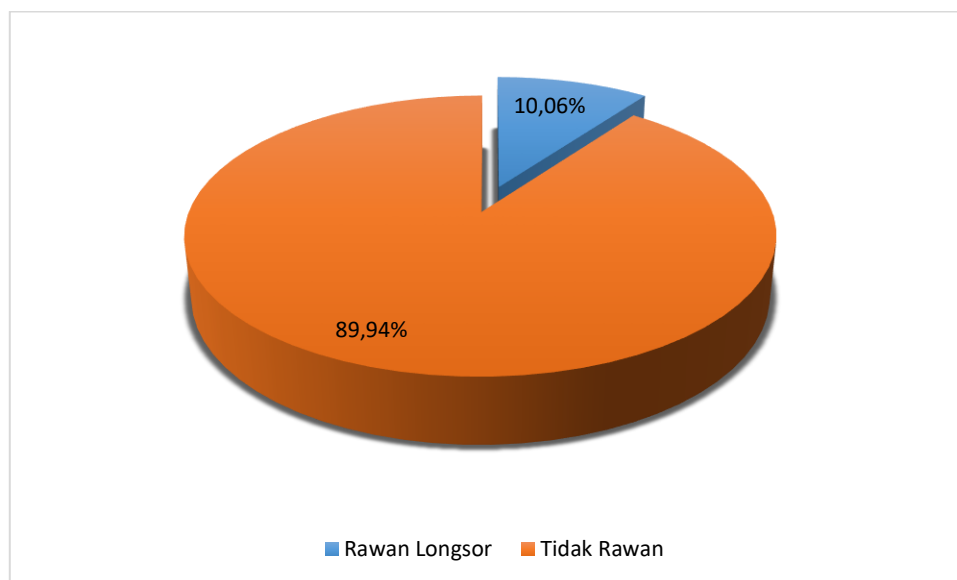
No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
1	Brati	934,41	4.407,54	5.341,95
2	Gabus	-	16.384,43	16.384,43
3	Geyer	3.732,53	16.655,77	20.388,30
4	Godong	-	9.309,69	9.309,69
5	Grobogan	1.578,20	8.888,84	10.467,04
6	Gubug	-	6.536,53	6.536,53



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Rawan Longsor	Tidak Rawan	Jumlah
7	Karangrayung	2.480,84	11.958,17	14.439,01
8	Kedungjati	5.659,15	8.886,26	14.545,41
9	Klambu	797,18	4.400,57	5.197,75
10	Kradenan	-	11.155,98	11.155,98
11	Ngaringan	-	11.921,82	11.921,82
12	Penawangan	584,98	6.954,40	7.539,38
13	Pulokulon	1.974,39	11.859,84	13.834,23
14	Purwodadi	-	7.820,60	7.820,60
15	Tanggunharjo	463,99	4.531,70	4.995,69
16	Tawangharjo	541,20	8.781,80	9.323,00
17	Tegowanu	-	5.425,00	5.425,00
18	Toroh	833,42	11.844,87	12.678,29
19	Wirosari	772,21	14.308,61	15.080,81
	Jumlah	20.352,51	182.032,41	202.384,92
	Persentase	10,06%	89,94%	100,00%

Sumber: RTRW Kabupaten Grobogan, 2021



Sumber: Hasil Olahan Data RTRW Kabupaten Grobogan, 2021

Gambar 2.11. Persentase Luas Wilayah Kabupaten Grobogan Menurut Rawan Bencana Longsor



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.10
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Grobogan

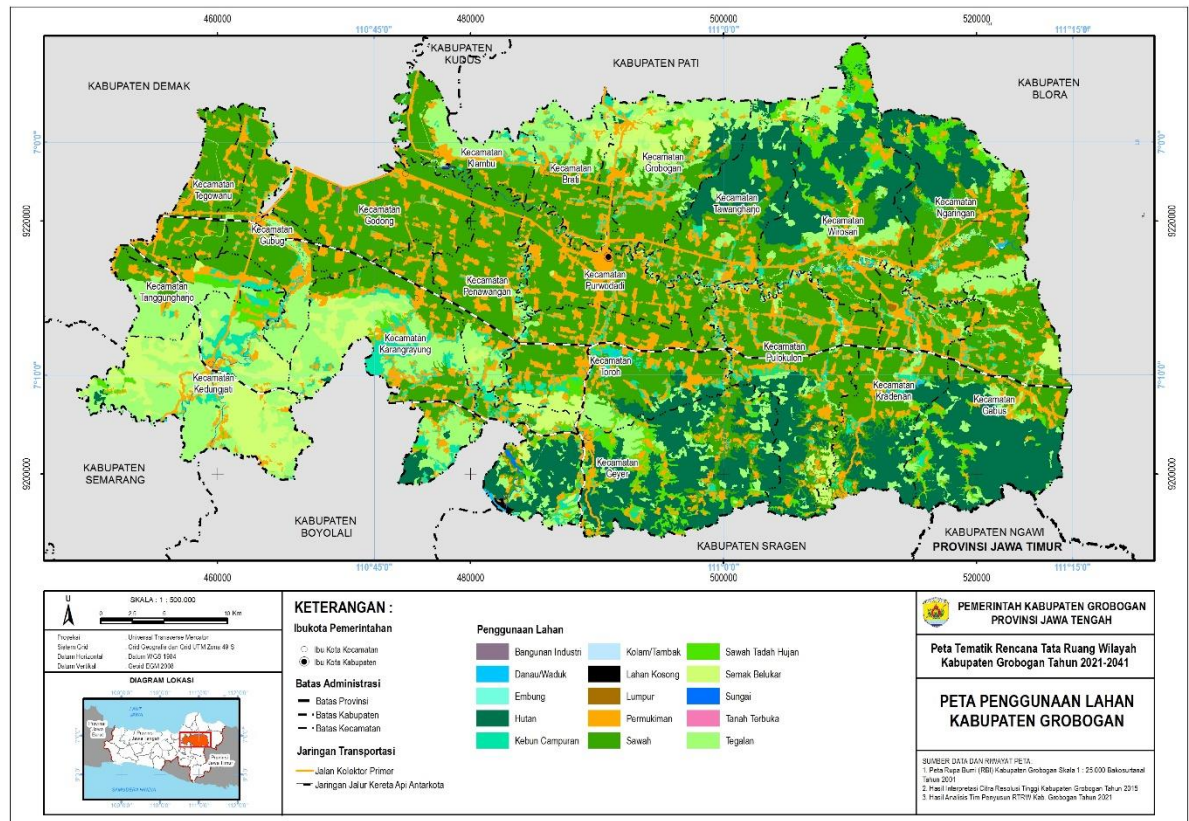
No	Kecamatan	Luas Tutupan Lahan (Km2)																Total
		Bangunan Industri	Danau/ Waduk	Embung	Hutan	Kebun Campuran	Lahan Kosong	Kolam/ Tambak	Lumpur	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tanah Terbuka	Tegalan	Lain-Lain	
1	Brati	0,00	0,00	0,00	0,15	2,80	0,00	0,00	0,00	9,13	21,69	0,00	2,75	0,33	0,00	16,83	0,00	53,69
2	Gabus	0,00	0,00	0,02	70,17	2,44	0,01	0,00	0,00	17,61	45,08	7,55	3,93	0,00	0,00	17,12	0,00	163,93
3	Geyer	0,00	0,64	0,00	99,77	6,72	0,79	0,00	0,00	23,86	18,55	21,83	7,49	1,89	0,00	23,60	0,00	205,14
4	Godong	0,25	0,00	0,05	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	18,15	73,38	0,00	0,08	0,23	0,00	0,14	0,00	92,93
5	Grobogan	0,20	0,00	0,03	8,09	5,29	0,00	0,00	0,00	15,69	30,08	2,33	21,16	0,17	0,03	21,30	0,00	104,36
6	Gubug	0,02	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	14,50	31,84	0,10	0,26	0,42	0,00	15,70	0,00	65,52
7	Karangrayung	0,00	0,00	0,01	4,59	16,36	0,00	0,00	0,00	22,48	35,84	2,77	15,98	0,00	0,00	46,23	0,00	144,27
8	Kedungjati	0,83	0,00	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	10,64	0,00	6,36	57,82	1,52	0,00	59,57	0,00	145,29
9	Klambu	0,00	0,00	0,05	0,00	3,04	0,18	0,00	0,00	6,96	25,68	0,00	0,99	0,64	0,00	14,82	0,00	52,35
10	Kradenan	0,00	0,36	0,03	27,21	5,57	0,00	0,00	0,44	20,67	46,47	1,35	2,10	0,24	0,00	7,22	0,00	111,66
11	Ngaringan	0,00	0,25	0,01	32,77	2,20	0,00	0,00	0,00	15,50	44,19	8,76	1,31	0,62	0,00	13,52	0,00	119,15
12	Penawangan	0,00	0,00	0,01	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	14,24	45,98	0,41	1,35	0,54	0,00	9,80	0,00	75,23
13	Pulokulon	0,00	0,00	0,02	25,59	5,98	0,00	0,00	0,00	25,41	63,63	1,40	5,22	1,04	0,00	8,66	0,00	136,95
14	Purwodadi	0,02	0,00	0,01	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	24,48	49,26	0,00	0,88	0,81	0,00	1,30	0,00	78,18
15	Tanggunharjo	0,00	0,00	0,01	0,00	2,53	0,00	0,00	0,00	7,42	16,40	2,13	1,09	0,00	0,00	20,54	0,00	50,13
16	Tawangharjo	0,02	0,00	0,00	34,68	3,60	0,00	0,00	0,00	12,42	28,42	3,52	1,50	0,39	0,00	8,51	0,00	93,07
17	Tegowanu	0,03	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	11,03	42,30	0,00	0,67	0,14	0,00	0,00	0,00	54,26
18	Toroh	0,00	0,29	0,01	8,63	9,96	0,07	0,00	0,00	28,92	61,47	3,56	5,43	0,22	0,00	8,16	0,00	126,72
19	Wirosari	0,13	0,02	0,04	50,42	5,18	0,00	0,01	0,00	19,44	35,24	19,31	3,54	0,86	0,00	16,84	0,00	151,03
Total		1,50	1,56	0,30	362,07	87,97	1,05	0,01	0,44	318,55	715,49	81,39	133,57	10,06	0,03	309,87	0,00	2023,85

Sumber : Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 - 2041



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Adapun sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Peta Tematik RTRW Kab. Grobogan Tahun 2021-2041.

Gambar 2.13. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2021

Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Grobogan Tahun 2030 berdasarkan analisis KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 menunjukkan status daya dukung lahan SL (326.598 Ha) > DL, (325.946 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan pada tahun 2030 dinyatakan Surplus. Kondisi Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan Kabupaten Grobogan mampu memenuhi kebutuhan standart hidup layak penduduk.

Selain dengan hasil analisis perhitungan di atas, status daya dukung lahan di Kabupaten Grobogan yang surplus juga didukung dari hasil perhitungan yang termuat dalam Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2019 yang menyatakan bahwa status daya dukung lahan surplus sampai dengan tahun 2031 dimana didapatkan hasil perhitungan bahwa ketersediaan lahan (SL) sebesar 299.727 m3 pertahun lebih besar dari pada kebutuhan air (DL) sebesar 43.948,14 m3.

Dari hasil analisis yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan daya dukung lahan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Hidup Nomor 17 Tahun 2009 didapatkan bahwa sampai dengan tahun 2030 dalam kondisi surplus karena nilai $SL > DL$. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lahan setempat masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi hayati di wilayah tersebut. Penyediaan produksi hayati secara berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang berdasarkan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dibedakan dalam dua bagian, yaitu Kemampuan Lahan dan Evaluasi Kesesuaian Lahan. Berikut penjelasan kajian analisis yang dilakukan.

Kemampuan lahan merupakan karakteristik lahan yang mencakup sifat tanah (fisik dan kimia), topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup lain. Berdasarkan karakteristik lahan tersebut, dapat dilakukan klasifikasi kemampuan lahan ke dalam tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan.

Berdasarkan analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) yang telah dilakukan, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan menjadi tiga (3) kelas, yaitu :

1) Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a) Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
- b) Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam.
- c) Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah.
- d) Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah.
- e) Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2) Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a) Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan.
- b) Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu.

- c) Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini.
 - d) Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.
- 3) Rendah
- Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :
- a) Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan.
 - b) Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadimudah tandus.
 - c) Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan:

Tabel 2.11
Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
1	Kec. Brati	244,23	469,91	4.880,84
2	Kec. Gabus	165,44	2.451,36	13.926,74
3	Kec. Geyer	192,52	4.878,48	15.559,93
4	Kec. Godong	-	-	9.350,31
5	Kec. Grobogan	427,82	1.232,33	8.434,08
6	Kec. Gubug	-	72,29	6.469,99
7	Kec. Karangayung	562,11	1.769,04	12.179,12
8	Kec. Kedungjati	308,58	3.902,55	11.118,18
9	Kec. Klambu	224,54	739,04	4.286,96
10	Kec. Kradenan	-	1.452,88	9.757,44
11	Kec. Ngaringan	-	101,40	12.115,39
12	Kec. Panawangan	-	-	7.517,07



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Kecamatan	Potensi Rendah (Ha)	Potensi Sedang (Ha)	Potensi Tinggi (Ha)
13	Kec. Pulokulon	-	497,39	13.195,51
14	Kec. Purwodadi	-	-	7.813,75
15	Kec. Tanggunharjo	27,45	453,73	4.235,84
16	Kec. Tawangharjo	79,27	659,08	8.699,43
17	Kec. Tegowanu	-	-	5.721,37
18	Kec. Toroh	325,46	847,79	11.488,22
19	Kec. Wirosari	161,09	1.009,32	14.015,29
	Jumlah	2.718,51	20.536,59	180.765,46

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Evaluasi kesesuaian penggunaan lahan dilakukan untuk melihat kesesuaian antara penggunaan lahan dengan hasil analisis kemampuan lahan, sehingga setiap penggunaan lahan sesuai dengan kemampuan lahan dan mendukung pengembangan kawasan. Beberapa parameter pemetaan yang digunakan yaitu :

1. Peta penggunaan lahan
2. Peta kemampuan lahan sampai dengan tingkat unit pengelolaan

Dari hasil analisis evaluasi kesesuaian lahan atau pemanfaatan ruang dapat diketahui beberapa penggunaan lahan yang terindikasi dapat menimbulkan dampak resiko terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan hasil analisis maka dihasilkan kondisi evaluasi kesesuaian lahan Kabupaten Grobogan dalam bentuk 3 (tiga) kondisi, yaitu :

- a) Sangat Sesuai (S1) : Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang berarti atau nyata terhadap penggunaan secara berkelanjutan, atau faktor pembatas bersifat minor dan tidak akan berpengaruh terhadap produktivitas lahan secara nyata
- b) Cukup Sesuai (S2): Lahan mempunyai faktor pembatas, dan faktor pembatas ini akan berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan (input). Pembatas tersebut biasanya dapat diatasi oleh petani sendiri
- c) Sesuai marginal (S3) : Lahan mempunyai faktor pembatas yang berat, dan faktor pembatas ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitasnya, memerlukan tambahan masukan yang lebih banyak daripada lahan yang tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas pada S3 memerlukan modal tinggi, sehingga perlu adanya bantuan atau campur tangan (intervensi) pemerintah atau pihak swasta.

Hasil evaluasi kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Grobogan sebagai berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.12
Evaluasi Kesesuaian Lahan di Kabupaten Grobogan

No	Klasifikasi Kesesuaian Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	N (Tidak Sesuai)	570,64	0,3%
2	S1 (Sangat Sesuai)	160.463,00	79,0%
3	S2 (Cukup Sesuai)	29.458,86	14,5%
4	S3 (Sesuai Marginal)	12.659,90	6,2%
	Jumlah	203.152,41	100%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membina interaksi sosial, yang dapat berupa pemerataan dan pemenuhan dasar pembangunan, distribusi barang dan jasa serta mobilitas sumberdaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan melalui upaya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana skala kabupaten; pembagian wilayah kabupaten menjadi subwilayah berdasarkan pertimbangan tertentu; serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari Kawasan Lindung, dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air; dan Kawasan Cagar Budaya. Badan Air dengan luas kurang lebih 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) hektar terdapat di seluruh Wilayah Daerah. Kawasan Cagar Budaya meliputi:

- a. bangunan Masjid Ki Ageng Selo di Kecamatan Tawangharjo;
- b. bangunan Stasiun Kereta Api Gundih di Kecamatan Geyer;
- c. bangunan Rumah Dinas Bank Rakyat Indonesia di Kecamatan Purwodadi;
- d. bangunan kantor pemasaran hasil Hutan di Kecamatan Purwodadi;
- e. situs gedung SMP Negeri 1 Purwodadi di Kecamatan Purwodadi; dan
- f. cagar budaya lainnya di seluruh Wilayah Daerah.

Pola ruang Kawasan budidaya yang dominan adalah untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Hutan Produksi yang dibagi menjadi dua yaitu Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap dengan luas masing-masing yaitu 3.060,97 Ha dan 67.097,20 Ha serta Kawasan Permukiman terdiri atas: Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.13
Luas Kawasan Budidaya dalam Perda No. 12 tahun 2021 tentang RTRW
Kab. Grobogan Tahun 2021-2041

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Badan Air	1.664,50
2.	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	3.060,97
3.	Kawasan Hutan Produksi Tetap	67.097,20
4.	Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	31,76
5.	Kawasan Pariwisata	58,66
6.	Kawasan Perikanan Tangkap	19,48
7.	Kawasan Perkebunan Rakyat	7.555,22
8.	Kawasan Permukiman Perdesaan	32.250,40
9.	Kawasan Permukiman Perkotaan	7.479,82
10.	Kawasan Pertambangan Mineral Bukan Logam	1.069,81
11.	Kawasan Peruntukan Industri	1.273,02
12.	Kawasan Peternakan	77,72
13.	Kawasan Tanaman Pangan	80.746,37
Luas Total		202.384,92

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

Pertambahan penduduk yang semakin pesat menyebabkan perkembangan permukiman yang ada berbanding lurus dengan kebutuhan seperti penyediaan perumahan maupun permukiman tradisional yang telah menyebar di masyarakat. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan di Kabupaten Grobogan, permintaan akan lahan untuk aktivitas dan hunian juga semakin meningkat. Oleh karena itu, di dalam RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 telah dialokasikan Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 7.480 Ha dan Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 32.250 Ha.

Kabupaten Grobogan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah dan Nasional menjadikan sektor pertanian dalam arti luas menjadi prioritas pembangunan daerah, dalam RTRW Kabupaten Grobogan, telah ditetapkan Kawasan Pertanian yang terdiri atas: a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 80.746 Ha, Kawasan Peternakan dengan luas kurang lebih 78 Ha. Di dalam Kawasan tanaman pangan telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 71.949 Ha.

Alih fungsi lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Grobogan menjadi dasar dalam pengendalian alih fungsi lahan. Hal ini juga selaras dengan **Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021** tentang Penetapan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat tercantum bahwa luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Grobogan seluas 87.730,07 Ha lebih luas dari pada yang ditetapkan oleh RTRW Kab. Grobogan. Selain pengendalian alih fungsi lahan dari sisi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, beberapa upaya Pemerintah Daerah dengan berbagai program, kegiatan dan inovasi di bidang pertanian agar petani nyaman bekerja di sawah dan tidak menjual lahannya untuk dialihkan menjadi kegiatan non pertanian menjadi prioritas yang perlu terus didorong.

Sektor pertambangan merupakan sektor yang potensial di Kabupaten Grobogan, hal ini dibuktikan dengan keberadaan PT. Semen Grobogan yang telah beroperasi mulai tahun 2021. Adapun kawasan pertambangan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan seluas 1.070 Ha yang merupakan bagian dari Kawasan pertambangan Rembang dan Kawasan pertambangan Kendeng.

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menetapkan Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.273 Ha yang tersebar di 12 Kecamatan dengan 3 kecamatan dengan luasan terbesar berturut-turut terdapat di Kecamatan Ngaringan dengan luas kurang lebih 340,43 Ha, Kecamatan Tanggunharjo dengan luas kurang lebih 154,37 Ha; Kecamatan Tegowanu dengan luas kurang lebih 146,32 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.14
Sebaran Kawasan Peruntukan Industri Kab, Grobogan

No	Lokasi Kawasan Peruntukan Industri	Luas (Ha)
1	Kecamatan Brati	27,19
2	Kecamatan Gabus	21,42
3	Kecamatan Godong	55,05
4	Kecamatan Grobogan	68,35
5	Kecamatan Gubug	44,13
6	Kecamatan Kedungjati	104,47
7	Kecamatan Kradenan	135,93
8	Kecamatan Ngaringan	340,43
9	Kecamatan Tanggunharjo	154,37
10	Kecamatan Tawangharjo	5,41
11	Kecamatan Tegowanu	146,32
12	Kecamatan Wirosari	169,94
	Total Luas	1.273,02

Sumber: RTRW Kab. Grobogan, 2021

[illegible]

Gambar 2.14. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Grobogan

- sistem jaringan transportasi;
- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem jaringan prasarana lainnya.

11-27



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

menjadi jalan kewenangan kabupaten. Kabupaten Grobogan belum terdapat jalan arteri yang menjadi kewenangan pusat.

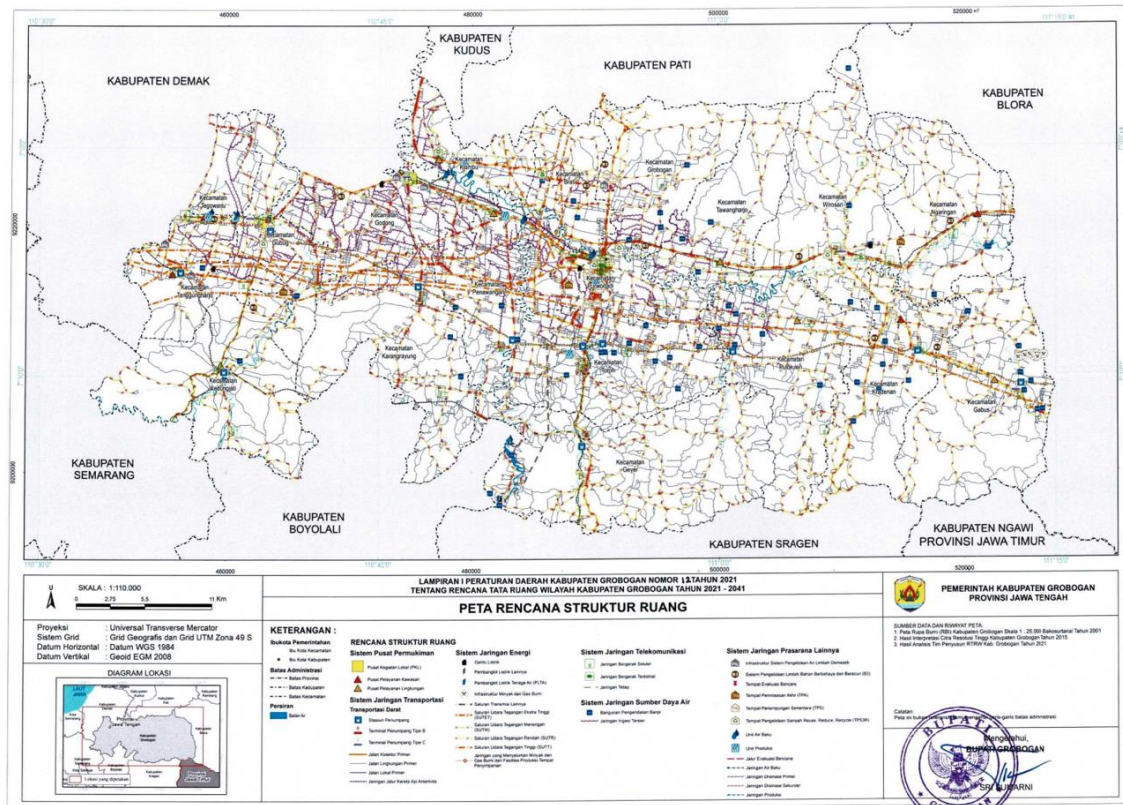
Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang wilayahnya dilintasi jaringan rel kereta api terpanjang di Jawa Tengah. Jaringan kereta api yang melintas terdiri atas Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota antara lain Jaringan jalur kereta api Yogyakarta-Solo-Semarang-Purwokerto (Joglosemarkerto); Jaringan jalur ganda kereta api jalur Purwodadi - Surabaya sebagai bagian jalur perkeretaapian Jakarta – Surabaya; Rencana Jaringan jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; Jaringan jalur kereta api non aktif koridor Semarang – Demak - Godong – Purwodadi – Wirosari - Blora; Jaringan jalur kereta api non aktif Gambringan – Purwodadi; dan Jaringan jalur non aktif Kedungjati–Tuntang–Ambarawa. Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan terdapat di jaringan jalur kereta api Semarang – Purwodadi yang merupakan jalur Kedungsepur.

Stasiun Kereta Api berupa Stasiun Penumpang yang masih aktif untuk kegiatan naik turun penumpang serta stasiun perlintasan antara lain Stasiun Gundih di Kecamatan Geyer; Stasiun Kedungjati di Kecamatan Kedungjati; Stasiun Ngrombo di Kecamatan Toroh; Stasiun Gubug di Kecamatan Gubug; Stasiun Karangjati di Kecamatan Karangrayung; Stasiun Sedadi di Kecamatan Penawangan; Stasiun Gambringan di Kecamatan Toroh; Stasiun Kradenan di Kecamatan Kradenan; Stasiun Tanggungharjo di Kecamatan Tanggungharjo; Stasiun Sulursari di Kecamatan Gabus; dan Stasiun Jambon di Kecamatan Pulokulon.

Secara rinci gambaran struktur ruang Kabupaten Grobogan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041, dapat dilihat ke dalam Gambar berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 2.15. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Grobogan

2.1.3 Aspek Demografi

2.1.3.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang terdapat di Kabupaten Grobogan berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 1.507.156 jiwa, terdiri dari 775.655 jiwa laki-laki dan 749.501 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2017 – 2023

Tahun	Jenis Kelamin		Total (L+P)	Pertumbuhan
	Laki - Laki	Perempuan		
2018	732.653	727.127	1.459.780	0,69%
2019	739.322	734.109	1.473.431	0,94%
2020	745.244	748.244	1.483.386	0,68%
2021	748.531	740.416	1.488.947	0,37%
2022	754.396	746.749	1.501.145	0,82%
2023	775.655	749.501	1.507.156	0,56%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.1.3.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan dan Sex Rasio

Dari segi sex rasio, jumlah penduduk di Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Dengan komposisi jumlah penduduk sebanyak 775.655 jiwa laki-laki dan 749.501 jiwa perempuan, maka sex rasio penduduk mencapai 101,09%. Hal ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.

Dilihat dari jumlah penduduk per wilayah, Kecamatan Purwodadi merupakan wilayah yang paling banyak penduduknya, yaitu mencapai 143.654 jiwa, sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Klambu, yaitu sebanyak 39.890 jiwa.

Untuk mengetahui rincian jumlah penduduk dan sex rasio per kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki - Laki	Perempuan		
1	Kedungjati	22.690	22.566	45.256	100,55
2	Karangrayung	52.762	51.765	104.527	101,93
3	Penawangan	33.852	33.440	67.292	101,23
4	Toroh	60.459	60.462	120.921	100,00
5	Geyer	34.390	34.124	68.514	100,78
6	Pulokulon	57.240	56.107	113.347	102,02
7	Kradenan	43.011	42.595	85.606	100,98
8	Gabus	38.204	37.858	76.062	100,91
9	Ngaringan	36.446	35.260	71.706	103,36
10	Wirosari	48.426	47.855	96.281	101,19
11	Tawangharjo	30.611	29.957	60.568	102,18
12	Grobogan	40.813	40.069	80.882	101,86
13	Purwodadi	71.586	72.068	143.654	99,33
14	Brati	26.489	25.921	52.410	102,19
15	Klambu	20.151	19.739	39.890	102,09
16	Godong	44.798	44.757	89.555	100,09
17	Gubug	43.843	43.579	87.422	100,61
18	Tegowanu	29.970	29.710	59.680	100,88
19	Tanggunharjo	21.914	21.669	43.583	101,13
	Total Penduduk	757.655	749.501	1.507.156	101,09

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024

2.1.3.3 Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

Dari aspek kepadatan penduduk tercatat sebesar 744,70 jiwa/km², dengan wilayah terpadat terletak di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.837,48 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk di Kabupaten Grobogan terlihat pada Tabel di bawah ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.17
Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Jiwa/Km ²
1	Kedungjati	145,29	45.256	311,49
2	Karangrayung	144,27	104.527	724,52
3	Penawangan	75,23	67.292	894,48
4	Toroh	126,72	120.921	954,24
5	Geyer	205,14	68.514	333,99
6	Pulokulon	136,95	113.347	827,65
7	Kradenan	111,66	85.606	766,67
8	Gabus	163,93	76.062	463,99
9	Ngaringan	119,15	71.706	601,81
10	Wirosari	151,02	96.281	637,54
11	Tawangharjo	93,06	60.568	650,85
12	Grobogan	101,49	80.882	796,95
13	Purwodadi	78,18	143.654	1.837,48
14	Brati	56,56	52.410	926,63
15	Klambu	52,35	39.890	761,99
16	Godong	92,93	89.555	963,68
17	Gubug	65,52	87.422	1.334,28
18	Tegowanu	54,26	59.680	1.099,89
19	Tanggunharjo	50,13	43.583	869,40
	JUMLAH	2.023,84	1.507.156	744,70

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2019. Tercatat PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 27.268.744,50 juta rupiah. Pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 28.815.025 juta rupiah dan tahun 2022 menjadi sebesar 31.819.468 juta rupiah, kemudian pada tahun 2023 PDRB Kabupaten



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Grobogan kembali meningkat menjadi 34.758.920,00 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.18
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.518.944,81	7.807.904,94	8.192.209,11	8.765.347,67	9.330.841,00
2	Pertambangan dan Penggalian	358.185,54	369.166,13	413.157,36	473.831,89	535.776,00
3	Industri Pengolahan	3.632.925,31	3.733.004,48	4.053.773,62	4.498.334,02	5.067.021,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.298,54	25.266,56	26.290,69	30.674,31	32.651,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.973,13	12.534,75	13.117,93	13.433,34	15.066,00
6	Konstruksi	1.570.385,00	1.444.478,73	1.625.276,51	1.824.709,68	1.999.641,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.481.403,92	5.428.016,13	5.762.252,16	6.224.871,97	6.777.462,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.312.081,20	971.852,47	1.013.407,41	1.618.228,29	1.903.896,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.327.740,76	1.319.413,49	1.382.725,21	1.639.224,28	1.813.560,00
10	Informasi dan Komunikasi	708.722,88	834.197,52	887.851,29	913.731,89	997.968,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.156.280,44	1.215.736,00	1.304.777,84	1.433.015,14	1.536.967,00
12	Real Estate	576.910,89	579.572,84	590.844,89	623.442,09	658.127,00
13	Jasa Perusahaan	77.562,70	74.338,62	76.158,50	82.636,05	92.010,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	903.533,33	904.892,49	883.361,07	933.773,93	1.009.960,00
15	Jasa Pendidikan	1.465.454,96	1.456.775,78	1.474.329,77	1.506.521,71	1.611.500,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	290.244,58	309.404,19	320.763,43	332.778,36	367.563,00
17	Jasa lainnya	794.204,84	782.189,38	794.728,07	904.913,57	1.008.910,00
	Jumlah	27.278.521,82	27.268.744,50	28.815.024,86	31.819.468,19	34.758.920,00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 di Kabupaten Grobogan untuk tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun PDRB ADHK tahun 2019. PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 20.115.533,52 juta rupiah, mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 5,97% dan menjadi 21.318.146,23 juta rupiah, dan pada tahun 2023 sebesar 22.380.304,00 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.075.560,67	5.191.418,52	5.383.553,74	5.504.654,70	5.513.427,00
2	Pertambangan dan Penggalian	220.236,50	223.576,41	245.201,98	272.255,93	299.418,00
3	Industri Pengolahan	2.494.834,78	2.504.481,53	2.645.844,99	2.792.708,50	2.985.342,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	19.965,72	21.093,65	22.003,59	25.476,13	26.832,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.059,32	9.233,59	9.504,55	9.576,28	10.618,00
6	Konstruksi	1.092.990,96	1.003.028,18	1.082.743,04	1.137.001,76	1.201.588,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.292.117,11	4.205.503,15	4.397.723,86	4.563.350,00	4.792.100,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1.101.544,34	789.628,27	800.455,51	1.204.010,26	1.306.180,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	956.007,73	940.730,51	966.766,11	1.102.705,37	1.229.758,00
10	Informasi dan Komunikasi	713.196,71	832.856,53	886.024,34	909.221,68	991.389,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	773.097,11	808.592,04	829.380,09	837.224,62	877.646,00
12	Real Estate	474.781,54	474.227,15	477.703,11	494.167,50	517.867,00
13	Jasa Perusahaan	54.716,60	51.284,25	51.801,84	54.052,63	58.132,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	621.795,77	616.278,75	597.903,43	616.030,05	647.485,00
15	Jasa Pendidikan	915.566,12	903.281,59	902.045,40	917.396,57	979.279,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	204.689,96	213.517,52	219.792,10	224.746,68	242.352,00
17	Jasa lainnya	617.357,28	594.295,76	597.085,84	653.567,57	700.890,00
	Jumlah	19.692.631,32	19.383.027,40	20.115.533,52	21.318.146,23	22.380.304,00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2019 menunjukkan tren positif, yaitu sebesar 5,37%. Tahun 2020 pertumbuhan PDRB mengalami perlambatan yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional. Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,78, dan tahun 2022 pertumbuhan semakin tinggi seiring membaiknya kondisi perekonomian daerah menjadi 5,98%, kemudian pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 4,98%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya fenomena el Nino yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh pada pertanian di Kabupaten Grobogan. Hal ini mengakibatkan (1) Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turun menjadi 0,17%. (2) Sistem tanam yang mundur dan mempengaruhi jumlah produksi pertanian. (3) Saat terjadi fenomena el nino juga dibarengi dengan kelangkaan pupuk bersubsidi yang ada di lapangan. Adanya fenomena el nino ini sangat berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan PDRB karena kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB di Kabupaten Grobogan sangat besar 26,84% paling tinggi dibanding dengan sektor yang lain.

Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2019 sampai dengan 2023 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20
Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2019-2023
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (%)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-1,52	2,28	3,7	2,25	0,17
2	Pertambangan dan penggalian	9,23	1,52	9,67	11,03	9,98
3	Industri pengolahan	8,93	0,39	5,64	5,55	6,88
4	Pengadaan listrik gas	5,81	5,65	4,31	15,78	5,32
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,31	1,92	2,93	0,75	10,87
6	Konstruksi	5,65	-8,23	7,95	5,01	5,68
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8,06	-3,26	4,57	3,77	5,01
8	Transportasi dan pergudangan	9,82	-28,32	1,37	50,42	8,49
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	10,19	-1,6	2,77	14,06	11,52

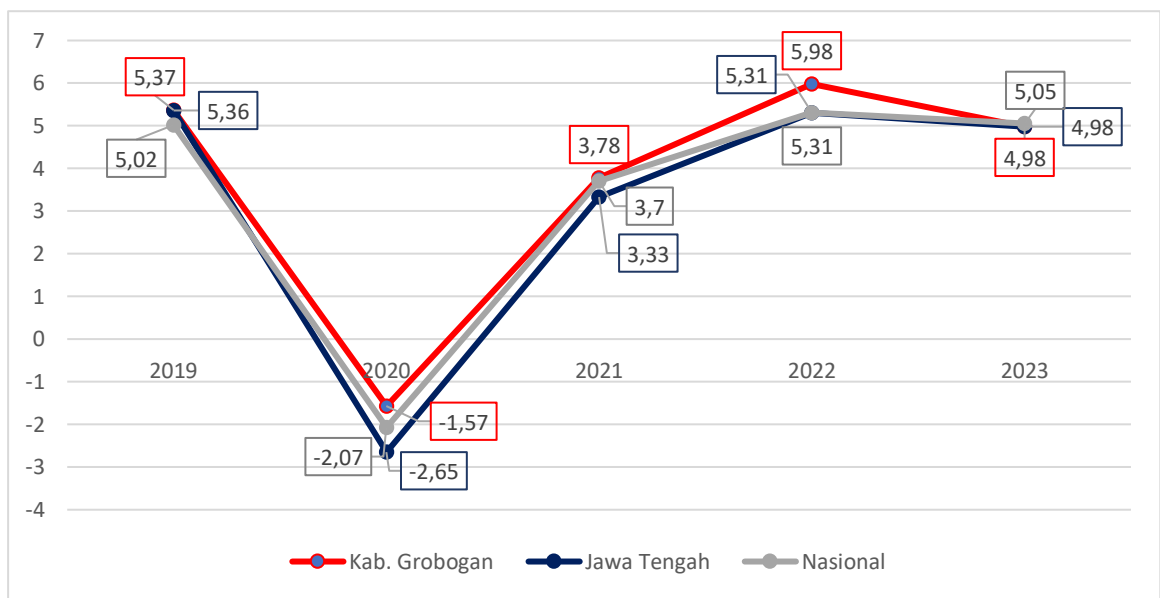


RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
10	Informasi dan komunikasi	11,40	16,78	6,38	2,62	9,04
11	Jasa Keuangan dan asuransi	3,81	4,59	2,57	0,95	4,83
12	Real estate	6,58	-0,12	0,73	3,45	4,8
13	Jasa perusahaan	10,19	-6,27	1,01	4,35	7,55
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3,83	-0,89	-2,98	3,03	5,11
15	Jasa pendidikan	7,28	-1,34	-0,14	1,7	6,75
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	7,04	4,31	2,94	2,25	7,83
17	Jasa lainnya	9,47	-3,74	0,47	9,46	7,24
	PDRB	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 4,98%, sama dengan Provinsi Jawa Tengah, namun lebih rendah dari Nasional, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

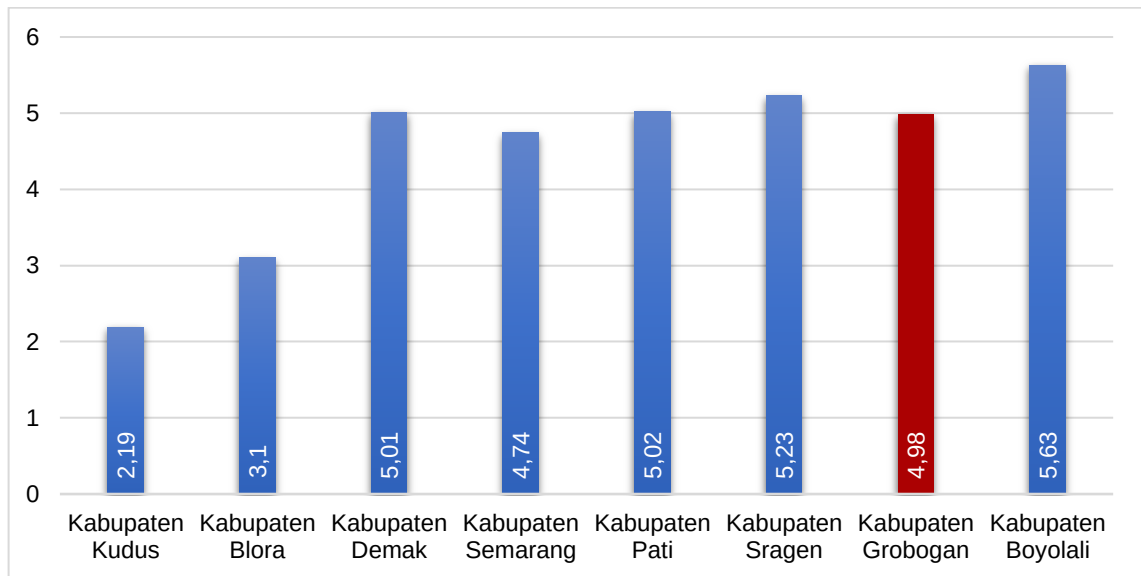


Gambar 2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dibandingkan Kabupaten sekitar berada pada posisi kelima setelah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Demak, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2023

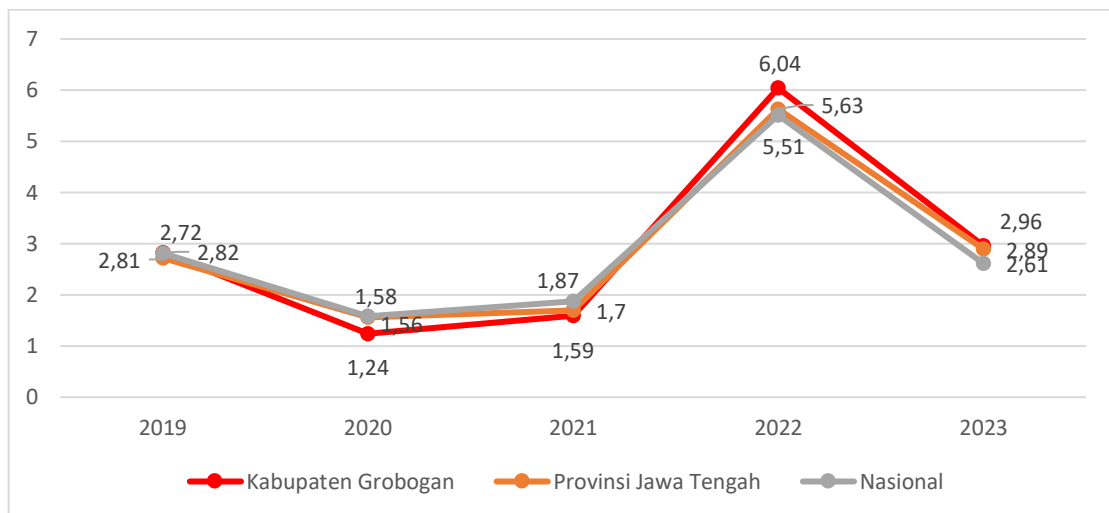
2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori terkendali. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan berdasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai sister city karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri. Inflasi Kabupaten Kudus tahun 2023 adalah 2,96%. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2019 hingga 2023.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2023

Gambar 2.3. Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) per satu orang penduduk. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan menurut dasar harga berlaku tahun 2019 sebesar Rp 19.891 ribu rupiah, menurun pada tahun 2020 menjadi 18.789 ribu rupiah. Tahun 2021 kembali meningkat sampai tahun 2023 sebesar 18% menjadi sebesar 23.283 ribu rupiah. PDRB perkapita ADHK cenderung perkembangannya fluktuatif. Tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID 19, selanjutnya tahun 2021 ekonomi mulai bangkit kembali hingga 14.991 juta rupiah.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023

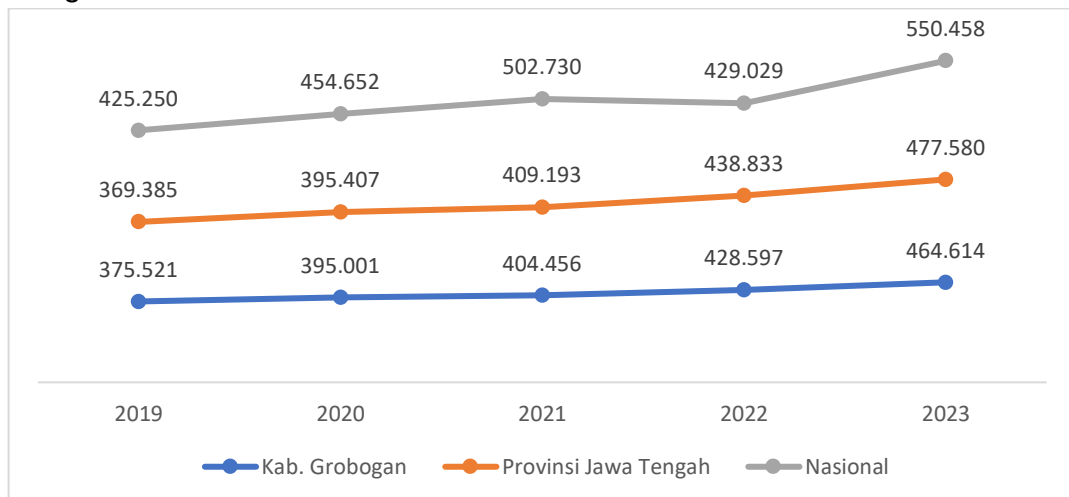
Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Ribu Rp)	
		Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
2019	1.371	27.278.521,82	19.692.631,32	19.891	14.359
2020	1.451	27.264.642,88	19.379.683,67	18.789	13.356
2021	1.461	28.815.024,86	20.115.533,52	19.725	13.770
2022	1.470	31.819.468,19	21.318.146,23	21.644	14.501
2023	1.493	34.758.920,16	22.380.303,89	23.283	14.991

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Grobogan 2019-2023

2.2.1.4 Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.

Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar Rp.464.614,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar Rp.428.597,- per kapita perbulan. Garis kemiskinan Kabupaten Grobogan masih lebih rendah dibandingkan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



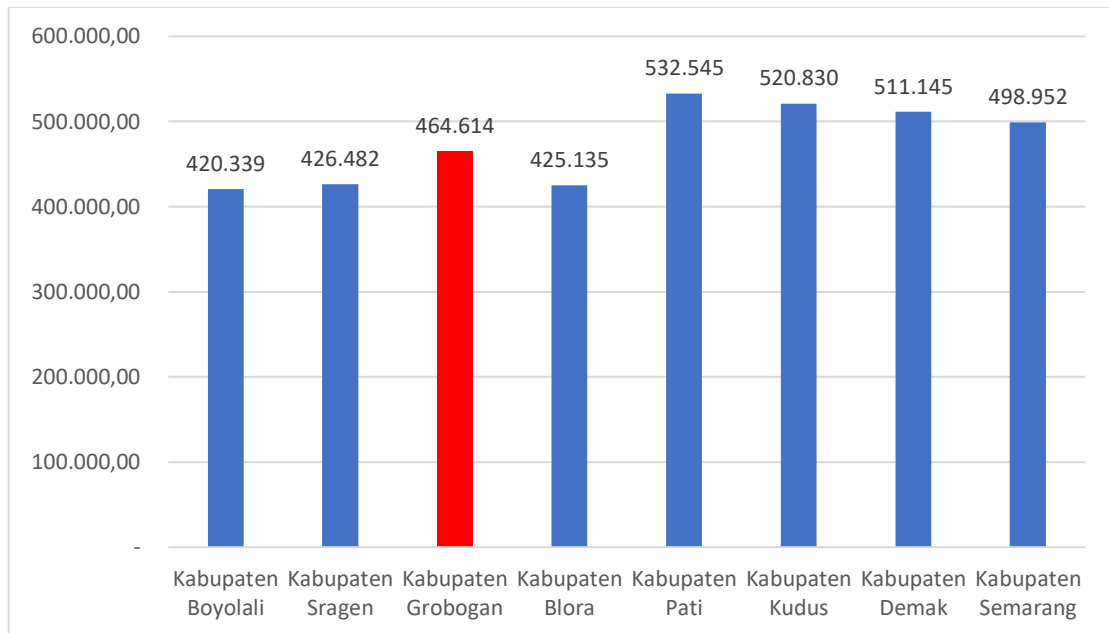
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2019- 2023 (Rp)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Pati, Kudus, Demak, dan Semarang.



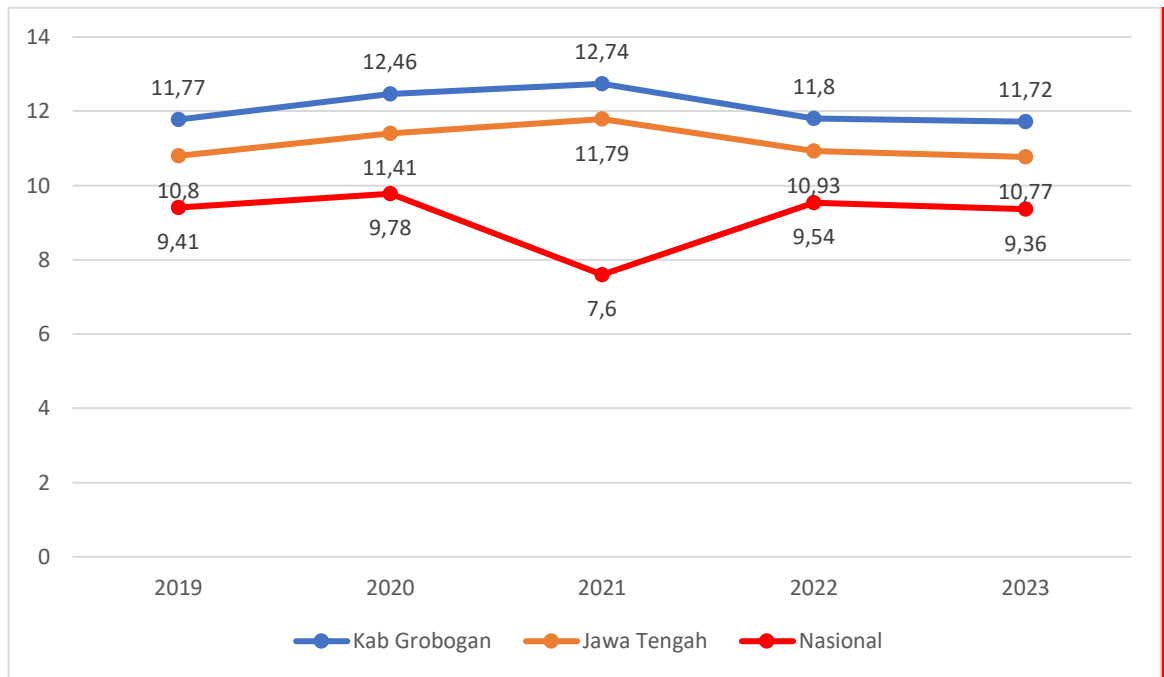
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.5. Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Rp)

Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 sebesar 11,77 persen atau sekitar 16,19 ribu orang, mengalami penurunan hingga tahun 2023 dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 11,72 persen atau sekitar 16,25 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



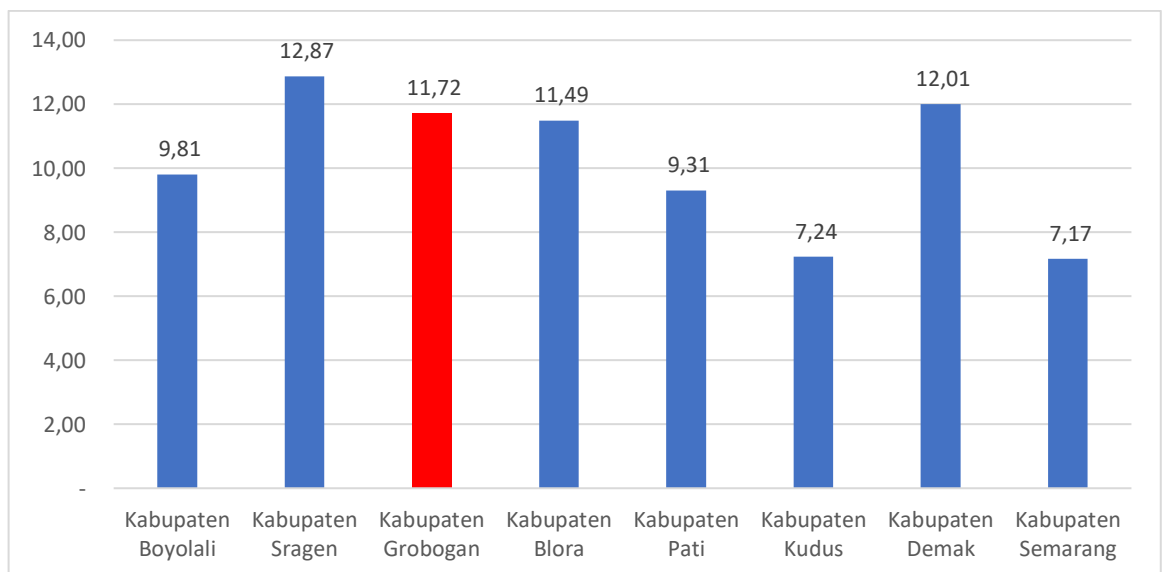
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.6. Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023 (%)

Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat ketiga tertinggi setelah Kabupaten Sragen dan Demak, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



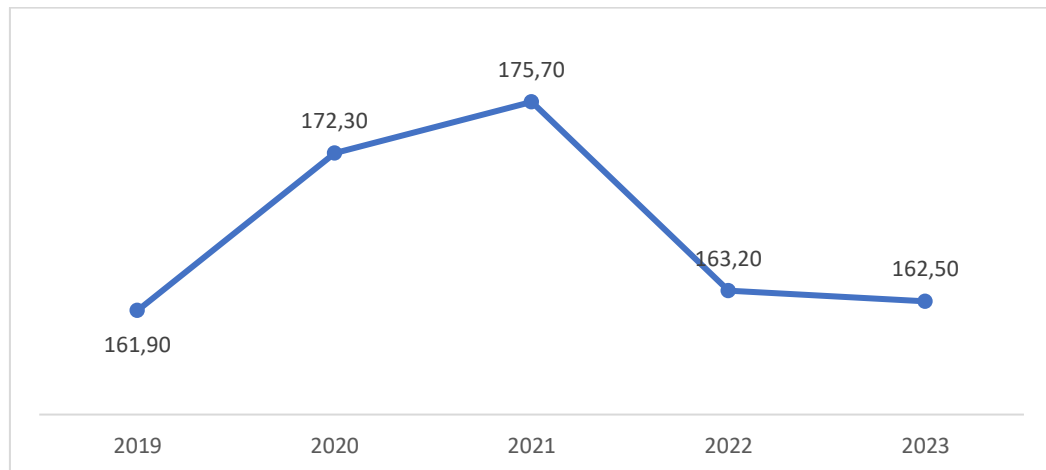
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.7. Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (%)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga 2023 fluktuatif, yaitu dari tahun 2019 sebanyak 161,90 ribu jiwa, mencapai angka tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 175,70 ribu jiwa, kemudian tahun 2023 menjadi sebanyak 162,50 ribu jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



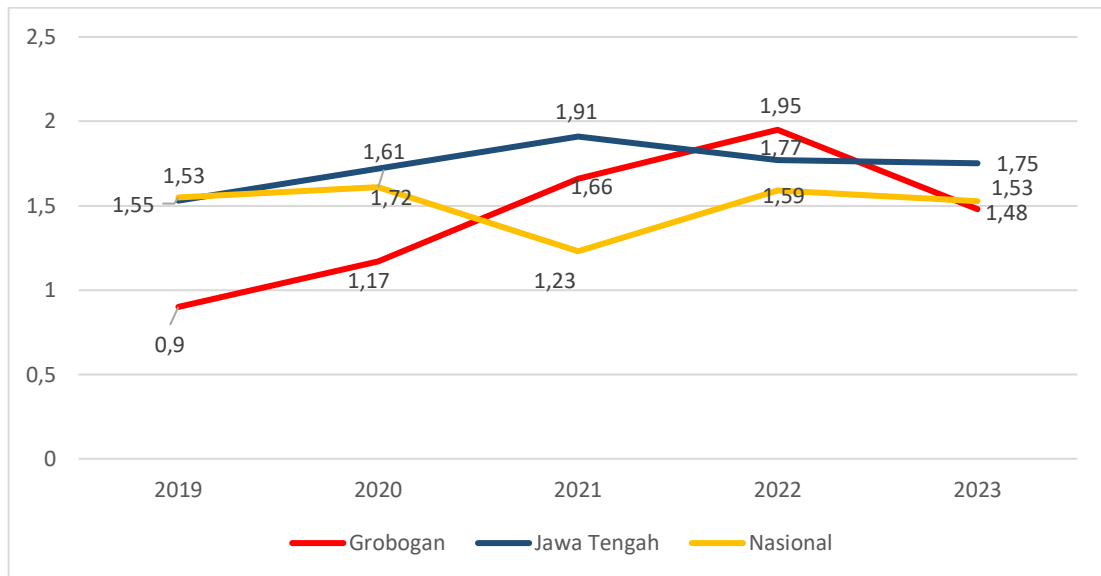
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2019 hingga tahun 2023 terjadi kenaikan, dari tahun 2018 sebesar 1,67 menjadi 1,95 pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1,48 pada tahun 2023. indeks kedalaman kemiskinan perlu terus ditekan agar kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 1,95 lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,53. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



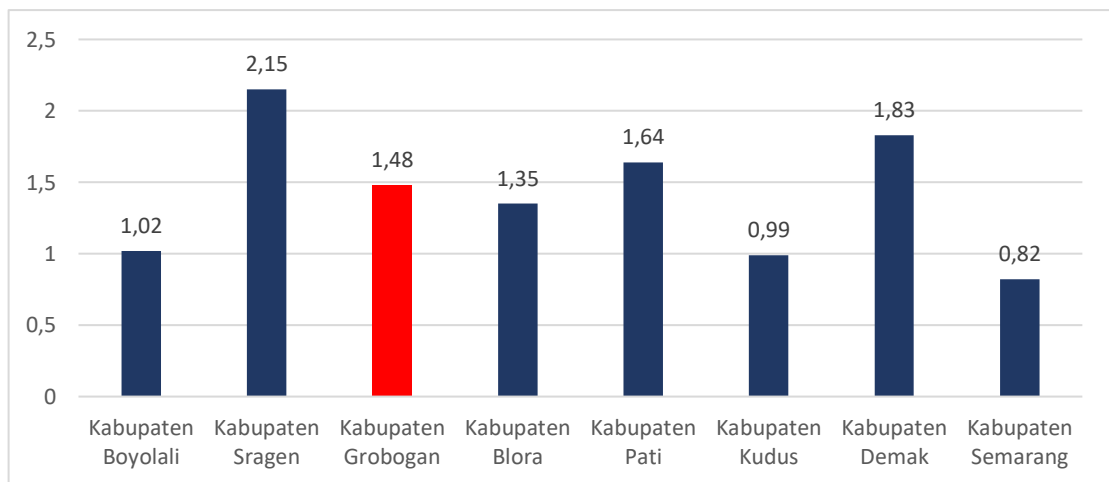
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber : BPS Nasional, 2022

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

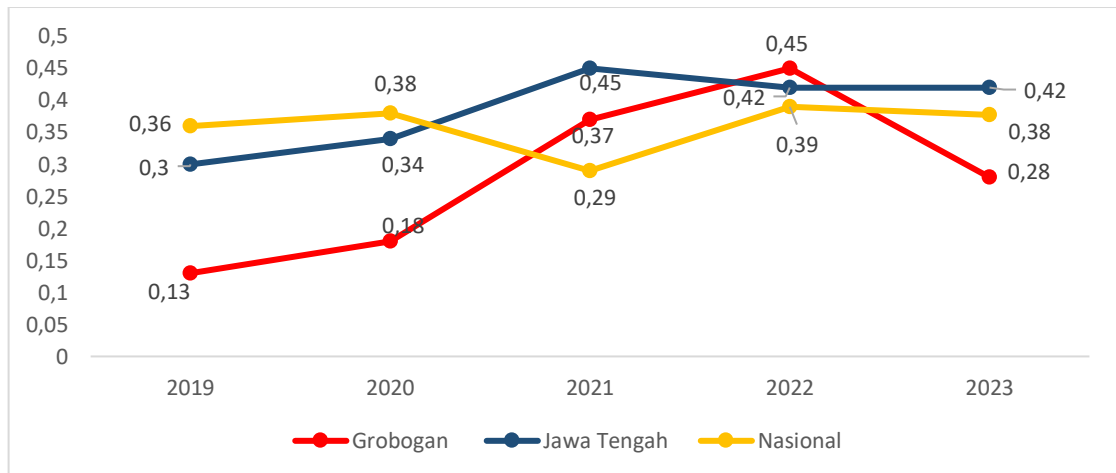
Gambar 2.10. Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

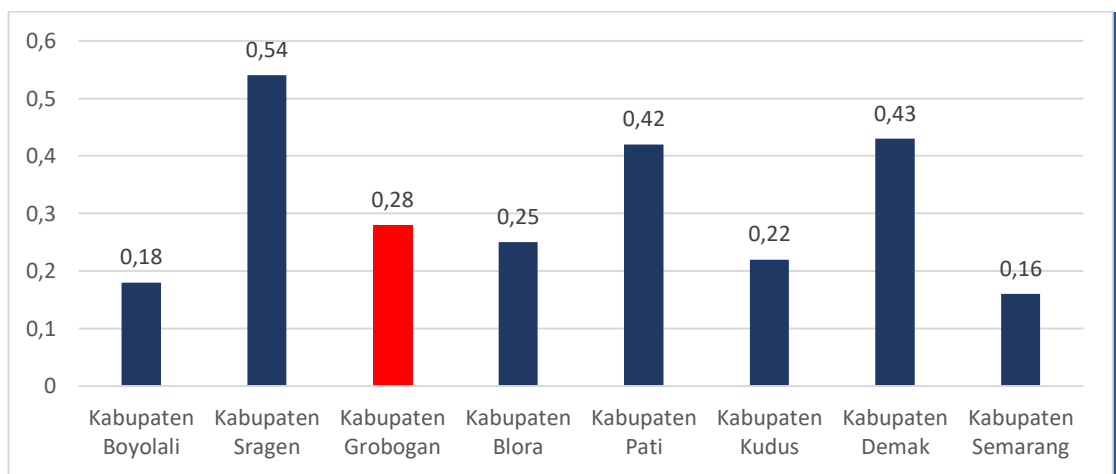
Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan meningkat, yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,13 menjadi sebesar 0,28 pada tahun 2023. Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 0,28 lebih baik dibanding Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,38. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.11. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan tertinggi keempat setelah Kabupaten Sragen, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.12. Perbandingan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

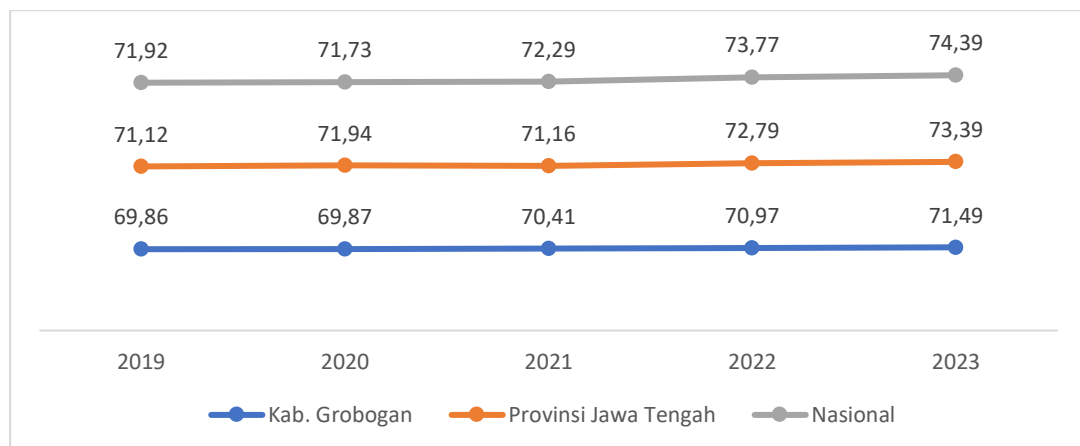


RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun mulai dari tahun 2019 sebesar 69,86 meningkat menjadi 71,49 pada tahun 2023. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 71,49 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 73,39 dan Nasional sebesar 74,39. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



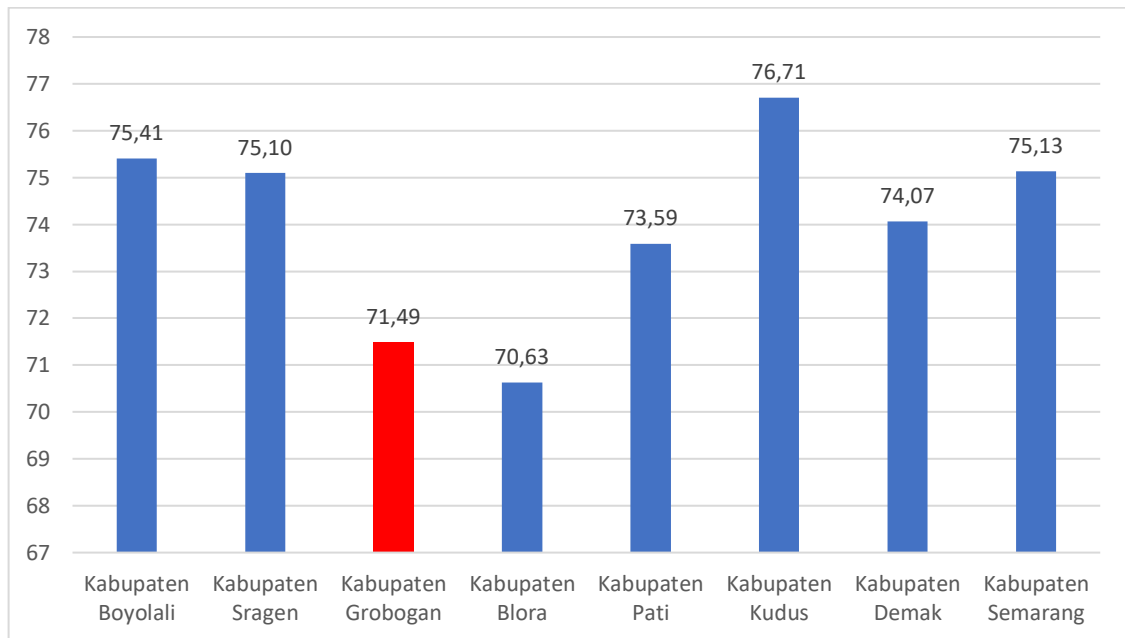
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.13. Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan memiliki nilai IPM terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.14. Perbandingan IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

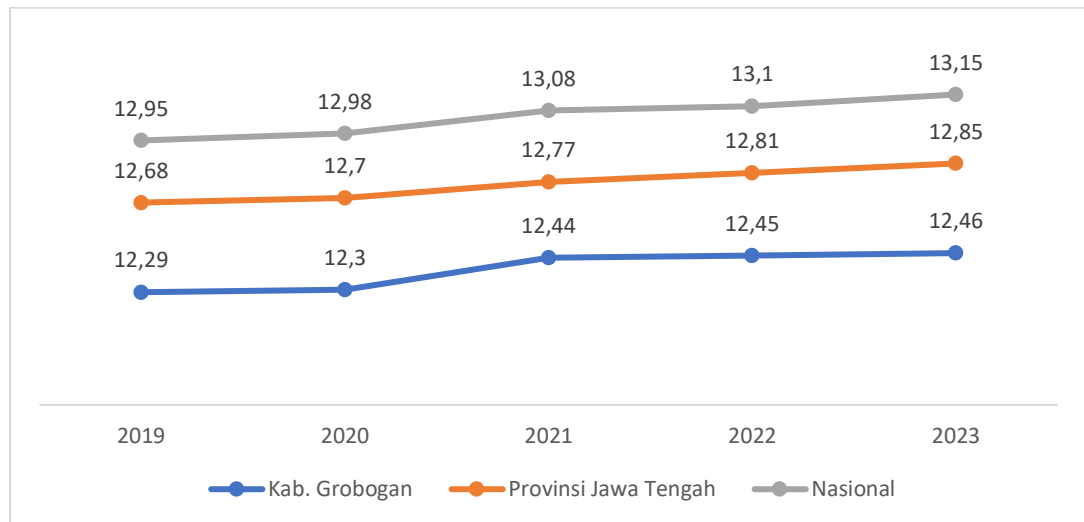
2.2.2.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,29 tahun, dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 12,46 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



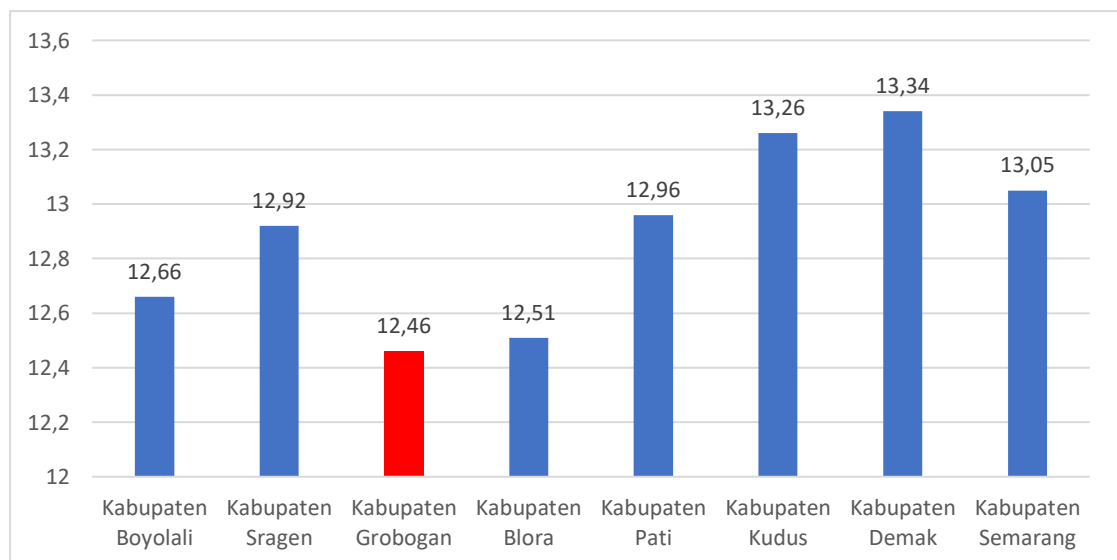
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.15. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten di wilayah sekitar, Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2024

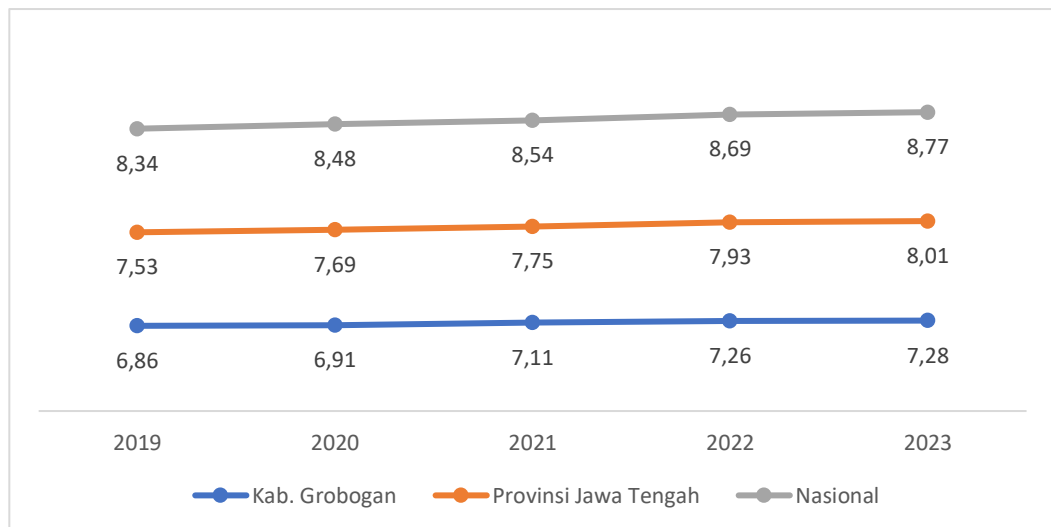
Gambar 2.16. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.2.2.3 Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 6,86 tahun dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 7,28 tahun. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



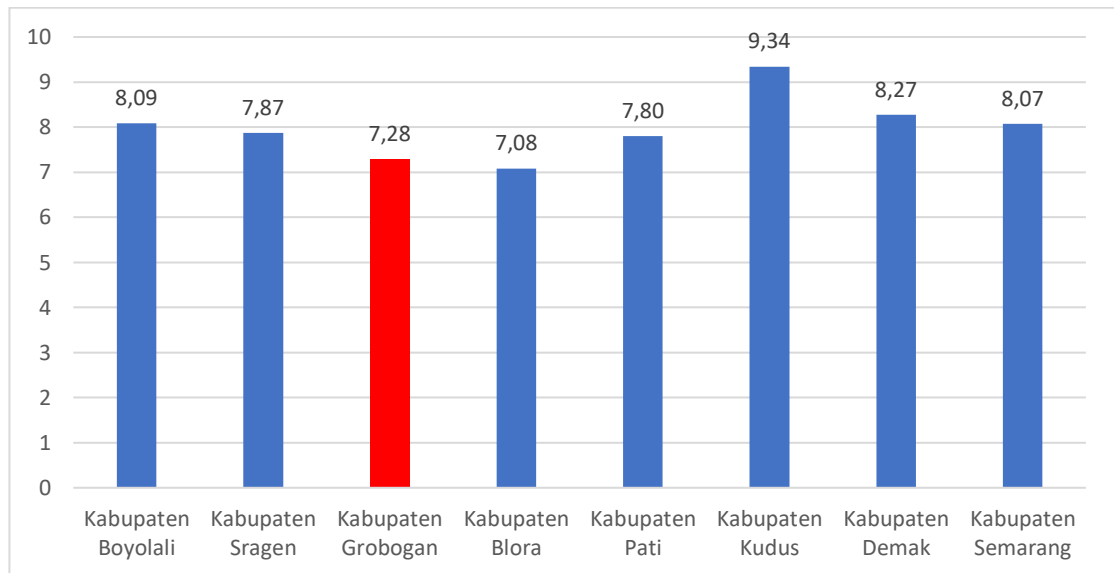
Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.17. Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 7,28 tahun masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan menempati posisi kedua paling rendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

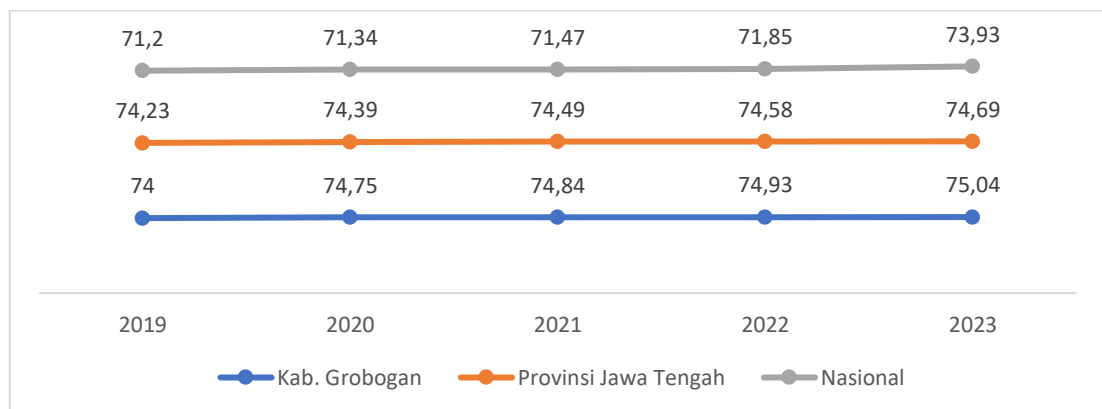


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.18. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (Tahun)

2.2.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Usia Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



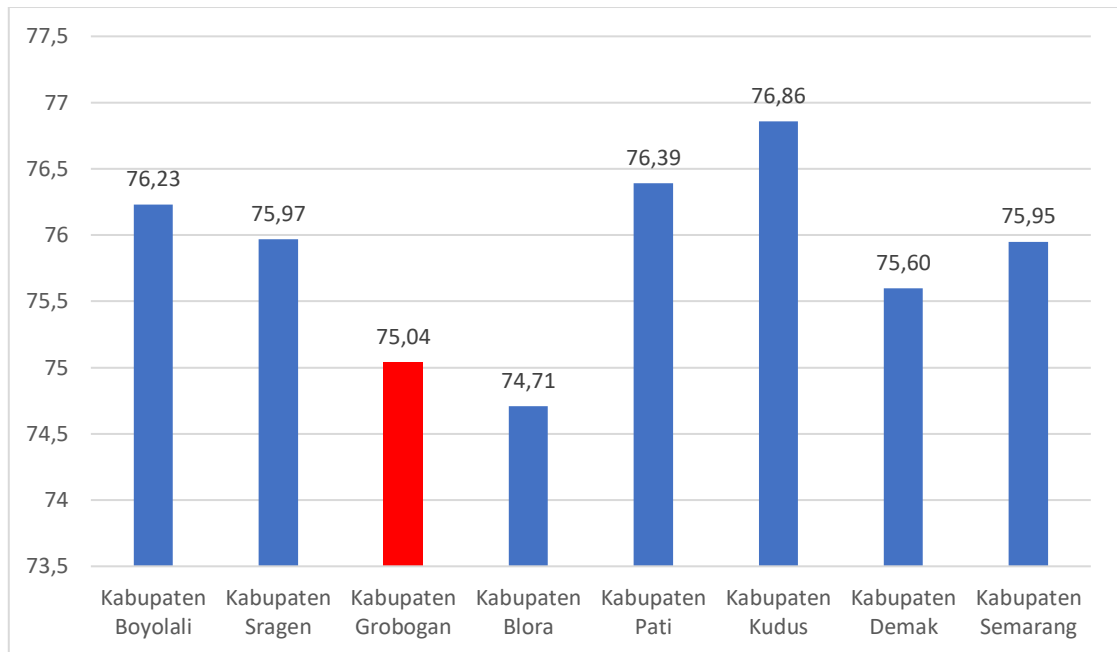
Sumber: BPS Nasional, 2023

Gambar 2.19. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Grobogan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Dibandingkan dengan kabupaten lain di wilayah sekitar, usia harapan terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

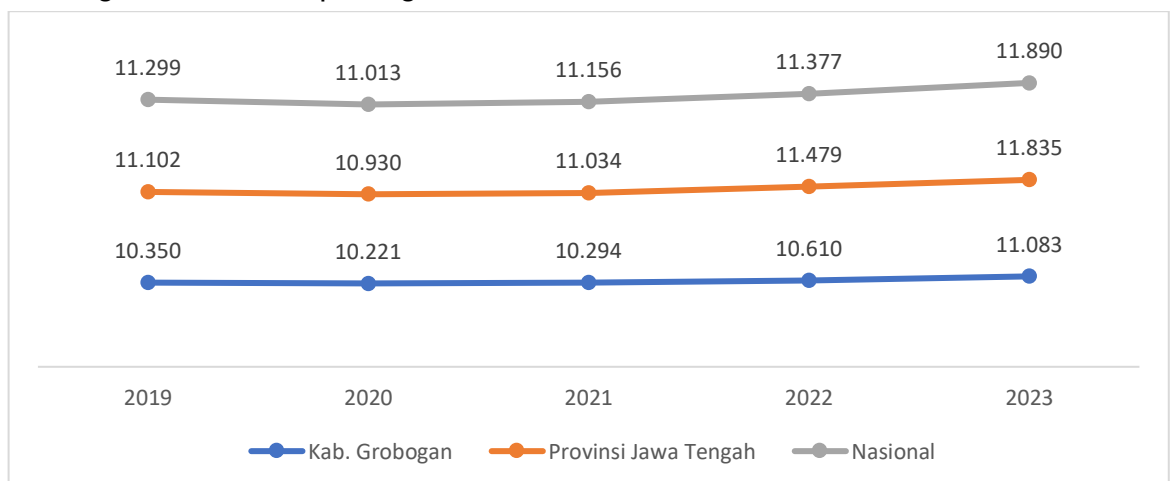


Sumber: BPS Nasional, 2024

Gambar 2.20. Posisi Relatif Usia Harapan Hidup dengan Kabupaten Sekitar Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (Tahun)

2.2.2.5 Pengeluaran per Kapita

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Grobogan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 juga terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu dan pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp11.083 ribu. Secara rinci pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan bisa dilihat pada gambar berikut ini.



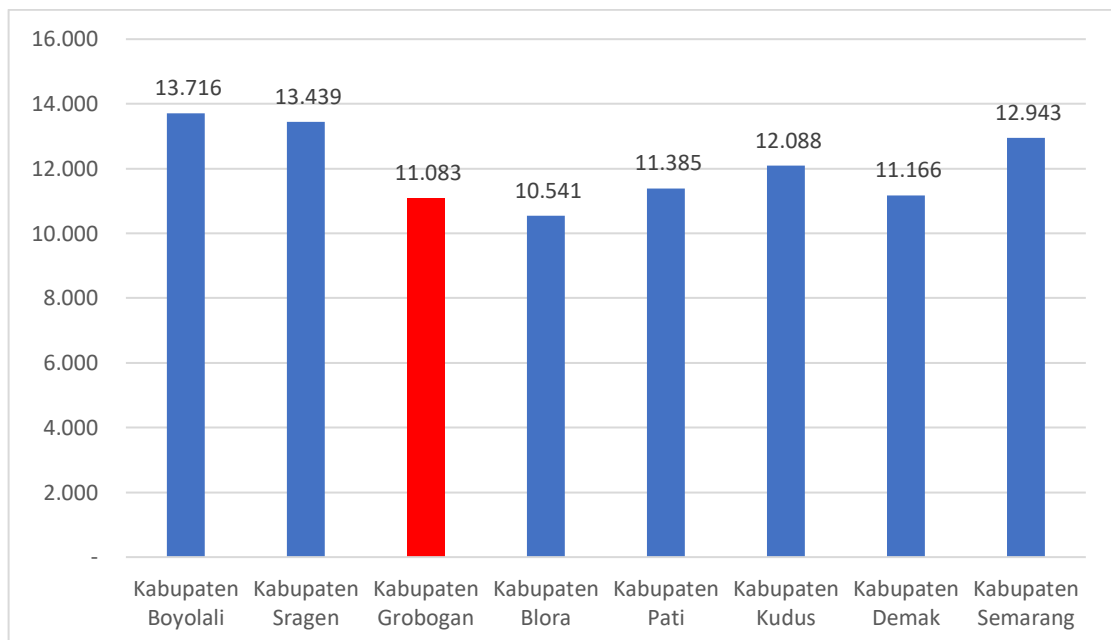


RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024

Gambar 2.21. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (ribu rupiah)

Dibandingkan kabupaten sekitar, pengeluaran perkapita Kabupaten Grobogan berada pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2024

Gambar 2.22. Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023 (ribu rupiah)

2.2.2.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

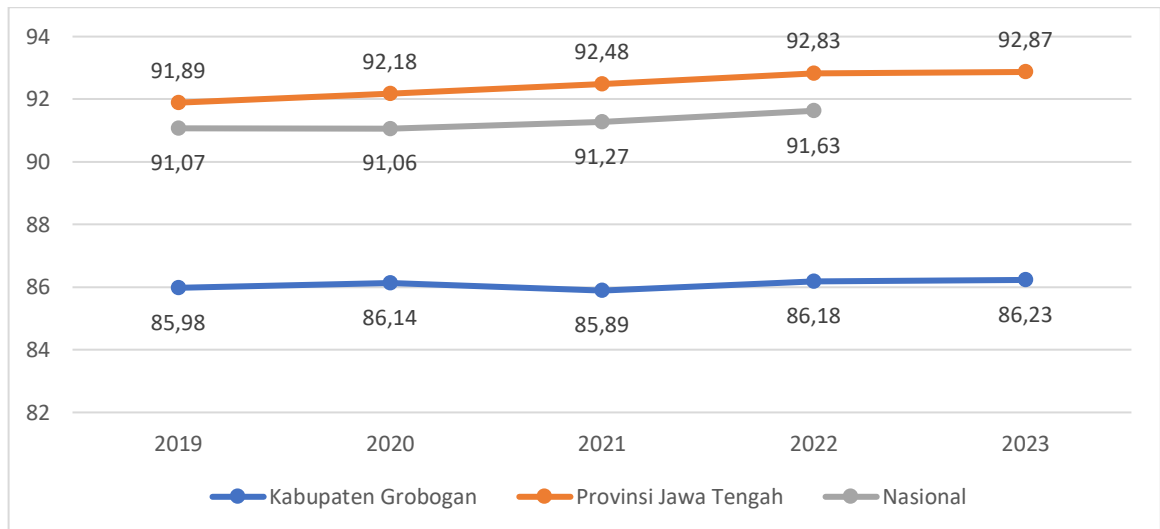
IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung meningkat yaitu dari 85,81 pada tahun 2018 menjadi 86,18 pada tahun 2022. IPG Kabupaten Grobogan lebih rendah dibandingkan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



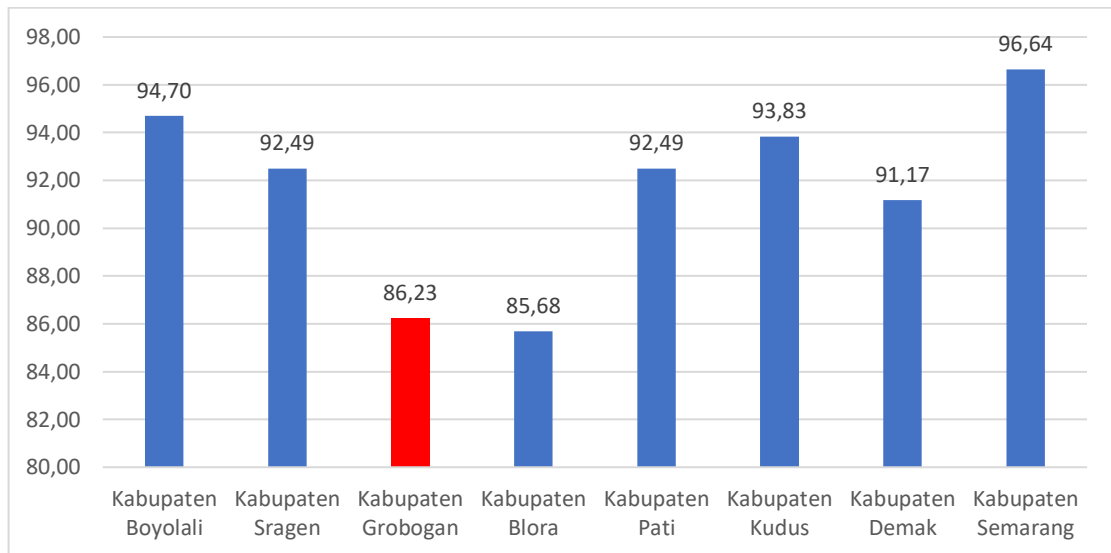
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.23. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Dibandingkan kabupaten sekitar, IPG Kabupaten Grobogan menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Blora. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.24. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2023

2.2.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender

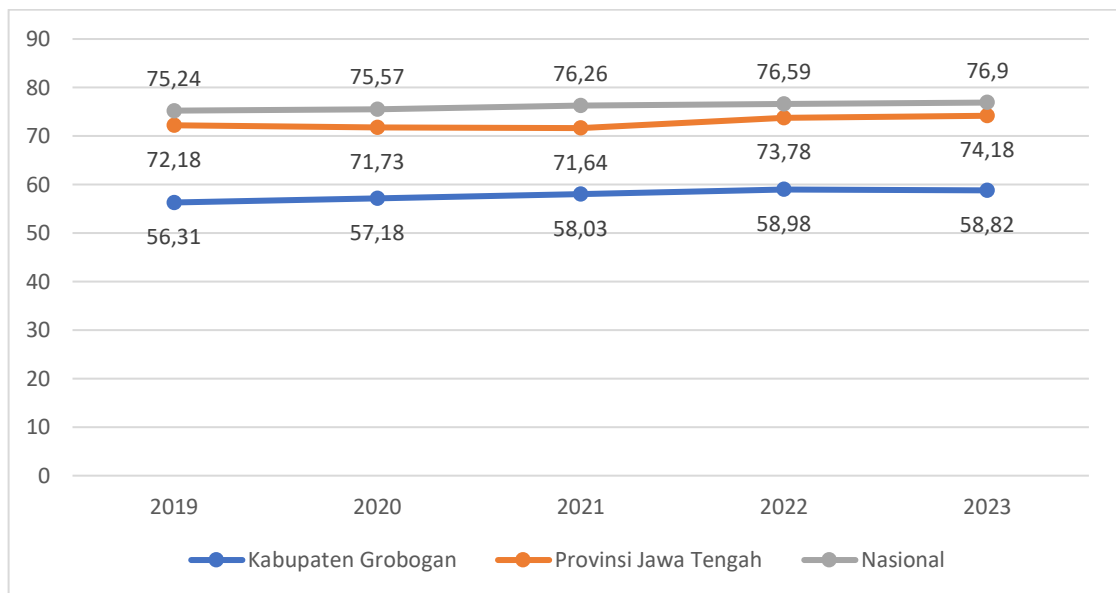
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut.

Perkembangan IDG pada tahun 2019 hingga tahun 2023 kondisinya cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 56,31 pada tahun 2019 menjadi sebesar 58,82 pada tahun 2023. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan IDG Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.25. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Capaian IDG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 58,82, menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memiliki potensi yang layak untuk diperhitungkan. IDG diyakini signifikan, karena negara-negara yang tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan, yang merupakan setengah dari masyarakat mereka, dikatakan meremehkan potensi ekonomi. Komponen pembentuk IDG yaitu perempuan di parlemen diukur dari persentase perempuan yang menduduki kursi di DPRD. Untuk mencapai hal ini pemerintah menetapkan quota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Penetapan kuota 30% perempuan dalam pemilu legislatif adalah sebuah affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan.

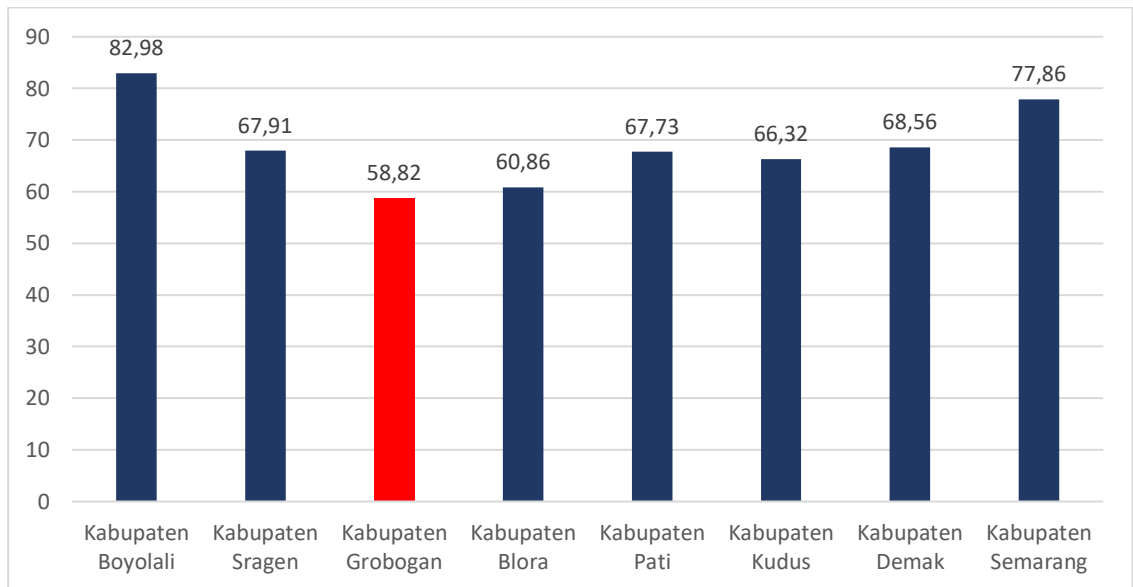
Partisipasi perempuan dalam ranah politik masih menghadapi beberapa tantangan, karena budaya patriarki yang membatasi hak perempuan untuk masuk ke politik, terutama di lembaga legislatif dan kurangnya pendidikan tentang politik. Ada kecenderungan partisipasi perempuan dalam politik di negara-negara berkembang menjadi sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Akibatnya, mereka terlibat dalam hal-hal yang biasanya memang didahulukan sebelumnya yaitu urusan rumah tangga. Melihat dari anggota DPRD Kabupaten Grobogan periode ini hanya terdapat 6 anggota perempuan dari 50 anggota DPRD. Dengan hasil perolehan kursi legislatif perempuan yang hanya mendapatkan 12% dari jumlah keseluruhan pastinya ada faktor penghambatnya dalam keterwakilan perempuan dalam pencalonan, dan penerimaan dewan perempuan periode ini. Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan sendiri itu bisa jadi karena Salah satu hambatan perempuan menjadi penentu kebijakan pembangunan bangsa ini adalah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

budaya patriarki. Tingginya dominasi laki-laki dalam budaya patriarki menunjukkan betapa perempuan tidak diberi kesempatan. Perempuan dipandang lemah dalam budaya ini, dan mereka lebih sering dipandang sebagai ibu rumah tangga. mengurus keuangan, maka dari itu perempuan juga terbatas dalam keadaan ini.

IDG Kabupaten Grobogan terendah diantara kabupaten sekitar. Secara rinci perbandingan IDG Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.26. Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar tahun 2023

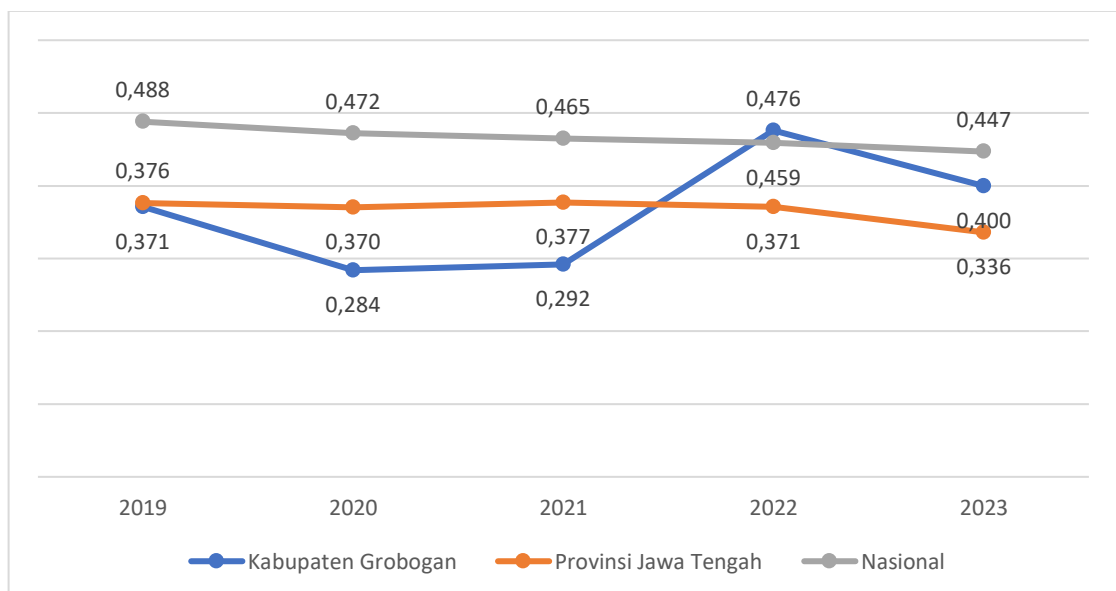
Untuk mengetahui bagaimana disparitas gender yang ada di Kabupaten Grobogan sehingga menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dicermati berdasarkan ketidakadilan yang ada, yakni: marginalisasi atau kemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotip, kekerasan, beban kerja lebih Panjang dan lebih banyak. Proses marginalisasi yang berujung pada kemiskinan, sejujurnya banyak terjadi di masyarakat dan negara yang mempengaruhi laki-laki dan perempuan yang berakibat berbagai peristiwa, seperti pengusuran, bencana alam atau prosedur eksploitasi. mungkin ada satu bentuk diskriminasi terhadap wanita, yang disebabkan oleh gender. Ada beberapa jenis dan bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme cara marginalisasi perempuan karena perbedaan gender tersebut. Asal-usulnya bisa dari peraturan pemerintah daerah, kepercayaan, interpretasi non sekuler, kepercayaan tradisional dan perilaku atau bahkan ilmu pengetahuan. Marginalisasi terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja seperti di tempat kerja, terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau subkultur dan bahkan di suatu daerah termasuk di Kabupaten Grobogan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.2.2.8 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks ketimpangan gender adalah sebuah ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidaoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks ketimpangan gender pada kabupaten Grobogan tahun 2019-2023 mengalami keadaan fluktuatif. Tahun 2019 memiliki capaian 0,371 hingga naik pada tahun 2023 sebesar 0,400, perkembangan indeks ketimpangan gender dapat dilihat pada grafik berikut.

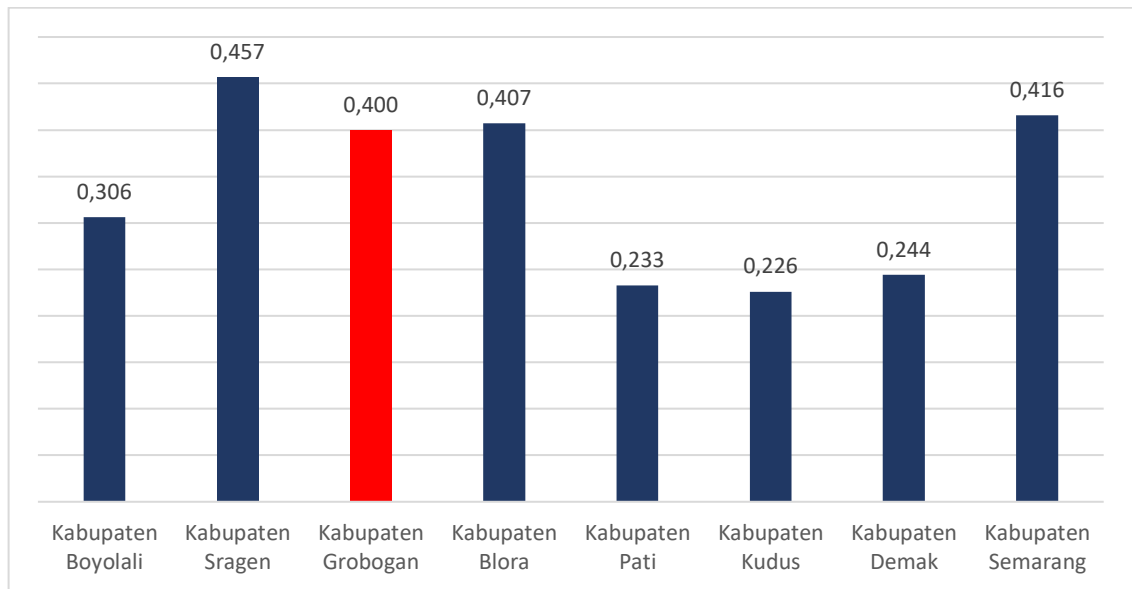


Gambar 2.27. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Capaian IKG Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 sebesar 0,400, menempati posisi ketiga tertinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 2.28. Posisi Relatif Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten Sekitar tahun 2023

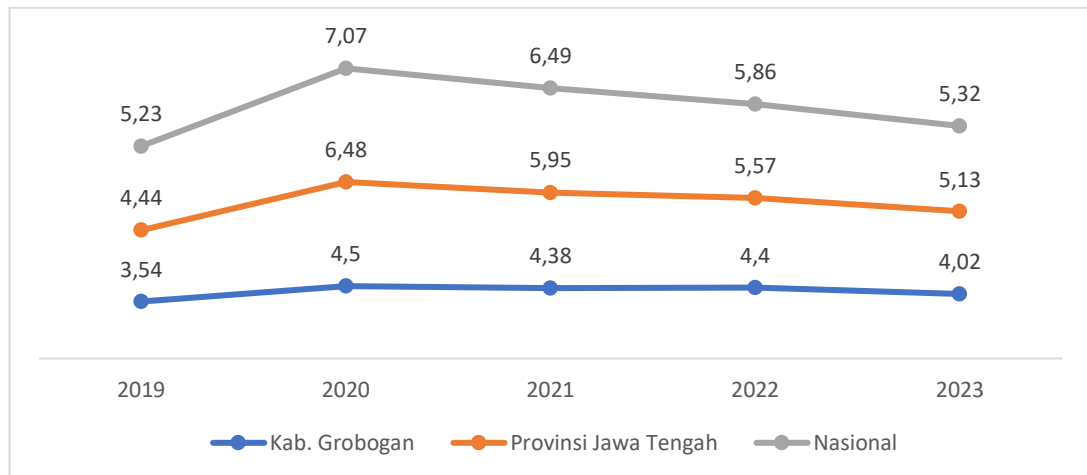
2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami kecenderungan terjadi kenaikan. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,54% dan naik hingga 4,02% pada tahun 2023. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 4,02%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.



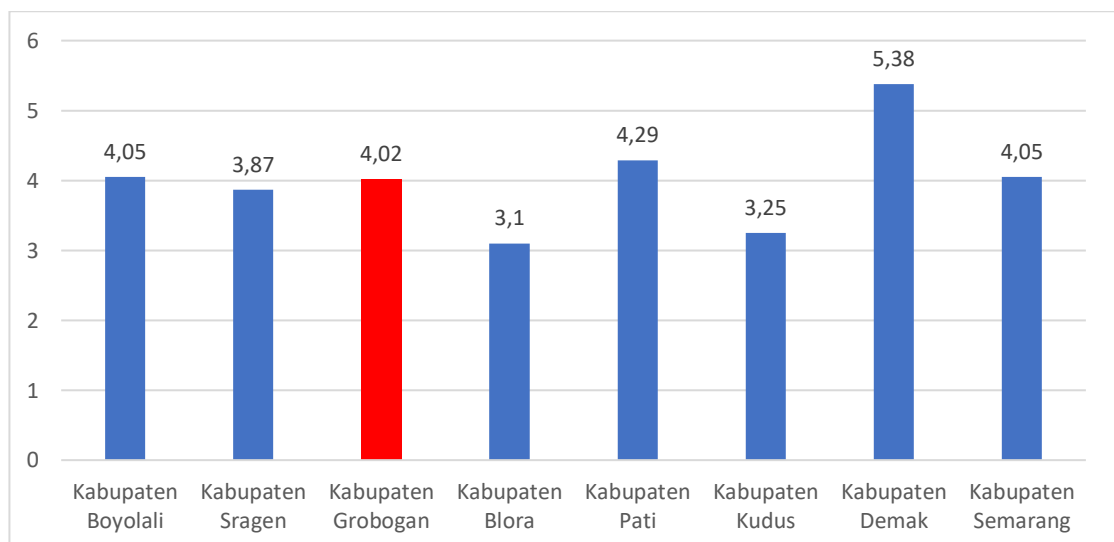
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.29. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2023 (%)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan diperlukan kolaborasi semua stakeholder. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan antara lain melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan UMK/IKM yang bertujuan untuk menumbuhkan wirausaha-wirausaha yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian daerah. Dengan demikian adanya kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelatihan kewirausahaan produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing sehingga tercipta wirausaha-wirausaha produktif dan mandiri. Pelatihan – pelatihan tersebut dilakukan oleh berbagai dinas instansi terkait seperti Disnakertrans, DinkopUKM, Disperindag baik melalui anggaran APBD Kabupaten, fasilitasi APBD Provinsi, maupun APBN serta menggandeng perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Disnakertrans Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan perusahaan yang berada di Kabupaten Grobogan juga rutin mengadakan bursa kerja yang bertujuan menjaring pekerja baru sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka.

Selain itu, dengan banyaknya perusahaan yang menanamkan investasi di Kabupaten Grobogan sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai contoh Pabrik Garmen yang didirikan pada akhir tahun 2016 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wirosari telah menyerap pekerja kurang lebih sebanyak 12.000 orang. Jumlah pekerja yang terserap oleh perusahaan yang mendirikan pabrik/kegiatan usaha di Kabupaten Grobogan sampai dengan tahun 2021 sebanyak sebanyak 41.227 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22
Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Grobogan

No	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Total	Proyeksi	Kekurangan
1	PT. Graha Artha	Aktivitas Penunjang Kelistrikan	139	139	0
2	PT. Malindo Feedmill. Tbk - Grobogan	Industri Ransum Makanan Hewan	123	123	0
3	PT Pungkook Indonesia One	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	12.923	16	3.077
4	PT Cj Cheiljedang Feed Semarang	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung	18	18	0
5	Formosa Bag Indonesia	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan	4.228	4.528	300
6	PT. Nufeed Internasional Indonesia	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	33	33	0
7	PT. Cargill Indonesia (Purwodadi)	Industri Ransum Makanan Hewan	73	73	0



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Perusahaan	Sektor Usaha	Total	Proyeksi	Kekurangan
8	PT. Mulia Harvest Agrotech	Industri Ransum Makanan Hewan	172	172	0
9	PT. Kartika Polaswasti Mahardhika	Industri Air Minum Dan Air Mineral	124	124	0
10	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Poultry Breeding Division Unit	Budidaya Ayam Ras Pedaging	110	110	0
11	PT. Semen Grobogan	Pertambangan Semen	251	251	0
12	PT. Malindo Feedmill, Tbk Area Grobogan Hatchery	Pembibitan Ayam Ras	94	94	0
13	PT. Global Sarana Sukses - Cargill Purwodadi	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi	38	38	0
14	PT. Holi Karya Sakti	Industri Gloves	1.454	1.5	46
15	PT Belgindo Raya	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	284	284	0
16	PT. Citraniaga Karyalestari	Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya	162	162	0
17	PT. Berill Jaya Sejahtera	Penggilingan Padi	175	175	0
18	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Industri Ransum Makanan Hewan	209	209	0
19	PT. SAE APPAREL	Industri Garmen	-	8	8
	J U M L A H		41.227	32.033	11.423

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Grobogan, 2023

2.2.2.9 Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif pada kisaran angka antara 4,98% hingga 5,37%, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tergolong tinggi pada angka 4,98%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74 tahun menjadi sebesar 75,03 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

Tabel 2.23
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,37	-1,57	3,78	5,98	4,98
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,54	4,5	4,38	4,4	4,02
3	Angka Kemiskinan	11,77	12,46	12,74	11,8	11,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49



2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan pengertian tersebut tugas penyelenggaraan pendidikan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang juga telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pendidikan merupakan urusan strategis dalam menciptakan sumberdaya yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Pengelolaan pendidikan dasar; (2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini; (3) Pengelolaan pendidikan nonformal; (4) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; (5) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota; (6) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan (8) Pembinaan bahasa.

Capaian Indikator pada Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan, capaian Rata-rata Lama Sekolah Kab. Grobogan pada tahun 2022 sebesar 7,91 per tahun dan tahun 2023 mencapai 7,28 per tahun. Target tahun 2023 sebesar 7,00 per tahun, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,28 disebabkan tuntutan kehidupan modern untuk bersaing mendapatkan lapangan kerja memerlukan pendidikan, sehingga masyarakat mulai sadar dan memerlukan pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah terus melanjutkan program wajib belajar 12 tahun melalui Gerakan Mesti Sekolah.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Capaian Harapan Lama Sekolah Kab. Grobogan pada tahun 2022 sebesar 12,81 per tahun dan tahun 2023 mencapai 12,46 per tahun. Target tahun 2023 sebesar 12,33 per tahun, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,13 per tahun disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi memberikan jaminan harapan masa studi yang lebih lama bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah pertumbuhan ekonomi harus dipacu terus agar berdampak pada harapan masa studi di sekolah.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Capaian APK PAUD Formal (TK/RA) Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 90,45% dan tahun 2023 mencapai 66,73%. Target tahun 2023 sebesar 86,90%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 20,17% disebabkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD masih rendah, karena belum merupakan kewajiban yang merupakan rangkaian stase jenjang dalam pendidikan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah dibuat kebijakan bahwa peserta didik yang ingin masuk jenjang SD harus berijazah PAUD Formal.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Capaian APS usia 5-6 Tahun Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 90,45% dan tahun 2023 mencapai 91,91%. Target tahun 2023 sebesar 86,90%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 5,01% disebabkan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak dimulai dari jenjang SD, walaupun usianya masih 6 tahun. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu sosialisasi pada orangtua/masyarakat tentang perlunya PAUD.

Akreditasi PAUD dan PNF adalah suatu kelayakan menurut SNP kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan PAUD dan PNF berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Ada 8 Standar Nasional PAUD meliputi Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pengelolaan dan Standar Pembiayaan. Capaian Persentase PAUD Terakreditasi Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 18,06% dan tahun 2023 mencapai 42,81%. Target tahun 2023 sebesar 0,48%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 42,33% disebabkan kesadaran pengelola PAUD dan ketersediaan dana untuk akreditasi PAUD. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada pengelola PAUD tentang standarisasi PAUD.

Angka partisipasi kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI/SDLB/Paket A terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang SD/MI/SDLB/Paket A (Usia 7 - 12 Tahun). APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah di bawah Usia 7 tahun dan di atas Usia 12 Tahun di Jenjang SD/MI/SDLB/Paket A. Capaian APK SD/MI/Paket A/SDLB Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 93,55% dan tahun 2023 mencapai 91,24%. Target tahun 2023 sebesar 97,20%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 5,96% disebabkan masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM SD/MI/Paket A/SDLB adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD MI/Paket A/SDLB dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Capaian APM SD/MI/Paket A/SDLB Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 84,86% dan tahun 2023 mencapai 86,26%. Target tahun 2023 sebesar 90,05%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 3,79% disebabkan masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah SD/MI. Capaian APS SD/MI Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 91,53% dan tahun 2023 mencapai 91,84%. Target tahun 2023 sebesar 98,07%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 6,23% disebabkan masih terdapat penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi,



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Kegunaannya adalah Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ Paket B/SMPLB adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/ Paket B/SMPLB. Capaian APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 91,49% dan tahun 2023 mencapai 89,48%. Target tahun 2023 sebesar 99,39%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 9,91% disebabkan masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP,MTs dan Paket B, menunjukkan partisipasi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SMP,MTs dan Paket B. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SMP, MTs dan Paket B. Capaian APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB Kab. Grobogan sebesar 75,87% dan tahun 2023 mencapai 80,18%. Target tahun 2023 sebesar 97,68%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 17,50% disebabkan Masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Capaian APS SMP/MTs Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 79,92% dan tahun 2023 mencapai 81,83%. Target tahun 2023 sebesar 88,48%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 6,65% disebabkan Masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah karena masalah ekonomi, sosial dan kesehatan. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Sosialisasi pada orangtua tentang pentingnya pendidikan.

Jumlah siswa putus sekolah secara nasional kembali mengalami kenaikan pada tahun ajaran 2022/2023. Angka Putus Sekolah (APtS) siswa putus sekolah di tingkat SD mencapai 40.623 anak. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah, diantaranya berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi ke sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 0,43% dan tahun 2023 mencapai 0,04%. Target tahun 2023 sebesar 0%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,04% disebabkan Masih terdapat anak SD/MI yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan masalah sosial. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Penguatan kapasitas kepala Sekolah SD/MI untuk menangani masalah anak putus sekolah.

Jumlah siswa putus sekolah di tingkat SMP/MTs secara nasional mencapai 13.716 anak. BPS melalui Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 mengungkapkan bahwa, 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Sebagian besar yaitu 67,0% di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya yaitu 8,7% dikarenakan anak harus mencari nafkah. Capaian Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 2,15% dan tahun 2023 mencapai 0,24%. Target tahun 2023 sebesar 0%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,24% disebabkan masih terdapat anak SMP/MTs yang putus sekolah karena faktor ekonomi dan masalah sosial. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah penguatan kapasitas kepala Sekolah SMP/MTs untuk menangani masalah anak putus sekolah.

Angka Kelulusan SD/MI adalah proporsi antara lulusan SD/MI pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SD/MI adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 6) pada jenjang SD/MI yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SD/MI. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pada akhir Jenjang Pendidikan. Capaian Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 100% disebabkan kriteria kelulusan peserta didik SD/MI ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kriteria kelulusan distandarkan agar menjadi indikator mutu lulusan.

Angka Kelulusan SMP/MTs adalah proporsi antara lulusan SMP/MTs pada akhir tahun ajaran terhadap jumlah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs pada awal tahun ajaran, dinyatakan dalam satuan persen. Lulusan SMP/MTs adalah peserta didik tingkat tertinggi (kelas 9) pada jenjang SMP/MTs yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan pada jenjang SMP/MTs. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan. Capaian Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 100% disebabkan kriteria kelulusan peserta didik SMP/MTs ditentukan oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kriteria kelulusan distandarkan agar menjadi indikator mutu lulusan.

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Ukuran yang umum adalah 9m x 8m. Ruang kelas memiliki syarat kelayakan dan standar tertentu, misalnya ukuran, pencahayaan alami, sirkulasi udara, dan persyaratan lainnya yang telah dibakukan oleh pihak berwenang terkait. Capaian Ruang kelas SD/MI kondisi baik Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 48,82% dan tahun 2023 mencapai 97,95%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 97,95% disebabkan ketercukupan anggaran rehabilitasi ruang kelas SD/MI. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil rehabilitasi ruang kelas.

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. Jadi, berdasarkan standar Kemendikbudristek, ukuran ruang kelas minimum SMP/SMA itu $32 \times 2 \text{ m}^2 = 64 \text{ m}^2$ sebagai catatan, di dalam



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Permendiknas ini tidak disebutkan ukuran minimum panjang kali lebar ruang kelas. Capaian Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 30,63% dan tahun 2023 mencapai 97,85%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 97,85% disebabkan ketercukupan anggaran rehabilitasi ruang kelas SMP/MTs. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk peningkatan kualitas hasil rehabilitasi ruang kelas.

Komponen-komponen yang harus dievaluasi (dinilai) dalam akreditasi sekolah meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Capaian Persentase SD Terakreditasi Minimal B Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 74,00% dan tahun 2023 mencapai 96,65%. Target tahun 2023 sebesar 97,51%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,86% disebabkan terbatasnya anggaran untuk memenuhi komponen dalam instrumen akreditasi jenjang SD/MI. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk pemenuhan komponen akreditasi SD/MI.

Akreditasi SMP adalah pengakuan terhadap suatu lembaga Pendidikan setingkat SMP oleh badan yang berwenang. Pengakuan ini diberikan setelah lembaga pendidikan tersebut dinilai memenuhi syarat dan kriteria tertentu. Adapun instrumen akreditasi sekolah disusun mengacu 8 standar tersebut. Meliputi (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan, (5) Standar Sarana & Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. Capaian Persentase SMP Terakreditasi Minimal B Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 56,52% dan tahun 2023 mencapai 84,06%. Target tahun 2023 sebesar 88,24%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 4,18% disebabkan terbatasnya anggaran untuk memenuhi komponen dalam instrumen akreditasi jenjang SMP/MTs. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah diperlukan penambahan anggaran untuk pemenuhan komponen akreditasi SMP/MTs.

Peningkatan kompetensi guru dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui kualifikasi akademik guru, pendidikan dan pelatihan, uji sertifikasi, memberi kesempatan perbaikan pembelajaran. Peningkatan-peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah, peningkatan dalam hal keahlian (skill), sikap (attitude), dan kemampuan (abilities). Peningkatan kemampuan guru merupakan cara untuk meningkatkan standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Capaian Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 88,79% dan tahun 2023 mencapai 90,82%. Target tahun 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sebesar 96,56%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 5,74% disebabkan masih sangat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV terutama guru TK/RA. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kerjasama dengan LPTK/FKIP dari perguruan tinggi pencetak tenaga Guru untuk membuka program Studi Pendidikan jenjang S1/D-IV di Grobogan.

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Pendidik PAUD, harus memiliki kompetensi professional di mana harus menguasai ilmu perkembangan psikologi anak, sesuai tingkat fase perkembangan anak. Juga kompetensi pedagogik yaitu kemampuan menguasai metode pembelajaran dan penguasaan pengelolaan kelas maupun kelompok. Capaian Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 47,38% dan tahun 2023 mencapai 50,41%. Target tahun 2023 sebesar 61,86%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 11,45% disebabkan masih sangat banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah kerjasama dengan LPTK/FKIP dari perguruan tinggi pencetak tenaga Guru untuk membuka program Studi Pendidikan jenjang S1/D-IV di Grobogan.

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Seorang guru harus mampu memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Di samping itu harus terampil dalam menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. Peran-peran tersebut berkaitan dengan empat kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Capaian Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 97,18% dan tahun 2023 mencapai 98,46%. Target tahun 2023 sebesar 94,28%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 4,18%.

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Capaian Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 96,65% dan tahun 2023 mencapai 96,99%. Target tahun 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sebesar 97,38%, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 0,39% disebabkan terdapat beberapa guru mata pelajaran di jenjang SMP/MTS yang sudah senior dengan pendidikan awal D-III namun enggan melanjutkan S1-D-IV. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah menunggu purna tugas dan regenerasi guru yang bersangkutan.

Manajemen berbasis sekolah atau sering disingkat MBS merupakan bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan guru dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 51 Ayat 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), secara otonom sekolah lebih mudah mendesaian proses pembelajaran sesuai dengan kondisi sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Namun demikian, tidak semua sekolah memiliki kemampuan untuk menerapkan MBS dalam peningkatan mutu sekolah. Capaian Persentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 100% disebabkan seluruh sekolah di semua jenjang melaksanakan MBS.

Kompetensi guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari kompetensi profesional oleh sebab itu guru harus mampu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yaitu : 1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal dan silabus yang berlaku. 2. Tidak boleh mengganggu tugas guru 3. Tidak terlalu banyak membuang waktu 4. Konsisten dengan rancangan penelitian. Capaian Rasio ketersediaan PTK yang kompeten Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 88,79 rasio dan tahun 2023 mencapai 90,82 rasio. Target tahun 2023 sebesar 63,26 rasio, selisih antara target dan capaian tahun 2023 sebesar 27,56 rasio disebabkan Platform Merdeka Mengajar membantu meningkatkan kompetensi PTK. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah Platform Merdeka Mengajar perlu dilanjutkan dengan monitoring kinerja yang terukur.

Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Muatan Lokal, dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Capaian Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 100% dan tahun 2023 mencapai 100%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 100% disebabkan seluruh satuan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pendidikan jenjang Pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal bahasa daerah. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah implementasi kurikulum muatan lokal harus tetap dilanjutkan agar budaya lelelur yang adiluhung tidak punah digilas teknologi.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Minimnya capaian warga negara yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar sangat mencerminkan kualitas suatu negara. Beberapa program yang dijalankan Kemendikbud dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah di antaranya melalui Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa di luar negeri (SILN), dan pemberian beasiswa untuk siswa berbakat dan berprestasi. Capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 92,46% dan tahun 2023 mencapai 88,09%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 88,09% disebabkan kesadaran masyarakat usia 7-15 tahun untuk bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia terdebut sebanyak 11,1 %. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan traching anak tidak sekolah umur 7-15 tahun.

Literasi dan numerasi siswa SD di Kabupaten Grobogan secara umum masih rendah, dengan capaian tahun 2024 sebesar 55,64 untuk literasi SD/ sederajat dan 43,29 untuk numerasi SD/ sederajat. Sementara itu literasi SMP/ sederajat sudah cukup tinggi sebesar 67,72, dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 66,46.

Tabel 2.24
Nilai Literasi dan Numerasi Siswa SD/ Sederajat dan SMP/ Sederajat
di Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023	2024
LITERASI SD/ SEDERAJAT	48,19	50,58	63,49	55,64
LITERASI SMP/ SEDERAJAT	59,36	61,56	67,09	67,72
NUMERASI SD/ SEDERAJAT	38,14	40,08	56,63	43,29
NUMERASI SMP/ SEDERAJAT	59,36	61,56	60,78	66,48



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Selain membantu mengembangkan kesadaran sosial, lingkungan, dan politik, pendidikan juga membantu membangun kesadaran tanggung jawab dalam masyarakat. Pendidikan yang baik akan membantu masyarakat dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan individu dan masyarakat. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga membantu dalam pembangunan karakter, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan individu, dan menciptakan masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Setiap warga negara berhak atas Pendidikan yang setinggi-tingginya, dan harus menyelesaikan Pendidikan dasarnya sampai tuntas. Capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 87,64% dan tahun 2023 mencapai 91,50%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 91,50% disebabkan kesadaran masyarakat usia 7-18 tahun yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia terdapat sebanyak 8,5%.

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sangat penting untuk mendukung Pendidikan kesetaraan. Di Kabupaten Grobogan terdapat sebanyak 31 PKBM dengan status akreditasi sebanyak 1 PKBM berakreditasi A, sebanyak 9 PKBM dengan status akreditasi B, sebanyak 5 PKBM dengan status akreditasi C, dan sebanyak 17 PKBM belum terakreditasi.

Tabel 2.25
Status Akreditasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Grobogan

Nama Satuan Pendidikan	Desa	Kecamatan	Akreditasi
1. PKBM PAKIS AJI	Kronggen	Brati	A
2. PKBM AL YAHYA NUSANTARA	Asemrudung	Geyer	Belum terakreditasi
3. PKBM NGUDI ILMU	Werdooyo	Godong	B
4. PKBM PINTAR	Harjowinangun	Godong	B
5. PKBM AN NAAFI	Anggaswangi	Godong	Belum terakreditasi
6. PKBM ARUM SARI	Getasrejo	Grobogan	C
7. PKBM BAKTI INDONESIA	Grobogan	Grobogan	B



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Nama Satuan Pendidikan	Desa	Kecamatan	Akreditasi
8. PKBM BASMALA	Tambakan	Gubug	B
9. PKBM AZ ZAHRA	Kuwaron	Gubug	Belum terakreditasi
10. PKBM RIZQUNA	Gubug	Gubug	Belum terakreditasi
11. PKBM AL MUBAROK	Putatnganten	Karangrayung	C
12. PKBM PAMOR	Mojoagung	Karangrayung	B
13. PKBM HARAPAN SAMBIWAYANG	Karangsono	Karangrayung	Belum terakreditasi
14. PKBM MEKARSARI	Ngombak	Kedungjati	C
15. PKBM ASSALAAM	Jumo	Kedungjati	Belum terakreditasi
16. PKBM BAITUSSALAM	Kradenan	Kradenan	B
17. PKBM PONDOK BACA ASSHOEFFAH	Kradenan	Kradenan	Belum terakreditasi
18. PKBM TARUNA FIRROCHMAN	Grabagan	Kradenan	Belum terakreditasi
19. PKBM MANBAUL ULUM	Bandungsari	Ngaringan	Belum terakreditasi
20. PKBM TRUNOYUDHO	KARANGWADER	Penawangan	C
21. PKBM BINTANG ILMU	Pulutan	Penawangan	B
22. PKBM MIFTAHUL HUDA	Mangunrejo	Pulokulon	B
23. PKBM SENDANG COYO	Pulokulon	Pulokulon	Belum terakreditasi
24. PKBM AL AKBAR	Purwodadi	Purwodadi	Belum terakreditasi
25. PKBM AL FAIZAR ISLAMIC SCHOOL	Purwodadi	Purwodadi	Belum terakreditasi
26. PKBM PANGESTU	Tanggungharjo	Tanggungharjo	C
27. PKBM RADEN BAGUS SONGGOM	Selo	Tawangharjo	Belum terakreditasi
28. PKBM TUNAS HARAPAN	Plosorejo	Tawangharjo	Belum terakreditasi
29. PKBM HABIBIYYAH	Tambakselo	Wirosari	B
30. PKBM DARUSSALAM	Tanjungrejo	Wirosari	Belum terakreditasi
31. PKBM SINAR MENTARI	Tanjungrejo	Wirosari	Belum terakreditasi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Terkait pencapaian SPM bidang pendidikan, capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 92,46% dan tahun 2023 mencapai 88,09%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 88,09% disebabkan kesadaran masyarakat usia 7-15 tahun untuk bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia tersebut sebanyak 11.1 %. Alternatif solusi yang dapat diambil dari permasalahan ini adalah perlu dilakukan tracing anak tidak sekolah umur 7-15 tahun. Capaian Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan Kab. Grobogan tahun 2022 sebesar 87,64% dan tahun 2023 mencapai 91,50%. Capaian tahun 2023 sudah memenuhi target yaitu 91,50% disebabkan kesadaran masyarakat usia 7-18 tahun yang tidak sekolah untuk kembali bersekolah semakin tinggi, walaupun masih terdapat anak tidak sekolah/putus sekolah di usia tersebut sebanyak 8,5%.

Tabel 2.26
Capaian Indikator pada Urusan Pendidikan Kabupaten Grobogan

Indikator	Satuan	CAPAIAN						TARGET
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,67	6,86	6,91	7,11	7,91	7,28	7,00
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,28	12,29	12,30	12,44	12,81	12,46	12,33
APK PAUD Formal (TK/RA) (%)	%	64,88	64,88	85,74	93,97	90,45	66,73	86,9
APS PAUD	%	87,22	104,85	76,48	87,56	90,45	91,91	86,9
Persentase PAUD terakreditasi	%	-	15,64	29,78	28,18	18,06	42,81	0,48
APK SD/MI/Paket A/SDLB	%	107,79	107,79	93,79	90,87	93,55	91,24	97,20
APM SD/MI/Paket A/SDLB	%	91,29	91,29	87,41	84,04	84,86	86,26	90,05
APS SD/MI	%	98,93	69,1	96,46	97,2	91,53	91,84	98,07
APK SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	102,27	102,27	94,11	91,39	91,49	89,48	99,39
APM SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	72,26	72,26	69,85	77,59	75,87	80,18	97,68
APS SMP/MTs	%	88,07	87,79	87,79	88,08	79,92	81,83	88,48
Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI	%	0,013	0,13	0,41	0,004	0,429	0,04	0
Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs	%	0,15	0,15	0,19	0,019	2,154	0,24	0
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indikator	Satuan	CAPAIAN						TARGET 2023
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,23	99,23	100	100	100	100	100
Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	50,93	50,93	28,48	24,57	48,82	97,95	97,95
Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	34,93	34,93	29,69	31,64	30,63	97,85	97,85
Persentase SD Terakreditasi Minimal B	%	91,83	89,8	92,14	97,26	74,00	96,65	97,51
Persentase SMP Terakreditasi Minimal B	%	83,45	82,35	85,29	85,29	56,52	84,06	88,24
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,63	95,63	94,26	86,62	89,79	90,82	96,56
Guru TK/RA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	65,38	65,38	60,3	70,47	47,38	50,41	61,86
Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95,32	95,32	93,49	90,15	97,18	98,46	94,28
Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	96,61	96,61	96,13	86,02	96,65	96,99	97,38
Persentase Sekolah melaksanakan MBS dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	84,85	80,59	86,61	81,56	89,79	90,82	63,26
Persentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100
Indikator SPM								
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	85,10	93,68	96,15	84,08	92,46	88,09	88,09
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	0,40	9,45	87,8	87,98	87,64	91,50	91,50
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	64,88	69,10	104,8	87,56	96,87	91,91	91,91

Urusan pendidikan terdiri dari 4 program dan 9 indikator. Dari semua indikator yang di targetkan pada periode RPJMD tahun 2021-2026, hingga tahun 2023 semua indikator nya memiliki status capaian sangat tinggi. Terlihat dari capaian indikator Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B pada tahun 2023 memiliki persentase capaian sebesar 91,74%. Hal ini dikarenakan adanya Regulasi kinerja Daerah di bidang Pendidikan yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

menetapkan indikator sekolah terakreditasi minimal B, kemudian mendorong upaya mewujudkannya oleh seluruh stakeholder pendidikan seperti Dinas Pendidikan, BBPMP Kemdikbud, dan masyarakat penyelenggara pendidikan swasta. Pada indikator Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan local capaian hingga tahun 2023 sudah 100%, hal ini dikarenakan adanya Regulasi Kemdikbud yang mengatur tentang kurikulum muatan lokal yang merupakan Local wisdom yang perlu diwariskan kepada generasi penerus dan juga Kebijakan implementasi kurikulum merdeka secara massal di satuan pendidikan.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 6 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator memiliki status akan tercapai. Indikator yang mempunyai status akan tercapai yaitu Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B, APS SD/MI Anak Usia 7-12 Tahun dan APS SMP/MTS Anak Usia 13-15 Tahun. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pendidikan

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	100	100	91,53	91,74	100	91,74	ST	91,53		Dinas Pendidikan
	APS Anak Usia 5-6 Tahun	%	86,13	86,51	86,9	90,45	93,15	86,13	107,19	ST	105,02		Dinas Pendidikan
	APS SD/MI Anak Usia 7-12 Tahun	%	97,2	97,63	98,07	91,53	93,43	97,20	95,27	ST	94,17		Dinas Pendidikan
	APS SMP/MTS Anak Usia 13-15 Tahun	%	88,08	88,48	88,88	79,92	88,64	88,08	99,73	ST	90,74		Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pendidikan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	21,38	21,27	21,14	89,79	89,75	21,01	424,55	ST	427,37		Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pendidikan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pendidikan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pendidikan
Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50% Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)													

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada urusan pembangunan kesehatan dibedakan kedalam sub urusan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, sub urusan sumber daya manusia, sub urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Kinerja terkait upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat dapat dilihat dari Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 1,07 per 1000 penduduk melebihi target sebesar 0,087 per 1000 penduduk; dan Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan realisasi sebesar 73,19% belum memenuhi target sebesar 100% pada tahun 2023, dan Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita dengan realisasi sebesar 5,66% belum mencapai target sebesar 5%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kinerja terkait sumber daya manusia Kesehatan terlihat dari Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dengan realisasi tahun 2023 sebesar 93,3% telah mencapai target sebesar 83,3%, Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan terealisasi sebesar 90,45% dari target sebesar 55,25%. Kinerja terkait Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dapat dilihat dari Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan dengan realisasi sebesar 68,33% dari target sebesar 66%; Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin terealisasi sebesar 67,4% dari target sebesar 63%; dan Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terealisasi sebesar 53,82% dari target sebesar 70%. Terkait Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri baru mencapai 22,14% dari target sebesar 38%.

Urusan Kesehatan memiliki 5 program dengan 12 indikator yang di targetkan dalam RPJMD periode tahun 2021-2026. Pencapaian target urusan Kesehatan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat 6 indikator yang sangat tinggi, 3 indikator memiliki status tinggi, 1 indikator memiliki status sedang, 1 indikator memiliki status rendah dan 1 indikator memiliki status sangat rendah. Indikator yang masih perlu di tingkatkan pencapaiannya yaitu Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri dan Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, dapat terlihat bahwa 4 indikator memiliki status capaian telah tercapai, 5 indikator memiliki status capaian akan tercapai dan 3 indikator memiliki status capaian perlu Upaya keras. Indikator yang mmeiliki status capaian perlu Upaya keras yaitu Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri, dan Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntasi Publik. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.28
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,083	0,087	0,087	1,02	1,07	0,09	1.229,89	ST	1.188,89		Dinas Kesehatan
	Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	82,93	100	100	86,54	73,19	100	73,19	S	73,19		
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	6	6	5	4,6	5,66	4	88,34	T	70,67		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	56,6	66,6	83,3	93,3	93,3	100	112,00	ST	93,30		Dinas Kesehatan
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	%	49,4	53,2	55,25	96,6	90,45	80,2	163,71	ST	112,78		
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	62	64	66	64	68,33	72	103,53	ST	94,90		Dinas Kesehatan
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	%	61	62	63	62	67,4	66	106,98	ST	102,12		
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	60	65	70	71,2	53,82	85	76,89	T	63,32		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	28	33	38	16,43	22,14	53	58,26	R	41,77		Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	50	100	50,00	SR	50,00		Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	90	100	90,00	T	90,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%													
 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)  Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)  Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)													

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat kota menjadi tantangan dimasa depan. Perbaikan dan upaya-upaya peningkatan kualitas jalan harus disertai dengan pola penanganan yang terpadu, antara lain dengan memperhatikan saluran dan kondisi drainase di sekitarnya. Konsistensi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang merupakan tantangan pada masa depan. Sistem terpadu tersebut dihadapkan pada kendala penerapan pola dan pengaturan ruang yang sesuai dengan peruntukan. Proses perencanaan ruang kedepan perlu didukung regulasi yang tegas, yang memperhatikan daya dukung lingkungan, sinergitas antar sektor, batasan kemampuan lahan, serta kerawanan terhadap bencana. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

a. Jalan

Program yang sangat dirasakan manfaatnya dan berdampak luas bagi masyarakat adalah pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur jalan. Jalan merupakan prasarana utama dalam perpindahan arus barang maupun jasa termasuk produk unggulan daerah, menghubungkan antar wilayah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian daerah, mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan. Kondisi jalan baik di Tahun 2016 sebesar 48,08 % dan saat ini di Tahun 2023 sebesar 86,46% dari 942 km jalan kewenangan Kabupaten.

Total Panjang jalan Kabupaten berdasarkan SK Bupati Grobogan Nomor 620/294/2023 adalah 942,389 Km, dan terbagi menjadi 286 ruas jalan. Target jalan kondisi mantap didalam RPJMD tahun 2021 – 2026, di Tahun 2026 sebesar 90,17% setara dengan 849,752 Km. Kondisi jalan dalam kondisi mantap pada akhir tahun 2023, sepanjang 803,423 km. Jadi untuk mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2026 adalah menambah kondisi mantap sebesar 4,343% setara dengan Panjang jalan 40,928 Km sehingga kebutuhan anggarannya kurang lebih 40,928 km x 3,5 Milyar rupiah = Rp 143,248 Milyar Rupiah. Dalam mencapai target indikator prosentase panjang jalan kondisi baik dilakukan melalui beberapa strategi meliputi :

- 1) Strategi Penentuan Prioritas Lokasi Pembangunan :
 - Diutamakan untuk jalan akses produksi pertanian, industri lokal;
 - Ruas jalan yang masih dalam kondisi rusak berat, rusak ringan dan atau untuk jalan menuju standar (jalan beton setapak);
 - Akses desa perbatasan (terisolir); dan
 - Mempertimbangkan asas pemerataan pembangunan.
- 2) Strategi Mengatasi Keterbatasan Keuangan, melalui optimalisasi menggali berbagai sumber pembiayaan:
 - DAU;
 - DAK/Instruksi Presiden untuk penanganan jalan Kabupaten maupun jalan Provinsi di Wilayah Kabupaten Grobogan;
 - Bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah;
 - Pihak Ke 3 (Pinjaman Daerah)
 - CSR, dan sumber dana lainnya.
- 3) Strategis Teknis Konstruksi Jalan
 - Untuk penanganan jalan pada kondisi rusak berat (kondisi dimana pondasi jalan belum mantap/stabil) dipakai *KONSTRUKSI BETON BERTULANG*;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- Bagian tertentu utk kondisi tanah dasar cukup baik menggunakan *Aspal/Hot Mix*

Perkembangan kondisi jalan mantap di kabupaten Grobogan pada tahun 2016 – 2023 dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.29
Kondisi Jalan Mantap di Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2023

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Target Kondisi Jalan Mantap (%)	Target Kondisi Jalan Mantap (Km)	Realisasi Jalan Mantap (%)	Realisasi Jalan Mantap (Km)
2016	890.01	46.53	414.12	48.08	427.92
2017	890.01	52.94	471.17	66.06	587.94
2018	917.77	60.01	550.75	72.11	661.80
2019	917.77	67.88	622.98	76.27	699.98
2020	917.77	76.08	698.24	78.91	724.21
2021	917.77	80.45	738.35	79.82	732.56
2022	942.389	85.17	802.63	85.25	803.423
2023	942.389	86.42	814.41	85.827	808.828

Perkembangan kondisi jalan di kabupaten Grobogan pada tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.30
Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023

Tahun	Kondisi								Kondisi mantap = (kondisi	Total Panjang Jalan (km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat			
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%		
2018	427.9	48.08	84.26	9.47	170.18	19.12	207.68	23.33	57.55	890.01
2019	661.81	72.11	42.23	4.6	112.51	12.26	101.22	11.03	76.7	917.77
2020	724.21	78.91	21.29	2.32	60.09	6.55	112.18	12.22	81.2	917.77
2021	536.741	58.48	195.82	21.34	83.144	9.06	102.065	11.12	79.8	917.77
2022	571.70	60.66	231.72	24.59	62.05	6.58	76.92	8.16	85.3	942.39
2023	568.17	60.29	240.66	25.54	49.21	5.22	84.35	8.95	85.8	942.39



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

b. Irigasi dan Sumber Daya Air

Mendasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi maka Daerah irigasi di Kabupaten Grobogan sesuai dengan kewenangan terbagi menjadi 3 yaitu, kewenangan Pusat seluas 30,007 Ha tersebar di 6 (enam) daerah irigasi, kewenangan Provinsi seluas 792 Ha tersebar di satu daerah irigasi serta kewenangan Kabupaten seluas 13,497 Ha yang tersebar di 268 daerah irigasi. Secara rinci rekapitulasi daerah irigasi sesuai dengan kewenangan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar di bawah.

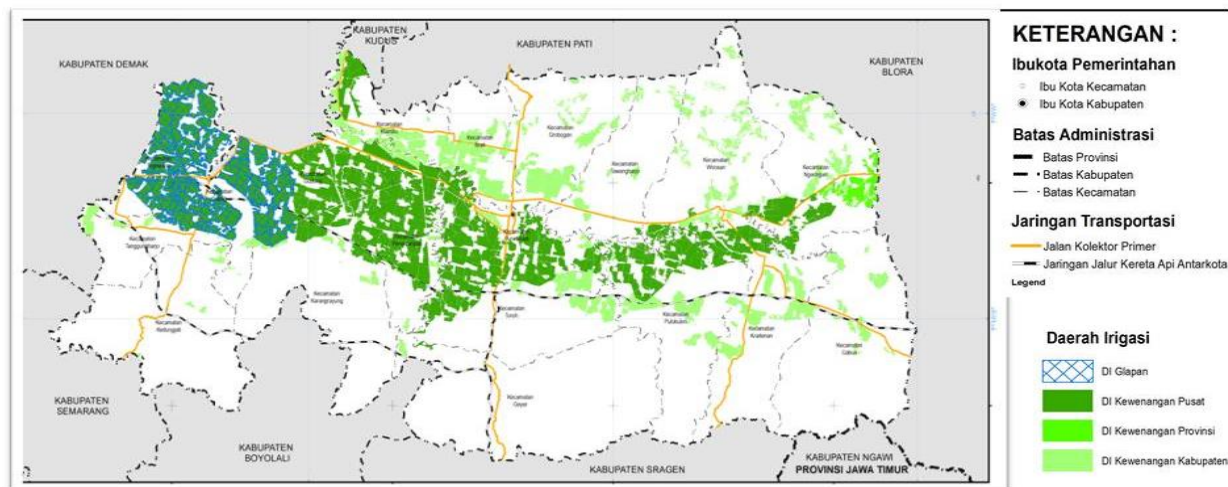
Tabel 2.31
Rekapitulasi Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah Daerah Irigasi	Luas	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	6	30,007	DI Glapan, DI Klambu, DI Sidorejo, DI Sedadi, DI Dumpil
2	Kewenangan Provinsi	1	792	DI Kedungawaru
3	Kewenangan Kabupaten	268	13,497	DI Tirto, DI Nglangon, DI Simo dll
	Total	275	44,296	

Sumber : DPUPR Kabupaten Grobogan, 2023



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 2.31. Peta Daerah Irigasi Kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah di Kabupaten Grobogan

Fungsi jaringan irigasi tahun 2023 sebesar 86,24 % sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 86,3 %. Dalam rangka meningkatkan layanan areal irigasi maka dipilih Daerah Irigasi yang strategis dengan kriteria sumber air cukup dan areal lahan pertanian luas. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan meningkatkan saluran berpasangan agar menekan biaya pemeliharaan dan peningkatan nilai efisiensi air irigasi, dan menurunkan angka kebocoran air sehingga in efisiensi berkurang. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah dengan Pengelolaan Irigasi Sistem Partisipatif (PISP) dengan cara pemberdayaan petani air, penguatan komisi irigasi, Pengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, Pengelolaan sistem irigasi yang berkelanjutan. Adapun sumber pembiayaan untuk pengelolaan irigasi dari sumber dana DAU, DAK, dan Partisipasi Masyarakat. Pengelolaan pengaturan air irigasi meliputi kapan air harus dialirkan, dimanfaatkan atau dibuang, lokasi layanan dan jumlah air yang dialirkan berdasarkan Perbup no. 62 th 2019 tentang Pola Tanam yang mengatur sistem Kedungombo padi – padi - palawija dimulai 1 Oktober, Sistem Glapan dengan pola tanam padi – padi - palawija



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dimulai 1 November dan Sistem Dumpil di bulan Desember, yang nantinya realisasi tanam disesuaikan dengan ketersediaan air.

Persentase wilayah bebas banjir pada tahun 2023 sebesar 90,15 % melebihi tahun 2022 yang hanya sebesar 89,2 %. Langkah yang dilakukan adalah dengan penanganan sungai strategis dalam kondisi kritis yang terdapat longsor tanggul, pendangkalan, DAS yang rusak dan lintasan aliran. Penanganan yang dilakukan adalah dengan perkuatan tebing dan normalisasi sungai. Untuk mengatasi genangan di wilayah perkotaan, DPUPR Kab.Grobogan melakukan pembangunan drainase yang rusak dan pemeliharaan drainase yang mengalami sumbatan sampah atau sedimentasi lumpur. Mengingat pendanaan untuk drainase belum optimal maka untuk mengatasi genangan di wilayah perkotaan juga masih belum optimal.

c. Penataan Ruang

Program Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masih terdapat masyarakat yang belum menaati aturan yang sudah tertuang didalam Perda 12 tahun 2021 tersebut, untuk itu perlu adanya pengendalian Penataan Ruang dengan menertibkan melalui kerjasama dengan beberapa pihak. Selain itu dalam pelaksanaanya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, perlu direview setiap lima (5) tahun sekali untuk menyesuaikan dengan prioritas kebijakan daerah yang lebih penting.

d. Air Minum dan Sanitasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mengamanatkan sub urusan air minum dan sub urusan air limbah domestik di Kabupaten Grobogan diampu oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan sub urusan air minum meliputi Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota. Dalam SPM bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berkaitan dengan air minum diukur melalui indikator Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Air Minum Sehari-hari. Cakupan pelayanan air minum meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 sebesar 87,1% meningkat menjadi 87,1 % di tahun 2023. Peningkatan capaian tersebut didukung dengan berbagai program kegiatan antara lain penyediaan SPAM melalui DAK Air Minum, Program Pamsimas, Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan, Pengembangan jaringan air minum PDAM, penyediaan SPAM dari Dana Desa dan swadaya masyarakat. Walaupun cakupan pelayanan air minum sudah cukup tinggi, tetapi pada bulan-bulan tertentu banyak desa di Kabupaten Grobogan mengalami kekeringan khususnya di musim kemarau, hal ini tercermin dari jumlah desa yang mengajukan permohonan dropping air ke BPBD Kabupaten Grobogan yang mencapai 100 lebih desa setiap tahunnya. Desa yang mengajukan dropping air didominasi oleh desa yang belum mempunyai jaringan perpipaan, diluar Cekungan Air Tanah (CAT), dan tidak memiliki air permukaan/mata air yang mengalir sepanjang tahun. Oleh karena itu, pada tahun 2023 telah dilakukan penggunaan teknologi tepat guna berupa pemanenan air hujan terintegrasi dengan sumur resapan untuk menaikkan level muka air tanah di 5 (lima) desa rawan kekeringan sebagai *pilot project* yang akan dievaluasi efektivitasnya secara periodik .

Capaian layanan air limbah domestik mengalami peningkatan, dari 78,23 % pada tahun 2022 naik menjadi 78,59% di tahun 2023, sehingga masih ada 22,41% masyarakat di Kabupaten Grobogan yang belum memperoleh layanan air limbah domestik yang layak. Peningkatan cakupan air limbah domestik tersebut didukung beberapa program melalui berbagai sumber pendanaan antara lain Hibah Air Limbah Setempat (HALS), DAK Sanitasi, Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Bidang Sanitasi dari dana APBN, Kredit Air dan Sanitasi oleh PD. BPR BKK, bantuan jamban dari CSR maupun swadaya masyarakat.

e. Prasarana Persampahan

Indikator yang memiliki status perlu upaya keras di dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu persentase ketersediaan TPS 3R di kecamatan. Upaya ini harusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mencegah terjadinya masalah persampahan. Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan mengajukan pendanaan Pembangunan TPS 3R melalui Dana Alokasi Khusus ke Pemerintah Pusat, dan juga mengalokasikan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 11 program dan 15 indikator. Pencapaian urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tergolong cukup baik. Terlihat dari realisasi capaian jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat sebanyak 12 indikator memiliki status sangat tinggi, 1 indikator memiliki status rendah dan ada 2 indikator masih belum diketahui realisasi capaian di tahun 2023. Indikator yang memiliki kategori rendah yaitu Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator dengan status capaian telah tercapai, 10 indikator dengan status capaian akan tercapai, dan 1 indikator dengan status capaian perlu upaya keras. Secara lebih rinci capaian indikator program untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	85	85,5	86	86,3	86,24	87,5	100,28	ST	98,56		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	persentase daerah bebas banjir	%	89,16	89,99	90,52	89,2	90,15	97,47	99,59	ST	92,49		
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	85,3	86,2	87,1	86,73	87,1	89,8	100	ST	96,58		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses	%	75,19	76,59	78,09	78,23	78,59	82,29	100	ST	95,07		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	sanitasi (air limbah domestik) layak												
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	64	65	66	65,2	66,28	69	100,42	ST	96,06		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	21	22	37	22	57,89	84	57,89	R	84		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	70	71	75	70	76	85	101,33	ST	89,41		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	0	0	40	100	100	80	250,00	ST	125,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	80,45	85,17	86,42	85,61	85,83	90,17	99,31	ST	95,89		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	71,27	72	73,03	72,5	72,8	75,12	99,69	ST	96,91		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki	%	73	75	78	75	77	85	98,72	ST	90,59		Dinas Pekerjaan Umum dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi												Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	0	33	67	98	98	100	146,27	ST	98,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan Perumahan dan Permukiman memiliki 5 program dengan 9 indikator program. Pencapaian urusan perumahan dan permukiman, jika dibandingkan dengan target tahun 2023, memiliki 6 indikator berstatus sangat tinggi dan 3 indikator berstatus sedang. Indikator yang memiliki status sedang yaitu pada program penunjang urusan pemerintahan daerah di indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko. Penyebab ketercapaian indikator-indikator program sampai dengan tahun 2023, dikarenakan adanya Peran serta masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan rumah layak huni, Banyaknya sumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD daerah seperti APBN, CSR dan sumber-sumber lain; dan juga Komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat, terintegrasinya PSU di Kawasan permukiman secara menyeluruh; Pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang sesuai dengan rencana umum tata ruang kota. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 5 indikator memiliki status telah tercapai, dan 4 indikator memiliki status akan tercapai.

Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum) pada tahun 2023 telah memenuhi target yang dicanangkan Dimana capaiannya sebesar 100%. Pengembang perumahan sebagian besar telah menyerahkan asset PSU kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sehingga pemeliharaan dan pembangunan PSU tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah. Adapun pengembang perumahan yang telah menyerahkan asset sebanyak 36 pengembang dengan rincian sebagai berikut:



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

1	PSU Perumahan Pondok Grobogan Asri	19	PSU Perumahan Griya Semesta
2	PSU Perumahan Ayodya Bersemi 1	20	20.PSU Perumahan Semesta Mulia
3	PSU Perumahan Cahaya Griya Mandiri	21	PSU Perumahan Grand Semesta
4	PSU Perumahan Gubug Permai	22	PSU Perumahan Grand Master
5	PSU Perumahan Petra Griya Indah	23	PSU Perumahan Pesona Gajah Mada
6	PSU Perumahan Ayodya Bersemi 2	24	PSU Perumahan Cahaya Griya Mandiri Putat
7	PSU Perumahan Griya Wijaya Sartika	25	PSU Perumahan Griya Praja Indah
8	PSU Perumahan Permata Hijau Tahap 1 & 2	26	PSU Perumahan Graha Petridian Asri
9	PSU Perumahan Griya Penggung Regency	27	PSU Perumahan Cluster Taman Asteria
10	PSU Perumahan Bumi Kalongan Indah	28	PSU Perumahan MH Tamrin
11	PSU Perumahan Griya Sambak Regency	29	PSU Perumahan Semesta Asri Grabagan
12	PSU Perumahan Kepoh Persada Indah	30	PSU Perumahan Griya Mutiara Purwodadi
13	PSU Perumahan Grobogan Permai	31	PSU Perumahan Grand Mutiara Putat
14	PSU Perumahan Alamanda	32	PSU Perumahan Mekar Wangi Residence
15	PSU Perumahan Widya Sartika Godong	33	PSU Perumahan Kendalisada
16	PSU Perumahan Ganesha Regency	34	PSU Perumahan Griya Gading Asri
17	PSU Perumahan Bumi Kalongan Indah (PEPABRI)	35	PSU Perumahan RSS. Sambak Indah
18	PSU Perumahan Semesta Asri 1 Klambu	36	PSU Perumahan Perumda Purwodadi

Indikator yang memiliki status akan tercapai yaitu kinerja persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani menunjukan perkembangan cenderung meningkat. Persentase penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan mengalami peningkatan dari 26,45 % pada tahun 2021 menjadi 32,80 % pada tahun 2022, tetapi stagnan pada tahun 2023.

Presentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak (Persen) yang bersumber dari data Susenas BPS tahun sebelumnya di Kabupaten Grobogan tahun 2023 baru mencapai sebesar 49,10%. Meskipun penanganan RTLH sudah dikerjakan bersama sama dari tahun ke tahun, tetapi dengan banyaknya jumlah RTLH yang harus ditangani di Kabupaten Grobogan maka cakupan persentase rumah tidak layak huni yang ditangani pada tahun 2023 hanya mampu mencapai angka sebesar 2,25% sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD. Adapun jumlah penanganan RTLH dari tahun 2017 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.33
Penanganan RTLH Kabupaten Grobogan

NO.	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Penerima Th.2017	Jumlah Penerima Th.2018	Jumlah Penerima Th.2019	Jumlah Penerima Th.2020	Jumlah Penerima Th.2021	Jumlah Penerima Th.2022	Jumlah Penerima Th.2023	Jumlah Penerima Th.2024	Jumlah	keterangan	Sumber Dana
1	Bankuepemdes RTLH	168 unit	705 unit	819 unit	453 unit	453 unit	503 unit	241 unit 123 unit 64 unit	341 unit 225 unit	4,095 unit	th 2017 sd 2020 @ Rp 10.000.000,- th 2021-2022 @ Rp. 12 jt th 2023-2024 @ Rp. 20 jt	APBD Propinsi
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)		352 unit	700 unit	758 unit	495 unit	764 unit	80 unit 16 unit 60 unit 29 unit 500 unit	0 unit	3,754 unit	@ Rp 17.500.000,- tahap 5 tahap 6 tahap 7 tahap 14 & 15 PKE	APBN
3	Dana Alokasi Khusus Bid Perumahan Permukiman		177 unit	96 unit	143 unit	63 unit	50 unit			529 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020)	APBN
4	Bantuan Bazzas Jateng	10 unit			19 unit		6 unit	49 unit	0 unit	84 unit	@ Rp 15.000.000,- (2018) @ Rp 17.500.000,- (2019-2020) 20 jt & Ruspin (2022) 15 jt (2023)	Bazzas Prov Jateng
5	CSR Bank Jateng CSR PT. Djarum CSR PT. Pungkook CSR BKK		75 unit				97 unit	50 unit 5 unit 30 unit 2 unit		289 unit	s.d. 2022 @ Rp 15.000.000,- 2024 @ Rp 20jt @ Rp 20jt @ Rp 15.000.000,-	CSR CSR CSR CSR
6	Pembangunan Baru Disperakim Propinsi Jawa Tengah				15 unit					15 unit	@ Rp 35.000.000,-	Disperakim Prop Jateng
7	Program Pengembangan Perumahan									-	@ Rp 15.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
8	APBD Kab. Grobogan						476 unit	420 unit	200 unit	1,096 unit	@ Rp 15.000.000,-	APBD Kabupaten Grobogan
	JUMLAH	178 unit	1,309 unit	1,615 unit	1,388 unit	1,011 unit	1,896 unit	1,669 unit	796 unit	9,862 unit		

Selain itu, indikator kinerja yang belum tercapai adalah persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan dan Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perumahan dan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.34

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perumahan dan Permukiman

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Perumahan dan Kawasan Permukiman													
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	ST	100		
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	0,17	0,21	0,25	20,83	100	100	100	ST	0,38		
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	26,45	31	35,55	32,80	32,80	49,22	92,27	ST	66,64		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	0,93	1,68	2,42	1,97	2,25	4,66	93,09	ST	48,34		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu	
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status		
	sarana dan Utilitas Umum)													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	75,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	75,00			
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	75,00			
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%		S	66% ≤ 75%		R	51% ≤ 65%		SR	≤ 50%	
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)				Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)				

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Kinerja terkait ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dari indikator Persentase cakupan patroli petugas satpol PP sebesar 76% dari target sebesar 76%; Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 83% dari target sebesar 83%; Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) terealisasi sebesar 0,32% dari target 0,32%. Terkait dengan pemadaman kebakaran, Persentase Warga Negara yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebesar 72% dari target sebesar 72%. Terkait pengelolaan bencana, Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebesar 100% dari target sebesar 100%; Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 70%; dan Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terealisasi sebesar 68,33% dari target sebesar 70%.

Penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki 4 program dengan 10 indikator program. Pencapaian urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat jika dibandingkan dengan target tahun 2023 semua indikator memiliki status capaian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Meningkatnya Komitmen Satpol PP kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat. Pada program penanggulangan bencana, indikator semuanya sangat tinggi. Hal ini dikarenakan tersedianya bahan logistik dan koordinasi yang baik antara stakeholder kebencanaan, dan Adanya komunikasi dan sinergitas yang baik antara OPD dan Relawan Kebencanaan di Kabupaten Grobogan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 4 indikator berstatus telah tercapai dan 6 indikator yang akan tercapai. Indikator yang memiliki status akan tercapai yaitu Persentase cakupan patroli petugas satpol PP, Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota, Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Evakuasi Korban Kebakaran dan Persentase penilaian area manajemen resiko, dan Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk lebih jelasnya capaian indikator kinerja program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol pp	%	72	74	76	74	76	82	100	ST	92,68		Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	81	82	83	82	83	86	100	ST	96,51		
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,31	0,31	0,32	0,31	0,32	0,35	100	ST	91,43		
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	70	71	72	84,16	72	75	100	ST	96,00		Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		
	Persentase penilaian area manajemen resiko	level	NA	Level 1	Level 2	Level 2	level 2	Level 3	100	ST	75		
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	70	70	70	100	70	142,86	ST	142,86		Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	60	65	70	65	68,33	75	97,62	ST	91,11		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Keterangan:

ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%	S	66% ≤ 75%	R	51% ≤ 65%	SR	≤ 50%
	Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)			Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)	

6. Urusan Sosial

Kewenangan kabupaten dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang sosial menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ada 6 sub urusan. Sub urusan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. Terkait pemberdayaan sosial, pencapaian Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga sebesar 58,05% dari target sebesar 100%. Terkait Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, pencapaian Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani sebesar 100% dari target 100%. Terkait Rehabilitasi Sosial, kinerja Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sebesar 45,57% dari target sebesar 54%. Terkait perlindungan dan jaminan sosial, Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial realisasi sebesar 26,39% dari target sebesar 26,56%. Terkait Penanganan Bencana, Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Terkait pengelolaan taman makam pahlawan, persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart realisasi sebesar 80% dari target 80%.

Urusan sosial yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan memiliki tujuan meningkatkan kualitas penanganan PMKS, dengan sasaran berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS. Indikator sasaran dari urusan sosial adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pencapaian urusan sosial jika di bandingkan dengan target tahun 2023 termasuk kategori cukup baik, terlihat dari 7



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

indikator yang di targetkan terdapat 4 indikator dengan status capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan status capaian tinggi, 1 indikator dengan status capaian sedang, 1 indikator memiliki status sangat rendah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, 3 indikator dengan status akan tercapai, 2 indikator perlu Upaya keras. Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga dan Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial perlu upaya keras karena terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja indikator. Secara lebih rinci perkembangan dan persentase capaian indikator program urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sosial

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	status	%	Status	
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	86,37	100	100	97,07	58,05	100	58,05	SR	58,05		Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	NA	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	50,28	52	54	51,47	45,57	59	84,38	T	77,23		Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	23,47	23,75	26,56	23,34	26,39	52,10	99,35	ST	50,65		Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	99,18	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Sosial



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	status	%	Status	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	75	78	80	78	80	86	100,00	ST	93,02		Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	75,00		Dinas Sosial
Keterangan:													
ST			T			S		R		SR			
91% ≤ 100%			76% ≤ 90%			66% ≤ 75%		51% ≤ 65%					
Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)						Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)		Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)					

2.4.2 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Ketenagakerjaan

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs. Target dunia yang ingin dicapai yaitu pada tahun 2030 memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Permasalahan ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran terbuka (TPT). Hal ini berarti terdapat kesenjangan antara supply tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2023 sebesar 4,02%.

Kinerja terkait pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja ditunjukkan dengan indikator Persentase lulusan bersertifikat pelatihan 100% dari target 100%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan anggaran dari DBHCT untuk kegiatan pelatihan berbasis kompetensi, sehingga semakin banyak pencari kerja yang mengikuti pelatihan. Kinerja terkait penempatan tenaga kerja ditunjukkan dengan Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten dengan realisasi sebesar 76,34% dari target sebesar 76%. Di Kabupaten Grobogan masih tinggi lulusan SMA/SMK yang belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia industri. Kinerja terkait hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial ditunjukkan dengan Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB dengan realisasi 21,28% dari target sebesar 21,10%. Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB juga masih perlu peningkatan ketercapaian. Hal ini dikarenakan masih rendahnya upah minimum yang diterima oleh tenaga kerja yang ada di Kabupaten Grobogan. Saat ini telah dilakukan pembinaan terkait pengesahan dan pendaftaran PKB serta telah di tambah tenaga fungsional mediator hubungan industrial di lingkup Dinas tenaga kerja dan transmigrasi.

Urusan ketenagakerjaan terdiri dari 5 program dan 7 indikator yang ditargetkan pada RPJMD periode tahun 2021-2026. Pencapaian urusan ketenagakerjaan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023, semuanya berstatus sangat tinggi jika dibandingkan terhadap target tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, semuanya sebanyak 7 indikator pada kategori telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan ketenagakerjaan bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketenagakerjaan

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	67	67	67	100	100	69	144,93	ST	144,93		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	%	75,38	75,5	76	77,2	76,34	76,85	100,45	ST	100,46		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	16,88	18,99	21,10	77,2	21,28	27,43	100,84	ST	281,44		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)



2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengarah pada peningkatan keberdayaan perempuan, peningkatan perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian mengingat hal tersebut juga dijadikan indikator dalam SGD's tujuan ke-5 yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kinerja terkait Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan tergambarkan dari Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 82%. Kinerja terkait Perlindungan Khusus Anak ditunjukkan dengan Persentase kekerasan terhadap anak dengan realisasi 0% dari target 0%. Terkait Perlindungan Perempuan Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan terealisasi sebesar 77,14% dari target sebesar 70%. Terkait Kualitas Keluarga ditunjukkan dengan Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban memiliki realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Terkait Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak ditunjukkan dengan indikator Meningkatnya ketersediaan data pilah gender dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%. Terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA) ditunjukkan dengan indikator Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA dengan capaian Kategori Madya sesuai target pada kategori Madya.

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari 7 program dan 9 indikator. Pencapaian urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak jika dibandingkan dengan target tahun 2023 terdapat 6 indikator dengan status capaian sangat tinggi, 3 indikator dengan status capaian tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 6 indikator dengan status telah tercapai dan 3 indikator dengan status akan tercapai. Meskipun telah mencapai target, namun masih ada beberapa indikator yang mempunyai kendala. Diantaranya pada indikator meningkatnya ketersediaan data pilah gender, meskipun sudah mencapai target namun masih ada beberapa kendala di antaranya yaitu tidak semua Perangkat Daerah memiliki data pilah, dan data pilah belum digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan dan kegiatan. Hal ini telah tercapai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Grobogan Nomor 50 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Terbitnya SK Bupati tentang data pilah.

Secara lebih rinci capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	78	80	82	100	100	84	121,95	ST	119,05		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	NA	0	0	0	0	0	100	ST	100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	60	65	70	76,47	77,14	77	110,20	ST	100,19		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	100,00	ST	100,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Penunjang Urusan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	83,33	100	83,33	T	83,33		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	83,33	100	83,33	T	83,33		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	83,33	100	83,33	T	83,33		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

Keterangan:

ST



91% ≤ 100%

T

76% ≤ 90%

S



66% ≤ 75%

R

51% ≤ 65%

SR

≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)

Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)

Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

3. Urusan Pangan

Urusan pangan memiliki 5 program dan 7 indikator program. Pencapaian urusan pangan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 dan target akhir RPJMD semua indikator nya telah mencapai target yang di tentukan. Diantaranya indikator Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar, sampai dengan tahun 2023 realisasi capaiannya telah lebih dari 100%. Hal ini dikarenakan Pola konsumsi makanan termasuk jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi masyarakat dapat sangat memengaruhi kesesuaian angka kecukupan gizi. Jika masyarakat atau individu memiliki kebiasaan makan yang kurang seimbang atau kurang bervariasi, ini dapat berdampak pada kecukupan gizi energi dan protein. Kebijakan pangan dan pertanian yang diterapkan oleh pemerintah dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi makanan. Kebijakan yang mendukung produksi pangan yang berkualitas tinggi dan terjangkau dapat meningkatkan kesesuaian gizi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD semua indikator berstatus telah mencapai target akhir RPJMD dengan persentase capaian target akhir RPJMD telah mencapai 100% atau lebih.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan. Secara umum ketersediaan pangan baik energi dan protein telah memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten Grobogan. Penanganan daerah rawan pangan dilakukan dengan penyediaan peta kerentanan dan ketahanan pangan atau yang biasa disebut peta FSVA (Food Security And Vulnerability Atlas) di tingkat kecamatan. Selain itu juga Pemerintah kabupaten harus menyediakan serta mengelola cadangan pangan untuk mengantisipasi kondisi rawan pangan di daerah. Selain menjaga ketersediaan dan pengelolaan cadangan pangan, kewenangan lain untuk pemerintah kabupaten adalah pelaksanaan keamanan pangan. Keamanan pangan disini berarti adalah adanya pengawasan terhadap bahan pangan segar yang beredar di masyarakat. Sampai tahun 2023 pemerintah selalu melaksanakan pengawasan peredaran bahan pangan segar di masyarakat.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tergolong baik, sebesar lebih dari 90% pada tahun 2023, namun perlu terus ditingkatkan. Baik ketersediaan energi dan protein perkapita terlihat telah memenuhi standar. Stabilitas harga dan pasokan pangan juga telah terjaga dengan baik. Selain itu, upaya menekan *food loss* dan *food waste* terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Upaya menekan *food loss* antara lain dilakukan dengan peningkatan kualitas proses pra-panen dengan modernisasi alat dan mesin agar menghasilkan mutu yang diinginkan pasar, peningkatan mutu penyimpanan, penanganan, pengemasan melalui lumbung pangan, system resi Gudang maupun modernisasi alat pasca panen. Sedangkan upaya menekan *food waste* dengan kampanye dan edukasi masyarakat yang kontinu melalui keluarga, sekolah, PKK agar mengubah perilaku tidak menghabiskan makanan, makan tidak sesuai dengan porsi makanannya, serta mengurangi gaya hidup (gengsi) menghabiskan makanan di depan orang ramai.

Di Kabupaten Grobogan sudah ada Technopark Pangan yang merupakan UPT dari dinas Ketahanan Pangan Daerah. Technopark pangan merupakan pusat layanan terintegrasi (*one stop service*) yang memberikan pelayanan bagi pelaku usaha pangan lokal di Kabupaten Grobogan. Pelayanannya meliputi tiga aspek yaitu : fasilitasi produksi, fasilitasi *learning center* dan fasilitasi pemasaran. Dalam pelaksanaan inovasi Technopark dilakukan dengan pendekatan 3 pilar yaitu pilar bisnis, pilar sosial dan pilar edukasi. Selain itu, Technopark Pangan Grobogan merupakan pusat penghubung interaksi antara para pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi dan pebisnis) dengan komunitas pelaku usaha ke depan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Technopark Pangan sebagai bagian alur rantai pasok peningkatan produksi dan pemasaran komoditas pertanian juga sangat selaras dengan tujuan Pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, dimana pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih relatif tinggi sebesar 11,72 %. Technopark Pangan merupakan paket lengkap dalam upaya pengentasan kemiskinan karena membantu UMKM dalam mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penguatan daya saing UMKM melalui pemberdayaan UMKM dengan 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) menciptakan iklim yang memungkinkan potensi UMKM berkembang (*Enabling*); (2) menguatkan potensi dan daya yang dimiliki UMKM (*Empowering*); (3) memberikan perlindungan UMKM (*Protecting*).

Pelayanan dan keberpihakan terhadap kepentingan UMKM dengan memberikan fasilitasi gratis terhadap UMKM. Pelayanan dan keberpihakan tersebut berupa 1). Penyediaan peralatan produksi bagi UMKM tanpa dipungut biaya. 2). Pemberian bantuan modal bagi UMKM. 3) Pembelian produk bagi UMKM. Pendekatan sosial kemasyarakatan terutama pemberian bantuan dan subsidi permodalan serta pembelian produk UMKM sangat membantu mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk terutama saat berlangsungnya pandemi covid-19.

Pilar bisnis / ekonomi berupa fasilitasi jaringan pemasaran dengan adanya jaringan SRC (*Sampoerna Retail Community*), jaringan indomaret dan alfamaret, serta toko modern lainnya. Di Technopark sendiri juga disediakan ruang pameran untuk produk UMKM binaan Technopark. Selain berfungsi sebagai ruang pameran, juga berfungsi sebagai toko sehingga masyarakat umum bisa membeli produk UMKM di Technopark. Disediakan Sarana promosi dan penjualan produk melalui aplikasi android dan toko online **PASAR PANGAN**.

Technopark sebagai sarana edukasi bagi masyarakat baik masyarakat yang belum berwirausaha maupun yang sudah berwirausaha. Technopark menyediakan sarana prasarana untuk berbagai macam pelatihan. Mulai dari pelatihan produksi, mutu, perijinan, kelembagaan maupun pemasaran. Masyarakat yang awalnya belum berwirausaha setelah ikut pelatihan di Technopark diharapkan berwirausaha. Masyarakat yang sudah berwirausaha diharapkan mengembangkan usahanya.

Pelayanan *Co-working space* yang dikembangkan di Technopark Pangan yaitu menyediakan sarana /tempat berkumpulnya para pelaku usaha pangan lokal, komunitas dalam satu lokasi dengan dilengkapi sarana akses jaringan internet, layanan informasi potensi pangan grobogan (segar atau olahan), teknologi dan sarana ujicoba untuk mengembangkan potensi Grobogan (khususnya komoditas tanaman pangan) yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. **Ruang co-working space** di Technopark pangan ini juga menjadi kantor bersama untuk sinergi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

ABG-c, dinas ketahanan pangan, investor, pelaku usaha, komunitas untuk bersinergi bagi pengembangan UMKM khusus pangan lokal.

Technopark mengembangkan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang bertumpu pada sumberdaya lokal. Diversifikasi pangan selain beras antara lain Rasteja (Beras Analog dari bahan ketela dan jagung), Mie Sayur (Mie organik yang terbuat dari komposisi sayur - sayuran seperti bayam, daun kelor dan wortel), Tepung Mokaf, aneka olahan kedelai dan aneka produk olahan mie dari tepung mokaf. Tujuan diversifikasi pangan ini adalah meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dan konsumsi pangan tidak hanya bertumpu pada salah satu komoditas saja.

Secara rinci capaian kinerja program urusan ketahanan pangan bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Ketahanan Pangan

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pangan													DKPD
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	NA	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	NA	100	100	102,3	100	100	100	ST	102,30		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	NA	10	10	10	10	10	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	NA	30	30	30	30	30	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%	S	66% ≤ 75%	R	51% ≤ 65%	SR	≤ 50%			
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)			Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)				

4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 3 sub urusan yaitu 1) izin lokasi; 2) sengketa tanah garapan; 3) ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, 4) Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta 5) Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee. Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 sub bidang yaitu: 1) pemberian izin lokasi; 2) penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee; 6) penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) pemberian izin membuka tanah dan 9) perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.

Urusan pertanahan memiliki 3 program dengan 3 indikator pendukung. Pencapaian urusan pertanahan jika dibandingkan dengan tahun 2023 semuanya telah tercapai. Hal ini didukung dengan adanya komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen, adanya Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan, adanya Peraturan perundangan undangan yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

jasal dan juga Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Secara rinci kinerja program RPJMD urusan pertanahan bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pertanahan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	0	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	0	5	16	16	16	58	100,00	ST	27,59		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	NA	14,29	28,57	14,29	28,57	100	100,00	ST	14,29		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)



5. Urusan Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Grobogan selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif.. Capaian nilai IKLH selama 5 tahun terakhir cenderung menurun dari capaian tahun 2018 sebesar 74,29 menjadi 69,34 pada tahun 2022. Sedangkan untuk komponen pembentuk IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL, dapat diketahui bahwa nilai IKA dan IKL cenderung menurun sedangkan IKU cenderung meningkat. Secara detail mengenai perkembangan nilai IKLH dan masing – masing komponennya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.41

Perkembangan Nilai IKLH dan Komponen Pembentuknya Kabupaten Grobogan Tahun 2018 - 2022

NO	INDEKS	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	IKA	78,75	80	79,00	49,38	60,26
2	IKU	85,68	91,2	86,13	87,69	86,56
3	IKL	62,4	69,19	61,26	51,38	53,09
4	IKLH	74,29	79	78,00	65,33	69,34

Sumber : Dokumen IKLH Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Pada tahun 2023 terjadi perubahan perhitungan IKLH dan komponennya berdasarkan S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024. Nilai konversi IKA 2023 sebesar 68,14, Nilai konversi IKU 2023 sebesar 85,19, nilai konversi IKL 2023 sebesar 65,52, dan Nilai konversi IKLH 2023 sebesar 74,47.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks kualitas Lingkungan Hidup cara penghitungan indeks kualitas air menjadi salah satu penyebab fluktuatifnya IKLH di Kabupaten Grobogan antara lain bakteri *ecoli* harus di masukan penghitungan IKA menyebabkan perubahan yang sangat signifikan. Disamping itu, penurunan angka Indeks Tutupan Lahan ini menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan tutupan lahan secara signifikan, dan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, mendasarkan neraca perubahan tutupan lahan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi perubahan lahan dari non permukiman menjadi permukiman sebesar 297,47 Ha. Selain itu, penurunan indeks tutupan lahan juga dipengaruhi adanya penggunaan Kawasan hutan untuk sektor pertanian. Pengelolaan hutan yang belum terpadu dan optimal sehingga mengakibatkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan. Deforestasi dan degradasi kawasan hutan berakibat pada penurunan nilai dan kualitas hutan sehingga mempengaruhi fungsi dan potensi hutan. Program IPHPS dan KHDPK yang telah berjalan lebih ditonjolkan untuk peningkatan produksi pertanian tanaman semusim yang belum mengindahkan aspek konservasi sehingga cenderung memperparah degradasi hutan. Oleh karena itu, program kegiatan pelestarian hutan harus digalakkan kembali melalui reboisasi, reforestasi dan reformulasi manajemen pengelolaan hutan yang lebih baik terutama program KHDPK dan IPHPS dengan mempertimbangkan pengelolaan Perhutani yang berazaskan produksi, kelestarian, dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan sampah di kabupaten Grobogan dapat tergambarkan dari kinerja indikator persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani dan persentase pengurangan persampahan perkotaan yang ditangani. Capaian indikator Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani selama kurun waktu 2021-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 69% pada tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 67 %, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan kinerja dengan capaian sebesar 46%. Faktor yang mempengaruhi fluktuasinya layanan pengangkutan sampah adalah sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang masih belum memadai dimana sarana prasarana yang dimiliki sebanyak 13 truk pengangkut sampah (dump truck dan arm roll), beberapa mobil bak terbuka serta kendaraan roda tiga dengan jumlah total sebanyak 27 armada. Meskipun begitu, masih terdapat kurang lebih 64 % sampah perkotaan yang belum tertangani di Kabupaten Grobogan. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah dengan baseline capaian 2022 baru mencapai sebesar 42,43%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pengangkutan persampahan yang belum optimal ditambah perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena keterbatasan sarana prasarana persampahan yang ada akan menjadi permasalahan yang semakin kompleks apabila tidak segera ditangani, hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya tumpukan sampah liar di pinggir jalan raya dan sungai yang terjadi saat ini. Meskipun demikian, satu hal yang cukup menggembirakan adalah prosentase pengurangan sampah di perkotaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2022 sebesar 46,25 % meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 15 %.

Upaya pengurangan sampah juga didukung adanya sarana prasarana TPS 3R yang sudah berdiri sebanyak 11 unit yang tersebar di 9 kecamatan serta adanya bank sampah sebanyak 287 unit yang tersebar di 19 kecamatan pada tahun 2023. Potensi timbunan sampah di Kabupaten Grobogan per hari kurang lebih sebesar 1.043 ton/hari sedangkan yang dapat dikelola sebesar 81 ton/hari di TPA Ngembak. TPA Ngembak sebagai satu-satunya TPA di Kabupaten Grobogan mempunyai kemampuan menerima sampah semakin terbatas, dimana saat ini kapasitas terpakai sudah mencapai 90%. Menurut perkiraan, apabila tidak ada perubahan pola dan metode dalam pengolahan persampahan di TPA Ngembak, maka pada tahun 2026 Kabupaten Grobogan akan mengalami darurat sampah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan mulai mengambil langkah serius dengan berkomitmen menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah berupa Pembangunan PDU/TPST dan *landfill mining* zona pasif pada TPA Ngembak pada tahun 2025 dan melakukan inisiasi pengolahan sampah menjadi *Refuse Derived Fuel* (RDF). Bahan bakar RDF ini telah banyak digunakan pada sektor industri terutama pada industri semen, industri kertas dan pembangkit listrik, yaitu sebagai bahan bakar pada boiler pembakaran batu bara. Solusi RDF untuk sampah yang tidak bisa didaur ulang relevan dengan adanya PT Semen Grobogan (PT SG) di Tanggunharjo Grobogan. PT SG membutuhkan RDF sebagai co-firing batu bara sebanyak 20% atau sekitar 300 ton/hari.

Cakupan pemantauan kualitas air hanya sebesar 65 pada tahun 2023 jauh dari target yang ditetapkan sebesar 85,71 % , hal ini dikarenakan kurangnya SDM, kompetensi, dan sarana prasarana lab untuk melakukan pemantauan mandiri di badan air lain selain sungai kesongo dan soca mengingat wilayah grobogan sangat luas, dan jumlah badan air seperti sungai tidak sedikit.

Capaian indikator rasio cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2018 sebesar 40 %



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

meningkat menjadi 50 % pada tahun 2022 sedangkan terkait pengelolaan limbah B3, Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3 baru mencapai 37,5%.

Pemerintah Grobogan terus berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca/emisi karbon sebagai upaya penanggulangan perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan global yang perlu ditangani secara bersama. Capaian indikator Pengurangan Emisi GRK di Kabupaten Grobogan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022) cukup baik walaupun cenderung stagnan, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertahan di angka 34 %. Berdasarkan data AKSARA, capaian penurunan emisi GRK Kumulatif sd tahun 2024 (4 April 2024) sebesar 409.61 TonCO₂eq.

Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain dengan kegiatan efisiensi energi dengan penggunaan lampu hemat energi (LED/CFL), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah domestik, limbah ternak dan limbah tahu secara komunal, pengelolaan TPA ramah lingkungan, program Bang Sampah, pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk organik, pemanfaatan pupuk organik di sektor pertanian, pengelolaan limbah tahu komunal, penggunaan varietas padi rendah emisi dan lain sebagainya.

Urusan Lingkungan hidup memiliki 10 program dan 14 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian urusan lingkungan hidup jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat 1 indikator yang memiliki status capaian sangat tinggi, 6 indikator dengan status capaian tinggi, 3 indikator dengan status sedang, 2 indikator dengan status rendah dan 2 indikator dengan status sangat rendah. Indikator yang masih perlu peningkatan realisasinya yaitu Cakupan pemantauan kualitas air, Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola, Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3, Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk, Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten, Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik, dan Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terlihat 7 indikator memiliki sttaus capaian akan tercapai dan 7 indikator memiliki status capaian perlu Upaya keras. Indikator yang masih perlu Upaya keras yaitu Cakupan pemantauan kualitas air, Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola, Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3, Persentase pembentukan kader lingkungan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk, Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten, Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik, Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani. Secara lebih rinci capaian kinerja program RPJMD urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Lingkungan Hidup

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	28,57	71,43	85,71	100	80	100	93,34	ST	80,00		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	57,14	71,43	85,71	71,43	65	100	75,84	S	65,00		Dinas Lingkungan Hidup
	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	75	100	100	100	70	100	70,00	S	70,00		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	7,61	7,61	8,45	100	6,6	10	78,11	T	65,61		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	25	37,5	50	37,5	35	100	70,00	S	35,00		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau	%	62,5	75	75	75	65	75	86,67	T	86,67		Dinas Lingkungan Hidup



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup												
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	0	30	40	30	20	60	50,00	SR	33,33		Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	0	15	20	15	10	35	50,00	SR	28,57		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	0	3	9	3	3	9	33,33	R	33,33		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	%	NA	100	100	100	80	100	80,00	T	80,00		Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	67	69	71	69	46	77	64,79	R	59,74		Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	80	100	80,00	T	80,00		Dinas Lingkungan Hidup



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	80	100	80,00	T	80,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	80	100	80,00	T	80,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)
 Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)
 Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 4 sub urusan meliputi: 1) pendaftaran penduduk; 2) pencatatan sipil; 3) pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan; dan 4) profil kependudukan. Sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan data informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memiliki 5 program dengan 19 indikator program. Pencapaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil jika dibandingkan dengan target tahun 2023, semua indikator yang di targetkan telah mencapai status sangat tinggi. Pada indikator Rasio Perekaman KTP persentase capaian hingga tahun 2023 mencapai 99,06, hal ini dikarenakan adanya program Dalang Perkasa (Datang langsung Perekaman KTP ke Desa) dan rumah penduduk (bagi lansia dan disabilitas). Juga ada perekaman bagi siswa-siswi sekolah yang berusia 16-17 tahun bagi penduduk pemilih pemula 2024 terdapat undangan pemanggilan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

perekaman KTP, membuka tempat pelayanan perekaman di 19 Kecamatan, MPP dan Kantor Dispendukcapil. Sehingga rasio perekaman KTP bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian ada juga kendala yang di hadapi saat perekaman KTP, diantaranya terdapat masyarakat yang berada di luar kota karena merantau atau berada di pondok pesantren di kota lain dan Pada saat dilakukan jemput bola, beberapa siswa siswi di sekolah terdapat yang enggan melakukan perekaman KTP karena belum ada kesadaran mengenai pentingnya perekaman untuk bisa dicetak KTP elektronik pada saat yang bersangkutan berusia 17 tahun.

Pada program pencatatan sipil di indikator rasio kepemilikan akta kelahiran 0-5 tahun jika di bandingkan dengan target tahun 2023 memiliki status capaian sangat tinggi. Peningkatan pencapaian akta kelahiran dilakukan dengan Integrasi pelayanan, dan adanya Inovasi POS PAKDE, Kerjasama dengan berbagai Bidan, Puskesmas, dan RS. Inovasi beramal bisa membantu melakukan percepatan pelayanan, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, aktif melakukan jemput bola (seperti memberikan akta kepada masyarakat yang pasif dengan bekerja sama pihak Perangkat Desa) dan Memperluas lokasi pelayanan akta pencatatan sipil melalui MPP dan Online. Namun demikian kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting manfaat dokumen kependudukan, sehingga masyarakat baru akan mengurus dokumen kependudukan ketika membutuhkan dokumen tersebut.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk indikator presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan jika di bandingkan dengan target tahun 2023 masih belum tercapai, hal ini dikarenakan Jaringan dari Kominfo yang belum sampai kepada lembaga pengguna. OPD juga belum sepenuhnya paham apa itu akses data dan belum memanfaatkannya walaupun sudah mendapatkan ijin akses, tujuan akses dan data balikan terkadang tidak bisa disinkronkan dengan keadaan di Dinas. Namun demikian, kabupaten grobogan juga sudah melakukan Upaya Untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga pengguna. Yaitu dengan dilakukan sosialisasi pemanfaatan data sampai dengan triwulan II tahun 2023. Sudah ada 18 OPD/lembaga yang mendapatkan ijin akses pemanfaatan data dari Kemendagri, dan secara aktif melakukan pemanfaatan data tersebut.

Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terdapat 11 indikator dengan status capaian telah tercapai dan 8 indikator dengan status akan tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP	%	107,89	100	100	98,03	99,06	100	99,06	ST	99,06		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan KTP	%	98,36	99	99	97,32	98,45	99	99,44	ST	99,44		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,51	99,65	99,7	100	99,93	100	100,23	ST	99,94		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan KIA	%	72,14	80	85	80,54	81,55	95	95,94	ST	85,84		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99,09	99	99	99,43	99,57	99	100,58	ST	100,58		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	41,29	42	42,5	45,44	46,25	44	108,82	ST	105,11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	94,72	95	96	97,71	97,96	99	102,05	ST	98,95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	94,72	95	96	97,71	97,96	99	102,05	ST	98,95		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	100	0	0	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	100	0	0	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	90,00	100	90,00	ST	90,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase database yang valid dan update	%	97,7	98	98,25	98,26	100	99	101,78	ST	101,01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1	1	1	1	1	1	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	76,35	100	76,35	T	76,35		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%													



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Target Akhir RPJMD Telah
Tercapai ($X > 100\%$)



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai
($99\% \leq X < 66\%$)



Target Akhir RPJMD Perlu
Upaya Keras ($X \leq 65\%$)

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Kabupaten terbagi menjadi 4 sub urusan, yaitu: 1) Penataan Desa, dengan kewenangan penyelenggaraan penataan Desa. 2) Kerja Sama Desa, dengan kewenangan Fasilitas kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 3) Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kewenangan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa. 4) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kewenangan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota; dan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Kinerja terkait Penataan Desa ditunjukkan dengan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik dengan realisasi sebesar 48,35% dari target 48,35%. Terkait Kerjasama Desa kinerja ditunjukkan dengan indikator Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi dengan realisasi sebesar 66,67% dari target sebesar 66,67%. Terkait Administrasi Pemerintahan Desa ditunjukkan dengan Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik dengan realisasi 75% dari target 100%. Terkait Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu terealisasi 100% dari target 100%. Terkait Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat ditunjukkan dengan indikator Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dengan realisasi level Tinggi dari target Level Tinggi; dan Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha 5,86% dari target sebesar 5,49%.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa memiliki 5 program utama dan 9 indikator. Pencapaian indikator urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat 6 indikator yang memiliki status sangat tinggi, 2 indikator dengan status sedang, dan 1 indikator belum diketahui capaiannya. Indikator yang memiliki status capaian sedang yaitu Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik dan Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 8 indikator dengan status telah tercapai dan 1 indikator dengan status akan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

tercapai. Indikator yang memiliki status akan tercapai yaitu Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	41,03	44,69	48,35	44,69	48,35	59	100	ST	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	44,44	55,56	66,67	55,56	66,67	100	100	ST	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	N/A	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100	ST	100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	1,83	3,66	5,49	1,83	5,86	11	106,65	ST	100		
Program Penunjang Urusan	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Dinas Pemberdayaan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	75	100	75,00	S	75		Masyarakat dan Desa
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%		S	66% ≤ 75%		R	51% ≤ 65%		SR	≤ 50%
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)				Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)			

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana memiliki 3 sub urusan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana. Kinerja terkait Pengendalian Penduduk ditunjukkan dengan angka kelahiran sebesar 5,02% dari target 24%. Terkait Keluarga Berencana (KB) ditunjukkan dengan Cakupan peserta KB Aktif dengan realisasi 77,07% dari target 78%. Terkait Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ditunjukkan dengan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS dengan realisasi 76,00% dari target 89%.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana memiliki 3 program dan 3 indikator. Pencapaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jika dibandingkan dengan target tahun 2023, sebanyak 2 indikator yang di targetkan mempunyai status capaian sangat tinggi, dan 1 indikator belum diketahui capaiannya. Program yang di targetkan di RPJMD tahun 2021-2026 yaitu Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 1 indikator dengan status capain telah tercapai dan 2 indikator



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dengan status capaian akan tercapai. Indikator yang akan tercapai yaitu Cakupan peserta KB Aktif dan Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS. Pada indikator Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS masih on the track dikarenakan adanya keinginan pasangan untuk segera memilki anak, Usia Anggota UPPKS yang lebih dari 45 tahun sudah tidak berminat untuk ber-KB (Unmet Need), dan Anggota UPPKS sedang kondisi hamil. Namun demikian Kabupaten Grobogan telah melakukan penyuluhan KIE tentang KB Pasca Persalinan. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Program Daerah Kabupaten Grobogan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023	%	Status	%	Status		
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	29	26	24	5,02		21,0			176,10		DP3AKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	77	77,5	78	77,06	77,07	79,5	98,80	ST	96,94		DP3AKB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	87	88	89	88,07	76,00	90,5	85,39	ST	83,98		DP3AKB
Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%													
 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)  Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)  Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)													

9. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 1 sub urusan yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan sebagai berikut:

- Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota.
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.
- d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota.
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota.
- h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota.
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota.
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.
- m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.
- p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja indikator urusan perhubungan di Kabupaten Grobogan didapatkan hasil dan penjelasan sebagai berikut :

- a. Indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan mencapai 70,85%, telah memenuhi target kinerja RPJMD.
- b. Indikator Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik mencapai 104,79%, telah memenuhi target tahun 2023 dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Indikator lain seperti Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, dan Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko juga telah memenuhi target.

Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perhubungan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	65	68	70	69,76	70,85	75	101,21	ST	93,01		Dinas Perhubungan
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	90	94	95	96,81	104,79	100	110,30	ST	96,81		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Perhubungan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Saat ini Kabupaten Grobogan terdapat 5 (lima) terminal Tipe C yang dikelola yaitu :

- a. Terminal Gubug,
- b. Terminal Godong,
- c. Terminal Angkotdes,
- d. Terminal Wirosari dan
- e. Terminal Sulursari.

Kondisi semua terminal tersebut dalam kondisi baik meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C. Kedepannya akan dilakukan kajian dan evaluasi terhadap pelayanan penyelenggaraan terminal tipe C, rata-rata prosentase pemenuhan standart pelayanan penyelenggaraan terminal Tipe C dan penyusunan SK Bupati penetapan Terminal Tipe C yang disusun pada tahun 2022. Selain terminal Tipe C, di Kabupaten Grobogan juga terhadap beberapa halte yang berlokasi :

- a. Jl. Solo Purwodadi No. 3 Simpang Utara dengan kondisi halte rusak berat.
- b. Jl. Diponegro No. 32 Sambak Dnyak dengan kondisi halte kurang baik.
- c. Jl. Semarang-Purwodadi No. 9 Perumda dengan kondisi halte kurang baik.
- d. Jl. Semarang-Purwodadi Km. 35 dengan kondisi halte kurang baik.
- e. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.
- f. Jl. Gubug-Purwodadi dengan kondisi halte baik.

Adapun trayek angkutan perkotaan saat ini adalah sebanyak 15 (lima belas) rute trayek sedangkan angkutan perdesaan sebanyak 10 (sepuluh) rute trayek. Data trayek angkutan perkotaan an perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47
Data Rute Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Grobogan.

No	Trayek	Rute Trayek
1	Jalur 1	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Sulursari – Kuwu – Wirosari – Purwodadi
2	Jalur 2	Purwodadi – Pulokulon – Kuwu – Kradenan – Sulursari – Kuwu – Sulursari – Kuwu – Wirosari – Purwodadi
3	Jalur 3	Purwodadi – Godong – Karangrayung – Godong – Purwodadi
4	Jalur 4	Purwodadi – Godong – Gubug – Kedungjati – Gubug – Godong – Purwodadi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Trayek	Rute Trayek
5	Jalur 5	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Tegal Rejo – Wirosari – Purwodadi – Klambu
6	Jalur 6	Klambu- Purwodadi- Wirosari – Ngaringan – Wirosari – Purwodadi – Klambu
7	Jalur 7	Purwodadi – Godong – Juwangi – Godong – Purwodadi
8	Jalur 8	Purwodadi – Gundih – Ledokdawan – Sobo - Bancar – Karangsono – Bancar – Sobo – Ledokdawan – Gundih – Purwodadi
9	Jalur 9	Purwodadi – Wirosari – Kuwu – Crewek – Simo – Bago – Simo – Crewek - Kuwu – Wirosari – Purwodadi
10	Jalur 10	Purwodadi – Gundih –Monggot – Kedung Ombo – Gundih – Monggot – Purwodadi
11	Jalur 11	Sindurejo – Genengadal – Dimoro – Genengadal – Sindurejo
12	Jalur 12	Purwodadi – Wirosari – Ngaringan – Ngarap arap – Kalangdosari – Banjarejo – Karangrejo – Bendoharjo – Tahunan – Sulursari
13	Jalur 13	Purwodadi – Penawangan – Sedadi – Karangrayung
14	Jalur 14	Terminal Godong – Karanganyar – Kemloko – Mangean – Anggaswangi – Truko – Ketangirejo – Sambung – Bangkle – Jrapah – Latak – Jeketro – Saban – Mlilir – Kemiri -Pilangwetan – Terminal Gubug
15	Jalur 15	Terminal Gubug – Kwaron – Kapung – Mrisi – Kaliwenang – Sugihmanik – Kebonagung – Tlogorejo – Pasar Tegowanu
16	Jalur A	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. S. Parman – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. DR. Sutomo – Simpang Lima – Jl. Diponegoro – Danyang – Toroh (pasar) – Danyang – Jl. Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
17	Jalur B	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Nglejok – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl Jend Sudirman – Getasrejo – Temon – Grobogan (pasar) – Temon – Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl S Parman – Jl A Yani – Nglejok – Jl Gajah Mada – Terminal Bis
18	Jalur C	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Simpang Lima – Jl. R Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Riyadi – Getasrejo – Jono (pasar) –Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Siswomiharjo – Jl Pemuda – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima - Gajahmada – Terminal Bis
19	Jalur D	Terminal Bis – Jl. Gajah Mada – Simpang Lima – Jl. R Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Riyadi – Getasrejo – Jl. Jend Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Siswomiharjo – Jl Pemuda – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima - Gajahmada – Terminal Bis
20	Jalur E	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. DR. Sutomo – Simpang Lima – Jl. Diponegoro – Danyang – Candisari – Pengkol – Sedadi – Lajer – Sedadi – Pengkol – Candisari – Danyang – Jl. Diponegoro - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
21	Jalur F	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl. Tentara Pelajar – Kalongan – Ngraji – Boloh – Ngraji – Kalongan – Jl Tentara Pelajar – Jl DR Sutomo - - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Trayek	Rute Trayek
22	Jalur G	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Penawangan – Godong (Pasar) – Penawangan - Jl. A Yani – Terminal Pasar
23	Jalur H	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT Haryono – Jl. S Parman – Jl D.I Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl Diponegoro – Danyang – Gendingan – Tambirejo – Boloh – Tunggak – Kenteng – Tunggak – Boloh – Tambirejo – Gendingan - Danyang – Jl Diponegoro – Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
24	Jalur I	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. Suhada – Jl Bhayangkara – Jl. D.I Panjaitan – Jl Glugu – Kedungrejo – Karanganyar – Kandangan – Karanganyar – Kedungrejo – Jl Glugu – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo - Simpang Lima – Jl. R. Suprpto – Jl. A Yani – Terminal Pasar
25	Jalur J	Terminal Pasar – Jl. Katamso – Jl. MT. Haryono – Jl. Slamet Riyadi – Getasrejo – Temon – Grobogan – Putatsari – Lebak – Lebengjumuk – Lebak – Putatsari – Grobogan – Temon – Getasrejo – Jl Jendral Sudirman – Jl Bhayangkara – Jl DI Panjaitan – Jl Hayam Wuruk – Jl DR Sutomo – Simpang Lima – Jl. Gajah Mada – Jl. Untung Suropati – Jl. A Yani – Terminal Pasar

Kualitas sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor saat ini dalam kondisi baik dan memenuhi standar dari Kementerian Perhubungan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Sertifikat dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor KP.423/AJ.502/DRJD/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan terakreditasi dengan klasifikasi **“Akreditasi B”** dan nilai klasifikasi tersebut akan berakhir pada 08 Februari 2023. Adapun bentuk sertifikatnya adalah sebagai berikut :





RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Gambar 2.6. Sertifikat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan yang sudah dimiliki dan telah dilakukan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan antara lain sebagai berikut :

- a. Alat Uji Emisi CO/HC (*Gas Analyzer*)
- b. Alat Uji Ketebalan Asap (*Smoke Tester*)
- c. Alat Uji Penunjuk Kecepatan (*Speed Tester*)
- d. Alat Uji Kebisingan Klakson (*Sound Level Meter*)
- e. Alat Uji Rem (*Brake Tester*)
- f. Alat Uji Lampu (*Head Light Tester*)
- g. Alat Uji Kincup Roda Depan (*Side Slip Tester*)
- h. Alat Uji Kedalaman Alur Ban
- i. Alat Pengukur Berat Kendaraan (*Axle Load Meter*)
- j. Alat Pengukur Dimensi
- k. Alat Uji Daya Tembus Cahaya Kaca (*Tint Tester*)

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kabupaten Grobogan tahun 2022 memiliki data Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 8.102 kendaraan dan kendaraan yang sudah dilakukan uji sebanyak 8.826 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.48
Daftar Kendaran Yang di Uji

Tahun	KBWU	Kendaraan Uji			
		Barang	Penumpang	Jumlah	Persentase
2016	3.237	1.564	741	2.305	71,21%
2017	2.643	1.680	712	2.392	90,50%
2018	3.174	920	643	1.563	49,24%
2019	3.738	548	710	1.258	33,65%
2020	2.166	104	490	594	27,42%
Jumlah	14.958	4.816	3.296	8.112	54,23%



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sumber: Dinas Perhubungan

Persentase kendaraan antara kendaraan yang diuji dengan KBWU setiap tahun mengalami penurunan, hal tersebut karena beberapa faktor antara lain kendaraan yang dijual dan dilakukan balik nama di daerah lain, kendaraan berada diluar kota dan dilakukan numpang uji di daerah lain, kendaraan dalam perbaikan, dan lain sebagainya.

Kondisi perkelengkapan jalan yang dimiliki sudah cukup baik, meskipun belum sepenuhnya terealisasi semuanya, akan tetapi setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan pemasangan perlengkapan jalan baru. Adapun data perlengkapan jalan yang dikelola sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Warning Light : 82 buah
- b. Traffic Light : 9 buah
- c. Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan : 91 buah
- d. Marka Jalan : 800 m²
- e. Marka Zona Selamat Sekolah (ZoSS) : 8 lokasi
- f. Traffic Light Portabel : 2 buah
- g. Cermin Tikungan : 19 buah
- h. Pita Kejut : 15 titik
- i. Alat Penerangan Jalan (APJ) : 2.022 Titik.

Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 dan 2022 mengalami beberapa insiden kecelakaan lalu lintas. Adapun data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49
Daftar Kecelakaan Lalu Lintas

Tahun	Kejadian	Korban		
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan
2021	564	140	0	547
2022	866	156	0	902

Sumber : Data Satlantas Polres Grobogan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tingkat kecelakaan yang melibatkan angkutan umum terjadi secara fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2020 terdapat penurunan yang signifikan. Upaya-upaya terus dilakukan dalam menekan angka kecelakaan yaitu dengan cara pemberian penyuluhan kepada awak angkutan, perusahaan angkutan, pelajar maupun masyarakat lainnya. Tahun 2023 telah dilakukan perhitungan kinerja lalu lintas dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.50
Perhitungan Kinerja Lalu Lintas Tahun 2023

No	Nama Jalan	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
	KORDON DALAM		
1	Jl. R. Suprpto	0.20	A
2	Jl. A. Yani	0.20	A
3	Jl. Diponegoro	0.23	B
4	Jl. Gajahmada	0.18	A
5	Jl. MT. Haryono	0.24	B
6	Jl. S. Parman	0.20	A
7	Jl. Sudirman	0.29	B
8	Jl. DI. Panjaitan	0.26	B
9	Jl. Hayam Wuruk	0.35	B
10	Jl. Dr. Sutomo	0.41	B
11	Jl. Siswomiharjo	0.09	A
12	Jl. Raya Danyang-Kuwu	0.44	B
13	Jl. Raya Danyang-Pengkol	0.10	A
14	Jl. Penawangan-Truko	0.08	A
15	Jl. Truko-Jeketro	0.22	B
16	Jl. Brigjen Katamso	0.06	A
17	Jl. Suhada	0.16	A
18	Jl. Bhayangkara	0.26	B
19	Jl. Raya Inspeksi Irigasi Bendung Klambu	0.15	A
20	Jl. Untung Suropati	0.46	C
21	Jl. MH. Thamrin	0.26	B



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Jalan	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
22	Jl. Godong – Purwodadi	0.50	C
23	Jl. Purwodadi – Wirosari	0.54	C
	KORDON LUAR		
1	Jl. Gubug - Kapung - Kedungjati (Bts Godong-Demak)	0.27	B
2	Jl. Godong – Karangrayung	0.25	B
3	Jl. Kuwu - Simo (Bts Kradenan - Sragen)	0.23	B
4	Jl. Purwodadi - Geyer (Bts Geyer - Sragen)	0.28	B
5	Jl. Brati - Klambu III (Bts Klambu - Kudus)	0.23	B
6	Jl. Purwodadi - Grobogan (Bts Grobogan - Pati)	0.42	B
7	Jl. Kuwu - Sulursari (Bts Gabus - Blora)	0.42	B
8	Jl. Wirosari - Ngaringan (Bts Ngaringan - Blora)	0.30	B
Nilai Jumlah		8.28	
Nilai Rata-Rata		0.27	
Nilai Modus			B
Kategori Tingkat Pelayanan			B

Sumber: Dinas Perhubungan

Hasil perhitungan kinerja lalu lintas pada tahun 2022 menunjukkan bahwa rata-rata ruas jalan di Kabupaten Grobogan mempunyai nilai V/C rasio sebesar 0.27 sehingga pada kategori tangka pelayanan jalan dengan nilai B atau dengan karakteristik lalu lintas yaitu arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Pengelolaan titik parkir yang mempunyai izin dari Dinas Perhubungan berjumlah 155 titik parkir yaitu dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.51
Data Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Titik Lokasi	Lokasi
1	Dp. Sate Pak Min	Jl. R. Soeprapto
2	Dp. Warung Dhuwur	
3	Dp. Apotik Husada	
4	Dp. Istana Tas	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Titik Lokasi	Lokasi
5	Dp. Tk. Ledok	
6	Dp. Tk. Dua – Dua	
7	Dp. FIF	
8	Dp. LP s.d moel salon	
9	Dp. Pasar Glendoh	
10	Dp. Bakso manteb/Danamon	
11	Dp. Luwes	
12	Dp. Sinar Alam	
13	Bank Mandiri	
14	Dp. SMA N 1 Purwodadi	
15	Dp. Dapur emak	
16	Dp. RM. Muhamadiyah	
17	Dp. Surya Laksana	
18	Laksana Motor	
19	Dp. Telkom	
20	Dp. Dr. Joko	
21	Dp. BNI	
22	Dp. Noroyono	
23	Belakang Masjid simpang 5	
24	Depan Toko Terang	
25	Dp. Apotik s.d Pos Polisi	Jl. A. Yani Barat
26	Dp. BRI Teras	
27	Dp. Putra Hasta- Toko 99	
28	Dp. Sae Elektronik	
29	Dp.RM. Lastri	
30	Dp. Kios Buah Evo	
31	Dp. Terminal Listrik	
32	Dp. Vivi s.d Pos Polisi	
33	Dp. Kios Buah Timur	
34	Dp. Kios Buah Tengah	
35	Pos Polisi/ kencana	Jl. A. Yani Timur



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Titik Lokasi	Lokasi
36	Dp. Tk. Margo Mulyo	
37	Dp. Tk. Viva	
38	Dp. Tk. Megaria	
39	Dp. Tk. Merdeka	
40	Dp. Tk. Citra	
41	Dp. Tk. Jakarta	
42	Dp. Baru Motor	
43	Dp. Toko Gubug	
44	Dp. Tk. Jamu jago	
45	Dp. RM. Kodri	Jl. A. Yani Timur - Nglejok
46	Dp. Pasar Nglejok	
47	Dp. Tk. Mainan Makmur Jaya	
48	Dp. Uyus Kichen	
49	Dp. Bank BCA	Jl. MT. Haryono
50	Dp. Depan Dewi	
51	Dp. Buana	
52	Dp. Dr. Yolanda	
53	Santana	
54	Dp.Tk. Marsudi	
55	Dp. Tk Roti Santana	
56	Apotik Tasnim	
57	JNE dan Yuslin Cell	Jl. S. Parman
58	Dp. Bank Jateng	
59	Dp. Kencana	
60	Dp. PLN	
61	Depan Prodi	Jl. Raya Getas
62	Depan Toko Cahaya	
63	Dp. Apotik Asa	Jl. Sudirman
64	Dp. Kantor Pos	
65	Dp. KPU	
66	Dp.RM Larasati	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Titik Lokasi	Lokasi
67	Alon2 Sebelah Barat	
68	Alon2 Sebelah Selatan	Jl. Gatot Subroto
69	Alon2 Sebelah Timur	Jl. KS. Tubun
70	Alon2 Sebelah Utara	Jl. Bhayangkara
71	Dp. Bakmi jowo	
72	Dp. STMJ	
73	Dp. RM. 45	
74	Dp. Penyet Surabaya	
75	Segitiga emas	
76	Dp. Rocet Chiken	
77	Dp. Bakso menanti	
78	Dp. Soto Bagong	Jl. Kartini
79	Dp. Apotik Waras	
80	Depan Tk. Wijaya	Jl. Siswomiharjo
81	Depan Bakso Pak Gito	
82	Depan Jambari	
83	Dp. Wr. Noroyono	Jl. Gajah Mada
84	Depan Wr. Berkah	Jl. Kapten Tendean
85	Dp. Toko Kosmetik	
86	Dp. RS. Yakum Barat	
87	Barat Psr. Gubug - 1	Lingkungan Pasar Gubug
88	Barat Psr. Gubug - 1a	
89	Barat Psr. Gubug - 2	
90	Barat Psr. Gubug - 3	
91	Barat Psr. Gubug - 4	
92	Barat Psr. Gubug - 5	
93	Barat Psr. Gubug - 6	
94	Timur Psr.Gubug - 2	
95	Timur Psr.Gubug - 3	
96	Timur Psr.Gubug - 4	
97	Timur Psr.Gubug - 5	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Titik Lokasi	Lokasi
98	Timur Psr.Gubug - 6a	
99	Timur Psr.Gubug - 6b	
100	Dp. Toko Mas (MT. Haryono)	Kecamatan Gubug
101	Dp. SD 7 Gubug	
102	Dp. RM. Prasmanan	
103	Dp. Bakso Malvis	
104	Dp. Toko Rajawali	
105	Dp. RM. Bu Pangat	
106	Dp. Toko Rahayu	
107	Dp. Pasar Godong	Kecamatan Godong
108	Dp. RM. Lumayaan	
109	Belakang Pasar Godong	
110	Dp. Bakso Dewa	
111	Depan Pasar Buah Godong	
112	Jl. Suro Jenggolo,(Depan Bakso)	Kecamatan Kradenan
113	Jl. Raya Kuwu (Dp. Pasar Kuwu)	
114	Jl. Suro Jenggolo,(timur)	
115	Depan Pasar Kradenan	
116	Tikungan Rodikun Kuwu	
117	Jl. Surojenggolo (Dp Psr Kuwu)	
118	Jl. Raya kuwu (Dp halte bus)	
119	Jl. Raya kuwu (Dp Tk mari kuwu)	
120	Depan MTS Kuwu	
121	Depan Pasar kuwu	
122	Depan Stasiun lama	
123	Jl. Gajah Mada	Kecamatan Wirosari
124	Jl Diponegoro Wirosari	
125	Dp. Masjid, Wirosari	
126	dp RM Noroyono, Wirosari	
127	dp RM Mbah Nggolo, Wirosari	
128	Jl Kusuma Bangsa Wirosari	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Titik Lokasi	Lokasi
129	depan Indomart Wirosari	
130	dp Alfamart Wirosari	
131	Dp. Kantor Pos	
132	Dp SPBU Kunden, Wirosari	
133	Jl. Tamprin (Dp Mie Kopyok)	Jl. Thamrin
134	Jl. Tamprin (Dp Es Gianyar)	
135	Jl. Tamprin (Dp Mie Too)	
136	Jl. Tamrin	
137	Dp Soto Sodara)	Jl. Dr. Sutomo
138	Dp. Sido Mampir	
139	Dp Rocket Chicken	
140	Soto Ayam Jowo - Kremes	
141	Dp dr. Gigi	
142	Dp. Soto Ganesa	Jl. Hayam Wuruk
143	Dp. Permata Bunda	
144	Dp. Dr. Undang	
145	Dp. Sosis	
146	Depan Muhajir	Jl. DI. Panjaitan
147	Dp.Wm. Wulan	Kecamatan Toroh
148	Dp. WM. Mb. Puk	Jl. Katamso
149	Dp. Dokter Jatmiko	
150	Dp. Toko Jadi Mulyo	
151	Swike (Cik Ping)	Jl. Sugiyono
152	Dp. Pasar Sulur	Kecamatan Sulursari
153	Kedungjati	Kecamatan Kedungjati
154	Karangrayung	Kecamatan Karangrayung
155	Indomart Tawangharjo	Kecamatan Tawangharjo



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pengelolaan sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Aplikasi Informatika. Penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah 2,70. Terkait Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik ditunjukkan dengan persentase Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi dengan realisasi 98% dari target 96%. Terkait Pengelolaan Aplikasi Informatika ditunjukkan dengan persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan realisasi 100% dari target 100%.

Urusan komunikasi dan informatika memiliki 3 program dan 5 indikator dalam RPJMD. Pencapaian urusan komunikasi dan informatika jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sudah cukup baik. Terlihat dari 5 indikator yang ditargetkan sebanyak 5 indikator memiliki capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, semuanya sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Komunikasi dan Informatika

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengelolaan	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	94	95	96	100	98	99	101,02	ST	100		Dinas Komunikasi dan Informasi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Informasi Dan Komunikasi Publik													
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Komunikasi dan Informasi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan kinerja program koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri dari 7 program dan 9 indikator. Pencapaian urusan koperasi, usaha kecil dan menengah jika dibandingkan dengan target tahun 2023 terdapat 7 indikator yang memiliki capaian sangat tinggi, 1 indikator dengan status capaian tinggi dan 1 indikator dengan status capaian sangat rendah. Faktor pendorong ketercapaian beberapa indikator yang ada di urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu dilaksanakan pembinaan dan pendampingan di gerakan koperasi, Dilaksanakan penillaian kesehatan KSP/USP serta pendampingan di gerakan koperasi, dilakukan pendidikan serta pelatihan di gerakan koperasi, dan dilaksanakan pembinaan dan pendampingan di gerakan koperasi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 2 indikator dengan status capaian telah tercapai, 6 indikator dengan status capaian akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.

Ada satu indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro. Pada indikator ini realisasi tahun 2023 sebesar 0 (nol) karena pada program ini tidak ada anggaran untuk mendukungnya. Salah satu sub kegiatannya adalah fasilitasi perijinan bagi UMKM. Meskipun demikian pada program ini tetap ada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perijinan bagi UMKM. Kesadaran UMKM untuk berijin dan mengurus perijinan untuk usaha mereka masih sangat kecil. Pelaku UMKM hanya focus pada produksi saja. Permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Grobogan selain permodalan adalah produksi dan pemasaran. Untuk produksi, produk dari pelaku UMKM belum mampu bersaing dengan produk pabrikan, baik dari rasa, bentuk, varian, maupun packagingnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendampingan baik dari Pemerintah maupun swasta untuk menaikkan nilai produk UMKM tersebut. Saat ini digitalisasi produk dan pemasaran sudah menjadi hal yang biasa, namun banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan digitalisasi ini. Pelaku UMKM yang memanfaatkan *e-commerce* masih sedikit karena pengetahuan mereka tentang *e-commerce* masih kurang. Disamping itu, pelaku UMKM juga masih kesulitan dalam mendisplaykan produk mereka.

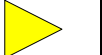
Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.53

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	45	46,87	48,77	46,1	47,47	53	97,33	ST	90,32		Dinas Koperasi UMKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat	%	45	46,87	48,77	46,1	47,47	54	97,33	ST	87,16		Dinas Koperasi UMKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	45	46,87	48,77	46,8	50,54	54	103,63	ST	92,80		Dinas Koperasi UMKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	1,2	1,3	1,4	1,25	1,39	2	99,29	ST	81,76		Dinas Koperasi UMKM
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,2	1,3	1,4	1,29	0	1,7	0	SR	0		Dinas Koperasi UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,2	1,3	1,4	1,28	1,39	2	99,29	ST	81,76		Dinas Koperasi UMKM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Dinas Koperasi UMKM
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	80,59	100	80,59	T	80,59		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%		S	66% ≤ 75%		R	51% ≤ 65%		SR	≤ 50%
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)					Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)						Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah satu elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kabupaten Grobogan. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Grobogan, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Grobogan cukup terbuka khususnya di bidang usaha mikro dan jasa, sementara untuk industri besar terkendala keterbatasan lahan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Grobogan wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal memiliki 6 sub urusan yakni: 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) Pelayanan Penanaman Modal; 5) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 6) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Grobogan hanya meliputi 4 sub urusan. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memiliki kewenangan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten. Sub urusan Promosi Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. Sub urusan Pelayanan Penanaman Modal, memiliki kewenangan terkait Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

kewenangan. Sub urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; memiliki kewenangan terkait Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Urusan penanaman modal dan perizinan terpadu memiliki 6 program dengan 8 indikator pendukung. Pencapaian urusan penanaman modal jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat 6 indikator dengan status sangat tinggi, 1 indikator dengan status rendah dan 1 indikator belum diketahui status capaiannya. Indikator yang status capainya rendah yaitu program pengendalian pelaksanaan penanaman modal di indikator prosentase pelaku usaha yang dipantau, di bina dan di awasi. Hal ini dikarenakan Berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut melalui pada sistem Online Single Submission Berbasis Resiko (OSS RBA) di Sub Pengawasan, dalam pelaksanaannya sampai dengan bulan September 2022, sistem sub pengawasan belum dapat dioperasikan karena kendala sistem dalam pengembangan dari BKPM. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut adalah unduh data dari OSS RBA untuk melakukan analisa data profil pelaku usaha, selanjutnya verifikasi dokumen bersama dengan OPD Teknis yang terkait, setelah itu baru dilakukan kunjungan lapangan/ lokasi proyek. Terkendalanya sistem OSS RBA maka pelaksanaan kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan di akhir tahun 2022. Namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendorong tercapainya indikator tersebut yaitu dengan cara melakukan Bimbingan Teknis / Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan dengan inspeksi lapangan ke lokasi proyek.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator prosentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi dengan target 75,81 % dan realisasi 45,27 % tertulis tidak memenuhi target. Hal ini karena perbedaan satuan indikator yang sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pada tahun 2022 satuannya adalah kegiatan sedangkan di tahun 2023 satuannya adalah prosentase.

Terdapat 6 indikator telah tercapai dan 2 indikator perlu upaya keras jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD. Indikator yang perlu Upaya keras yaitu persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi dan persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan, hal ini dikarenakan data / informasi perizinan dan non-perizinan belum realtime. Namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan ketercapaian



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

indikator yaitu dengan cara meningkatkan koordinasi / rapat dengan OPD teknis (Forum PTSP). Secara lebih rinci capaian indikator kinerja program dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	340	350	360	4689	9023	420	2.506,39	ST	2.148,33		DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	NA	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	NA	75,46	75,81	51,76	45,27	76	59,71	R	59,52		DPMPTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	NA	32,89	46,05	46,05	46,05	86	100	ST	53,55		DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		DPMPTSP
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023	%	Status	%	Status		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)  Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)  Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) keolahragaan; dan 3) kepramukaan. Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga.

Kinerja terkait Daya Saing Kepemudaan diukur dari Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan) dengan realisasi 40% dari target 32,5%; dan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan realisasi 0,3% dari target 0,26%. Terkait Daya Saing Keolahragaan diketahui dari Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan realisasi 15% dari target 16,67%. Terkait kepramukaan, Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan sebesar 0% dari target 100%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan kepemudaan dan olahraga berada di bawah koordinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Urusan kepemudaan dan olahraga memiliki 4 program dan 7 indikator. Pencapaian urusan kepemudaan dan olahraga jika dibandingkan dengan target tahun 2023 terdapat 3 indikator berstatus sangat tinggi, 1 indikator dengan status tinggi, 1 indikator dengan status sangat rendah, dan 2 indikator belum diketahui status capaiannya pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 5 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator pada kategori perlu upaya keras. Indikator yang berstatus perlu upaya keras yaitu indikator Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan, hal ini dikarenakan Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tahun anggaran 2023 tidak berada di Disporabudpar Kabupaten Grobogan. Namun demikian pembinaan Kwartir ranting Pramuka telah dilaksanakan melalui Hibah kepada Kwarcab Pramuka Kabupaten Grobogan Tahun 2023. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kepemudaan dan olahraga bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.55

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	25	30	32,5	40		37,50			106,67		Disporabudpar
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,24	0,25	0,26	0,3		0,29			103,45		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	16,67	16,67	16,67	15,00	15,00	16,67	89,98	T	89,98		Disporabudpar
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	NA	100	100	100	0	100	0	SR	0		Disporabudpar



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Disporabudpar
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

14. Urusan Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistem Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Pencapaian kinerja statistik ditunjukkan indikator Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD dengan realisasi 100% dari target 100%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan statistik mempunyai 1 program dan 1 indikator yang ditargetkan di RPJMD tahun 2021-2026. Pencapaian urusan statistik jika dibandingkan dengan target tahun 2023 mempunyai status sangat tinggi. Hal ini dikarenakan proses koordinasi dan pengumpulan data sudah di rencanakan pada awal tahun jadi penyerapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai target. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, indikator statistik juga mempunyai status telah tercapai. Secara rinci kinerja program RPJMD urusan statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Statistik

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyelenggaraan Statistik	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Komunikasi dan Informasi
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%	S	66% ≤ 75%	R	51% ≤ 65%	SR	≤ 50%			
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)				Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)			

15. Urusan Persandian

Urusan persandian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat satu sub urusan yakni Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan kewenangan kabupaten meliputi a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota; b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan persandian di Kabupaten Grobogan masih menjadi permasalahan salah satunya karena masih belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam mengelola informasi pemerintahan. Kinerja persandian diukur dengan indikator Persentase



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Urusan persandian dilaksanakan melalui 1 program dan 1 indikator program RPJMD periode tahun 2021-2026. Pencapaian urusan persandian tergolong sangat baik. Terlihat jika di dibandingkan dengan target tahun 2023 mempunyai status capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, indikator yang mengampu urusan persandian memiliki status telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan persandian bisa dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Persandian

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD (2022)	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Komunikasi dan Informasi

Keterangan:

ST



91% ≤ 100%

T

76% ≤ 90%

S



66% ≤ 75%

R

51% ≤ 65%



SR

≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)

Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)

Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat sudah sewajarnya untuk dijaga dan lestarikan. Identitas suatu bangsa dalam bentuk seni dan budaya harus tetap dijaga dan dilestarikan salah satunya melalui kegiatan promosi kepada masyarakat luas. Pelestarian seni dan budaya perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada. Urusan kebudayaan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri 7 sub urusan yaitu: 1) Sub Urusan Kebudayaan, 2) Sub Urusan Perfilman Nasional, 3) Sub Urusan Kesenian Tradisional, 4) Sub Urusan Sejarah, 5) Sub Urusan Cagar Budaya, 6) Sub Urusan Permuseuman, dan 7) Sub Urusan Warisan Budaya. Dari 7 sub urusan tersebut, hanya 5 sub urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Grobogan dalam urusan Kebudayaan.

Kinerja terkait Pengembangan Kebudayaan ditunjukkan dengan Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan realisasi sebesar 80% dari target 77%. Kinerja terkait Pengembangan Kesenian Tradisional ditunjukkan dengan Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional terealisasi sebesar 81,25% dari target 100%. Kinerja terkait Pembinaan Sejarah ditunjukan dengan Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal dengan realisasi 0 dari target 100%. Kinerja terkait Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya diketahui dari Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dengan realisasi 4,81% dari target 31,91%. Kinerja terkait Pengelolaan Permuseuman diketahui dari Persentase Jumlah Pengunjung Museum dengan realisasi sebesar 280,93% dari target 100%.

Urusan kebudayaan dalam RPJMD memiliki 5 program yang dijabarkan dalam 5 indikator program. Pencapaian urusan kebudayaan jika dibandingkan dengan target tahun 2023, terdapat 1 indikator yang sangat tinggi, 1 indikator dengan status capaian sangat rendah, 3 indikator belum ada data realisasi capaian di tahun 2023. Pada indikator cakupan pengembangan kesenian tradisional Tahun 2022 sebanyak 13 dari 16 jenis kesenian diberikan rekomendasi pentas seni, ada 3 jenis kesenian tidak mengajukan rekomendasi pentas seni maupun tidak diselenggarakannya pentas seni. Pada tahun 2023 Belum selesai perhitungan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021-2026, terdapat 1 indikator telah tercapai, 1 indikator akan tercapai, dan 1 indikator perlu Upaya keras. Indikator yang perlu Upaya keras yaitu indikator Cakupan cagar budaya yang dilestarikan. Hal ini dikarenakan Sejak tahun 2018 hingga 2023 tidak ada penambahan Cagar Budaya yang ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja program urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.58

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kebudayaan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	73	75	77	80		85			94,12		Disporabudpar
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	100	100	100	81,25		100			81,25		Disporabudpar
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	0	50	100	0		100			-		Disporabudpar
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	10,64	21,28	31,91	4,81	4,81	63,83	15,07	SR	7,53		Disporabudpar
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	100	100	151,80	280,93	100	280,93	ST	280,93		Disporabudpar

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X < 66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X ≤ 65%)

17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan suatu sistem informasi yang didalamnya terdapat aktivitas pengumpulan, pengolahan, pengawetan, pelestarian dan penyajian informasi. Perpustakaan telah berkembang menjadi salah satu sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, dan juga sebagai sarana rekreasi. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan bidang perpustakaan seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah kabupaten/kota; Pelestarian naskah kuno milik Daerah kabupaten/kota; dan Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Kinerja



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

perpustakaan dapat dilihat dari Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dengan realisasi sebesar 3,08% dari target 3,68%.

Urusan perpustakaan memiliki 1 program dan 1 indikator di dalam RPJMD. Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 mencapai 83,70% dengan status capaian tinggi. Hal ini dikarenakan Jumlah pendataan perpustakaan meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan (Akreditasi perpustakaan). Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase capaiannya sebesar 61,48%. Selain itu SDM pengelola perpustakaan kurang sehingga mempengaruhi minat akreditasi. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perpustakaan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	2,23	3,01	3,68	2,34	3,08	5,01	83,70	T	61,48		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Keterangan:

ST



91% ≤ 100%

T

76% ≤ 90%

S



66% ≤ 75%

R

51% ≤ 65%



SR

≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)

Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)

Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

18. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip sebagai bagian dari sejarah pembangunan sebuah negara/organisasi harus dilaksanakan dengan baik. Arsip sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban sebuah pelaksanaan kegiatan bagi pemerintah daerah yang dapat diakses secara terbuka menjadi salah satu indikator peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah. Pemerintah melalui UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan arsip, penyusutan arsip sampai dengan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

tahap pelestarian arsip. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa pengelolaan kearsipan dilakukan baik pada arsip statis maupun arsip dinamis. Pengertian dari arsip statis yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Adapun yang dimaksud dengan arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Urusan Kearsipan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah terkait dengan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan perizinan.

Kinerja pengelolaan arsip terlihat dari Prosentase pengolahan arsip secara baku dengan realisasi 90% dari target 90%. Kinerja terkait Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip ditunjukkan dengan Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan dengan realisasi sebesar 88% dari target 88%. Kinerja terkait Perizinan Penggunaan Arsip diukur dengan Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip terealisasi sebesar 70% dari target 70%.

Urusan kearsipan yang ditargetkan dalam RPJMD terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 6 indikator. Pencapaian indikator pada urusan kearsipan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sudah baik. Terlihat dari 6 indikator yang di targetkan semuanya telah berstatus sangat tinggi. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya pengolahan arsip yang sesuai dengan NSPK, telah dilaksanakannya kegiatan preservasi yang telah sesuai dengan NSPK, tersedianya Daftar Arsip yang dapat diakses oleh pengguna arsip, Laporan keuangan telah disusun tepat waktu sesuai yang ditentukan, Kebutuhan rutin perangkat daerah telah tercukupi sesuai kebutuhan dan Kebutuhan dokumen manajemen resiko telah terpenuhi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator mempunyai status telah tercapai dan 3 indikator mempunyai sttaus akan tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan Kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kearsipan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	79	86	90	86	90	98	100	ST	91,8		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	84	86	88	86	88	90	100	ST	97,8		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	62	-	70		70	76	100	ST	92,1		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)



2.4.3 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah kota pada urusan kelautan dan perikanan mencakup sub urusan Perikanan Tangkap meliputi: (a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota, (b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: (a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan, (b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan (c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Kinerja urusan kelautan dan perikanan dilihat dari 4 program dan 6 indikator yang menjadi tolok ukurnya. Pencapaian urusan kelautan dan perikanan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 kurang baik. Terlihat dari 6 indikator yang di targetkan, terdapat 3 indikator dengan status sangat tinggi dan 3 indikator dengan status sangat rendah. Indikator yang memiliki status sangat rendah yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya dan Jumlah produksi produk olahan ikan.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator Jumlah produksi perikanan tangkap, capaian sebesar 1.329,564 ton. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan rutin tahunan penebaran benih ikan di perairan umum untuk mempertahankan ekosistem perairan umum ikut mendukung pencapaian target produksi perikanan tangkap. Pada Program Pengelolaan dengan indikator Perikanan Budidaya, Jumlah produksi perikanan budidaya capaian sebesar 2.882,023 ton. Hal ini dikarenakan adanya stimulan berupa hibah ke masyarakat (dalam bentuk perkolaman rakyat dan bantuan benih ikan dan pakan). Pada program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator jumlah produksi produk olahan ikan, persentase capaian tahun 2023 sebesar 313,480 ton. Hal ini dikarenakan adanya kampanye Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan) dan Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk ikan secara rutin. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan mencapai 90 unit pada tahun 2023.

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator Jumlah produksi perikanan tangkap, capaian sebesar 578,31 ton. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan rutin tahunan penebaran benih ikan di perairan umum untuk mempertahankan ekosistem perairan umum ikut mendukung pencapaian target produksi perikanan tangkap. Adanya kemarau yang panjang di tahun 2023 maka banyak perairan yang tidak ada airnya. Pada Program Pengelolaan dengan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

indikator Perikanan Budidaya, Jumlah produksi perikanan budidaya capaian sebesar 1440,028 ton. Hal ini dikarenakan adanya stimulan berupa hibah ke masyarakat (dalam bentuk perkolaman rakyat dan bantuan benih ikan dan pakan). Kemarau panjang juga menyebabkan banyak kolam yang kekurangan air. Pada program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator jumlah produksi produk olahan ikan, persentase capaian tahun 2023 sebesar 145,185 ton. Hal ini dikarenakan adanya kampanye Gemarikan (Gerakan memasyarakatkan makan ikan) dan Pembinaan kelompok pengolah dan pemasar produk ikan secara rutin. Indikator ini mengalami penurunan karena jumlah ikan yang diolah mengalami penurunan jumlahnya. Salah satu upaya meningkatkan konsumsi ikan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, di Kabupaten Grobogan berkembang aneka usaha pengolahan ikan. Jumlah usaha pengolahan ikan mencapai 90 unit pada tahun 2023

Untuk meningkatkan minat masyarakat memelihara ikan, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kabupaten Grobogan sudah menempuh berbagai upaya, antara lain, penyuluhan tentang prospek budidaya ikan kepada masyarakat, dan pemberian bantuan benih dan pakan ikannya yang diberikan secara gratis juga dibagikan kepada masyarakat. Tentunya perlu terus dilakukan pembinaan terhadap para pembudidaya ikan agar dapat meningkatkan luasan kolam pembudidayaan dan produktivitas perikanan budidaya.

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator dengan status capaian telah tercapai dan 3 indikator dengan status capaian perlu Upaya keras. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1201,62	1262	1325,5	1264,677	578,31	6.978,85	43,63	SR	8,29		Disnakan
Program Pengelolaan	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	2587,66	2730,17	2881	2731,192	1440,028	15.245,99	49,98	SR	9,45		Disnakan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Perikanan Budidaya													
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	298,88	304,26	310,04	307,32	145,185	1.582,14	46,83	SR	9,18		Disnakan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Disnakan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

2. Urusan Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota, penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota, pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik pariwisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

kreatif di Daerah kabupaten/kota, Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Urusan pariwisata terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 4 indikator. Pencapaian urusan pariwisata jika dibandingkan dengan tahun 2023 kurang baik. Terlihat dari 4 indikator yang di targetkan, terdapat 1 indikator dengan status capaian sangat tinggi, dan 3 indikator dengan status capaian sangat rendah. Indikator dengan status capaian sangat rendah yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Nusantara, Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya, Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai dan 3 indikator dengan status capaian perlu Upaya keras. Penambahan destinasi wisata di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan hanya sebesar 10.71%. Desa wisata yang ada di Kabupaten Grobogan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 556.4/3994/2022 sejak tahun 2022 tetap jumlahnya yaitu sebesar 33 buah. Destinasi wisata di Kabupaten Grobogan sudah mulai bangkit lagi paska pandemi Covid 19 meskipun masih belum optimal seperti sebelum pandemic Covid 19. Hal ini terlihat dari jumlah wisatawan nusantara yang masih rendah pertumbuhannya bahkan mengalami kontraksi sebesar 0,59%. Geliat untuk berwisata masih merupakan kebutuhan tersier dan belum menjadikan kebutuhan utama bagi warga masyarakat. Belum banyak destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Grobogan yang membutuhkan sertifikat tenaga pariwisata misalnya sertifikat pemandu wisata dan lain – lain.

Program pemasaran pariwisata dengan indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara mengalami penurunan. Hal ini karena geliat pariwisata belum sepenuhnya membaik setelah Covid-19 melanda dan masyarakat masih enggan untuk menghabiskan waktunya di tempat – tempat wisata sehingga pertumbuhannya sangat sedikit. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan primer.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif tidak tercapai targetnya karena untuk pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan baru dimulai pada tahun 2020. Selama kurun waktu 3 tahun belum ada produk hasil inovasi yang bisa didaftarkan SNI atau ISOnya. Selain ketidaktahuan dari pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya SNI atau ISO juga produk pelaku ekonomi kreatif yang belum bisa bersaing dengan produk dari luar. Indikator prosentase tenaga kerja pariwisata yang mendapat sertifikasi belum terpenuhi targetnya karena kompetensi tenaga kerja pariwisata di Kabupaten Grobogan masih belum layak untuk disertifikasi.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Selama tahun 2023 tidak ada pelaku ekonomi kreatif yang mendaftarkan SNI, ISO atau sejenisnya karena kurang sadarnya pelaku ekonomi kreatif dalam hal perijinan. Tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi juga belum mencapai targetnya, karena tidak adanya minat dari tenaga pariwisata udalam bersertifikat.

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pariwisata

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	24	10	10	16,67	10,71	10,00	107,14	ST	107,14		Disporabudpar
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	NA	5	5	50,76%	-0,59	5,00	(11,70)	SR	-11,70		Disporabudpar
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	2	3	3	2	0	3,00	-	SR	0,00		Disporabudpar
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	2	3	3	2	0	3	-	SR	0,00		Disporabudpar

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)  Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)  Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)



3. Urusan Pertanian

Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencakup sub urusan Sarana Pertanian, Prasarana Pertanian, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian, dan Perizinan Usaha Pertanian. Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Pada urusan pertanian terdapat 15 indikator kinerja program. Pencapaian kinerja program urusan pertanian terhadap target tahun 2023 sebanyak 10 indikator berstatus sangat tinggi dan sebanyak 6 indikator belum diketahui status capaiannya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 15 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 1 indikator akan tercapai. Capaian indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indikator Persentase pemanfaatan sarana peternakan telah tercapai di tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya pemberian hibah berupa ternak untuk mendorong pemanfaatan sarana peternakan dalam pembudidayaan ternak di Masyarakat. Pada indikator Persentase pemanfaatan prasarana peternakan di tahun 2022 sudah tercapai, hal ini dikarenakan Pemberian hibah berupa jalan usaha tani sektor peternakan dan alat mesin pengolahan pakan untuk mendorong masyarakat untuk memanfaatkan prasarana peternakan yang ada.

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Selain tanaman pangan, tanaman hortikultura dan perkebunan yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan cukup banyak, antara lain Bawang Merah, Cabe Besar, Cabe Rawit, Melon, Semangka, Pisang, Jambu Air, Belimbing, Tebu, Tembakau, dan Populasi tanaman kelapa. Sebagian besar menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, Penurunan produksi untuk komoditas yang lain disebabkan karena minat petani untuk menanam kembali untuk komoditas melon, semangka, jambu air dan belimbing berkurang karena jaminan harga pasca panen yang sangat rendah dan tidak dapat menutup biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. Adanya berbagai upaya dan inovasi yang dikembangkan baik di sisi *on farm* seperti inovasi methuk jempolan, hacking kedelai, dan *off farm* dengan Rumah Kedelai Grobogan dan inovasi pengolahan produk turunan padi, jagung, kedelai mampu meningkatkan minat petani untuk menanam kedelai khususnya, dan terbukti produksi kedelai mengalami kenaikan mulai tahun 2022 sebesar 43.693 ton dan untuk tahun 2023 sebesar 57.451 ton, Produksi padi 788,123 ton dan jagung 880,062 ton untuk tahun 2023.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Luas lahan pertanian sawah di wilayah Kabupaten Grobogan mencapai 71.549 ha. Luas lahan panen padi dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan penurunan dari 136.094 ha menjadi 129.631 ha pada tahun 2023. Produksi jagung meningkat dari sebanyak 129.962 ha pada tahun 2019 menjadi sebanyak 145.062 ha pada tahun 2023. Luas panen kedelai juga menurun dari 26.489 ha pada tahun 2019 menjadi 26.030 ha pada tahun 2023. Luas panen kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan, sedangkan luas panen cabe dan bawang merah mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Perkembangan luas panen tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No.	Kecamatan	PADI	JAGUNG	KEDELA	KACANG HIJAU	KACANG TANAH	UBI KAYU	UBI JALAR	CABE	BAWANG MERAH
1	Kedungjati	1.122	9.511	700	-	-	-	-	16	-
2	Karangrayung	4.782	10.954	1.560	-	-	7	-	4	79
3	Penawangan	7.962	797	1.051	2.415	-	-	-	102	604
4	Toroh	7.322	11.129	1.779	-	-	-	-	13	275
5	Geyer	6.722	20.742	1.054	-	-	-	-	-	13
6	Pulokulon	9.215	12.368	1.817	-	-	-	-	32	97
7	Kradenan	8.538	9.972	1.557	129	37	-	-	18	21
8	Gabus	8.532	14.792	3.617	50	-	27	-	63	88
9	Ngaringan	9.433	6.192	3.711	405	50	10	5	202	34
10	Wirosari	8.561	11.251	1.476	-	164	-	17	49	103
11	Tawangharjo	6.790	7.342	1.455	767	-	8	-	7	4
12	Grobogan	7.238	8.807	1.685	2.342	-	-	-	4	14
13	Purwodadi	7.877	1.844	586	1.139	11	-	-	26	222
14	Brati	4.624	2.665	62	635	-	-	-	1	33
15	Klambu	4.203	3.169	102	608	2	2	4	211	983
16	Godong	9.640	-	769	5.908	-	-	-	1	122
17	Gubug	6.897	2.290	1.561	1.419	-	-	-	31	60



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Kecamatan	PADI	JAGUNG	KEDELAI	KACANG HIJAU	KACANG TANAH	UBI KAYU	UBI JALAR	CABE	BAWANG MERAH
18	Tegowanu	6.914	3.332	1.072	1.207	-	-	-	32	28
19	Tanggungharjo	3.259	7.905	416	712	-	-	-	62	69
	Jumlah 2023	129.631	145.062	26.030	17.736	264	54	26	874	2.849
	Jumlah 2022	136.398	136.733	17.659	10.828	331	121	9	875	2.751
	Jumlah 2021	132.664	132.554	11.087	30.402	558	70	23	381	2.953
	Jumlah 2020	132.242	117.685	25.154	26.174	797	864	28	721	2.385
	Jumlah 2019	136.094	129.962	26.489	27.975	609	840	35	758	1.239

Dalam rangka penguatan sektor pertanian menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dengan penetapan Peraturan Daerah Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani ditujukan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk :

- mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- memberikan kepastian Usaha Tani;
- melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- melindungi kearifan lokal dalam upaya penerapan *Good Agriculture Practices*.

Kinerja peternakan terutama terlihat dari jumlah populasi hewan (sapi) sebesar 209.646 ekor pada tahun 2022 turun menjadi 168.680 ekor di tahun 2023. Hal ini disebabkan karena adanya PMK (penyakit mulut dan kuku) serta penyakit LSD (*Lumpy Skin Disease*) sehingga banyak sapi yang mati dan terkena penyakit tersebut. Tidak hanya ternak sapi, penyakit tersebut juga menyerang ternak kerbau dan kambing. Terkait dengan kesehatan hewan, dalam rangka menjaga kualitas daging, dilakukan pengawasan dengan capaian Cakupan daging memenuhi kriteria ASUH (aman, sehat, utuh dan halal).



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pertanian

Program dan Kegiatan	indikaor	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Dinas Pertanian													
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	2	2	3,8	3,8	2	190,00	ST	190,00		Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	3	3	4,8	4,8	3	160,00	ST	160,00		Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5	5	5	8,6	8,6	5	172,00	ST	172,00		Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9	9	9	22	22	9	244,44	ST	244,44		Dinas Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	2	2	2	2,12	2,12	2	106,00	ST	106,00		Dinas Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pertanian
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pertanian
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Pertanian
Dinas Peternakan dan Perikanan													



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	indikaor	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase produksi bibit ternak	%	38	40	42	59,71	47,81	46	103,93	ST	129,80		
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	73	74	75	92,6	92,6	77	125,14	ST	120,26		Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	55,5	56	56,5	92,39	92,39	58	164,98	ST	159,29		
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	100	100	100		100			100,00		Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	55	60	65	59,16	59,16	80	98,60	ST	73,95		Dinas Peternakan dan Perikanan

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

4. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Kabupaten berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perizinan dan pendaftaran perusahaan; Sarana Distribusi Perdagangan; Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Pengembangan Ekspor; Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Urusan perdagangan terdiri dari 6 program yang dijabarkan dalam 6 indikator. Pencapaian urusan perdagangan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 mempunyai capaian yang baik. Terlihat dari realisasi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

capaian hingga tahun 2023 terdapat 5 indikator dengan status capaian sangat tinggi dan 1 indikator dengan status sangat rendah. Indikator dengan status sangat rendah yaitu persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku. Hal ini disebabkan kurangnya alat ukur dan tera yang sah. Upaya yang dilakukan adalah penambahan alat ukur dan tera yang sah juga sudah dilakukan.

Kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting tidak memenuhi target karena adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga seperti minyak goreng, bawang merah dan daging. Kenaikan harga ini dipicu karena kelangkaan barang di pasaran serta kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga distribusi barangnya tersendat. Banyak kucuran anggaran dari APBN untuk membangun pasar sesuai persyaratan teknis pasar antara lain pasar pulokulon, pasar wirosari. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan stabilitas harga dan ketersediaan Bapokting antara lain dengan operasi pasar, pasar murah, gerakan pangan murah. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, dari 6 indikator yang di targetkan terdapat 5 indikator dengan status capaian telah tercapai dan 1 indikator dengan status capaian perlu upaya keras. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perdagangan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Perdagangan													Disperindag
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00		Disperindag
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	46,15	60,71	67,86	63,81	72,22	79	106,43	ST	91,92		Disperindag
Program stabilisasi Harga Barang	Persentase kelangkaan ketersediaan harga,	%/thn	16,67	16,67	16,67	16,67	5,6	16,67	166,41	SR	166,41		Disperindag



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	stok kebutuhan Bapokting												
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	%/thn	20	20	20	25,0	35,0	25	175,00	ST	140,00		Disperindag
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	81,41	89,7	93,52	90,7	31,70	100	33,90	SR	31,70		Disperindag
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0,018	0,032	0,032	0,033	2,2	0,086	6944,44	ST	2583,98		Disperindag

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

Untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku sudah memenuhi target. Berikut rekapitulasi UTTP yang ditera / tera ulang pada tahun 2023 sesuai Tabel dibawah ini.

Tabel 2.66
UTTP yang Ditera / Tera Ulang Tahun 2023

No	Jenis UTTP	Jumlah
1	Pompa ukur BBM (Nozzle)	354
2	Timbangan elektronik	397
3	Timbangan meja	589
4	Timbangan pegas	6
5	Timbangan sentisimal	11



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

6	Timbangan neraca	0
	TOTAL	1.357

5. Urusan Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri Kabupaten Grobogan (MEA). Urusan perindustrian sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan yaitu: Sub Urusan Perencanaan Pembangunan Industri, kewenangan kabupaten adalah dalam hal Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota; Sub Urusan Perizinan, kewenangan kabupaten meliputi: Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah; Penerbitan IPUi bagi industri kecil dan menengah; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota; dan Sub Urusan Sistem Informasi Industri Nasional, kewenangan kabupaten dalam aspek Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sektor industri memiliki potensi yang besar dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Grobogan yang cenderung naik dari tahun ke tahun yaitu 14,18% tahun 2022 dan 14,58% pada tahun 2023. Lama kelamaan sektor industri akan menggeser sektor perdagangan dan sektor pertanian. Hal ini karena adanya tren pola konsumsi rumah tangga terutama untuk makanan minuman dan barang barang kerajinan. Pola konsumsi rumah tangga meningkat dipicu dengan semakin mudahnya dalam mendapatkan barang. Semakin mudahnya dalam mengakses *marketplace / ecommerce* membuat pola konsumsi masyarakat meningkat. Tinggal pencet di HP maka barang yang diinginkan akan datang.

Urusan perindustrian terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 6 indikator. Pencapaian urusan Perindustrian tergolong sangat baik. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, semua indikator memiliki status capaian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Indikator sasaran RPIK sebanyak 11 indikator sudah tercapai semua, pengajuan perijinan usaha industri pada tahun 2023 sebanyak 11 pengajuan dan sudah 3 izin yang keluar rekomendasi untuk keluar IUI sedangkan yang lain masih berproses, dan Adanya surat kemenperin kewajiban industri untuk mempunyai akun SINNAS. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, 6 indikator yang di targetkan juga memiliki



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

status telah tercapai. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perindustrian

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00		Disperindag
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah dibagi jumlah ijin yang dikeluarkan oleh instansi terkait dibagi jumlah Ijin	%	15,04	100	100	100	100	100,00	100,00	ST	100,00		Disperindag
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIINAs	%	0	46,15	46,15	47,6	75,58	69,23	163,77	ST	109,17		Disperindag
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Disperindag
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%		S	66% ≤ 75%		R	51% ≤ 65%		SR	≤ 50%



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Target Akhir RPJMD Telah Tercapai ($X > 100\%$)



Target Akhir RPJMD Akan Tercapai ($99\% \leq X < 66\%$)



Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras ($X \leq 65\%$)

6. Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi terdiri dari 1 program yang ditunjukkan dengan kinerja 1 indikator, yaitu Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan indikator Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi dengan realisasi 100% dari target 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai target. Transmigrasi merupakan kebijakan program pembangunan kawasan transmigrasi berasal dari pemerintah pusat, namun minat masyarakat mengikuti program transmigrasi tergolong tinggi. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Transmigrasi

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%		S	66% ≤ 75%		R	51% ≤ 65%		SR	≤ 50%
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)					Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)			Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)			

2.4.4 Pencapaian Target Kinerja Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Kinerja urusan perencanaan pembangunan diukur dengan indikator Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional dengan realisasi 100% dari target 100%; Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 84%; Persentase capaian



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan dengan realisasi 77,78% dari target 84%; Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan realisasi sebesar 80% dari target sebesar 80%.

Urusan Perencanaan pembangunan terdiri dari 3 program dan 7 indikator. Pencapaian urusan perencanaan Pembangunan terhadap target tahun 2023 sebanyak 6 indikator pada status sangat tinggi, dan 1 indikator status tinggi. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 5 indikator pada kategori telah tercapai dan 2 indikator pada kategori akan tercapai. Secara lebih rinci capaian indikator program urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69

Capaian Indikator Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Perencanaan Pembangunan

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	80	82	84	100	100	90	119,05	ST	111,11		Bappeda
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80	82	84	50	77,78	90	92,60	T	86,42		
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	76	78	80	75	80	86	100,00	ST	93,02		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Bappeda
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	penunjang Kinerja perangkat daerah												
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)  Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)  Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

2. Urusan Keuangan Daerah

Kinerja urusan keuangan daerah ditunjukkan dari beberapa indikator seperti Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%; Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu dengan realisasi sebesar 100% dari target 100%; dan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 17,95% dari target sebesar 3%.

Urusan Keuangan Daerah terdiri dari 4 program yang dijabarkan dalam 6 indikator pendukung. Pencapaian urusan keuangan daerah belum bisa diketahui status capaiannya hingga tahun 2023, karena data tahun 2023 belum diketahui. Sementara itu jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 6 indikator pada kategori telah tercapai. Kinerja pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah dilakukan secara periodik (Bulanan, Triwulan, dan Semesteran), Rekonsiliasi dengan pengurus barang dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara periodik (Triwulan), intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah terus dilakukan, dianggarkan Sosialisasi dan Penyebarluasan Pajak Daerah dan Dilaksanakan Bimbingan teknis kepada Pejabat penyusun laporan keuangan seluruh perangkat daerah. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Keuangan Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		BPPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		BPPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,85	2	3	37,73	17,95	3	598,33	ST	598,33		BPPKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		BPPKAD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

3. Urusan Kepegawaian

Urusan kepegawaian terdiri dari 1 program dengan 1 indikator. Pencapaian urusan kepegawaian yaitu Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Namun demikian jika dilihat dari capaian tahun sebelumnya, sudah tercapai. Secara rinci capaian kinerja program urusan kepegawaian bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.71

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepegawaian

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		BKPPD
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%	S	66% ≤ 75%	R	51% ≤ 65%	SR	≤ 50%			
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)			Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)				

4. Urusan Pendidikan dan pelatihan

Urusan Pendidikan dan pelatihan terdiri dari 2 program dengan 4 indikator. Jika dibandingkan dengan target tahun 2023, sebanyak 4 indikator pada kategori sangat tinggi. Pencapaian indikator Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun dengan realisasi sebesar 80% dari target sebesar 80%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator akan tercapai. Secara rinci capaian kinerja program urusan Pendidikan dan pelatihan bisa dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.72

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kepegawaian

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	-	80	80	68,67	80	100	100,00	ST	68,67		BKPPD
Program Penunjang	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		BKPPD



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Urusan Pemerintahan Daerah													
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X ≤ 65%)

5. Urusan Sekretariat Daerah

Urusan sekretariat daerah terdiri dari 3 program yang dijabarkan dalam 5 indikator. Pencapaian urusan sekretariat daerah masih belum bisa diketahui status capaiannya karena belum diketahui realisasi kinerjanya pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir 2026, sebanyak 4 indikator pada kategori telah tercapai, 1 indikator belum diketahui status kinerjanya. Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di indikator Status Kinerja LPPD masih belum ada data realisasi capaian, hal ini dikarenakan Hasil evaluasi 2022 belum keluar dari Kemendagri. Sesuai Kepmendagri No.100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan juga Permendagri No. 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda (terkait Klasifikasi Status Kinerja). Secara lebih rinci capaian kinerja Program urusan sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat Daerah

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100,00	ST	100		Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Deviden yang disetor BUMD	juta	25.288	19.267	21.112	27.731	32.374	24.719	153,34	ST	130,96		Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Sekretariat Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

6. Urusan Sekretariat DPRD



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan sekretariat DPRD memiliki 2 program dan 4 indikator yang di targetkan di RPJMD periode 2021-2026. Pencapaian fungsi penunjang sekretariat DPRD dibandingkan target tahun 2023 sebanyak 4 indikator berstatus sangat tinggi. Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP belum mencapai 100% dikarenakan terdapat pelaksanaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, yaitu dari 44 SOP terdapat satu sub kegiatan yang tidak sesuai. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, sebanyak 3 indikator yang telah dicapai dan 1 indikator akan tercapai. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Sekretariat DPRD

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	100	100	97,72	97	100	97,72	ST	97,72		Sekretariat DPRD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Sekretariat DPRD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
Keterangan:	ST	91% ≤ 100%	T	76% ≤ 90%	S	66% ≤ 75%	R	51% ≤ 65%	SR			≤ 50%	
		Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)				Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)				Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)			

7. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan terdiri dari 32 program dan 5 indikator. Pencapaian urusan pengawasan jika dibandingkan dengan target tahun 2023 tergolong baik, terlihat dari 5 indikator yang di targetkan semuanya sebanyak 5



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

indikator mempunyai status capaian sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 5 indikator telah tercapai. Secara lebih rinci capaian kinerja program urusan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Pengawasan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	60	60	60	57,6	60	60	100	ST	100		Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	-	20	40	100	100	64	250	ST	156		Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Inspektorat
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

8. Urusan Kewilayahan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Urusan kewilayahan di ampu oleh 19 kecamatan di kabupaten Grobogan. Pencapaian urusan kewilayahan hingga tahun 2023 tergolong cukup baik, sebanyak 78 indikator berstatus sangat tinggi, sebanyak 26 indikator berstatus tinggi, dan sebanyak 1 indikator berstatus sangat rendah, dan sebanyak 41 indikator belum diketahui capaiannya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD terlihat dari capaian kinerja urusan sebanyak 100 indikator berstatus telah tercapai, sebanyak 20 indikator berstatus akan tercapai, 1 indikator berstatus perlu upaya keras, dan sebanyak 25 indikator belum diketahui status capaiannya. Kinerja Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap didukung Petugas yang senantiasa melaksanakan tugas sesuai SOP dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Banyak Masyarakat Desa yang aktif dalam kegiatan dilaksanakan oleh Kecamatan dan Desa, Anggota Satlimnas senantiasa ikut berpartisipasi dalam menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat, Banyak Masyarakat yang antusias dalam mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, Desa selaku aktif dan mendukung kegiatan Administrasi yang tertib sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang berlaku, Petugas senantiasa melaksanakan tugas sesuai SOP dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan, Petugas senantiasa berusaha mencukupi kebutuhan rutin untuk tercapainya kinerja perangkat daerah yang optimal, Petugas selalu aktif dalam pemenuhan dokumen penilaian manajemen resiko. Pencapaian kinerja lainnya didukung komitmen yang tinggi dari PPTK serta dukungan dari pimpinan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Peran serta petugas Linmas Desa yang aktif serta adanya dukungan dari pimpinan sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Operator SIMDA FMIS dan BMD selalu aktif berkonsultasi ke BPPKAD ke Bidang Akuntansi dan Aset sehingga penyusunan laporan keuangan dapat terselesaikan tepat waktu. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pada urusan kewilayahan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan kewilayahan

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	Kecamatan Kedungjati												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	86	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	80	100	100	-	-	-	-		-		Kecamatan Kedungjati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	80	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	80	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	81.86	T	100		Kecamatan Kedungjati
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Kedungjati
	Kecamatan Karangrayung												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	98,71	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Karangrayung
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	99,83	100	100	0	0	99,83	-		-		Kecamatan Karangrayung



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	98,6	100	100	0	0	98,60	-		-		Kecamatan Karangrayung
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	99,87	100	100	0	100	99,50	100,00	ST	100,50		Kecamatan Karangrayung
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	99,4	100	100	0		99,40	-		-		Kecamatan Karangrayung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	94	92	93,00	92,00	ST	98,92		Kecamatan Karangrayung
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	99	90	94,50	90,00	ST	95,24		Kecamatan Karangrayung
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	98	90	94,00	90,00	ST	95,74		Kecamatan Karangrayung
	Kecamatan Penawangan												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Penawangan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	75	100	100	100	100	75	100,00	ST	133,33		Kecamatan Penawangan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (Kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	85	100	100	100	100	75	100,00	ST	133,33		Kecamatan Penawangan
Program Penyelenggaraan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas	%	85	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Penawangan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Urusan Pemerintahan Umum	koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan												
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	69,5	100	100	100	100	70,75	100,00	ST	141,34		Kecamatan Penawangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Penawangan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Penawangan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Penawangan
Kecamatan Toroh													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	N/A	100	100	70	70	N/A	70,00	T	70,00		Kecamatan Toroh
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	75	80	100	80,00	T	80,00		Kecamatan Toroh
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	77	100	100	60	75	78	75,00	T	96,15		Kecamatan Toroh
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Toroh
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Toroh



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	75	100	75,00	T	75,00		Kecamatan Toroh
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	90	100	90,00	ST	90,00		Kecamatan Toroh
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Toroh
Kecamatan Geyer													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Geyer
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Geyer
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Geyer
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Geyer
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Geyer
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Geyer
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Geyer



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Geyer
	Kecamatan Pulokulon												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Pulokulon
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	95	100	100	100	100	95	100,00	ST	105,26		Kecamatan Pulokulon
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Pulokulon
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Pulokulon
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	100	86	100	86,00	ST	86,00		Kecamatan Pulokulon
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Pulokulon
	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	84	100	84,00	T	84,00		Kecamatan Pulokulon
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	85	100	85,00	T	85,00		Kecamatan Pulokulon
	Kecamatan Kradenan												
Program Penyelenggaraan	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan	%	50	100	100	100	96,93	60	96,93	ST	161,55		Kecamatan Kradenan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap												
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	0	0	100	-				Kecamatan Kradenan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	0	97,38	100	97,38	ST	97,38		Kecamatan Kradenan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Kradenan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	0	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Kradenan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Kradenan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	95,10	82,02	100	82,02	T	82,02		Kecamatan Kradenan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Kradenan
Kecamatan Gabus													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	98	100	100	100	100	98	100,00	ST	102,04		Kecamatan Gabus
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	98	100	100	0	0	98	-		-		Kecamatan Gabus



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	97	100	100	0	0	98	-		-		Kecamatan Gabus
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	97	100	100	0	100	97	100,00	ST	103,09		Kecamatan Gabus
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	95	100	100	0	0	96	-		-		Kecamatan Gabus
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	96	77	100	77,00	T	77,00		Kecamatan Gabus
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Gabus
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Gabus
Kecamatan Ngaringan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	90	100	100	100	100	93	100,00	ST	107,53		Kecamatan Ngaringan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Ngaringan
Kecamatan Wirosari													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP	%	90	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Wirosari



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	83,42	100	100	84,97	98,72	84,5	98,72	ST	116,83		Kecamatan Wirosari
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (Kec & Desa/Kel	%	90	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Wirosari
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Wirosari
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi	%	83,1	100	100	98,69	86,88	83,5	86,88	T	104,05		Kecamatan Wirosari
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	94,18	80,56	100	80,56	T	80,56		Kecamatan Wirosari
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Wirosari
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Wirosari
	Kecamatan Tawangharjo												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP	%	90	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Tawangharjo
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	75	100	100	75	85	75	85,00	T	113,33		Kecamatan Tawangharjo



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase linmas (Kec & Desa/Kel	%	90	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Tawangharjo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	100	90	100,00	ST	111,11		Kecamatan Tawangharjo
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi	%	83,1	100	100	98,69	86,88	83,5	86,88	T	104,05		Kecamatan Tawangharjo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	97,81	74,09	100	74,09	T	74,09		Kecamatan Tawangharjo
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Tawangharjo
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Tawangharjo
Kecamatan Grobogan													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	94	100	100	99	100	98	100	ST	101,02		Kecamatan Grobogan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	95	100	100	100	100	97	100	ST	103,09		Kecamatan Grobogan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Grobogan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100,00		Kecamatan Grobogan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	pembinaan wawasan kebangsaan												
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	95	100	100	100	100	96	100	ST	104,17		Kecamatan Grobogan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	93	100	100	100	ST	93,00		Kecamatan Grobogan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah		100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Grobogan
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Grobogan
Kecamatan Purwodadi													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	90	100	100	86,53	100	92	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	82,61	100	100	99,48	100	86,78	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) aktif	%	96,5	100	100	100	100	97	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kelompok Masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	78,5	100	100	92,96	100	81,7	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrtasi	%	81,24	100	100	90,97	100	83,7	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Purwodadi
Kecamatan Brati													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	98,58	78,04	100	78,04	T	78,04		Kecamatan Brati
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	100	100	0	0	100	0		0		Kecamatan Brati
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	0	0	100	0		0		Kecamatan Brati
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	22,22	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Brati
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	0	0	100	0		0		Kecamatan Brati
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	93,04	100	100	100	ST	100		Kecamatan Brati
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin	%	100	100	100	87,71	71,71	100	71,71	T	71,71		Kecamatan Brati



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	penunjang Kinerja perangkat daerah												
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		Kecamatan Brati
	Kecamatan Klambu												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP Tetap	%	75	100	100	70,00	91,00	95	91,00	ST	95,79		Kecamatan Klambu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	-	100	100	0	0	-	-				Kecamatan Klambu
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) aktif	%	88	100	100	0	0	88	-		-		Kecamatan Klambu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	54	100	100	97,00	95,22	60	95,22	ST	158,70		Kecamatan Klambu
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	88	100	100	0	0	88	-		-		Kecamatan Klambu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	91,79	75,28	100	75,28	T	75,28		Kecamatan Klambu
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	0	0	100	-		-		Kecamatan Klambu
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	0	0	100	-		-		Kecamatan Klambu



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
	Keamatan Godong												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	86	99,5	50	99,50	ST	199,00		Keamatan Godong
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	80	100	100	90	80	50	80,00	T	160,00		Keamatan Godong
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	85	100	100	100	80	85	80,00	T	94,12		Keamatan Godong
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	85	100	100	100	91.82	100	91,82	ST	91,82		Keamatan Godong
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	86	100	100	90	80	86	80,00	T	93,02		Keamatan Godong
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	83	100	83,00	T	83,00		Keamatan Godong
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	78	100	78,00	T	78,00		Keamatan Godong
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	50	100	50,00	SR	50,00		Keamatan Godong
	Kecamatan Gubug												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	89,3	100	100	100	76,23	92,3	76,23	T	82,59		Kecamatan Gubug



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	83,21	100	100	100	0	85,21	-		-		Kecamatan Gubug
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	77,4	100	100	0	0	79,4	-		-		Kecamatan Gubug
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	80,8	100	100	100	100	83,8	100,00	ST	119,33		Kecamatan Gubug
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	70,7	100	100	0	0	71,7	-		-		Kecamatan Gubug
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	99,73	76,14	100	76,14	T	76,14		Kecamatan Gubug
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	71,38	100	71,38	T	71,38		Kecamatan Gubug
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Gubug
Kecamatan Tegowanu													
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Tegowanu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	n/a	100	100	0	0	n/a	-				Kecamatan Tegowanu



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	100	100	100	0	100	-		-		Kecamatan Tegowanu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	99,79	100	100	100	100	100	100,00	ST	100,00		Kecamatan Tegowanu
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100	0	0	100	-		-		Kecamatan Tegowanu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	0	0	100	-		-		Kecamatan Tegowanu
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	96,04	93,46	100	93,46	ST	93,46		Kecamatan Tegowanu
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	0	0	100	-		-		Kecamatan Tegowanu
	kecamatan Tanggungharjo												
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	90	100	100	87,23	100	92	100,00	ST	108,70		kecamatan Tanggungharjo
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Masyarakat yang diberdayakan	%	98	100	100	100	100	98	100,00	ST	102,04		kecamatan Tanggungharjo
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Linmas (kecamatan dan desa/Kelurahan) yang aktif	%	100	100	100	100	0	100	-		-		kecamatan Tanggungharjo
Program Penyelenggaraan	Presentase Kelompok Masyarakat yang	%	80	100	100	30,87	99,68	85	99,68	ST	117,27		kecamatan Tanggungharjo



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Daerah	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Urusan Pemerintahan Umum	mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan												
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa dengan tertib administrasi	%	90	100	100	100	100	92	100,00	ST	108,70		kecamatan Tanggungharjo
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	77,72	70,61	100	70,61	T	70,61		kecamatan Tanggungharjo
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		kecamatan Tanggungharjo
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100	ST	100		kecamatan Tanggungharjo

Keterangan: ST 91% ≤ 100% T 76% ≤ 90% S 66% ≤ 75% R 51% ≤ 65% SR ≤ 50%

Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%) Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%) Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X≤ 65%)

9. Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan dengan 6 program dan 8 indikator. Pencapaian urusan kesatuan bangsa dan politik jika dibandingkan dengan target tahun 2023, semua indikator nya memiliki status capaian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Adanya dukungan Anggaran dari APBD, Koordinasi yang baik antara Bakesbangpol dengan FKDM serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Adanya Perda dan Perbup yang mendukung pelaksanaan kegiatan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 6 indikator dengan status telah tercapai, 1 indikator dengan status akan tercapai dan 1 indikator dengan status perlu Upaya keras. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah pada urusan kesatuan bangsa dan politik disajikan pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.77

Capaian Kinerja Program RPJMD Kabupaten Grobogan Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	80	100	80,00	ST	80		Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	64	64	64	63,56	63,56	>64	99,31	ST	155		Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	20	20	76.6	47,62	100	238,10	ST	40		Badan Kesbangpol



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Program dan Kegiatan	Program dan Kegiatan	Satuan	Kondisi awal	Target Kinerja RPJMD		Realisasi		Kondisi Akhir RPJMD	% Capaian Tahun 2023		% Capaian Target Akhir RPJMD		PD Pengampu
			2021	2022	2023	2022	2023		%	Status	%	Status	
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Badan Kesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		Badan Kesbangpol
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	100	100,00	ST	100		

Keterangan:

ST 91% ≤ 100% T
 Target Akhir RPJMD Telah Tercapai (X>100%)

76% ≤ 90%

S



66% ≤ 75%

R Target Akhir RPJMD Akan Tercapai (99% ≤ X >66%)

51% ≤ 65%



SR

≤ 50% Target Akhir RPJMD Perlu Upaya Keras (X ≤ 65%)



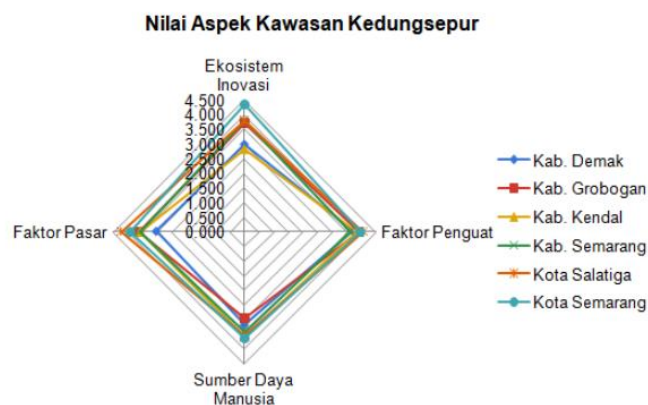
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pemetaan Daya Saing Daerah Kabupaten Grobogan

2.4.1.1 Capaian dan Progres Pemetaan Daya Saing Daerah

Wilayah kabupaten Grobogan di dalam kawasan Kedungsepur memainkan peran penting sebagai pendukung bagi kota Semarang dan sejumlah daerah lainnya. Hal ini disebabkan oleh peranannya dalam menyediakan komoditas pertanian, sumber daya manusia, menjadi lokasi industri, serta sebagai jaringan infrastruktur kewilayahan. Selama periode dari tahun 2020 hingga 2023, terdapat peningkatan skor Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) di kabupaten Grobogan. Pada tahun 2023, skor PDSD mencapai 3,555, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 3.499.

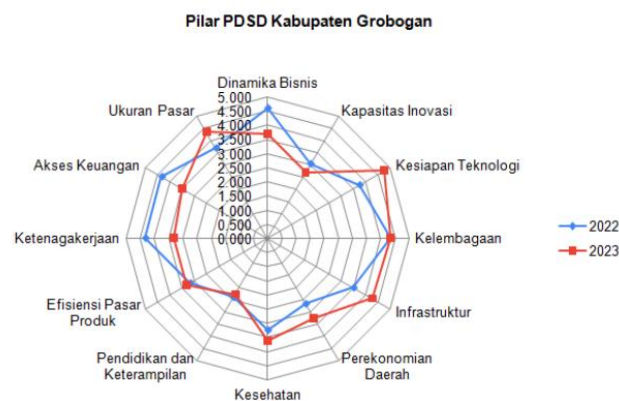


Gambar 2.32. Nilai Aspek Kawasan Kedungsepur

Pemetaan kondisi daya saing daerah kabupaten Grobogan pada tahun 2023 mengungkapkan berbagai komponen aspek, seperti yang terlihat pada Gambar 1. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan bahwa aspek faktor penguat atau "enabling environment" memiliki skor tertinggi, yaitu 3.955 namun aspek tersebut masih dibawah rata-rata kota/kabupaten yang ada di kawasan Kedungsepur. Sementara aspek sumber daya manusia memiliki skor terendah, yaitu 2.955 dan merupakan daerah dengan nilai ter rendah di kawasan Kedungsepur.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 2.33. Pilar PDSD Kabupaten Grobogan 2022-2023

Pemetaan tingkat daya saing suatu wilayah berdasarkan komponen pilar dapat diidentifikasi melalui Gambar 2, dimana terlihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada pilar kesiapan teknologi dengan skor mencapai 4.750 dimana terjadi peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2022. Hasil yang ditunjukkan oleh pilar kesiapan teknologi mencerminkan adanya peningkatan dalam akses dan adopsi teknologi. Sementara itu, pilar pendidikan dan keterampilan menunjukkan skor terendah, yakni 2.286 dimana skor tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena penurunan jumlah program latihan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja. Pilar ketenagakerjaan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, hal ini dikarenakan penurunan persentase jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja dan kenaikan persentase Pekerja Penuh Waktu (> 35 Jam) dalam Seminggu.

Pemetaan tingkat daya saing berdasarkan komponen dimensi, skor tertinggi pada dimensi teknologi dan keamanan serta ketertiban, masing-masing mencapai skor 5. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan produk inovasi teknologi yang telah berhasil diubah menjadi produk komersial, serta peran yang diperankan oleh pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sementara itu, skor terendah ditemukan pada dimensi pendidikan, yakni 1.571.

Pada segi faktor penguat, terdapat tiga pilar yang mendukung peningkatan wilayah kabupaten Grobogan, yaitu kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian daerah. Skor pilar-pilar ini adalah sebagai berikut: kelembagaan dengan skor 4.333, infrastruktur dengan skor 4.250, dan perekonomian daerah dengan skor 3.250. Sementara itu, dalam konteks ekosistem inovasi, faktor paling mendukung adalah kesiapan teknologi, dengan skor tertinggi mencapai 4.750. Kapasitas pasar, sebagai aspek dalam faktor kapasitas pasar, didukung oleh pilar ukuran pasar dengan skor 4.333. Sementara itu, aspek sumber daya manusia, yang memiliki skor terendah, dipengaruhi oleh pilar kesehatan dengan



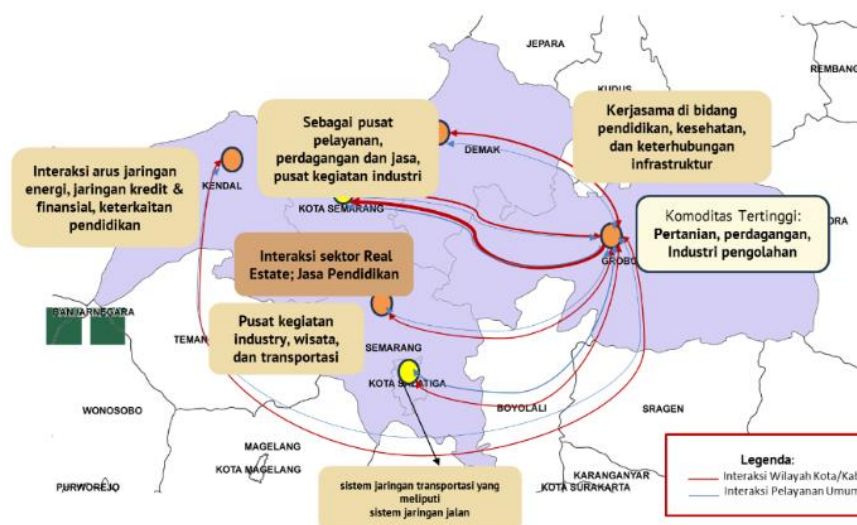
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

skor 3.625. Penting untuk dicatat bahwa posisi dominan wilayah dan aspek utama dalam pencapaian pembangunan daerah dapat diidentifikasi dengan membandingkan hasil pilar Pemetaan Daya Saing Daerah (PDSD) terhadap rata-rata skor dari seluruh pilar dalam setiap kategori tahapan.

2.4.1.2 Peran dan Kapasitas Daerah dalam Konteks Interaksi Wilayah

Berdasarkan distribusi PDRB 2022 menurut lapangan usaha, Kabupaten Grobogan memiliki tiga sektor unggulan dan komoditas tiap sektor. Tiga sektor tersebut yaitu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (27.55%) dengan komoditas padi, jagung dan kedelai, sektor perdagangan besar dan eceran : reparasi mobil dan sepeda motor (19.56%) dan sektor industri pengolahan (14.14%) dengan komoditas industri makanan. Sektor-sektor tersebut dapat menjadi potensi daerah untuk mendukung daerah lain di wilayah Kedungsepur

Berdasarkan analisis interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi di area Kedungsepur, dapat dinyatakan bahwa tingkat kepentingan interaksi ini bervariasi dengan daerah sekitarnya. Terdapat skala kepentingan yang sangat tinggi dalam interaksi dengan kabupaten Demak, kabupaten Semarang, dan kota Semarang, sedangkan dengan kota Salatiga dan kabupaten Kendal, tingkat kepentingannya dapat dikategorikan sebagai penting atau sedang. Sektor ekonomi yang berperan dalam daerah-daerah ini meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi kendaraan bermotor. Selain itu, peran kabupaten dan kota juga beragam dalam sektor-sektor tersebut, seperti industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi kendaraan bermotor.



Gambar 2.34. Peta Interaksi Wilayah Kedungsepur



Secara positioning kabupaten Grobogan memiliki peran sebagai kawasan hinterland dari Kedungsepur. Hal ini menunjukkan adanya kapasitas pada sektor primer yang kuat dan berinteraksi kuat dengan daerah perkotaan sekitarnya terutama Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Peran tersebut menunjukkan posisi kabupaten Grobogan dalam perwilayahan sebagai suplai bahan primer serta sumberdaya manusia. Sedangkan, banyak akses modal dan keuangan kabupaten Grobogan sangat berpengaruh dengan kota Semarang. Sementara itu, dalam hal interaksi wilayah yang berkaitan dengan pelayanan publik, tingkat kepentingannya juga berbeda. Kota Semarang, terkait dengan sektor pertanian, perdagangan, industri pendidikan, transportasi, dan pergudangan, serta kabupaten Demak, yang melibatkan sektor industri, konstruksi, perdagangan, pendidikan, transportasi, dan pergudangan, menunjukkan tingkat kepentingan interaksi wilayah yang sangat tinggi dalam sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, kabupaten Semarang dan kota Salatiga memiliki tingkat kepentingan yang dapat dianggap penting, sementara kabupaten Kendal memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, interaksi wilayah dalam konteks sektor ekonomi maupun pelayanan publik menunjukkan bahwa kota Semarang dan kabupaten Demak memiliki tingkat interaksi wilayah yang sangat penting, sedangkan kabupaten Semarang, kabupaten Salatiga dan kabupaten Kendal memiliki tingkat interaksi yang dapat dikategorikan sebagai penting dan sedang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan wilayah antara kabupaten Grobogan, kota Semarang, dan kabupaten Demak memiliki tingkat kepentingan yang sangat tinggi, yang mungkin dipengaruhi oleh kedekatan geografis kota Semarang dan kabupaten Demak dengan kabupaten Grobogan.

2.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.2.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

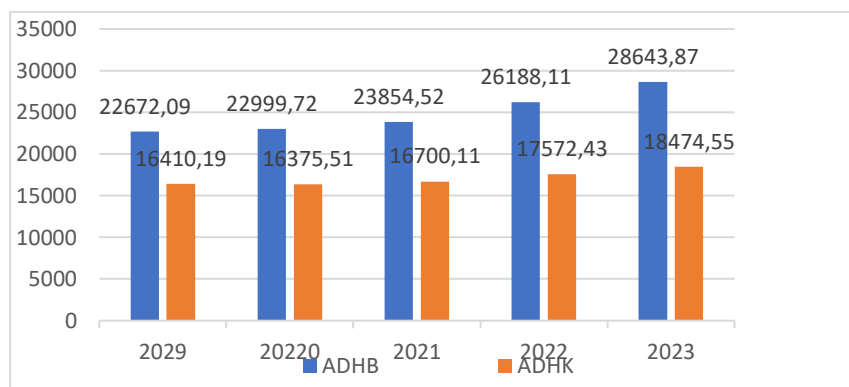
Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Pada tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp.22.672,09 milyar, meningkat menjadi Rp 28.643,87 milyar pada tahun 2023. Sedangkan kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga tahun 2023 terhadap PDRB menurut Pengeluaran berdasarkan harga berlaku cenderung naik dibanding tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sumber: BPS Kab. Grobogan

Gambar 2.35. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2023 (Milyar rupiah)

2.4.2.2 Penerapan *Circular Economy*

Pemerintah Kabupaten Grobogan berkomitmen untuk menerapkan *circular economy* melalui Kebijakan Implementasi Ekonomi Hijau, mengingat sistem *circular economy* sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan sumber daya alam, meminimalkan dampak lingkungan, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan bekerjasama dengan Universitas Diponegoro melalui program Kedaireka dan Iptek Desa Binaan UNDIP dengan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam penguatan kapasitas UMKM Tahu di Desa Sugihmanik. Desa Sugihmanik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mempunyai sekitar 30 UKM tahu. UKM tersebut tergabung dalam suatu paguyuban yang bernama “Ngudi Mulyo”. Rata – rata kapasitas produksi tiap UKM sekitar 150 - 450 kg kedelai setiap harinya. Dalam konteks *circular economy*, para UKM Tahu telah memanfaatkan limbah pertanian antara lain sekam padi dan bonggol jagung sebagai bahan bakar untuk mengolah kedelai menjadi tahu. Manfaat usaha tahu telah dirasakan oleh masyarakat dengan meningkatnya pendapatan, tetapi



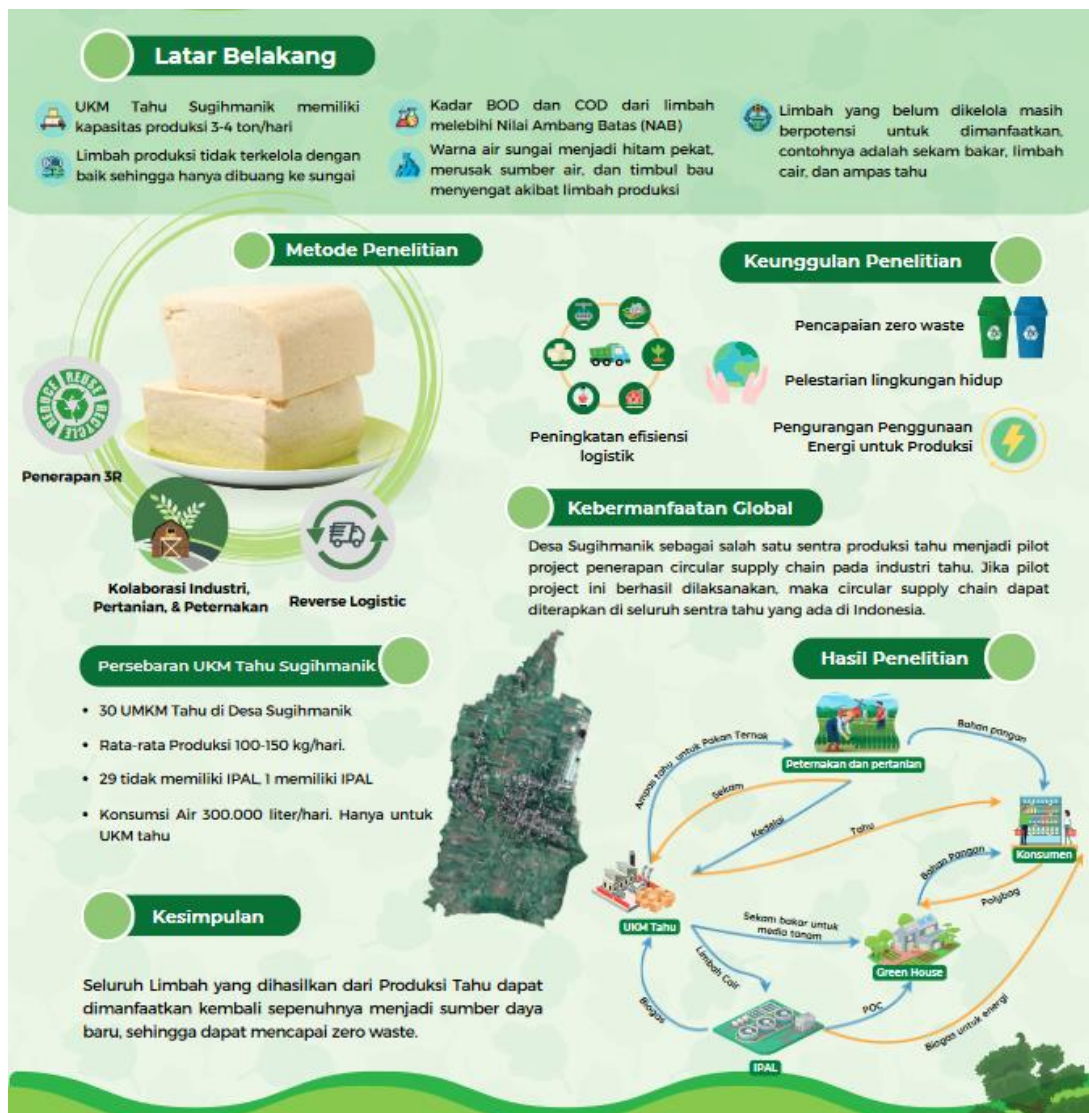
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

disisi lain menimbulkan dampak negative berupa pencemaran lingkungan akibat limbah tahu yang belum dikelola dengan baik.

Upaya untuk membantu UKM tahu dalam pengelolaan limbah tahu dengan membangun IPAL Komunal untuk mengurangi kerusakan lingkungan apabila limbah dari pabrik tahu langsung dibuang ke badan air/sungai, selain itu manfaat lainnya adalah dapat menghasilkan gas yang dimanfaatkan masyarakat untuk memasak. Selanjutnya, program tersebut akan diteruskan dengan meningkatkan kualitas produk, membantu legalitas perijinan dan upaya branding untuk memenangkan pasar. Juga penggunaan teknologi informasi dalam bentuk website untuk meningkatkan pemasaran. Bagi masyarakat sekitar, potensi pemanfaatan ampas tahu yang selama ini belum bernilai ekonomi dapat dibuat olahan seperti keripik, kerupuk atau stick ampas tahu. Selain itu, produk olahan turunan tahu dapat dengan melakukan diversifikasi produk. Selain menambah lapangan pekerjaan, upaya ini bisa menambah sasaran pasar bagi UKM tahu. Namun demikian, upaya-upaya tersebut perlu kerjasama dari semua pihak. Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan, keterbatasan modal dan peralatan, serta keterbatasan jaringan menjadi kendala yang dialami dalam pengembangan *circular economy* di UKM Tahu Ngudi Mulyo. Gambar 2 mengilustrasikan secara detail latar belakang, kebermanfaatan dan proses bisnis pelaksanaan *circular economy* pada UKM Tahu.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 2.36. Ilustrasi Pelaksanaan Pilot Project Circular Economy Pengelolaan Pabrik Tahu di Desa Sugihmanik, Kecamatan Tanggungharjo, Kab. Grobogan.

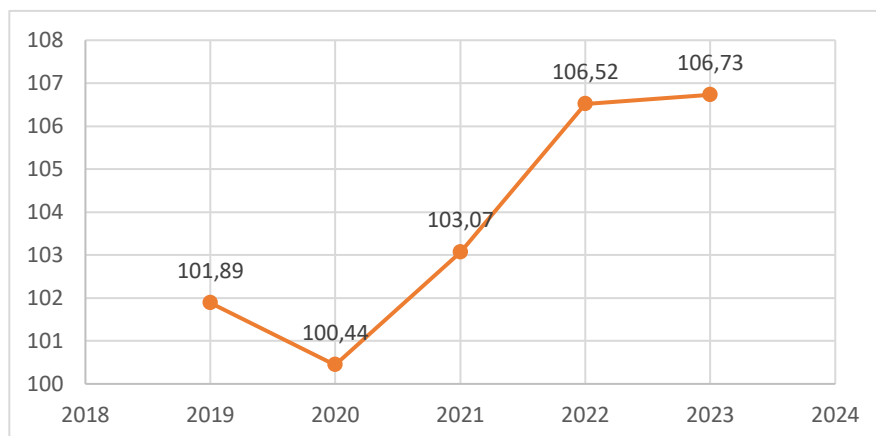
2.4.2.3 Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 100,445 pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 103,07 menjadi 106,73 pada tahun 2023. Hal ini karena daya beli petani meningkat.



Sumber: Bappeda, 2023

Gambar 2.37. Nilai Tukar Petani Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2023

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.2.1 Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Grobogan adalah demonstrasi/unjuk rasa. Meskipun demikian, kejadian demonstrasi termasuk jarang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, kasus demonstrasi yang terjadi dari tahun 2017 sampai 2021 hanya ada 1 kali kejadian demonstrasi, yakni pada tahun 2019 terjadi demonstrasi 1 kali terkait dengan Pelemahan KPK. Pada tahun 2022 terjadi demonstrasi sebanyak 2 kali, demonstrasi yang pertama dilakukan oleh sekitar 50 orang mahasiswa terkait penolakan jabatan Presiden tiga periode hingga penertiban tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin dan demonstrasi yang kedua dilakukan di Ddepan Dinas tenaga kerja terkait kenaikan UMK.

2.4.2.2 Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat dari Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

Menurut Peraturan Bupati tersebut layanan perizinan yang diberikan mencapai 70 jenis. Untuk memaksimalkan pelayanan perijinan tersebut, upaya yang



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dilakukan salah satunya adalah mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelayanan. Proses pengeluaran ijin di Kabupaten Grobogan dilakukan dalam kurun waktu 7 hari.

Saat ini untuk melakukan perijinan sudah dilakukan dalam satu pintu di Mal Pelayanan Publik. Berbagai ijin sudah terintegrasi disana termasuk perijinan untuk investasi. Melalui Sistem OSS (One Single Submission), izin berusaha dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat yaitu kurang dari satu jam. Keuntungan adanya OSS antara lain (1) Integrasi Sistem Pelayanan Perizinan. OSS merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem pelayanan perizinan terpusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang saat ini menggunakan SPIPSE dengan PTSP daerah yang menggunakan sistem SiCantik Kemenkominfo. Di dalam OSS juga terintegrasi berbagai sistem dari lembaga-lembaga perizinan lainnya seperti Sistem Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Indonesia National Single Window (INSW), serta Sistem Informasi Administrasi Kemendagri demi memudahkan perizinan (2) Mudah dan Cepat saat Mengurus Perizinan, keseluruhan proses akan menjadi lebih mudah dan cepat. Seluruh data perizinan di daerah dapat diakses dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor-kantor yang bersangkutan. (3) Pengawasan Sistem Semakin Ketat, pemerintah pusat telah menetapkan aturan yang tegas berupa sanksi kepada pemerintah daerah yang tidak menerapkannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha dan Penanaman Modal dinyatakan bahwa Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu. Pemberian Insentif dapat berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

2.4.2.3 Investasi

Investasi di Kabupaten Grobogan mengalami pasang surut dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.78
Performa Investasi di Kabupaten Grobogan

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai investasi PMA	ribu Us \$	30.110	47.468	0	94.483	365
Nilai investasi PMDN	Juta Rp	928.540	903.892	1.134.358	1.220.393,82	7.749.257,74
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		423	134	340	255	4.689
· PMA	Perusahaan	3	1	0	5	11
· PMDN	Perusahaan	420	133	340	250	4.678

Nilai investasi untuk PMA pada tahun 2022 mengalami penurunan sekitar 39% dibanding tahun 2021. Hal ini karena KPI yang ditawarkan di Kabupaten Grobogan belum sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh investor dan masih ada kepeminatan dari investor yang belum ditindaklanjuti di tahun 2022. Untuk investasi PMDN mengalami lonjakan yang signifikan sebesar 630% dibanding tahun 2021 dengan jumlah investor mengalami kenaikan 1.800% dibanding tahun 2021. Hal ini karena adanya perubahan system yang mengharuskan semua perusahaan untuk bermigrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA.

2.4.2.3. Pertumbuhan PDRB Sektoral

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,98 %. Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sektor transportasi dan pergudangan disusul dengan sektor pengadaan listrik gas, Penyediaan akomodasi dan makan minum, Pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan informasi dan komunikasi, Pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor – sektor lainnya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Grobogan pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,00 persen (angka ini menurun dari 27,55 persen dari tahun 2022). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 19,00 persen (turun dari 19,56 persen di tahun 2022), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,00 persen (naik dari 14,14



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

persen di tahun 2022). Secara rinci kontribusi PDRB per sektor lapangan usaha dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.79
Distribusi PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Atas Dasar Harga Berlaku, 2021–2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2021	2022	2023
A. Pertanian, kehutanan dan perikanan	28.43	27.55	27.00
B. Pertambangan dan penggalan	1.43	1.49	2.00
C. Industri pengolahan	14.07	14.14	15.00
D. Pengadaan listrik gas	0.09	0.10	0.00
E. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.05	0.04	0.00
F. Konstruksi	5.64	5.73	6.00
G. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	20.00	19.56	19.00
H. Transportasi dan pergudangan	3.52	5.09	5.00
I. Penyediaan akomodasi dan makan minum	4.80	5.15	5.00
J. Informasi dan komunikasi	3.08	2.87	3.00
K. Jasa Keuangan dan asuransi	4.53	4.50	4.00
L. Real estate	2.05	1.96	2.00
M,N. Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.00
O. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	3.07	2.93	3.00
P. Jasa Pendidikan	5.12	4.73	5.00
Q. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.11	1.05	1.00
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.76	2.84	3.00
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2023

Hasil analisis Location Quotient (Static Location Quotient dan Dynamic Location Quotient) digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi unggulan atau yang potensial dikembangkan di Kabupaten Grobogan. Static Location Quotient dapat mengidentifikasi sektor basis dan non basis untuk waktu tertentu saja (statis) sedangkan Dynamic Location Quotient dapat mengidentifikasi sektor basis dan non basis untuk waktu yang akan datang (dinamis). Berdasarkan analisis Static Location Quotient sektor unggulan Kabupaten Grobogan kurun waktu tahun 2013-2023, ada 10 sektor ekonomi di Kabupaten Grobogan yang merupakan sektor basis dengan nilai $LQ > 1$. Sektor tersebut adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil & sepeda motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan & Asuransi, Real Estate, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial, dan Sektor Jasa Lainnya. Ke-sepuluh sektor tersebut memiliki nilai $SLQ > 1$, yang artinya bahwa sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif, yaitu bahwa disamping sektor-sektor tersebut mampu memenuhi permintaan masyarakat domestic atau setempat, sektor tersebut juga cenderung mampu memenuhi permintaan dari luar daerah Kabupaten Grobogan. Oleh karena itu, sektor sektor tersebut perlu diupayakan dengan baik oleh



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pemerintah untuk lebih dikembangkan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian daerah di wilayah Kabupaten Grobogan.

2.4.2.4 Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya seoptimal mungkin meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri baik melalui upaya sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan dan BUMD, untuk selanjutnya menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Grobogan terus mendorong UMKM unggulan daerah agar lebih produktif dengan pemasaran yang penuh inovasi. Diantaranya memanfaatkan aplikasi Blangkon yang telah memasarkan produk UMKM di Jateng. Sain itu, menjalin kerja sama dengan perbankan, serta lembaga keuangan lainnya. Upaya lainnya adalah melakukan fasilitasi dan pendampingan membantu mempermudah UMKM dalam pengurusan izin berusaha, dan syarat-syarat lain agar UMKM yang berkualitas dapat masuk aplikasi e-Katalog yang merupakan aplikasi untuk memfasilitasi belanja pemerintah daerah secara elektronik. Realisasi belanja produk dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun 2022 untuk belanja operasi sebesar Rp. 507,187,927,849.76 setara 72 % terhadap total belanja operasi. Sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp. 412,448,822,774.06 setara 91,8 % total belanja modal. Secara rinci realisasi belanja produk dalam negeri dapat dilihat pada table di bawah.

Tabel 2.80
Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

No	JENIS	NILAI
1	Anggaran Komitmen Belanja PDN	Rp. 495.192.188.565,00
2	Realisasi Belanja PDN	Rp. 493.505.062.756,00
3	Prosentase PDN	113 %

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.4.3.1 Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio penduduk berpendidikan S1 sampai S3 di Kabupaten Grobogan selalu meningkat dari tahun 2018-2022. Dilihat dari proporsinya, penduduk dengan pendidikan S1 lebih besar dibandingkan dengan penduduk berpendidikan S2 dan S3.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 2.81
Rasio Lulusan S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kabupaten Grobogan
Tahun 2018-2022

Pendidikan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
S1	23.010	24.850	25.416	26.887	28.233
S2	1.058	1.152	1.206	1.279	1.342
S3	40	33	19	24	27
Jumlah	24.108	26.035	26.641	28.190	29.602
Jumlah Penduduk	1.459.780	1.473.431	1.478.278	1.488.947	1.501.145
Rasio	1,65	1,77	1,80	1,89	1,97

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2018-2022 (diolah)

2.4.3.2 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (dependency ratio) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif (15-64 tahun) terhadap penduduk tidak produktif (<15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Demikian pula penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Rasio ketergantungan ini merupakan indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa rasio ketergantungan total sebesar 44,30 persen, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia kerja) mempunyai beban tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 44,30% ini disumbangkan oleh rasio penduduk muda (32,92%) dan rasio penduduk tua (11,38%).

Tabel 2.82
Angka Ketergantungan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-14 tahun	176.637	165.855	342.492
15-64 tahun	522.783	517.446	1.040.229
>65 tahun	54.976	63.448	118.424
Jumlah	754.396	746.749	1.501.145
Rasio Ketergantungan			44,31

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Grobogan Tahun 2022



2.5 Inovasi Daerah

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik dalam pemerintahan, tidak dapat terlepas dan diperlukan adanya inovasi, sebagai upaya penyelesaian permasalahan daerah dan akselerasi pencapaian target pembangunan daerah. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan inovasi. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja BerAKHLAK. Inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Daftar Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
1	BERAMAL (Berikan Akta Kematian dan Akta Kelahiran)	Inovasi pendaftaran akta kelahiran atau akta kematian melalui aplikasi WhatsApp oleh petugas registrasi desa. Untuk pendaftaran Akta Kelahiran anak yang baru lahir sekaligus mendapatkan KK dan KIA, sedangkan untuk pendaftaran akta kematian sekaligus mendapatkan KK dan KTP status perkawinan Cerai Mati bagi istri/suami yang ditinggalkan
2	Kolaborasi Pengelolaan Pasar Rakyat (K-POP) di Kabupaten Grobogan	Peningkatan pengelolaan pasar yang lebih profesional dengan penguatan kemampuan SDM pengelola dan perbaikan sistem pelaporan retribusi menjadi sebuah sistem melalui kemampuan pengelola untuk melakukan self assesment menuju pasar SNI dan dicapai dengan pelibatan seluruh stakeholder, dan penguatan kolaborasi stake holder di tingkat Kabupaten dan tingkat Pusat
3	KERUDUNG KOTAK	Pelayanan Kesehatan untuk remaja yang meliputi pemeriksaan tekanan darah, penimbangan BB, TB dan LILA serta pemeriksaan Hb . Selain itu juga & penyuluhan kesehatan reproduksi dan seksual untuk orang tua yang dilakukan di setiap RT
4	TATO (Tanya Apotek Tanya Obat)	Mempermudah layanan kefarmasian oleh pasien
5	GEMAS LIHAT PTM - Gerakan Masyarakat Sehat Peduli Penyakit Tidak Menular	Gerakan Masyarakat Peduli Sehat Penyakit Tidak Menular yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor resiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan di wilayah kerja Puskesmas Ngaringan. Kegiatan ini merupakan upaya pengabdian kepada masyarakat dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Ngaringan dalam meningkatkan derajat kehidupan dan kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat yang berumur 15 tahun keatas bisa mendeteksi penyakit tidak menular sejak dini.
6	Pengelolaan Limbah UKM Tahu untuk Konservasi Air dan Energi serta	Pengelolaan limbah tahu untuk mengurangi dampak lingkungan di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo dengan bekerjasama antara UNDIP dan Pemkab Grobogan. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu dapat



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Peningkatan Ekonomi Lokal	menampung limbah dari 22 UKM Tahu. IPAL menghasilkan biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Selain itu proses daur ulang limbah lainnya menjadi produk yang bermanfaat, antara lain mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik dan nata de soya dan limbah padat menjadi kompos.
7	Akurasi Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dasar Melalui SIPPEKA (Sistem Pengendalian Penyusunan RKA)	Peningkatan penerapan manajemen kinerja yang terstruktur mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi serta pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang berkualitas. Dalam hal perencanaan, bukan hanya pemenuhan dokumen semata, tetapi juga harus berorientasi kepada kualitas dokumen dan penerapannya. Sehingga inovasi dimaksudkan untuk mengatasi persoalan rendahnya akurasi penyusunan RKAS dana BOS dan peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan
8	Pengelolaan Aset di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan melalui Digitalisasi Informasi Aset (DIASET)	Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
9	Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang Terintegrasi dengan SIM RS untuk mewujudkan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	Mendukung terintegrasinya sistem informasi akuntansi dan keuangan dengan SIM RS untuk bisa menghasilkan data transaksi keuangan yang valid dan akurat serta mudah diakses, transparan, akuntabel dengan didukung teknologi informasi perlu dilakukan kolaborasi dengan para pengelola kegiatan untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan, pencatatan, penyusunan data transaksi keuangan yang menghasilkan informasi akuntansi yang akurat dan valid yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi dan keuangan.
10	Optimalisasi Proses Penghapusan Barang Milik Daerah untuk Mewujudkan Laporan Neraca Aset yang Akuntabel di BPPKAD Kabupaten Grobogan	Pengajuan usulan penghapusan dan proses penghapusan Barang Milik Daerah dapat menjadi lebih efisien dan efektif
11	PUSAKA (Pelestarian Unsur Seni dan Kebudayaan) Leluhur Melalui Electronic Education Entertainment Method (e-EEM) di Kabupaten Grobogan	Digitalisasi kebudayaan dengan pemanfaatan media sosial secara positif sehingga mampu mendorong adanya inovasi dan kreativitas dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan di era revolusi industri 4.0
12	Pengelolaan data akreditasi terintegrasi dengan ruang pelayanan di RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.	Tersedianya sistem data akreditasi yang terintegrasi dengan ruang RSUD Dr. R. Soedjati
13	Integrasi Pengelolaan Barang Persediaan Melalui E-SIPBaper-	Pemantauan teknologi sistem informasi manajemen yang aplikatif didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, dinamis, dan inisiatif, sehingga kualitas dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Bagum Berbasis Desktop User Friendly Dalam Mengatasi Keterlambatan Laporan Keuangan (Financial Statement Delay) Organisasi Perangkat Daerah Untuk Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik	kuantitas output kinerja manajerial dan kinerja pegawai meningkat
14	Pelayanan Administrasi Era Pandemi Covid 19 Berbasis Teknologi Bergerak dengan Aplikasi Si Desta (Sistem Informasi Desa Digital) di Kecamatan Wirosari	Pelayanan administrasi agar masyarakat dapat terlayani dengan cepat dan mudah sesuai dengan protokol kesehatan serta peningkatan pengetahuan sistem informasi desa digital dapat meningkat bagi Pemerintah Desa/Kelurahan se Kecamatan Wirosari
15	Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Mutasi PNS melalui Penataan Sistem Mutasi Kepegawaian di Kabupaten Grobogan	Peningkatkan kinerja Kepala Bidang Mutasi Pegawai Kabupaten Grobogan
16	Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Kebutuhan Organisasi Melalui Partisipasi ASN dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Kompetensi (PENA BANGKOM)	Partisipasi ASN dalam Pena Bangkom melalui aplikasi digital usulan pengembangan kompetensi yang dapat diakses oleh seluruh ASN di Kabupaten Grobogan, yang dibuat berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan jabatan ASN
17	COKLAT LINTING	Program inovasi dalam rangka penurunan dan pencegahan stunting di Puskesmas Geyer 1
18	BERSELANCAR TEPI BARON	Menekan supaya kasus persalinan dengan kala 1 lama tidak meningkat
19	SEHARI SEHATI	Peningkatan meningkatkan kualitas hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar yang meliputi sosialisasi ditingkat Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi ditingkat desa dan diadakan pertemuan rutin setiap 1 bulan sekali kegiatannya meliputi pemeriksaan PTM terintegrasi dengan lansia
20	Grabak Tampir	Upaya penguatan program pengendalian penyakit tidak menular yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan deteksi dini faktor resiko PTM sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas di wilayah minimal setingkat dusun atau rukun warga
21	Sistem Informasi Perlintasan Sebidang Kereta Api Sebagai	Sistem Perlintasan Sebidang berdasarkan data laporan hasil survei sehingga dapat menyajikan data yang perlintasan sebidang di semua Kecamatan di Kabupaten Grobogan secara



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Upaya Mewujudkan Zero Accident di Kabupaten Grobogan	detail dan informatif. Sistem informasi tersebut dikembangkan agar dapat diakses seluruh masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan
22	Sinergitas Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) melalui Gardu Pokja (Gerakan Terpadu Kelompok Kerja) di Kabupaten Grobogan	Membangun kolaborasi melalui pengintegrasian peran multistakeholder dan multisektoral, baik dari pemerintah sendiri, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaan Program/Kegiatan serta keterlibatan sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kampung KB di Kabupaten Grobogan.
23	Dalmadi Center Pusat Promosi Produk Lokal Go International	Pembuatan Sistem Promosi dan Pemasaran Produk Lokal secara Online dan terintegrasi yang akan memudahkan masyarakat di Kabupaten Grobogan, Luar Daerah, bahkan Dunia Internasional untuk mudah mengenal dan mempelajari serta membeli produk produk Lokal yang dihasilkan oleh pelaku UMKM dan IKM di Kabupaten Grobogan
24	One Day Service Gampang, Gelis, Gratis (ODS 3 G)	Sebuah langkah perubahan atas pelayanan PBB-P2 dimana Pelayanan Perubahan data SPPT PBB-P2 dapat diberikan secara tuntas dalam satu hari
25	Sistem Pengendalian Akuntabilitas Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Sinergitas Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran yang Terintegrasi (Sinergi Pelangi)	Terwujudnya pedoman penyusunan dan penelaahan dokumen perencanaan penganggaran yang akuntabel dan ketepatan penggunaan alokasi anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan besaran dampak penggunaan anggaran terhadap hasil pembangunan
26	Akuntabilitas Laporan Omzet Pajak Daerah (AKALEPAKDE) di Kabupaten Grobogan	Terwujudnya laporan omzet pajak hotel, restoran dan cafe melalui pengawasan dan monitoring
27	Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi Dan Umkm (SIDATAKU)	Terwujudnya data tunggal dan terintegrasi sangatlah penting dalam rangka pengambilan kebijakan dan pelaporan terkait pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Grobogan.
28	POS PAKDE (Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan	Meningkatkan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan, jumlah penerbitan dokumen kependudukan khususnya KK, KTP-el, KIA, SKP, Akta Kelahiran dan Akta Kematian, meningkatkan kualitas pelayanan adminduk menuju pelayanan prima, mempermudah prosedur dan mekanisme pelayanan adminduk, mencegah adanya pungutan liar dan calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta mendekatkan pelayanan adminduk kepada masyarakat
29	Pengelolaan Sampah Guna meningkatkan Perekonomian Masyarakat menggunakan Media Online dengan Konsep	Pengelolaan sampah terpadu dan terintegrasi dari Rumah Tangga, bank sampah dan Bumdes di TPS dengan 5R di wilayah Kecamatan Gubug yang dapat menciptakan kesehatan lingkungan dan meningkatkan pendapatan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	5R Di Kecamatan Gubug	
30	Jaringan Pemasaran Ketahanan Pangan (JARAN KEPANG)	Meningkatkan pemasaran produk pangan lokal dan mengembangkan perekonomian daerah melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku usaha pangan lokal
31	Mewujudkan Pelaporan Harian Setiap Kejadian Dan Pengolahan Data Berbasis Elektronik (E-Ladalah)	Digitalisasi sistem pelaporan harian setiap kejadian dengan aplikasi elektronik, lapor, data dan olah (E-LADALAH) guna mempercepat penyebaran data dan informasi yang di dapat dan menerapkan prinsip-prinsip e-government di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Grobogan.
32	"APPEM PEDES" Pengawasan Penyusunan Produk Hukum Desa di Kabupaten Grobogan	Pelaksanaan pengawasan penyusunan produk hukum desa melalui akselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa di Desa Jono Kecamatan Tawangharjo, pelaksanaan evaluasi dan penetapan Peraturan Desa, serta membangun sistem aplikasi penyusunan dan pembimbingan peraturan desa
33	Data Online Kendaraan Kabupaten Grobogan (DOKAR GROBOG)	Pemilik kendaraan bermotor wajib uji dapat melakukan pelayanan administrasi uji kendaraan bermotor secara mudah, transparan, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja
34	Lumbung Pangan Reborn Menjaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Petani	Peningkatkan fungsi lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat, sebagai sistem Resi Gudang, sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan sebagai unit pengembangan ekonomi Gabungan Kelompok Tani sebanyak 10 Lumbung Pangan Masyarakat sebagai pilot proyek
35	Mewujudkan Partisipasi Dunia Usaha Melalui Pemanfaatan Anggaran CSR dalam Program Perlindungan Sosial Korban Bencana di Kabupaten Grobogan	Melibatkan dunia usaha dengan memanfaatkan dana CSR untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan pembekalan teknis dapur umum lapangan bagi relawan dan stakeholder terkait, serta melaksanakan operasional dapur umum lapangan untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana non-alam
36	Pengelolaan Keamanan Informasi eGovernment Melalui Tim CSIRT Di Kabupaten Grobogan	Penyediaan data informasi yang handal, tersedianya data yang akurat dan valid dengan didukung penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.
37	Digitalisasi Titik Tapal Batas (DiK TaBa) Kecamatan	Memberikan kemudahan dalam pengumpulan data spasial. Karena setiap Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan data terkait koordinat titik pilar batas dapat diakses secara digital.
38	Sistem Informasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)	Terwujudnya integrasi penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi; Anak Mesti Sekolah di Kabupaten Grobogan sehingga dihasilkan database Anak Tidak Sekolah (ATS) hasil verifikasi dan validasi, serta mengembalikan ATS hasil verifikasi ke sekolah sesuai jenjang terakhirnya, termasuk memberikan bantuan personal melalui APBD maupun CSR.
39	Penanganan Stunting Melalui Kolaborasi Gerakan Cegah Stunting "Geceg	Tersedianya database kasus stunting melalui transformasi digital yang dapat diakses secara real time oleh pemangku kebijakan (Pemerintah Daerah) dan stakeholders



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
	Stunting” di Kabupaten Grobogan	
40	Model Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di Kabupaten Grobogan Melalui Gerakan Menulis Seribu Buku (GELIS IBU)	Terwujudnya peningkatan mutu/kualitas pendidikan melalui Gerakan Menulis Seribu Buku (Gelis Ibu) sebagai bagian dari Gerakan Literasi Sekolah (GLS) dalam rangka menumbuhkembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari sekolah yang diharapkan berkembang ke lingkup keluarga dan masyarakat, dimulai dengan buku-buku yang ditulis oleh seluruh Kepala Sekolah.
41	Satu Data Kepegawaian Melalui Sistem Informasi Pengelolaan dan Pelayanan ASN (SIPP ASN)	Aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menyediakan informasi untuk manajemen data kepegawaian dan menyediakan pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
42	Methuk Jempolan (Jemput Pola Tanam)	Inovasi yang bertujuan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), meningkatkan kesuburan tanah dan berpotensi menghemat penggunaan pupuk.
43	Pemberdayaan Petani Bawang Merah melalui Sinergitas Pembentukan Lembaga Korporasi di Kabupaten Grobogan	Pengembangan pangsa pasar bawang merah dengan pengembangan diversifikasi produk dan peningkatam kualitas bawang merah
44	Rat Hunter	Inovasi pengendalian hama tikus yang dilakukan dengan memanfaatkan predator musuh alami yaitu burung hantu jenis Tyto alba. Pengendalian menggunakan predator burung hantu dapat mengurangi penggunaan racun kimia serta merupakan salah satu budidaya pertanian yang berkelanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs)
45	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif	Penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengarahkan program Ekonomi Kreatif di Kabupaten Grobogan
46	SINADA PENCERAH (Sinergi Integrasi Satu Data Untuk Perencanaan yang Cermat, Akurat dan Hebat di Kabupaten Grobogan)	Pengembangan system informasi bidang prasarana wilayah untuk menunjang pengambilan keputusan dan analisis untuk optimalisasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana wilayah, serta menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat umum.
47	Layanan SI CESA (Restorasi dan Digitalisasi Arsip Buku Letter C Desa)	Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan kepada masyarakat Memberikan layanan perbaikan Arsip Buku Letter C Desa yang mengalami kerusakan secara fisik
48	CETING 1000 (Cegah Stunting Dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan)	Inovasi ceting 1000 adalah kegiatan pencegahan stunting dalam 1000 hari pertama kehidupan yang dilakukan secara terpadu denga melibatkan lintas program dan lintas sector untuk mengatasi masalah gizi utamanya stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat, dengan sasaran dari



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		kegiatan ini adalah : Ibu hamil, Bayi usia 0-6 bulan, Ibu bayi, Remaja Putri, Calon pengantin, Balita, dan Kader Masyarakat
49	Lentera Guru	Lentera Guru adalah aplikasi presensi guru dan siswa berbasis selfie dan lokasi GPS telah menjadi solusi modern yang inovatif dalam mengelola kehadiran dan pemantauan kegiatan di sekolah.
50	Kelas Pintar Mengonsumsi Tablet FE	Pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas Toroh II yaitu pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri setiap bulan sekali di sekolah yang dilaksanakan dalam inovasi Germitada yaitu meliputi : Melakukan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri, Pemberian Tablet Tambah Darah, Melakukan Senam Bersama, Melakukan Makan Bersama, Penyampaian Materi Tentang anemia dan Asupan Gizi.
51	CENTINI (Cegah Stunting Sejak Dini)	CENTINI adalah upaya cegah stunting sejak dini melalui peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang dan pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan pada remaja putri di sekolah sekaligus memberikan tablet tambah darah (TTD).
52	KLIK JEMPOLAN (Ketepatan Layanan Informasi Kesehatan Jemput Persalinan dengan Ambulance)	Inovasi yang dibuat Puskesmas 2 Geyer bernama JEMPOLAN , singkatan dari Jemput Persalinan dengan Ambulance yang dimulai pada tahun 2019, dan dalam perkembangannya program Jempolan ini diinovasikan dengan penambahan alarm yaitu penanda adanya pasien yang akan melahirkan di Puskesmas Geyer 2. Program inovasi ini akan terus dikembangkan sehingga dapat memudahkan ibu yang akan bersalin.
53	Benguk Tempe Hitam (Mubeng-mubeng Yuk Temukan ,Periksa dan Edukasi HIV Tanpa Masalah)	Pelayanan yang dikembangkan Puskesmas Penawangan Benguk Tempe Hitam (Mubeng-mubeng Yuk HIV Tanpa Masalah) atau VCT Mobile yaitu proses konseling pra-testing, konseling post-testing dan testing HIV secara sukarela yang bersifat confidential (rahasia) dan secara lebih dini membantu orang mengetahui akan status kesehatannya.
54	Smart Thermometer and Record sebagai Penunjang Smart Library	Smart Thermometer And Record yang dikembangkan dengan menggunakan konsep Internet of Things (IoT) yang dirancang sebagai solusi cerdas yang tidak hanya mampu mengukur suhu tubuh, tetapi juga secara otomatis mencatat identitas pengunjung secara realtime yang dalam pengembangannya diaplikasikan dalam konteks Perpustakaan Pintar (Smart Library) dimana sebelumnya alat ini hanya digunakan untuk pengecekan suhu dan pencatatan identitas berdasarkan E-KTP.
55	Kader Peduli Keluarga Siap Berjaga (KPK SIAGA)	Pemberdayaan kader posyandu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi mereka untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat yaitu pada aspek kesehatan ibu dan bayi sehingga dapat menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi
56	Kecap Siap Jaga Ketan	Serangkaian kegiatan kursus/penyuluhan bagi calon pengantin yang diikuti oleh sepasang calon pengantin secara menyeluruh di wilayah Puskesmas Kradenan 1 dengan bukti memperoleh sertifikat penyuluhan calon pengantin, selanjutnya dari evaluasi kegiatan Kecap Siap Jaga Ketan di integrasikan dengan kartu kontrol kehamilan dan persalinan sebagai



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		monitoring kesehatan sehingga meminimalisir masalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
57	GO KASMARAN (Grobogan Kelola Sampah Mandiri Berkelanjutan)	Merupakan Inovasi di bidang Persampahan dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengolah sampah secara mandiri atau melalui kelompok swadaya masyarakat. Selain itu penggunaan Magot sebagai pakan lele selain membantu pemecahan permasalahan sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
58	INTAN SMART (Integrasi Data Wajib Pajak berbasis NIK, Tanda Tangan Elektronik dan Smart NPWPD)	Strategi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan dalam Mewujudkan Efektifitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan dengan mengintegrasikan data Wajib Pajak di Kabupaten Grobogan dengan NIK dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, akan di terapkan Tanda Tangan Elektronik pada layanan Pajak, Smart Card NPWPD, dimana kartu NPWPD dimanfaatkan menggunakan aplikasi android yang berisi kewajiban / tagihan Wajib Pajak, dan Smart Card ini juga dapat digunakan untuk KSWP maupun penertiban Pajak oleh Satpol PP.
59	Sinergitas Penanganan Potensi Intoleransi melalui Pembentukan Kampung Bhinneka di Kabupaten Grobogan	Sinergitas Penanganan Potensi Intoleransi Melalui Pembentukan Kampung Bhinneka Di Kabupaten Grobogan ini merupakan upaya inovatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan untuk mengimplementasikan program Pemerintah Kabupaten Grobogan menuju Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya.
60	SIDUTA (Sistem Terpadu Antar Kerja)	SIDUTA merupakan sebuah inovasi yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait kebutuhan informasi pasar kerja yang sesuai kompetensi bagi calon tenaga kerja terlatih lulusan BLK dan LPKS; pelayanan informasi pasar kerja yang dapat diakses dimana saja; pelayanan AK1 bagi calon tenaga kerja terlatih, dan penempatan calon tenaga kerja terlatih di perusahaan yang membutuhkan
61	KANCING DEPAN (Kader Andalan Cegah STunting Dengan Pemantauan Kesehatan)	KANCING DEPAN (Kader Andalan Cegah Stunting Dengan Pemantauan Kesehatan) adalah inovasi dari puskesmas godong 2 sebagai upaya nyata kami menurunkan dan mencegah kejadian stunting di wilayah kerja puskesmas godong 2 yang melibatkan lintas program diantaranya program KIA, program UKS, program Gizi, program Promkes serta program Kesehatan Lingkungan. Inovasi ini juga melibatkan lintas sektor diantaranya sektor pemerintah desa serta sektor pendidikan.
62	Penguatan One Village One Product Sentra Industri Pande Besi Desa Putatsari untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Pande besi merupakan sebuah inovasi dalam ranah keterampilan. Keterampilan yang dibuat yaitu membentuk besi menjadi perkakas tajam seperti pisau, sabit, cangkul, golok, keris, dan lain sebagainya. Dengan adanya pengembangan sentra nantinya juga dapat memberdayakan masyarakat, dapat menampung tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran masyarakat melalui kegiatan ekonomi, agar menjadi produktif dan berperan aktif sehingga dapat memicu laju perkembangan yang kian hari kian meningkat.
63	PEKAN PTM BERSAMA GERLINSMAS	Langkah preventif yang dibuat agar masyarakat yang masih sehat dan bugar dapat terhindar dari berbagai Penyakit Tidak



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
		Menular (PTM) dengan Peserta Pekan PTM bersama Gerlinsmas adalah Lintas Sektor Sewilayah Puskesmas Kradenan I meliputi Kepala Desa, Kader Posyandu, Masyarakat dan Karyawan Puskesmas Kradenan I ada sebanyak 100 Peserta.
64	JEMPOL PREMIUM (Jemput Bola Pelayanan Perizinan Usaha Mikro)	Program Pelayanan perizinan yang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan datang langsung di pusat berkumpulnya masyarakat Kabupaten Grobogan (rutin dan insidental) agar masyarakat dapat mengakses dengan lebih mudah, meliputi : Sosialisasi perizinan berusaha, Layanan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui system OSS (Online Single Submission) RBA yang sebelumnya disebut SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan hanya menggunakan KTP tanpa dipungut biaya untuk usaha beresiko rendah, Konsultasi pendampingan perizinan berusaha,
65	Briket Batok Kelapa Alternatif Energi Terbarukan	Pemanfaatan limbah batok kelapa menjadi arang batok kelapa sehingga dapat menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan pengganti LPG.
66	NENSI (Nenek Asi)	Kegiatan sosialisasi di tingkat Kecamatan Kedungjati dan penyuluhan-pelatihan di Desa Panimbo disertai peragaan cara menyusui yang benar yang diadakan karena capaian ASI Eksklusif di Desa Panimbo Kecamatan Kedungjati 70% dengan sasaran kegiatan adalah : Bayi usia 0-6 bulan, Ibu bayi, Nenek bayi, Ibu hamil, dan Kader Posyandu.
67	HACKING KEDELAI	Metode penanaman yang mengacu pada spesifikasi lokasi, bersifat partisipatif, mengintegrasikan teknologi yang sinergis, serta bersifat dinamis dan fleksibel yang diselaraskan dengan kondisi alam dan sosial-ekonomis petani kabupaten Grobogan, dimana metode ini memiliki tiga model peretasan yaitu 1) penyongsong hujan pada MT I, 2) methuk jempolan pada MT II dan 3) mengejar air pada MT III.
68	Sawah Digital	Digitalisasi sawah di Kab. Grobogan yang menghasilkan peta spasial lahan sawah sampai dengan petak-petak sawah milik petani yang disajikan hingga tingkat kelompok tani, dimana digitalisasi bermanfaat untuk perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, alokasi pupuk, pola tanam, serta informasi stok dan harga komoditas
69	Model Klasterisasi Menggunakan Optimasi Algoritma K-Means pada Opini Masyarakat Tentang Kebijakan Pertemuan Tatap Muka Sekolah Tahun 2022	Metode penentuan kebijakan terkait pertemuan tatap muka sekolah di tahun 2022 menggunakan algoritma K-Means untuk mengklasterisasi opini masyarakat.
70	Pengelolaan Layanan Sistem Informasi dan E-Government Berbasis Android di Kabupaten Grobogan (Portal Silegs)	Sistem Informasi yang memiliki beberapa layanan yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pelayanan fingerprint/ presensi berbasis android untuk mengakomodasi keperluan pegawai dalam pencatatan kehadiran dan penilaian terhadap tingkat kedisiplinan, serta melakukan evaluasi terstruktur melalui sistem informasi, juga layanan sitapres yang berkaitan dengan tunjangan pegawai untuk menilai dan memberikan tambahan penghasilan sesuai dengan beban kerja pegawai, hingga pengelolaan website desa.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
71	TERTIB SING TOKCER STRATEGI PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN TOKO ECERAN MENUJU PEMASARAN GLOBAL DI KABUPATEN GROBOGAN	Penertiban dan Peningkatan daya saing toko eceran dimana penertiban dilaksanakan untuk usaha toko swalayan yang sudah didirikan tanpa ijin dan dalam pengembangannya dibuat peta zonasi, sedangkan daya saing toko eceran dilaksanakan melalui digitalisasi sistem stock barang, sistim laporan keuangan dan branding tempat usaha untuk menghadapi perkembangan jaman.
72	GEMA UTAMA dan SIGANA – Strategi Respon Cepat Dan Terintegrasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Grobogan	Gema Utama adalah Gerakan Bersama Mengurus Bantuan Bencana ke Masyarakat, sedangkan SiGANA adalah Sistem Informasi Grobogan Aman Bencana yang merupakan aplikasi pantauan bencana yang dibangun untuk dapat digunakan sebagai media pengelolaan dan respon bencana di wilayah Kabupaten Grobogan dengan menggunakan Geographic Information System berbasis website dan mobile (berbasis android) sehingga dapat diakses dimana saja dengan koneksi internet.
73	Penilaian Kinerja Jaringan Irigasi Berbasis Partisipasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Inovasi yang disusun dalam rangka mengoptimalkan kinerja jaringan irigasi sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur irigasi dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk melakukan penelusuran jaringan irigasi, dimana data hasil penelusuran P3A diolah menjadi laporan kinerja jaringan irigasi yang dapat di manfaatkan sebagai acuan dalam perencanaan infrastruktur jaringan irigasi di Kabupaten Grobogan.
74	Pengawasan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan melalui Aplikasi Sipetir Gaspol (Sistem Pengawasan Terintegrasi Petugas Pemungut Pajak Online) di Kecamatan Ngaringan	Aplikasi pengawasan terintegrasi petugas pemungut pajak secara online di Kecamatan Ngaringan untuk mengetahui kinerja petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sehingga mampu mengawasi kinerja petugas pemungut pajak PBB secara terukur, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait fasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kecamatan.
75	SIAPA NONA (Sistem Informasi Pendataan Penduduk Non Permanen)	Aplikasi untuk melakukan pendataan penduduk non permanen secara daring sehingga dapat diterbitkan Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen dan dapat terdata secara administratif sehingga dapat dipetakan persebarannya yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan dalam pembangunan daerah serta pengendalian keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan
76	Pemberdayaan Masyarakat dengan Model Kampung Tematik di Desa Jangkunharjo Kecamatan Brati	Aksi perubahan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui pemberdayaan masyarakat dengan model kampung tematik dimana menampakkan hasil yang memuaskan karena kampung lebih rapi dan nyaman yang tercapai karena telah terlaksananya pengecoran bahu jalan, penutupan saluran dengan plat beton, perapian lampu jalan, pembuatan mural dinding, bertambahnya tanaman hias di pot disepanjang jalan lingkungan, terbukanya potensi ekonomi berupa budidaya bibit tanaman hias, serta meningkatnya kepedulian warga.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Nama Inovasi	Penjelasan Inovasi
77	Rumah Kedelai Grobogan (RKG)	Instalasi terpadu untuk memberikan pelayanan informasi dan edukasi agribisnis kedelai lokal hulu sampai hilir berbasis one stop learning, karena jumlah permintaan kedelai yang terus meningkat tetapi tidak diikuti peningkatan produksi dalam negeri secara signifikan.
78	ADM DESA (Anjungan Dukcapil Mandiri Desa)	Sebuah alat cetak dokumen adminduk yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat yang ditempatkan di desa/kelurahan dan dapat mencetak menggunakan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah.
79	Akuntabilitas Pelaporan Dana Bos Melalui "SINADI BOS" di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan	Sebuah sistem pelaporan yang dibuat dengan tujuan mewujudkan akuntabilitas pelaporan dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan yang berdampak positif untuk pemerintah Kabupaten Grobogan dan Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya kualitas pelaporan keuangan.
80	Rumah Kreatif Grobogan (RKG)	Rumah Kreatif Grobogan (RKG) sebagai sarana untuk berkreasi dan berinovatif masyarakat Grobogan khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif. Kegiatan utama yang ada di rumah kreatif Grobogan adalah workshop berbagai kuliner dengan chef, tempat studi tiru dari berbagai komunitas atau kalangan dari penjuru Indonesia. Fasilitas tersedia Workshop Kuliner , Gallery Room, Meeting Room, Creative Konsultasi, kantor & Mushola.
81	DESWITA BERGERAK (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat)	Inovasi di bidang pariwisata dengan memadukan pesona wisata desa dan kegiatan budaya adat istiadat lokal (kearifan lokal) sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberdayakan warga masyarakat dalam penyediaan cinderamata, makanan minuman, dan homestay. Dukungan dari unsur ABCGM baik untuk promosi, peningkatan produk pariwisata, dan peningkatan SDM pariwisata sudah dilakukan
82	Bumdesa Bimo Suci, Wirosari, Grobogan	Badan usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa) Bumi Suci merupakan program pendampingan tim pengabdian Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) yang berada di empat desa di Kecamatan Wirosari (Desa Karangasem, Tambakselo, Dokoro dan Tegalrejo). Program pendampingan tersebut adalah wujud sinergisme antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian warga.

2.6 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kabupaten Grobogan pada masing-masing urusan pemerintahan adalah sebagai berikut :

2.5.1 Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Anak tidak sekolah pada usia jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, kualitas ruang kelas dan sarana prasarana Pendidikan, dan kualitas pendidik dengan kualifikasi Pendidikan belum sesuai standar.
2. Kualitas Kesehatan ibu dan anak yang ditandai ditemukannya kasus kematian ibu dan kematian bayi, kasus stunting dan kekurangan gizi, angka kesakitan yang masih tinggi dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat belum optimal.
3. Kualitas prasarana irigasi pertanian, jalan, sistem drainase, sarana air bersih dan sanitasi yang belum memadai, dan pengelolaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, dan kapasitas penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum optimal.
4. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang belum optimal.
5. Belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh, dan pemenuhan sarana prasarana umum perumahan.
6. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, cakupan pelayanan kebakaran, dan penanggulangan bencana.
7. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial maupun rehabilitasi sosial diluar panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan korban bencana.

2.5.2 Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Masih adanya pengangguran terbuka disebabkan penempatan kerja yang kurang, dan kapasitas tenaga kerja yang belum memadai.
2. Kesetaraan gender dalam pembangunan yang belum terwujud, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pernikahan usia anak, serta kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak yang belum optimal.
3. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum ideal, dan kasus kerawanan pangan yg memerlukan penanganan.
4. Masih rendahnya luasan lahan yang bersertifikat dan penyelesaian izin lokasi yang belum optimal.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

5. Ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan, termasuk ruang terbuka hijau.
6. Pengelolaan sampah yang mencakup pengurangan produksi, pengangkutan dan pengolahan sampah yang cakupannya masih kurang.
7. Kepemilikan dokumen administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang perlu ditingkatkan, terutama akta kelahiran, KIA, akta pernikahan, dan akta kematian.
8. Kualitas kelembagaan masyarakat dan status kemajuan desa yang perlu ditingkatkan.
9. Partisipasi masyarakat dalam berKB yang perlu ditingkatkan, dan pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk yang belum optimal.
10. Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan kualitas layanan pengujian kendaraan, dan angkutan umum yang belum memadai.
11. Pengembangan SPBE untuk menunjang smart city dan pelayanan informasi publik yang belum optimal.
12. Keaktifan koperasi dan kesehatan KSP/USP, akses UMKM terhadap pembinaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, promosi produk dan kemitraan UMKM yang masih kurang.
13. Belum optimalnya investasi PMA maupun PMDN, promosi dan penyediaan informasi potensi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan.
14. Kewirausahaan pemuda yang masih kurang dan kualitas pemuda dan organisasi kepemudaan yang perlu ditingkatkan.
15. Prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional yang perlu ditingkatkan, karena kurangnya pelatih bersertifikasi dan sarana prasarana olah raga, dan kurangnya pembinaan atlet,.
16. Pengelolaan satu data dan validitas data statistik sektoral yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
17. Pengelolaan keamanan informasi yang belum optimal.
18. Pelestarian terhadap sejarah dan budaya local dan seni budaya daerah yang masih kurang.
19. Budaya literasi dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan yang masih kurang, dan kurangnya kualitas perpustakaan dipengaruhi oleh terbatasnya koleksi buku perpustakaan, kualitas SDM, dan sarana prasarana perpustakaan.
20. Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan dan belum optimalnya pengelolaan arsip di lembaga kearsipan daerah dan perangkat daerah.



2.5.3 Urusan Pilihan

1. Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan dan pembinaan terhadap kelompok pembudidaya ikan.
2. Belum optimalnya jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah, dipengaruhi oleh kualitas amenities, atraksi, aksesibilitas, dan kompetensi SDM pengelola pariwisata yang kurang.
3. Produktivitas dan nilai tambah komoditas pertanian yang masih kurang, dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian hama dan penyakit tanaman yang belum optimal.
4. Belum optimalnya produksi peternakan dan pengendalian penyakit hewan dan masyarakat veteriner.
5. Pengawasan pasar dalam upaya pengendalian harga dan pasokan pangan yang perlu ditingkatkan, kurangnya kelayakan pasar tradisional, dan pelaksanaan tera dan tera ulang yang belum optimal.
6. Pertumbuhan industri dan kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang masih rendah.
7. Kualitas dan daya saing, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran industri kecil dan menengah yang masih rendah.
8. Belum optimalnya Tidak adanya fasilitasi pemberangkatan transmigrasi

2.5.4 Urusan Penunjang

1. Penyediaan dan pemanfaatan hasil kelitbangan yang belum optimal.
2. Kualitas dokumen perencanaan yang perlu ditingkatkan.
3. Penggalan potensi pajak dan retribusi yang perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, dan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang perlu dioptimalkan.
4. Kompetensi ASN dan penempatan sesuai kompetensi perlu ditingkatkan.
5. Penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah belum optimal.
6. Kualitas layanan kesekretariatan daerah dalam menunjang kinerja pembangunan daerah perlu ditingkatkan.
7. Kualitas layanan kesekretariatan DPRD dalam menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD belum optimal.
8. Kualitas pelayanan di Kecamatan yang perlu ditingkatkan.
9. Tingkat Maturitas SPIP dan dan kapabilitas APIP, kualitas pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan aparat pengawas eksternal yang belum optimal.
10. Belum optimalnya peningkatan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, pengendalian dan penanganan potensi konflik social.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Grobogan yang perlu menjadi prioritas pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal

Penguatan dan pengembangan daya saing di bidang perekonomian menjadi tugas penting Pemerintah Kabupaten Grobogan pasca pandemi covid-19 agar mampu mengembalikannya ke kondisi semula dan bahkan meningkatkannya. Pengembangan ekonomi masyarakat harus memperhatikan kondisi sumberdaya/potensi lokal yang ada di masyarakat. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat yaitu penguatan sektor-sektor unggulan penopang perekonomian daerah, penguatan daya tarik investasi, penguatan pembangunan dari sektor pedesaan, serta penyediaan sumberdaya tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.

2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia memiliki kaitan erat dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pelaksanaan pembangunan yang adil dan merata. Optimalisasi akses dan pemerataan kualitas pendidikan sepanjang hayat harus dikuatkan untuk membentuk masyarakat yang cerdas. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan budaya literasi yang baik di masyarakat. Penguatan akses diprioritaskan pada sektor-sektor yang menunjang peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat, serta menunjang dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia.

Aspek kedua dalam peningkatan daya saing adalah penguatan derajat kesehatan masyarakat. Indikasi utama dari meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan adalah meningkatnya capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam indeks pembangunan manusia. Tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu 5 tahun ke depan terkait dengan derajat kesehatan masyarakat adalah mengenai pemenuhan gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat serta semakin meningkatnya tren penyakit tidak menular sebagai akibat dari pola hidup dan pola konsumsi makan masyarakat yang tidak sehat. Hal tersebut tentunya harus diatasi dengan pengoptimalan pelayanan kesehatan, penguatan kualitas pembangunan keluarga, dan peningkatan aktifitas fisik masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kelompok masyarakat. Harapan tersebut masih belum terwujud secara optimal, dengan masih ditemukannya hak-hak kelompok masyarakat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu pembangunan



ke depan harusnya mengedepankan inklusifitas baik dari sisi prosesnya maupun dari sisi kemanfaatannya.

3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor dasar yang dapat mempengaruhi percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang berfungsi untuk menopang penggerak ekonomi sesuai dengan potensi daerah, pelayanan dasar, serta pembangunan kawasan yang ramah lingkungan dan responsif terhadap bencana. Pemerataan pembangunan infrastruktur disertai dengan peningkatan kualitasnya dilaksanakan dengan tetap mengacu pada kebutuhan dan tematik potensi daerah pengembangan. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, sarana irigasi, dan sarana perhubungan dipercaya akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Grobogan. Pembangunan tersebut tentunya harus diiringi dengan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau aturan penataan ruang lainnya yang ada. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus berjalan dengan optimal didukung dengan perencanaan tata ruang yang berkualitas. Selain itu, pembangunan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penataan prasarana dan sarana umum (PSU) untuk mendukung pencapaian target universal acces.

Tantangan lain yang dihadapi adalah upaya perwujudan lingkungan yang bersih dan rendah polusi, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Hal tersebut perlu diantisipasi dengan pelaksanaan manajemen lingkungan hidup yang optimal, dan juga manajemen risiko bencana yang efektif.

4. Memperkuat kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat

Upaya pelestarian nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat menjadi tantangan besar untuk diwujudkan di tengah perkembangan jaman. Nilai-nilai luhur adat budaya yang ada di Kabupaten Grobogan harus diinternalisasi, dilestarikan dan diimplementasikan ke dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai luhur budaya tidak dapat terpisahkan dari nilai keimanan berdasarkan ajaran agama yang dianut. Implementasi nilai keimanan dan budaya akan mewujudkan kondusifitas wilayah Kabupaten Grobogan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern

Sasaran reformasi birokrasi yang termuat dalam roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2024 terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. 3 (tiga) sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 8 (delapan) area perubahan (pelayanan publik, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM ASN, Deregulasi, dan Manajemen Perubahan).

Upaya perwujudan reformasi birokrasi juga menjadi tantangan atau isu strategis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal tersebut harus didukung dengan perubahan pola pikir (*mind set*) tata pemerintahan. Aparatur sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus didasari atas pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), dengan didukung proses perencanaan, penanggaran dan implementasi yang efektif, efisien, dan ekonomis.

Manajemen ASN harus dilakukan dengan memperhatikan penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang baik. Hal tersebut untuk menciptakan ASN yang kompeten, profesional, kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya. Selain itu, hal tersebut juga dapat mendukung penguatan kelembagaan/organisasi pemerintahan.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional

Ketidakpastian ekonomi global semakin kompleks, disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,1 persen dari pertumbuhan 3,5 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,1 persen. Stagnasi pertumbuhan pada tahun 2024 di antaranya disebabkan oleh dampak tingginya suku bunga bank sentral dan penurunan dukungan fiskal di tengah kenaikan utang yang membebani perekonomian beberapa negara. Pada tahun 2024, negara berkembang diperkirakan akan lebih resilien dibandingkan dengan negara maju yang diperkirakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Aktivitas perdagangan global tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari penurunan Baltic Dry Index menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dari level rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 di antaranya disebabkan oleh pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar AS, dan ketegangan geopolitik. Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 3,3 persen disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya peningkatan jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat.

Sementara itu, aktivitas manufaktur tahun 2023 mengalami perlambatan, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor manufaktur yang berada di zona kontraksi sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, aktivitas jasa mengalami ekspansi, tecermin dari Purchasing Managers Index sektor jasa yang berada di zona ekspansi.

Harga komoditas tahun 2023 mengalami penurunan seiring dengan pelemahan permintaan serta pelemahan aktivitas manufaktur global. Harga komoditas utamanya energi yang mengalami penurunan di tahun 2023 berkontribusi pada upaya penurunan tingkat inflasi oleh bank sentral



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

berbagai negara. Meskipun di akhir tahun 2023 inflasi di beberapa negara telah turun dan kembali ke target bank sentral, tingkat suku bunga yang tinggi seperti suku bunga The Fed, Bank of England, dan European Central Bank belum menunjukkan sinyal akan diturunkan dalam waktu dekat. Hal ini memicu risiko perlambatan aktivitas perekonomian akibat tekanan suku bunga tinggi yang berkepanjangan (*higher for longer*).

Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05 persen. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00 persen di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya adalah intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tahun 2023 tumbuh sebesar 4,82 persen, didukung oleh subkomponen konsumsi transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel karena faktor peningkatan aktivitas wisata dan tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, menjelang tahun pemilu 2024 konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga tahun 2023 tumbuh mencapai 9,83 persen. Tingginya aktivitas kampanye, distribusi logistik kebutuhan pemilu, dan sosialisasi pelaksanaan pemilu memengaruhi tingginya realisasi ini. Kedua komponen konsumsi tersebut menghasilkan realisasi pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,93 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto/investasi tumbuh sebesar 4,40 persen secara keseluruhan tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto terutama didorong oleh investasi pada pembangunan perumahan, serta infrastruktur jalan tol dan bendungan. Secara keseluruhan, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto tersebut didukung terutama oleh komponen bangunan, diikuti kendaraan, serta mesin dan perlengkapan. Konsumsi pemerintah tumbuh positif di tahun 2023 sebesar 2,95 persen, setelah mengalami kontraksi pada tahun sebelumnya. Realisasi ini didukung oleh pendapatan dan belanja negara yang tumbuh positif di tahun 2023. Ekspor barang dan jasa mencatatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 21,75 persen di tahun 2023.

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa di tahun 2023 mengalami perlambatan yaitu sebesar 1,32 persen utamanya disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Namun demikian, neraca perdagangan barang masih mengalami surplus sebesar US\$ 36,93 miliar di tahun 2023 yang didorong oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas. Bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewani/nabati masih menjadi komoditas



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

utama dengan nilai ekspor tertinggi. Sementara itu, kinerja impor di tahun 2023 mencatatkan kontraksi sebesar 1,65 persen. Dari sisi komponen impor, subkomponen impor barang nonmigas berkontraksi, sementara impor barang migas dan impor jasa tumbuh positif.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor mencatatkan realisasi pertumbuhan positif di tahun 2023. Beberapa sektor mampu tumbuh mencapai dua digit, di antaranya sektor transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, dan penyediaan akomodasi dan makan minum, masing-masing sebesar 13,96; 10,52; dan 10,01 persen. Pertumbuhan sektor penyediaan akomamin sejalan dengan sektor transportasi, mengingat faktor tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan kinerja sektor pariwisata, serta persiapan pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan kedua sektor tersebut. Kinerja sektor pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan peningkatan signifikan. Sektor pariwisata mengalami peningkatan dengan kontribusi sebesar 4,1 persen di tahun 2023 serta diikuti oleh penerimaan sektor pariwisata (nilai devisa pariwisata) sebesar US\$14,63 miliar.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang semakin kompleks dan normalisasi harga komoditas dunia, industri pengolahan mampu tumbuh sebesar 4,64 persen di tahun 2023. Kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2023 pun menunjukkan gejala rebound walaupun masih sangat terbatas, yakni mencapai 18,67 persen atau naik 0,33 persen dibandingkan tahun 2022 (18,34 persen). Capaian ini utamanya didorong oleh keberlanjutan program hilirisasi yang mengakibatkan beberapa subsektor secara konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit di sepanjang tahun 2023.

Pertumbuhan sektor konstruksi sebesar 4,91 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Aktivitas konstruksi secara keseluruhan meningkat, tecermin dari realisasi pertumbuhan konsumsi semen domestik dan meningkatnya penanaman modal asing dan dalam negeri. Sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,85 persen, sejalan dengan adanya peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik pada subkomponen perdagangan besar dan eceran, serta peningkatan penjualan sepeda motor pada subkomponen perdagangan mobil dan sepeda motor.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi baik dari International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan pelemahan. IMF (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 3,1 persen (2024) dan 3,2 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,1 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,6



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

persen (2024) dan 4,1 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,5 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen (2024) dan 5,0 persen (2025).

World Bank (WB) (rilis Januari 2024) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,4 persen (2024) dan 2,7 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,7 persen (2024) dan 1,6 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 0,8 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen (2024) dan 4,3 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,4 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 4,9 persen (2024) dan 6,5 persen (2025).

Asian Development Bank (ADB) (rilis Desember 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2024 untuk negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,6 persen (2024), negara Tiongkok tumbuh sebesar 4,5 persen, Vietnam tumbuh sebesar 6,0 persen, Thailand tumbuh sebesar 3,3 persen, Malaysia tumbuh sebesar 4,6 persen, India tumbuh sebesar 6,7 persen dan Indonesia tumbuh sebesar 5,0 persen. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (rilis November 2023) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Ekonomi Global tumbuh sebesar 2,7 persen (2024) dan 3,0 persen (2025), negara Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,5 persen (2024) dan 1,7 persen (2025), negara Eropa tumbuh sebesar 0,9 persen (2024) dan 1,5 persen (2025), Jepang tumbuh sebesar 1,0 persen (2024) dan 1,2 persen (2025), Tiongkok tumbuh sebesar 4,7 persen (2024) dan 4,2 persen (2025), India tumbuh sebesar 6,1 persen (2024) dan 6,5 persen (2025) serta Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen (2024) dan 5,2 persen (2025).

Meskipun terdapat perlambatan ekonomi global, masih terdapat harapan terjadinya perbaikan ekonomi global di Tahun 2024. Tanda-tanda membaik (upside risks) dapat dilihat dari: (1) Tekanan inflasi telah mereda namun melambat penurunannya; (2) Perlambatan laju pengetatan moneter; (3) Potensi sumber pertumbuhan baru (ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru). Disisi lain terdapat beberapa resiko (downside risk) antara lain: (1) Peningkatan tensi geopolitik; (2) Geo Ekonomi: Fragmentasi dan Proteksionisme; (3) Pelemahan ekonomi Tiongkok; (4) Terbatasnya policy space (fiskal); (5) Peningkatan resiko debt distress; (6) Shock akibat perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20 persen. Konsumsi rumah tangga dan Lembaga NonProfit yang melayani Rumah Tangga diperkirakan tumbuh sebesar 5,02 persen di



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dorong oleh terjaganya daya beli masyarakat dan pelaksanaan Pemilihan Umum (presiden dan legislatif pada Februari serta kepala daerah pada November). Inflasi domestik diperkirakan semakin terkendali pada sasaran 1,5–3,5 persen, mendorong terjaganya daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, program percepatan penyelesaian infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto yang diperkirakan mencapai 5,26 persen. Kinerja ekspor dan impor juga diperkirakan tumbuh menguat dibandingkan tahun sebelumnya dengan prakiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,01 dan 4,39 persen, seiring dengan pemulihan perdagangan barang global dan berlanjutnya pemulihan perdagangan jasa pascapandemi.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2024, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 4,93 persen, atau setara dengan kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan yang mencapai 18,80 persen dari total Produk Domestik Bruto nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan di tahun 2024 ini utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral terutama di wilayah timur Indonesia, peningkatan konsumsi dalam negeri seiring pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang mendorong permintaan pada beberapa subsektor industri, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0 pada 7 (tujuh) subsektor prioritas, penerapan standarisasi, dan industri hijau.

Peningkatan produktivitas sektor pariwisata akan meningkat signifikan sejalan dengan pemulihan perjalanan. Kontribusi Produk Domestik Bruto Pariwisata diproyeksikan akan meningkat sebesar 4,5 persen di tahun 2024, didukung oleh pelaksanaan event dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (berskala internasional, event olahraga, beserta pelaksanaan festival pariwisata dan ekonomi kreatif nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui pintu masuk utama dan jumlah penerbangan juga menjadi faktor meningkatnya kunjungan wisatawan. Hasil pembangunan dan perbaikan kualitas amenities dan atraksi di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sehingga dapat meningkatkan devisa pariwisata.

Berdasarkan RKP Tahun 2025, kerangka ekonomi makro tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5-3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000-Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto diharapkan dapat menjadi pendorong perekonomian dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp.1.868-1.906 triliun serta tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Ratio diupayakan agar semakin baik, yakni pada angka 6,3-6,0.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5–6,1 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi Produk Domestik Bruto industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai trajectory jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 19,3-19,6 persen di tahun 2025. Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK): Akhir Periode	% (yoy)	1,5–3,5
2.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/US\$	15.000–15.400b)
3.	Cadangan Devisa	US\$ miliar	149,5–153,7
4.	Cadangan Devisa	dalam bulan impor	6,1–6,1
5.	Neraca Transaksi Berjalan	% PDB	(0,4)–(0,2)
6.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19,3–19,6
7.	Kontribusi PDB Pariwisata	%	4,6
8.	Penerimaan Perpajakan	% PDB	11,20–12,00
9.	Nilai Devisa Pariwisata	miliar	US\$ 22,10
10.	Keseimbangan Primer	% PDB	0,00–0,00
11.	Surplus/Defisit APBN	% PDB	(2,45)–(2,80)
12.	Stok Utang Pemerintah	% PDB	38,78–39,30
13.	Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	6,5–7,8 14
14.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	1.868,2–1.905,6
15.	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder	Triliun Rp	805,5–842,2



3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 tumbuh positif sebesar 5,31 persen (c-to-c). Ekonomi Jawa Tengah terus tumbuh sedikit melambat pada Tahun 2023 sebesar 4,98 persen (c-to-c), pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah terus berlanjut ditengah pelambatan ekonomi global. Struktur Perekonomian Jawa Tengah didukung oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, jasa pendidikan serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pariwisata. Tahun 2023 semua sektor dalam lapangan usaha tumbuh positif dan yang mencatat pertumbuhan tertinggi adalah sektor akomodasi makan minum sebesar 11,24 persen dan informasi dan komunikasi sebesar 10,67 persen hal tersebut seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dan aktivitas Pemilu. Sementara itu, dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan terbesar didukung dari pengeluaran konsumsi LNRT (7,34 persen), pengeluaran konsumsi rumah tangga (5,68 persen), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (4,36 persen). Sementara ekspor Jawa Tengah hanya sebesar 0,87 persen akibat perekonomian di negara mitra dagang yang mengalami perlambatan.

Laju pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,13 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,57 persen. Angka kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,98 persen di tahun 2022, turun menjadi 10,77 persen pada Maret 2023. Sementara itu inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 2,89 persen (y-o-y), turun dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen (y-o-y). Tingkat ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah yang diukur menggunakan Rasio Gini membaik, dari sebelumnya 0,392 (September 2022) turun menjadi 0,369 (Maret 2023).

Salah satu upaya meningkatkan pemerataan ekonomi adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, adanya ketersediaan akses terhadap berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, tingkat literasi keuangan Jawa Tengah meningkat dari tahun 2019 sebesar 47,38 persen menjadi 51,69 persen pada tahun 2022 dan inklusi keuangan di Jawa Tengah meningkat dari 65,71 persen menjadi 85,97 persen pada tahun 2022.

Mendasarkan pada kondisi-kondisi tersebut, maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diproyeksikan pada kisaran angka 4,90–5,60 persen, Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 2,5 + 1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2025, angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,66-9,00 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 4,81-4,42 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 48,53-48,66 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,362 di tahun 2025.

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60
2.	PDRB per kapita	Juta Rp	48,53-48,66
3.	Inflasi	%	2,5 + 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,81-4,42
5.	Angka Kemiskinan	%	9,66-9,00
6.	Rasio Gini	Angka	0,362

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada:

- 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
- 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
- 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai;
- 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- 6) Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (green economy) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada green jobs dan green investment dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- 7) Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Grobogan

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tergambarkan dari beberapa indikator daerah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2018-2022 fluktuatif dari sebesar 5,83% pada tahun 2018 menjadi 5,98%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan cenderung menurun dari 12,31% pada tahun 2018 menjadi 11,72% pada tahun 2023. IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun dari tahun 2018 sebesar 69,32 meningkat menjadi 71,49 pada tahun 2023. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan mengalami kecenderungan menurun, pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,22% dan naik hingga 4,4% pada tahun 2022.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan menunjukkan angka yang positif pada kisaran angka antara 4,98% hingga 5,37%, kecuali tahun 2020 dan tahun 2021 yang terdampak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 tergolong tinggi pada angka 4,98%. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang tergolong rendah, pada kisaran angka antara 3,54% hingga 4,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 berada pada angka 4,02%.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah, namun angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih tergolong tinggi, pada angka 11,72% pada tahun 2023. Angka kemiskinan terdampak secara signifikan pada tahun 2020 dan 2021 akibat Pandemi Covid-19. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan yang masih tinggi dipengaruhi oleh adanya peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dari sebesar 0,9 pada tahun 2019 menjadi 1,48 pada tahun 2023, dan peningkatan indeks keparahan kemiskinan dari sebesar 0,13 pada tahun 2019 menjadi 0,28 pada tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin tinggi. Semakin besar indeks kedalaman kemiskinan, menunjukkan biaya yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan semakin besar, karena kemiskinan yang ada lebih cenderung didominasi penduduk miskin yang berada pada kerak-kerak kemiskinan yang jauh dari garis kemiskinan. Sementara itu anggaran penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Grobogan sangat terbatas. Semakin tinggi indeks keparahan kemiskinan menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks pembangunan manusia Kabupaten Grobogan juga masih rendah, walaupun pertumbuhan ekonomi tergolong tinggi dan tingkat pengangguran terbuka tergolong rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Harapan Lama Sekolah yang masih rendah, Rata-Rata Lama Sekolah yang masih rendah, dan pengeluaran per kapita yang masih rendah. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Grobogan mengalami kenaikan yang kurang signifikan dari tahun 2019 sebesar 12,29 tahun menjadi sebesar 12,46 tahun pada tahun 2023. Rata-Rata Lama Sekolah juga mengalami kenaikan namun tidak begitu signifikan, dari sebesar sebesar 6,86 tahun pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,28 tahun pada tahun 2023. Usia Harapan Hidup mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 74 tahun menjadi sebesar 75,03 tahun pada tahun 2023. Pengeluaran per kapita meningkat dari tahun 2019 sebesar Rp 10.350 ribu menjadi sebesar Rp11.083 ribu pada tahun 2023.

Mendasarkan pada realisasi kinerja tahun 2023, dan memperhatikan proyeksi ekonomi makro nasional dan proyeksi ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya ditetapkan proyeksi perekonomian daerah untuk tahun 2025. Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan tahun 2025 diperkirakan semakin membaik dari tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian global, nasional, dan regional. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat sehingga mampu mendorong tumbuhnya perekonomian daerah. Keyakinan konsumen yang semakin membaik akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan didorong Inflasi yang diperkirakan akan mulai menurun seiring dengan harga energi yang lebih terkendali, dan harga komoditas pangan yang semakin terkendali.

Proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3
Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Grobogan 2025

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,98	4,98	4,00 – 6,00	5±1	4,80-5,80
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,4	4,02	4,18	4,1	3,90-3,50
3.	Angka Kemiskinan	%	11,8	11,72	10,03 – 10,64	9,76 – 10,24	10,90-10,40
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,97	71,49	72,10	72,27	72,60

Arah kebijakan perekonomian daerah pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pengendalian inflasi yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pasokan pangan, efisiensi tata niaga, serta penguatan kerjasama antar daerah dalam pengendalian pasokan dan harga bahan pokok dan barang penting.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, pariwisata dan usaha kecil dan menengah.
3. Peningkatan investasi pemerintah dan swasta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4. Penguatan pembangunan infrastruktur yang mampu memicu pertumbuhan wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Grobogan pada tahun 2025 disusun dengan memperhatikan perbaikan kondisi perekonomian daerah yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Sementara alokasi dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat diasumsikan pada trend pendapatan transfer ke daerah pada kurun 3 tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk penyusunan APBD tahunan diamanatkan bahwa apabila belum ada informasi resmi alokasi dana transfer pusat, maka penganggaran pendapatan dari transfer pusat didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran sebelumnya serta trend pendapatan selama 3 tahun sebelumnya. Adapun tren Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah selama 3 tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 3.4
Trend Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Grobogan
2022-2025

No.	URAIAN	Realisasi 2022	APBD 2023 Perubahan	Realisasi 2023	APBD 2024	RKPD 2025
1	PENDAPATAN	2.588.637.777.477	2.642.089.347.285	2.669.556.739.246	2.792.344.317.000	2.855.534.252.400
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	424.751.554.830	398.496.245.776	432.842.307.598	402.924.503.000	564.912.012.320
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	140.153.778.330	144.250.000.000	165.305.904.194	146.200.000.000	292.957.886.816
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.780.097.460	12.467.753.776	12.904.696.220	11.689.462.000	12.080.966.504
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.731.883.442	31.568.392.000	32.374.497.780	31.769.559.000	31.769.559.000
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	245.085.795.598	210.210.100.000	222.257.209.404	213.265.482.000	228.103.600.000
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.150.762.504.647	2.235.359.101.509	2.229.767.131.648	2.387.991.814.00	2.281.350.240.080
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.927.933.333.556	1.962.318.763.509	1.983.186.174.708	2.122.381.123.000	2.114.187.228.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.829.171.091	273.040.338.000	246.580.956.940	265.610.691.000	167.163.012.080
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.123.718.000	8.234.000.000	6.947.300.000	1.428.000.000	9.272.000.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.123.718.000	8.234.000.000	6.947.300.000	1.428.000.000	1.428.000.000
1.3.2	Dana Darurat	0	0			
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0			7.844.000.000
2	BELANJA DAERAH	2.687.129.832.388	2.788.370.117.220	2.664.044.606.310	2.804.649.517.000	2.865.584.252.400



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	URAIAN	Realisasi 2022	APBD 2023 Perubahan	Realisasi 2023	APBD 2024	RKPD 2025
2. 1	BELANJA OPERASI	1.782.077.675.347	1.971.888.358.475	1.849.873.027.205	2.021.366.342.958	2.050.294.460.451
2. 1. 1	Belanja Pegawai	903.803.678.896	1.053.305.226.078	956.421.842.659	1.176.762.827.125	1.210.961.528.582
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	725.590.549.926	715.494.412.432	686.714.920.671	658.420.157.093	730.709.643.719
2. 1. 3	Belanja Bunga	1.614.777.279	4.038.334.000	3.997.543.781	318.456.000	
2. 1. 4	Belanja Subsidi	497.524.900	334.740.000	334.740.000	940.998.340	944.645.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	132.743.988.646	173.790.895.965	171.310.864.594	170.038.164.400	93.085.125.150
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	17.827.155.700	24.924.750.000	31.093.115.500	14.885.740.000	14.593.518.000
2. 2	BELANJA MODAL	462.228.846.802	372.808.924.145	363.895.301.617	313.452.180.042	337.941.697.949
2. 2. 1	Belanja Tanah	0	0	634.943.135	1.328.982.465	
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	103.852.032.913	108.774.926.468	105.224.566.547	80.100.870.918	73.757.242.200
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	78.207.304.061	121.684.522.999	117.172.387.764	111.609.697.159	144.972.666.900
2. 2. 4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	273.891.417.655	129.942.103.602	127.077.953.221	105.287.003.500	104.037.442.849
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.278.092.173	11.174.871.076	13.089.755.952	14.625.626.000	14.374.346.000
2. 2. 6	Belanja Modal Aset Lainnya	0	1.232.500.000	695.694.998	500.000.000	800.000.000
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.037.199.239	12.660.743.600	12.002.802.488	18.854.999.000	14.000.000.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	14.037.199.239	12.660.743.600	12.002.802.488	18.854.999.000	14.000.000.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	428.786.111.000	431.012.091.000	438.273.475.000	450.975.995.000	463.348.094.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	13.580.148.000	15.671.776.000	15.671.776.000	18.151.847.000	30.523.946.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	415.205.963.000	415.340.315.000	422.601.699.000	432.824.148.000	432.824.148.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	-98.492.054.911	-146.280.769.935	5.512.132.936	-12.305.200.000	(10.050.000.000)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	URAIAN	Realisasi 2022	APBD 2023 Perubahan	Realisasi 2023	APBD 2024	RKPD 2025
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	347.768.413.632	230.218.775.873	89.392.200.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3. 1. 1	SiLPA	236.131.928.732	204.941.975.873	64.669.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0	25.276.800.000	24.723.200.000	0	0
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0	0			0
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	111.636.484.900	0			0
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0			0
3. 1. 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0			0
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.939.726.021	84.249.999.988	77.087.000.000	14.950.000.000	4.950.000.000
3. 2. 1	Penyertaan Modal Daerah	18.250.000.000	8.250.000.000	15.450.000.000	14.950.000.000	4.950.000.000
3. 2. 2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	50.000.000.000	61.637.000.000	0	0
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	25.689.726.021	25.999.999.988		0	0
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0			0
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0	0			0
	PEMBIAYAAN NETTO	303.828.687.611	145.968.775.885	12.305.200.000	50.000.000	10.050.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	205.336.632.700	151.480.908.821	0	0	0



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten yang sumber pembiayaan daerahnya tergantung pada Transfer Keuangan Daerah. TKD sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Untuk itu, DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi Daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja Daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagihasilkan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

Reformulasi pengalokasian DAU dilakukan melalui penghitungan kebutuhan fiskal berdasarkan pada unit cost dan target layanan, serta penghitungan kapasitas fiskal sesuai dengan potensi pendapatan Daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan dan kapasitas fiskal secara riil. Selain pada aspek pengalokasian, reformulasi DAU dilakukan pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat. Sehingga salah satu prioritas penggunaan DAU dipergunakan untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat dan tercukupinya pemberian Dana Kelurahan.

Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung Daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar-Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Pemerintah Daerah, belanja diprioritaskan pada belanja yang sifatnya merupakan mandatory spending, yaitu:

- a. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total Belanja Daerah;
- b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total Belanja Daerah;
- c. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Karena hal tersebut terkait dengan PMK Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, yang apabila daerah tidak melaksanakan kewajiban pengalokasian belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana transfer ke daerah yang tidak ditentukan penggunaannya.

Selain itu, Belanja Pegawai dan Belanja Infrastruktur agar disesuaikan secara bertahap sampai dengan Tahun 2027. Belanja juga diarahkan pada Penguatan Earmarking Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) khususnya dalam mendukung pencapaian SPM dan Prioritas Nasional; dan mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerjasama antar daerah, peningkatan investasi daerah.

Penentuan target pendapatan asli daerah mempertimbangkan asumsi-asumsi yang digunakan seperti pertumbuhan ekonomi yang direncanakan meningkat pada Tahun 2025. Pendapatan asli daerah disusun dengan menyesuaikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah membawa konsekuensi adanya peningkatan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, opsen PKB dan BBNKB diterapkan sebesar 66 persen dari pajak yang terutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kabupaten/kota namun dengan tidak menambah beban wajib pajak.

Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Daerah menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dibutuhkan persamaan persepsi serta koordinasi bersama antara Provinsi dengan kabupaten kota se Jawa Tengah agar pemungutan pajak daerah dan opsen pajak daerah dapat berjalan secara optimal. Terkait opsen pajak PKB dan BBNKB diperlukan koordinasi yang intens dengan Bapenda terkait validitas data Wajib Pajak untuk menjaga likuiditas kas daerah. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB diselaraskan dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah provinsi dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Adapun Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	URAIAN	RKPD 2025
1	PENDAPATAN	2.855.534.252.400
1. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	564.912.012.320
1. 1. 1	Pendapatan Pajak Daerah	292.957.886.816
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	12.080.966.504
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.769.559.000
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	228.103.600.000
1. 2	PENDAPATAN TRANSFER	2.281.350.240.080
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.114.187.228.000
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	167.163.012.080
1. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.272.000.000
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	1.428.000.000
1. 3. 2	Dana Darurat	
1. 3. 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.844.000.000
2	BELANJA DAERAH	2.865.584.252.400
2. 1	BELANJA OPERASI	2.050.294.460.451
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.210.961.528.582
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	730.709.643.719
2. 1. 3	Belanja Bunga	
2. 1. 4	Belanja Subsidi	944.645.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	93.085.125.150
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	14.593.518.000
2. 2	BELANJA MODAL	337.941.697.949
2. 2. 1	Belanja Tanah	
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	73.757.242.200
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	144.972.666.900
2. 2. 4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.037.442.849
2. 2. 5	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.374.346.000
2. 2. 6	Belanja Modal Aset Lainnya	800.000.000



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	URAIAN	RKPD 2025
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	14.000.000.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	463.348.094.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	30.523.946.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	432.824.148.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.050.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000
3. 1. 1	SiLPA	15.000.000.000
3. 1. 2	Pencairan Dana Cadangan	0
3. 1. 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	0
3. 1. 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
3. 1. 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
3. 1. 6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0
3. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.950.000.000
3. 2. 1	Penyertaan Modal Daerah	4.950.000.000
3. 2. 2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0
3. 2. 3	Pembentukan Dana Cadangan	0
3. 2. 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0
3. 2. 5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	0
	PEMBIAYAAN NETTO	10.050.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)	0

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer keuangan daerah, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi, melalui pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya.
- a. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi melalui penyebarluasan informasi pajak dan retribusi daerah.
- b. Meningkatkan sarana prasarana dan kompetensi SDM untuk menunjang pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, perluasan pemungutan pajak secara elektronik, serta pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak melalui SIPADA.
- c. Mengoptimalkan pemberdayaan dan pendayagunaan aset daerah secara professional agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
- d. Meningkatkan yang bersumber dari deviden BUMD dengan revitalisasi BUMD melalui upaya: pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan dan masyarakat
- e. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh OPDN), PPh pasal 21, pajak ekspor, dan PPh badan dengan melakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama maupun KPPN, dan sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak.
- f. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana transfer bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak.
- g. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis) dan pemerintah Provinsi untuk obyek pendapatan sesuai kewenangan pemerintah pusat dan provinsi termasuk penguatan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sinergi pemungutan opsen PKB dan BBNKB untuk memberikan kepastian penerimaan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.

- h. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian / Lembaga mengenai pendanaan yang bersifat rebursmen sebagai alternatif pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat / Lembaga donor.
- i. Pemberian data yang akurat untuk pembiayaan yang bersifat hibah baik dari pemerintah pusat maupun Lembaga lain.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pemenuhan belanja daerah terutama untuk pemenuhan belanja mandatory peraturan perundangan seperti pendidikan, kesehatan, pengawasan dan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, pengalokasian belanja daerah juga diarahkan pada:

- a. Peningkatan Belanja Produktif melalui Penguatan TKD, Penguatan Local Taxing Power dan Inovative Financing.
- b. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
- c. Peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien.
- d. Peningkatan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrim).
- e. Penguatan kualitas belanja daerah melalui kebijakan mandatory spending.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

belanja pegawai akan menampung kebutuhan :

- a) Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
- b) Gaji DPRD Kabupaten Grobogan.
- c) Tambahan Penghasilan PNS.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

d) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

2) **Belanja Barang Dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian program unggulan Kepala Daerah
- c) Pemenuhan kebutuhan prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025.

3) **Belanja Bunga**

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4) **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5) **Belanja Hibah**

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima hibah.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan, sehingga harus ada kepastian *by name by address* penerima bansos.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan kualitas infrastruktur perkotaan dan layanan dasar permukiman untuk pemenuhan SPM.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari pencairan dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan piutang daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 direncanakan dari SiLPA tahun anggaran 2024. Sementara itu kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan rencana investasi pemerintah daerah untuk penyertaan modal pada BUMD di Kabupaten Grobogan yang didasarkan pada analisis investasi sehingga meminimalisir resiko dana publik yang serta sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan *concern* pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai *value creator* maupun *agent development*.

Mencermati komponen pembiayaan khususnya penyertaan modal, hal ini untuk dijelaskan peruntukannya berdasarkan Peraturan terkait, seperti pemenuhan modal disetor atau untuk peningkatan kinerja BUMD (mendasarkan analisa investasi dan rencana bisnis BUMD)



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 didahului dengan penggambaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Hal ini dilakukan karena penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Visi RPJMD Kabupaten Grobogan 2021-2026 yaitu: **Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya.** Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 5 misi pembangunan meliputi:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing

Tujuan dari misi 1 adalah Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dan Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak.

2. Misi 2: Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana

Tujuan dari misi 2 adalah Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3, dan Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.

3. Misi 3: Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Tujuan dari misi 3 yaitu Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah, menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa, Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

4. Misi 4: Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dari misi 4 yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni, Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi, Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan, Meningkatnya kualitas manajemen ASN.

5. Misi 5. Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi 5 yaitu Terwujudnya Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah, Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 4.1

Penjabaran Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Target RKPD Tahun 2025

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
				2025	2025
MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing					
Meningkatkan masyarakat yang cerdas, sehat, berdaya saing dan berkeadilan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,60
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,01	87,01
	1	Meningkatnya masyarakat yang memiliki daya saing pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35
			Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,07
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22
	3	Meningkatnya kesetaraan gender, pemenuhan hak perempuan dan anak	Tingkat Capaian APE	Kategori	Utama (0,7725 – 0,9074)
Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana					
Meningkatkan kualitas Infrastruktur daerah, lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	79,55	79,55
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Sedang (140)	Sedang (140)
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	88,31	88,31
	1	Meningkatnya kualitas infrastruktur sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Persentase infrastruktur jalan, drainase, dan sumberdaya air kondisi baik	%	92,62
			Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	76,18



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
					2025	2025
			Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)
			Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	80,51	80,51
	2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah serta Limbah B3	Indeks Kualitas Air	Indeks	87,49	87,49
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	63,20	63,20
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	48,00	48,00
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	0,70	0,70
	3	Meningkatnya kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks		
	Misi 3 Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing					
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah						
		Pertumbuhan ekonomi	%	5+1	4,80-5,80	
		Angka Kemiskinan	%	9, 76 – 10,24	10,90-10,40	
	1	Meningkatnya Pertumbuhan sektor ekonomi unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%/thn	1,23	1,23
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%/thn	1,15	1,15
			Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%/thn	1,57	1,57
			Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,51	1,51
	2	Meningkatnya daya tarik investasi berskala nasional	Nilai investasi di daerah	Miliar rp	931,400	931,400
	3	menguatnya potensi pembangunan sosial ekonomi dari tingkat desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,71	0,71



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
					2025	2025
	4	Menurunnya jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	%/thn	1,4	1,4
	5	Meningkatnya daya saing dan penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,1	3,90-3,50
Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik						
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Berkualitas			Indeks reformasi birokrasi	Indeks	BB (73)	BB (73)
	1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik didukung dengan kemampuan inovasi yang mumpuni	Rata-rata nilai IKM	Kategori	B (78,70)	B (78,70)
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	2	Meningkatnya penerapan e-government yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	3,4
	3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta pengawasan	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)	BB (72)
			Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,12)
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP
	4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks sistem merit	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (255)
Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat						
Meningkatkan nilai-nilai pemajuan kebudayaan dan Kerukunan Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat			Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,40	78,40
			Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Misi / Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD
					2025	2025
	1	Meningkatnya kualitas pemajuan kebudayaan menjadi haluan pembangunan daerah	Persentase obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan Kesenian Tradisional yang dilestarikan	%	78,40	78,40
	2	Tertanganinya konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100
			Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100



4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Dalam perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan disajikan beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam rangka perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.2.2 Isu Strategis RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

Kelompok makro isu strategis RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19
2. Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri
3. Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan
4. Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.
5. Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.

4.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD

Arah kebijakan pada tahun 2025 adalah Penguatan daya saing SDM, didukung peningkatan reformasi birokrasi. Pembangunan tetap berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Penguatan tata kelola pemerintahan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dijadikan prioritas, selain tetap meneruskan pembangunan infrastruktur.

Penguatan reformasi birokrasi menegdepankan pada pencapaian sasaran-sasaran yang ada, yakni akuntabilitas, kapabilitas dan pelayanan prima. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas perencanaan, penanggran dan pengawasan, peningkatan kompetensi ASN, serta meningkatkan mutu pelayanan publik didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan prioritas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun ketiga ini meliputi:

1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat
3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care)
4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana
6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- 7. Penguatan daya dukung pelayanan publik yang prima
- 8. Pengembangan smart government dalam menunjang pengembangan smart city.
- 9. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan
- 10. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen ASN

4.2.4 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada komponen-komponen sebagaimana termuat pada gambar di bawah ini.

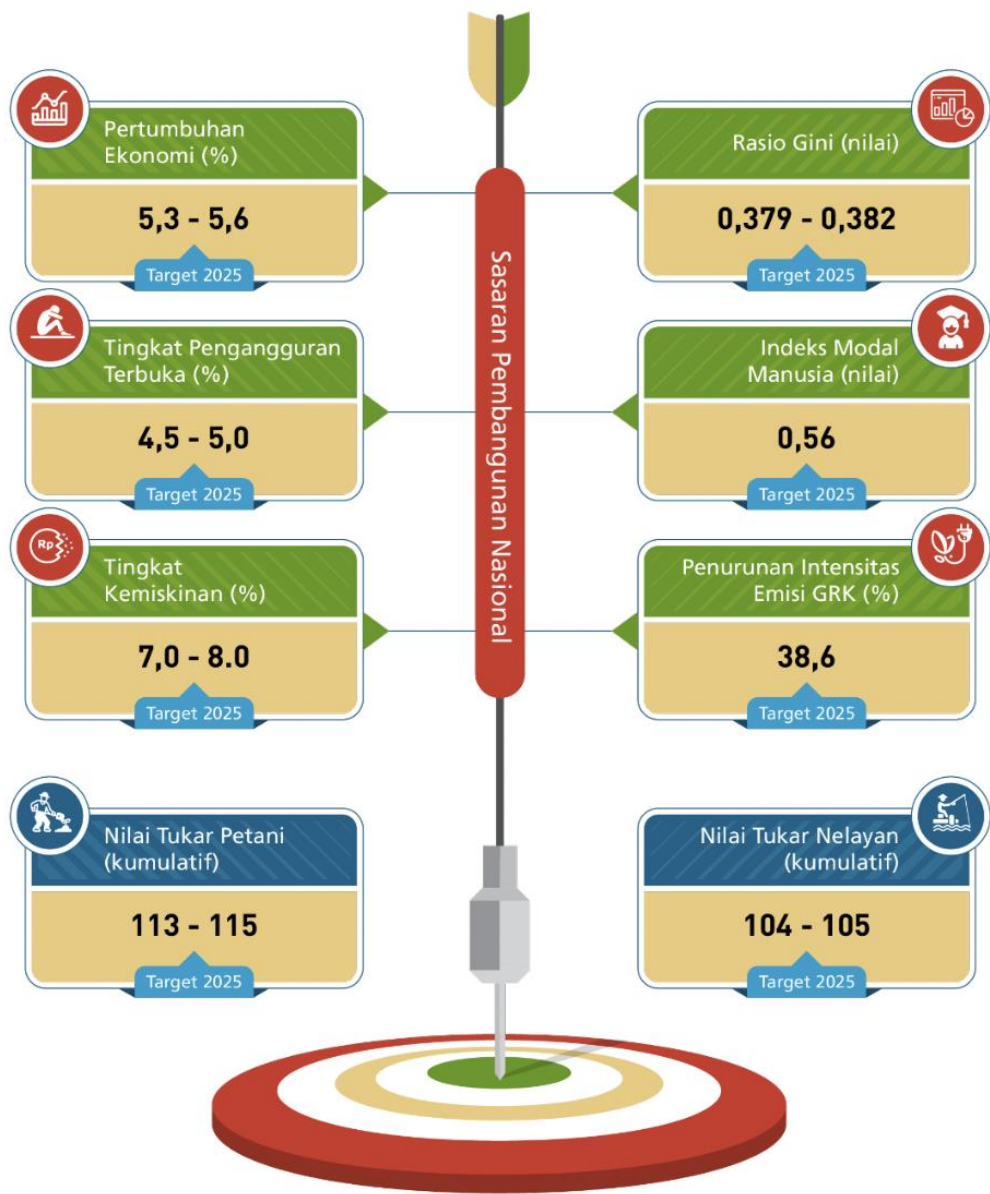


Gambar 4.1 Tema dan Penekanan RKP Tahun 2025



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.



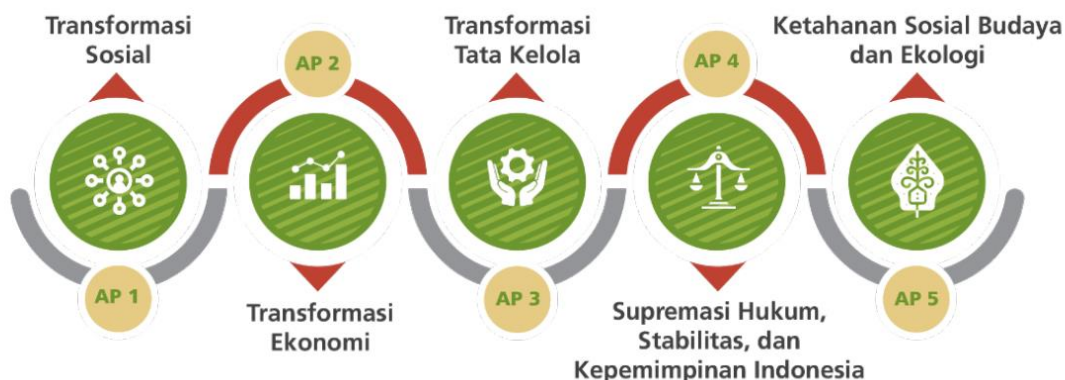
Gambar 4.2 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima Agenda Pembangunan. Lima agenda pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut:

- 1. Transformasi Sosial
- 2. Transformasi Ekonomi
- 3. Transformasi Tata Kelola
- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- 5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Gambar 4.3 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2025

4.2.5 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter dengan prioritas pembangunan diarahkan pada:

1. PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
 - a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah, melalui:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 2) Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, berbasis korporasi;
 - 3) Pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan (food loss and waste);
 - 4) Peningkatan produktivitas pertambangan yang berwawasan lingkungan;
 - 5) Peningkatan iklim penanaman modal berbasis sektor unggulan, pengembangan industri berbasis green investment, pengembangan kawasan industri/kawasan peruntukan industri (KI/KPI), pemetaan potensi sumberdaya pendukung industri berbasis wilayah, penguatan rantai pasok sektor unggulan, pemenuhan infrastruktur keras dan lunak yang memadai, serta pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal di daerah;
 - 6) Optimalisasi sumber-sumber dan potensi pendapatan daerah, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, serta optimalisasi sumber pembiayaan alternatif;
 - 7) Peningkatan ketentraman dan ketertiban wilayah dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah; dan
 - 8) Penerapan pembangunan ekonomi hijau (green economy) yang diawali dengan penyusunan dokumen pembangunan hijau di Provinsi Jawa Tengah dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

ekonomi sirkular (circular economy) secara bertahap sebagai tools untuk mencapai pembangunan rendah karbon.

- b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar melalui:
 - 1) Peningkatan pelayanan perizinan, akses permodalan, subsidi bunga, jaminan usaha, dan akses pasar bagi pelaku rintisan usaha (ultra mikro), serta penciptaan lapangan kerja yang layak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk masyarakat miskin;
 - 2) Peningkatan rumah layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, fasilitasi pengelolaan SPAM kabupaten/kota, pembangunan sarana prasarana SPAM perdesaan, dan fasilitasi pengelolaan air limbah domestik kabupaten/kota untuk mengurangi wilayah kantong kemiskinan;
 - 3) Pemenuhan kebutuhan layanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM pekerja sosial, rehabilitasi prasarana dan sarana panti, peningkatan kemandirian penerima manfaat dalam panti, peningkatan ketepatan sasaran penyelenggaraan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat termasuk masyarakat miskin, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan peningkatan pendapatan kelompok fakir miskin, dan peningkatan kapasitas petugas puskesmas;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
 - c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;

- b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan/ seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
 - d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
 - e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
 - f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
 - g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
 - c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
 - d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
- a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;

- b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

4.2.6 Penetapan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, Tema RKPD Tahun 2025 yaitu: **“Pemantapan Perekonomian Daerah dan Daya Saing SDM didukung Penguatan Reformasi Birokrasi Serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya”**.

Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025, meliputi sebagai berikut:

1. Prioritas Daerah 1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah

Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan daya saing dan nilai tambah produk unggulan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata
- b. Penguatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan didukung peningkatan kapasitas petani dan pembudidaya ikan guna meningkatkan kesejahteraan petani
- c. Penguatan ketersediaan pasokan pangan dan barang-barang penting dalam pengendalian inflasi daerah
- d. Penguatan investasi padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dalam rangka pengurangan pengangguran
- e. Peningkatan penempatan tenaga kerja didukung pengembangan kompetensi calon tenaga kerja dan kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha, serta perlindungan terhadap tenaga kerja formal dan informal.
- f. Penuntasan penanganan kemiskinan ekstrim dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.

2. Prioritas Daerah 2. Penguatan Daya Saing SDM dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, dan Penanganan anak tidak sekolah, difokuskan pada pelaksanaan kewenangan kab/kota yaitu PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dalam hal mendukung pencapaian Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun usia pra



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

sekolah) dan Penanganan ATS dengan pemberdayaan PKBM sebagai salah satu ujung tombak pelaksanaan.

- b. Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat dan Pemenuhan standar nasional perpustakaan.
- c. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), penguatan Kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
- d. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang
- e. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana.
- f. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
- g. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air
- h. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan.

3. Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana

Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut:

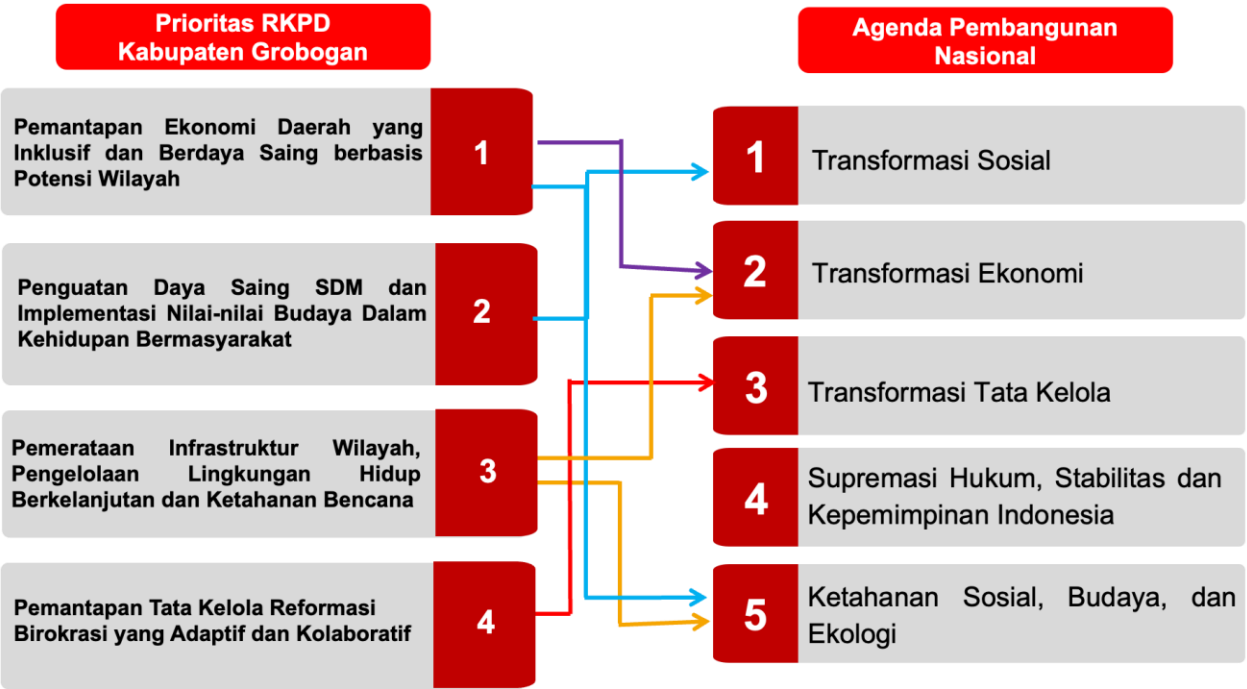
- a. Peningkatan kualitas jalan, drainase, dan infrastruktur sumber daya air
- b. Penanganan rumah tidak layak huni dan penataan prasarana dan sarana umum permukiman.
- c. Pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak
- d. Peningkatan layanan transportasi dan sarana keselamatan jalan
- e. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup
- f. Peningkatan mitigasi untuk Pembangunan Rendah Karbon, melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih, pengelolaan TPS3R, Bank Sampah, pembangunan IPAL/SPALD-Terpusat/ SPALD-Setempat dan pembangunan tangki septik skala individual, efisiensi energi penggunaan lampu, efisiensi energi penggunaan PJU, pembangunan energi terbarukan, menurunkan ketergantungan masyarakat atas penggunaan kendaraan bermotor diantaranya melalui Car Free Day, Reformasi Sistem Transit (BRT System), Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS), penerapan pengendalian dampak lalu lintas yang bertujuan mengurangi tingkat pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor.
- g. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana



**RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025**

- 4. Prioritas Daerah 4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif**
- a. Optimalisasi pemanfaatan SPBE guna mewujudkan smart city.
 - b. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang memiliki budaya kerja BERAKHLAK
 - c. Penguatan kolaborasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah
 - d. Penguatan pelayanan publik yang inovatif dan modern sesuai dengan tuntutan masyarakat

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Nasional dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.4 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional Dan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan terlihat pada gambar berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025



Gambar 4.5 Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Sinkronisasi isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Grobogan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 4.1
Hasil Perumusan Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19	Misi 3 Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing	- Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian - Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa - Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa	-	Transformasi Ekonomi	PD 1: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	Prioritas Daerah 1. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan daya saing dan nilai tambah produk unggulan sektor industri, perdagangan, UMKM, dan pariwisata 2. Penguatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan didukung peningkatan kapasitas petani dan pembudidaya ikan guna	- Dinas Pertanian - Dinas Peternakan dan Perikanan - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						meningkatkan kesejahteraan petani 3. Penguatan ketersediaan pasokan pangan dan barang-barang penting dalam pengendalian inflasi daerah 4. Penguatan investasi padat karya dalam rangka perluasan kesempatan kerja dalam rangka pengurangan pengangguran 5. Peningkatan penempatan tenaga kerja didukung pengembangan kompetensi calon tenaga kerja dan kerjasama pemerintah daerah dan dunia usaha 6. Penuntasan penanganan kemiskinan ekstrim	8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 9. Dinas Sosial



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan.	
Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri	MISI 1 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	- Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM - Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan <i>stunting</i> - Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	- Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. - Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat - Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care) - Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan	Transformasi Sosial	PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata,	Prioritas Daerah 2. Penguatan Daya Saing SDM dan Implementasi Nilai-nilai Budaya Dalam Kehidupan Bermasyarakat Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: - Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan, dan Penanganan anak tidak sekolah. - Penguatan kelembagaan dan pelayanan perpustakaan yang	- Dinas Pendidikan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kesehatan - Dinas Ketahanan Pangan - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
			kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada			dikelola oleh masyarakat dan Pemenuhan standar nasional perpustakaan. 3. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer (primary health care), penguatan Kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi dan penuntasan stunting, serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular 4. Peningkatan sarana prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						bergizi dan seimbang 5. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan optimalisasi program Generasi Terencana. 6. Percepatan pemenuhan anggaran responsif gender dan anak guna menyelesaikan isu strategis gender yang ada, pencegahan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.	
Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat.	Misi 5 Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama 2. Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan		Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara	1. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air 2. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat	1. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata. 2. Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Satuan Polisi Pamong Praja



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
					inklusif dan merata.	maupun sistem pemerintahan	
Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektivitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan	Misi 2. Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana	1. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan 2. Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana	-	• Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi • Transformasi Ekonomi	PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan.	Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Fokus arah kebijakan dari prioritas ini adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kualitas jalan, drainase, dan infrastruktur sumber daya air 2. Penanganan rumah tidak layak huni dan penataan prasarana dan sarana umum permukiman. 3. Pemenuhan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						4. Peningkatan layanan transportasi dan sarana keselamatan jalan 5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana	
Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.	Misi 4 Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	1. Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City	1. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya yang ada ke dalam berbagai sendi kehidupan baik di masyarakat maupun sistem pemerintahan 2. Peningkatan nilai-nilai toleransi dan cinta tanah air	Transformasi Tata Kelola	PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.	Prioritas Daerah 4. Pemantapan Tata Kelola Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Kolaboratif 1. Optimalisasi pemanfaatan SPBE guna mewujudkan smart city. 2. Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang	1. Sekretariat Daerah 2. Kecamatan 3. Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Inspektorat 6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Isu Strategis RPJMD	Misi RPJMD Tahun 2021–2026	Program Unggulan	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025 dalam RPJMD	Prioritas Nasional 2025	Prioritas Provinsi Jawa Tengah 2025	Prioritas RKPD Kabupaten Grobogan 2025	Perangkat Daerah
						memiliki budaya kerja BERAKHLAK 3. Penguatan kolaborasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan guna mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah 4. Penguatan pelayanan publik yang inovatif dan modern sesuai dengan tuntutan masyarakat	7. Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Penjabaran program dari masing-masing prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.3. Sinkronisasi RKPD Tahun 2025 dengan Arahan Pengembangan Wilayah

Arahan pengembangan wilayah Kabupaten Grobogan diarahkan selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041, yang terjabarkan dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, maupun rencana kawasan strategis, yang secara khusus tercantum dalam indikasi program yang sudah ditetapkan. Disamping itu, ada beberapa kriteria dalam penentuan prioritas dalam pengembangan wilayah. Adapun penentuan prioritas pelaksanaan pembangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu :

- Prioritas persoalan yang dihadapi:** Tingkatan kepentingan persoalan yang perlu mendapat penanganan.
- Pemecahan masalah:** Efektifitas program pembangunan yang dilaksanakan terhadap penyelesaian persoalan yang dihadapi.
- Pemenuhan kebutuhan:** Alokasi sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan peningkatan jumlah penduduk yang akan terjadi.
- Strategis:** Program pembangunan yang walaupun dalam jangka pendek tidak memberikan manfaat secara langsung dan besar, tetapi dalam jangka panjang akan memberikan implikasi perubahan mendasar dan struktural dalam pola tata ruang yang dituju.
- Keterpaduan:** Seluruh program pembangunan yang dilaksanakan harus terintegrasi baik secara sektoral maupun tata ruang sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal.
- Efek ganda:** Sinergi dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan harus mampu merangsang perkembangan pada sektor/subsektor atau pada lokasi-lokasi lainnya.
- Kesesuaian dengan rencana yang sudah ada:** Apabila suatu program pembangunan telah ditetapkan untuk dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui, maka rencana tersebut dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah, sehingga program-programnya perlu diprioritaskan.

4.3.1 Arahan Pengembangan Wilayah dalam Perda No. 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan adalah mewujudkan Ruang Daerah yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan Wilayah di bagian timur Jawa Tengah dengan berbasis sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan pariwisata. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut pengembangan kawasan perlu diarahkan untuk mendukung sektor utama tersebut, yaitu pertanian. Tujuan penataan ruang kabupaten perlu menyeimbangkan pewujudan penataan ruang wilayah Kabupaten Grobogan sebagai pusat pertumbuhan/pelayanan sbg pusat pengumpul di bagian timur Jawa Tengah yang memadukan ekonomi dan konservasi mampu



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah serta antar sektor yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan wilayah terpadu yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025 meliputi :

1. Penguatan Peran Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Grobogan

Arahan Pengembangan Wilayah Terpadu Tahun 2025 sebagaimana mengacu RTRW Kabupate Grobogan, menyebutkan bahwa PKL dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan, peribadatan. Adapun Kawasan Perkotaan yang masuk dalam PKL yaitu

- 1) Kawasan perkotaan Purwodadi;
- 2) Kawasan perkotaan Gubug; dan
- 3) Kawasan perkotaan Godong.

Titik simpul pengembangan (kota-kota) direncanakan baik sebagai pusat pertumbuhan maupun pusat-pusat pelayanan dari permukiman. Sistem pusat pelayanan wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten tersebut. Oleh karena itu, sarana prasarana pendukung untuk penguatan fungsi PKL sebagai pusat kegiatan berskala kabupaten yang dapat mendorong pengembangan wilayah sekitar mutlak diperlukan antara lain sarana prasarana transportasi, sumber daya air, perumahan dan permukiman, energi, telekomunikasi dan sarana prasarana lainnya seperti air minum, sanitasi dll.

2. Penguatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Kabupaten

Perda No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041 juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSK terdiri atas Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

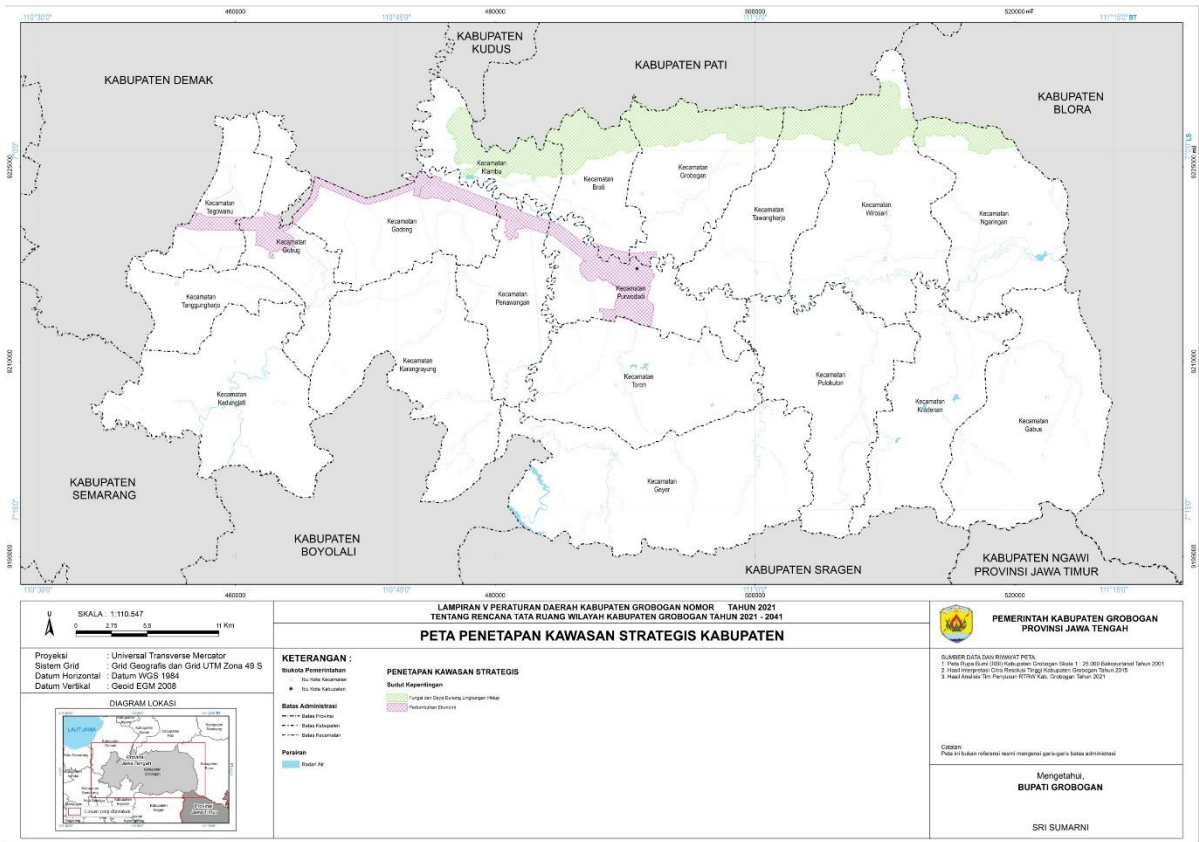
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi dengan tujuan untuk mewujudkan koridor pengembangan Kawasan Perkotaan Tegowanu – Gubug – Godong – Penawangan – Purwodadi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang didukung kegiatan industri dan penunjangnya dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan. Arah pengembangan adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman, dan industri. Saat ini, koridor Purwodadi – Semarang (di Kecamatan Godong, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu) telah berkembang industri – industri besar. Keberadaan industri – industri baru membuat wilayah ini memunculkan simpul – simpul aktivitas baru dengan pemanfaatan ruang permukiman dan perdagangan jasa yang melayani kebutuhan dasar pekerja industri seperti makanan, sandang maupun tempat tinggal. Industri besar ini merupakan industri yang berupa industri yang ramah lingkungan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan mencakup Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo seluas kurang lebih 11.377 ha meliputi: Kecamatan Klambu; Kecamatan Brati; Kecamatan Grobogan; Kecamatan Tawangharjo; Kecamatan Wirosari; dan Kecamatan Ngaringan. Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah mewujudkan Kawasan sebagai pusat konservasi dan pariwisata. Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah pengembangan konservasi, pariwisata, pertanian, dan perkebunan rakyat



Sumber : RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041

Gambar 4.6 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Grobogan

3. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Tema RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yaitu “Penguatan daya saing SDM dan Perekonomian Daerah, didukung peningkatan reformasi birokrasi”, Oleh karena itu, sektor yang perlu didorong lebih cepat di Kabupaten Grobogan adalah sektor industri, sektor pertanian dan sektor pariwisata yang terintegrasi dari hulu ke hilir karena mempunyai dampak besar terhadap perekonomian daerah.

Sektor industri di Kabupaten Grobogan berkembang sangat pesat. Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat mendorong tumbuhnya industri, hal ini dibuktikan dengan dukungan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten dan penambahan kawasan peruntukan industri menjadi 1.273 Ha yang tersebar di



**RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025**

sepanjang jalan kolektor primer terutama pada ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora.

Perkembangan industri di Kabupaten Grobogan lima tahun terakhir menunjukkan trend yang positif, dimana setiap tahun tumbuh positif bahkan saat pandemi Covid-19 berlangsung pada tahun 2020, sektor industri masih tumbuh positif 0,39%, tahun 2021 tumbuh positif 5,64%, tahun 2022 tumbuh positif 5,55% dan tahun 2023 tumbuh positif 6,88%. Secara rinci, perkembangan sektor industri dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 4.2
Perkembangan Sektor Industri di Kabupaten Grobogan

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB Sektor Industri Pengolahan	3.632.925,31	3.734.211,12	4.053.773,36	4 498 334,02	5.067.020,75
2.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	13,32	13,70	14,07	14,14	14,58
3.	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	8,93	0,39	5,64	5,55	6,88

Sumber : BPS Kab. Grobogan, 2023

Sektor industri di Kabupaten Grobogan diharapkan mampu jadi daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional. Oleh karena itu, pemerintah akan lebih fokus untuk memacu kinerja sektor industry dengan penyediaan infrastruktur pendukung industry yang handal didukung dengan kemudahan perizinan dan investasi

4. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, dengan didukung oleh luas baku sawah sebesar ± 82 ribu Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sector pertanian berkontribusi sebesar 27,00% terhadap total PDRB pada tahun 2023. Sehingga tidak heran apabila Kabupaten Grobogan dikenal sebagai Kota PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) karena merupakan produsen terbesar se-Jawa Tengah untuk ketiga komoditas pangan tersebut. Bahkan produksi padi Kabupaten Grobogan sebesar 788.123 ribu ton pada tahun 2023 menempati urutan nomor 7 (tujuh) terbesar se-Indonesia. Selain itu, komoditas hortikultura dan perkebunannya juga tidak kalah berkembang seperti bawang merah, cabe merah, semangka, melon, kopi dll. Sebaran Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar di bawah.

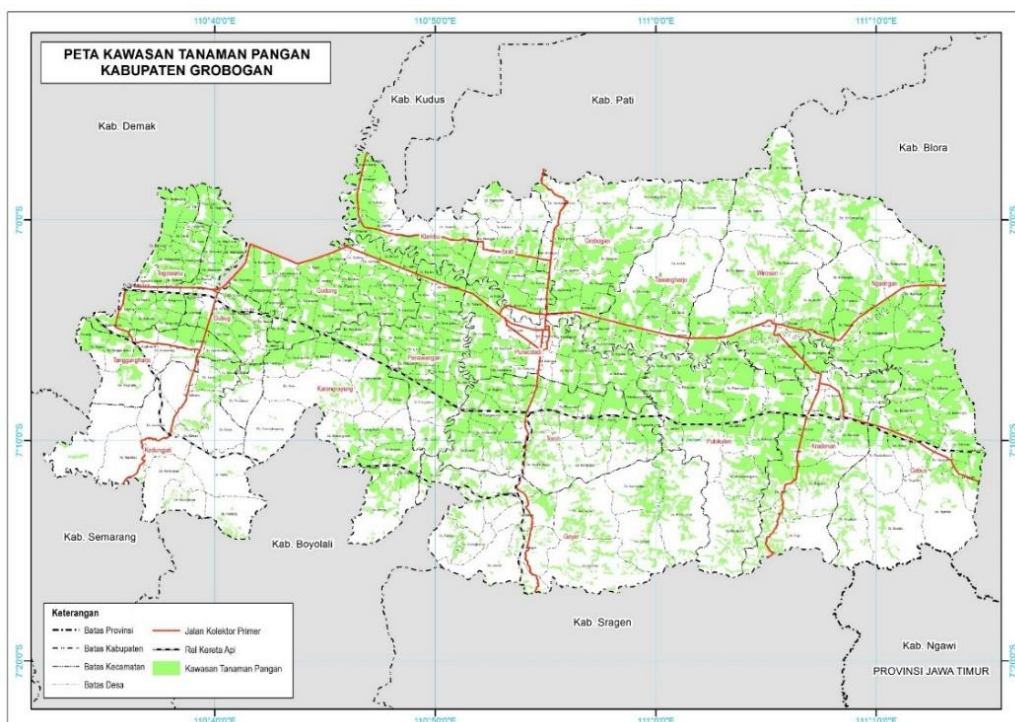
Pandemi Covid 19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Dari data yang dirilis oleh BPS ternyata sector pertanian lebih tahan banting terhadap dampak pandemic Covid – 19 dibandingkan sektor lainnya seperti sektor industri pengolahan, sektor transportasi dan pergudangan maupun sektor pariwisata. Hal ini terbukti dengan masih tumbuhnya pertumbuhan sector pertanian sebesar positif 2,28% di Kabupaten Grobogan dan secara agregat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan tahun 2020 mengalami



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

kontraksi sebesar minus 1,57 % dimana masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata Jawa Tengah sebesar minus 2,65 %. Oleh karena itu, penguatan sector pertanian dilakukan dengan mengintegrasikan sector pertanian dari hulu ke hilir baik dari sarana prasarana infrastruktur pendukung pertanian, sarana prasarana produksi pertanian berupa jaminan ketersediaan pupuk, penyediaan alsintan yang memadai, penyuluhan budi daya tanaman yang lebih baik, pengolahan paca panen dan peningkatan nilai tambah produk pertanian yang lebih intensif serta pemasaran dan tata niaga yang lebih menguntungkan petani. Hal ini juga selaras dengan arahan pemanfaatan ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Grobogan tahun 2021 – 2041.

Inovas sektor pertanian hulu hilir telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada proses produksi / budidaya ada inovasi pengendalian OPT dengan Rat Hunter/Rubuha (ruah burung hantu), mekanisasi alat dengan brigade alsintan, pemakaian teknologi google earth untuk sawah digital, pemakaian agensi hayati dan biosaka. Pengolahan pasca panen untuk kedelai ada di rumah kedelai grobogan (RKG), technopark pangan, rumah kreatif grobogan, kafe gerobak kedelai dan UV dryer. Sampai saat ini RKG, Technopark pangan dan rumah kreatif grobogan banyak dikunjungi dari Kabupaten lain sebagai role model dalam penanganan kedelai terutama pasca panennya. Dalam aspek pemasarannya ada RKG, technopark pangan, sistem resi gudang, pasar tani, BUMP komoditas PAJALE, lumbung pangan reborn dan kafe gerobak kedelai. Inovasi penunjang yang terkait dengan hacking kedelai adalah sekolah lapang iklim, kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan Universitas, mahasiswa magang dan KKN tematik, Program kedaireka sektor pertanian, asuransi usaha pertanian dan adanya penyuluh swadaya.



Sumber : Peta Tematik RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041

Gambar 4.7 Gambar Sebaran Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Grobogan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

5. Penguatan Dukungan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Grobogan semakin menggeliat baik sektor wisata alam antara lain Bledug Kuwu yang terkenal dengan lumpur alamnya, Goa Macan dan goa Lawa, Air Terjun Widuru; wisata religi dan budaya antara lain berupa makam Ki AGeng Selo maupun Wisata Buatan antara lain Embun Bening di Waduk Kedung Ombo. Desa wisata juga telah tumbuh dan berkembang di kabupaten Grobogan, sampai dengan akhir tahun 2022 telah tumbuh sebanyak 30 desa wisata dengan berbagai keunikan masing – masing.

Berbagai potensi wisata tersebut adalah modal dasar bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Grobogan, namun mengandalkan kekayaan alam, budaya, dan kesenian saja belum cukup, diperlukan langkah yang cerdas dengan menyusun strategis pemasaran dan merancang pola pengembangan pariwisata terintegrasi yang sesuai dengan karakter dan potensi daerah setempat. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, SDM pariwisata yang mumpuni dan atraksi/hiburan yang menarik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di kabupaten grobogan, harapannya sektor pariwisata yang mempunyai *multiplier effect* yang besar dan menjadi magnet kuat terhadap sektor lainnya dapat menjadi sumber alternatif penggerak ekonomi dengan meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025, lokus dan focus pembangunan telah disinkronkan dengan rencana indikasi program yang tertuang didalam Perda 12 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Grobogan Tahun 2021 – 2041. Adapun indikasi program yang terdapat di dalam RTRW Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada Gambar 4. dan Tabel 4,



Gambar 4.8 Integrasi Rencana Struktur Ruang pada RTRW ke dalam Dokumen RKPD Tahun 2025



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Tabel 4.3

Indikasi Program Prioritas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan sebagai arahan Penentuan Prioritas RKPD Tahun 2025

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN		
I.	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman		
	a. Penguatan Pusat Kegiatan Lokal		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ) dan Perkada	- Kawasan Perkotaan Purwodadi, - Kawasan Perkotaan Gubug, dan - Kawasan Perkotaan Godong	PD 3
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman		PD 2
	- Pengendalian dan pemanfaatan kegiatan Penataan Ruang		PD 3
	b. Penguatan Pusat Pelayanan Kawasan		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Peraturan Zonasi (PZ) dan Perkada	Ibu Kota Kecamatan - Wirosari - Tegowanu - Tanggungharjo - Toroh - Grobogan - Ngaringan - Kradenan	PD 3
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman		PD 2
	- Pengendalian dan pemanfaatan Ruang		PD 3
	c. Penguatan Pusat Pelayanan Lokal (PPL)		
	- penyediaan sarana prasarana pendukung pusat kegiatan dan pengembangan sistem pusat permukiman	Kecamatan - Kedungjati - Klambu	PD 2
	-		

IV-33



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
		- Kecamatan Godong; - Kecamatan Wirosari; - Kecamatan Gabus.	
	b. Sistem Jaringan Kereta Api - pengembangan jaringan jalur kereta api antarkota - pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan - peningkatan akses layanan jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan - pengembangan persimpangan tidak sebidang jalur kereta api antarkota dan jalur kereta api perkotaan. - peningkatan fasilitas pelayanan Stasiun Penumpang - pengendalian bangunan sekitar sempadan rel kereta api antarkota dan perkotaan; -	- Jaringan jalur kereta api Yogyakarta – Solo – Semarang - Purwokerto (Joglosemarkerto); - Jaringan jalur Semarang – Purwodadi. - Pembangunan Transportasi Massal Berbasis Rel, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan Wilayah Kabupaten Grobogan Wilayah Kabupaten Grobogan Stasiun Ngrombo, Gundih, Kedungjati Wilayah Kabupaten Grobogan	PD 3 PD 3 PD 3 PD 3
4.	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air		
	a. Prasarana Sumber Daya Air - pengembangan dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier guna mendukung keberadaan KP2B - Pembangunan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi baru - Pengelolaan Waduk, Bendung, Embung dan bangunan pengendali banjir lainnya yang sudah ada	Kawasan peruntukan pertanian Seluruh Kabupaten Grobogan	PD 3 PD 3



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
	- Pembangunan waduk, Bendung, embung baru sebagai fasilitas pemanenan penampung dan penahan air hujan	Seluruh Kabupaten Grobogan	PD 3
5.	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya		
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - pengembangan unit air baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi di seluruh kawasan permukiman perkotaan - pengembangan unit air baku, jaringan air baku, unit produksi dan jaringan produksi melalui pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat di seluruh kawasan permukiman perdesaan	Kawasan Permukiman Perkotaan Kawasan Permukiman Perdesaan	PD 3 PD 3
	b. Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL) - pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik pada kawasan peruntukan industri - pengembangan dan penyediaan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sistem <i>off site</i> di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan	Kawasan Peruntukan Industri Seluruh kawasan perkotaan	PD 3 PD 3
	c. Sistem Pengelolaan Limbah B3 - pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berada di kawasan peruntukan industri - peningkatan sarana pengumpul dan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh KPI di Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan	PD 3 PD 3
	d. Sistem Jaringan Persampahan - peningkatan dan pengembangan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman. - Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) - pengembangan sistem pengelolaan jaringan persampahan	Kecamatan Purwodadi Seluruh kabupaten Grobogan Seluruh kabupaten Grobogan	PD 3 PD 3 PD 3
	e. Sistem Jaringan Drainase - pengembangan Jaringan Drainase Primer.	Kawasan Perkotaan	PD 3



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program Utama dalam RTRW	Lokasi	Integrasi Prioritas RKPD
	- pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	Seluruh kabupaten Grobogan	PD 3
	- pengembangan Jaringan Drainase Tersier	Seluruh kabupaten Grobogan	PD 3
	f. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana - penyusunan pemetaan rawan bencana untuk penetapan jalur evakuasi - penyusunan Rencana Induk Penanganan Bencana	Seluruh Kabupaten Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	PD 3
	- pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	PD 3
	- peningkatan kualitas Jalur Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	PD 3
	- pengembangan Tempat Evakuasi Bencana	Daerah rawan bencana di Kabupaten Grobogan	PD 3

Keterangan :

- PD 2 yaitu Prioritas Daerah 2. Pemantapan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berdaya Saing berbasis Potensi Wilayah
- PD 3 yaitu Prioritas Daerah 3. Penguatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Bencana
- Sumber dana dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber lainnya yang dibagi sesuai dengan kewenangannya



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

4.3.2 Sinkronisasi RKPD 2025 dengan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi

Berdasarkan Perpres 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang & Purwodadi, wilayah Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi. KSN Kedungsepur ditetapkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional berbasis pada perdagangan barang dan/atau jasa, industry, industry maritim dan jasa maritim, sumber daya kelautan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tetap memperhatikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang. Fungsi Kabupaten Grobogan dalam KSN Kedungsepur adalah menjadi wilayah penunjang bagi Kota Semarang sebagai penyedia komoditas pertanian, sumber daya manusia, lokasi industri, dan jaringan infrastruktur kewilayahan.

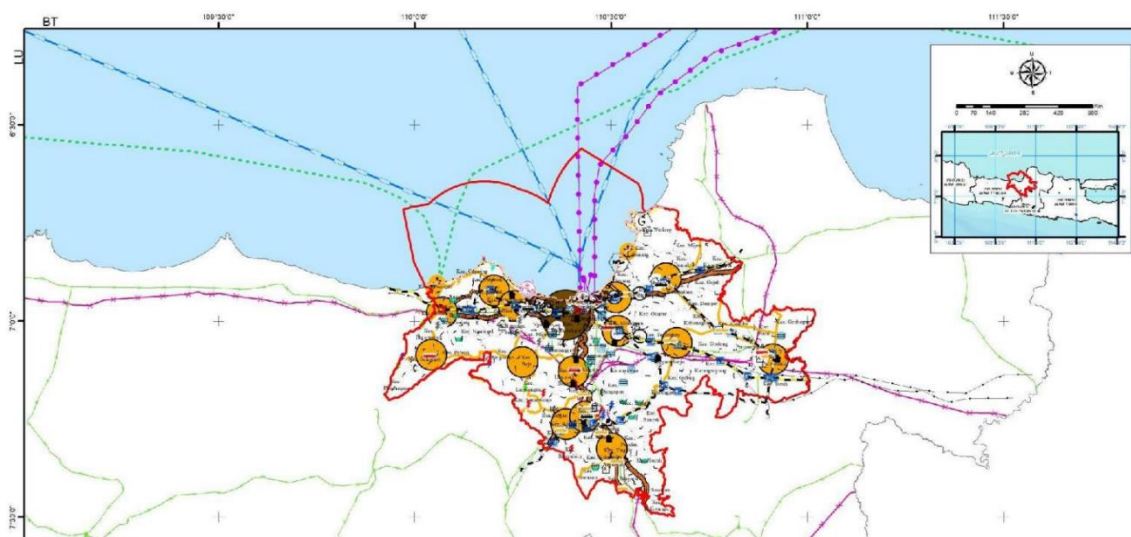
Selain itu, mengacu pada Perda Provinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan perkotaan Kedungsepur juga merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dalam konstelasi pengembangan wilayah, maka wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya perwujudan kawasan metropolitan, dengan kawasan perkotaan inti Kota Semarang sebagai :

- a. ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah;
- b. pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus;
- c. perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura; serta
- d. perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Wilayah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam kawasan Kedungsepur seluas ± 101.827 ha, meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Tanggunharjo, Kecamatan Kedungjati, Kecamatan Gubug, Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Klambu, Kecamatan Brati, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Toroh. Kawasan Perkotaan Kedungsepur di Kabupaten Grobogan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 2 (dua) Kawasan Perkotaan yaitu **perkotaan Purwodadi, dan Gubug** yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Sumber : Perpres 60/2022 tentang RTR KSN Kedungsepur

Gambar 4.9 Peta Struktur Ruang KSN Kedungsepur

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan sistem pusat perkotaan dengan wilayah sekitarnya, maka perlu adanya penyediaan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan sumber daya air; dan prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan handal. Adapun strategi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- mengembangkan keterpaduan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi baik ke dalam maupun ke luar Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- mengembangkan sistem transportasi angkutan umum massal melalui penetapan jalur bus komuter maupun jalur kereta api komuter;
- meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan;
- mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
- meningkatkan kualitas jaringan prasarana sumber daya air, mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber air, dan meningkatkan pengendalian daya rusak air;
- mengembangkan sistem pelayanan prasarana air bersih melalui SPAM regional di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- mengembangkan sistem jaringan drainase melalui normalisasi sungai yang terpadu dengan sistem pengamanan pantai di Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- mengembangkan sistem pelayanan prasarana air limbah melalui pelayanan IPAL terpadu dengan menetapkan pusat pengolahan limbah di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;
- mengembangkan sistem pelayanan prasarana persampahan melalui penetapan TPA terpadu di bagian utara dan selatan Kawasan Perkotaan Kedungsepur;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- j. mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri untuk menjamin aksesibilitas kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil kegiatan dari hulu ke hilir;

Khusus untuk Kabupaten Grobogan, seiring mulai berkembangnya kegiatan industri, pertumbuhan investasi daerah dan pengembangan wilayah yang pesat, berimplikasi terhadap intensitas pergerakan orang dan barang yang memanfaatkan ruas jalan Semarang – Purwodadi – Blora semakin meningkat. Dengan semakin membaiknya kondisi infrastruktur jalan, ruas jalan tersebut telah menjadi alternatif jalur penghubung Jakarta – Semarang – Surabaya, selain melalui jalur arteri pantau utara Jawa, karena dipandang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan rute yang lainnya khususnya untuk angkutan barang.

Peningkatan intensitas pergerakan pada ruas jalan tersebut terindikasi akan melampaui batas kapasitas jalannya, dalam hal penggunaan jenis dan ukuran kendaraan bermotor serta tingkat kepadatan lalu lintas. Mempertimbangkan kondisi tersebut, sudah selayaknya jika jalan Semarang – Purwodadi – Blora perlu peningkatan kapasitas jalan dengan pelebaran jalan atau apabila memungkinkan ditingkatkan status, fungsi maupun kelasnya menjadi jalan nasional dengan fungsi minimal jalan kolektor primer 1 (JKP-1) dan kelas jalan II, sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar rusa jalan tersebut dapat ditingkatkan status, fungsi dan kelas jalannya.

Selain ruas jalan Semarang – Godong – Purwodadi – Wirosari – Blora, ruas jalan kolektor primer lainnya yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pergerakan di Kawasan Kedungsepur yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan adalah :

- a. Pati (perbatasan Kedungsepur) – Purwodadi.
- b. Surakarta (perbatasan Kedungsepur)-Geyer-Purwodadi-Grobogan-Batas Pati (perbatasan Kedungsepur).
- c. Wirosari – Sulursari – Singget/Bts. Blora
- d. Gubug – Kapung – Kedungjati/Bts. Kab. Semarang

Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan **komparatif dan kompetitif** dibandingkan Kab./Kota lainnya di Kedungsepur yaitu **ketersediaan jaringan angkutan berbasis rel terpanjang se-Jawa Tengah** (3 koridor baik aktif maupun non aktif). Kereta Api diharapkan menjadi **back-bone angkutan massal** karena kapasitas angkutnya yang besar. Saat ini, angkutan berbasis rel tersebut belum menjadi pilihan utama karena berbagai alasan seperti jumlah frekuensi perjalanan yang minim dan integrasi dengan moda lainnya belum optimal. Oleh karena itu, dalam meningkatkan peran Kabupaten Grobogan dalam mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengusulkan optimalisasi jaringan kereta api melalui :

- a. **Peningkatkan frekuensi layanan KA Kedungsepur** dan integrasinya dengan angkutan jalan lainnya. Saat ini, KA Kedungsepur telah berjalan dengan frekuensi yang masih minim (hanya 2 kali perjalanan PP).



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- b. **Reaktivasi jaringan rel Kedungjati – Tuntang – Ambarawa** yang digunakan tidak hanya untuk angkutan wisata tetapi juga untuk angkutan komuter
- c. **Pembukaan kembali layanan KA Kalijaga relasi Semarang - Solo.** Walaupun KA Kalijaga melayani perjalanan antar kota, tetapi karakteristik penumpang lebih banyak untuk perjalanan komuter (ada hubungan erat antara PKN Kedungsepur dengan PKN Solo).

Dalam rangka mendukung sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Grobogan, maka perlu didukung dengan sarana prasarana yang handal antara lain ketersediaan jaringan sumber daya air yang handal melalui pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: DI Klambu, DI Glapan, dan DI Sedadi DI Sidorejo dan DI Bd. Dumpil DI Bd. Kedungwaru, penyediaan alsintan yang memadai, saprodi dan saprotan yang mencukupi.

Di wilayah Kedungsepur, Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang tidak luput dari bencana banjir. Berdasarkan peta kerawanan banjir dapat ditunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan sebagian besar masuk ke dalam wilayah dengan zona kerawanan banjir tinggi. Penyebab banjir disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya topografi di beberapa daerah yang cukup rendah, tingginya curah hujan, ketiadaan kemampuan aliran sungai untuk menampung debit air yang tinggi, dan kurangnya manajemen sumber daya air yang baik. Banjir yang terjadi di Kabupaten Grobogan berdasarkan data BBWS Pemali Juana tahun 2022 memiliki luas genangan air sebesar 17.665,86 Ha, dimana hal ini disebabkan oleh lipasan air di sungai Kliteh, Tuntang, Lusi, Sono, Gobang, Butuh, Sambirejo, Nglumpang, dan Ngemprak. Pada tahun 2023, beberapa Kabupaten/Kota di Pantura Timur antara lain Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Grobogan yang masuk ke dalam wilayah Sungai Pemali Juana mengalami banjir besar yang dampaknya signifikan dirasakan masyarakat. Di dalam indikasi program Perpres 60 Tahun 2022, terdapat beberapa rencana program pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Grobogan yang perlu diinisiasi baik pada tahapan perencanaan maupun pelaksanaan konstruksi antara lain :

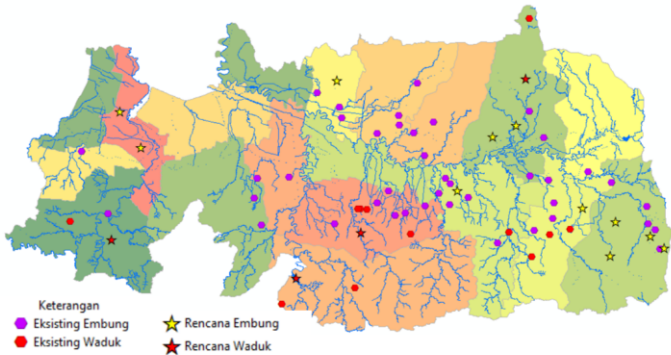
- a. Pembangunan Waduk Tegalrejo.
- b. Pembangunan Bendung Gerak Glapan Sungai Tuntang.
- c. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sistem Sungai Jragung.
- d. Perkuatan Tebing Sungai Serang.
- e. Pembangunan, peningkatan dan/ atau pemantapan saluran drainase primer meliputi: Kali Tuntang di DAS Tuntang.

Gambar berikut ini mengilustrasikan usulan pengendalian banjir di Kabupaten Grobogan yang berpengaruh juga terhadap wilayah kabupaten di bagian hilirnya.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Usulan Pengendalian Banjir



Normalisasi Sungai dan Penanganan Longsoran

NO	NAMA SUNGAI	NO	NAMA SUNGAI
1	Sungai Lusi	6	Sungai Peganjing
2	Sungai Serang	7	Sungai Grobogan
3	Sungai Sente	8	Sungai Renggong
4	Sungai Jajar Baru	9	Sungai Satryan
5	Sungai Glugu	10	Sungai Kliteh

Pembangunan waduk dan embung

No	Nama Waduk	Lokasi
1	Tegalrejo	S. Grobogan Kec. Wirosari
2	Gunung Wulan	Kec. Kedungjati
3	Ngemplak	Kec. Geyer
4	Bandungharjo	Kec. Toroh
5	Banjarejo	Kab. Blora

No	Nama Embung	Lokasi
1.	Iirto	Ds. Tambakselo Kec. Wirosari
2.	Coyo	S. Coyo Kec. Pulokulon
3.	Sulursari	Ds. Sulursari Kec. Gabus
4.	Pelem	Ds. Pelem Kec. Gabus
5.	Banjarejo	Ds. Banjarejo Kec. Gabus
6.	Tunggulrejo	Ds. Tunggulrejo Kec. Gabus
7.	Bangsri	Ds. Bangsri Kec. Geyer
8.	Karangsari	Ds. Karangsari Kec. Brati
9.	Dokoro	Ds. Dokoro Kec. Wirosari
10.	Kalisari	Ds. Kalisari Kec. Kradenan
11.	Balongpengkol	Ds. Tlogomulyo Kec. Gubug
12.	Panadaran	Ds. Panadaran Kec. Gubug

Gambar 4.10 Gambar Usulan Pengendalian Banjir di Kabupaten Grobogan

4.4 Rencana Pembangunan Tematik Holistik Integratif Spasial (THIS)

Program unggulan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1) Gerakan Pendidikan Untuk Semua Dan Peningkatan Kompetensi SDM

Pendidikan merupakan modal dasar dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berdaya saing. Permasalahan terkait dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Grobogan masih merupakan kendala besar yang harus diselesaikan. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, maka dilakukan berbagai upaya antara lain Pengembalian Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) ke lembaga pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan kabupaten, dengan melibatkan *stakeholder* termasuk meningkatkan peran desa melalui APBDes nya. Pengembalian ATS dan DTS dimulai dengan integrasi perencanaan dan kolaborasi penanganan melibatkan *stakeholders* pentahelix diwujudkan melalui Gerakan Mesti Sekolah (GEMES). Selain itu dilakukan upaya meningkatkan partisipasi sekolah bagi penduduk usia sekolah, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan kualitas serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan.

2) Gerakan cegah kematian Ibu, Bayi dan *stunting*

Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. *Stunting* menjadi salah satu target yang tercantum dalam tujuan-2 Sustainable Development Goals (SDG's), yaitu mengakhiri segala bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan menyusui, serta lansia.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Selain persoalan stunting, hal yang sangat merisaukan adalah kematian ibu dan bayi. Angka Kematian Ibu (AKI) di Grobogan masih berada di posisi kedua se-Jawa Tengah (Jateng). Sebaliknya dengan Angka Kematian Bayi (AKB), dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mengalami penurunan, akan tetapi tahun 2020 mengalami peningkatan. Penyebab kematian AKB didominasi oleh BBLR dan Asfiksia.

Sehubungan dengan tingginya angka prevalensi stunting, AKI dan AKB, dilakukan upaya antara lain melalui Gerakan Cegah Stunting (GECEG STUNTING) dan Grobogan Bersama Atasi Kematian Emak dan Anak (GROBAK MANAK) dilakukan dengan mendorong pelibatan para pemangku kepentingan/ *stakeholders* mulai dari RT, RW dan organisasi masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan, termasuk peran desa/kelurahan melalui APB Desa dan Dana Kelurahan. Dari segi perbaikan gizi Ibu hamil dan balita, dipandang perlu ada peningkatan peran Pemerintah Desa melalui dana desa.

3) Gerakan Cegah Perkawinan Usia Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Pembentukan kualitas unggul dalam diri pribadi masyarakat khususnya anak dan perempuan salah satunya adalah dengan melewati masa maturitas secara matang serta hidup dalam lingkungan yang sehat dalam segi perlakuan perilaku sehari-hari. Fenomena usia perkawinan di bawah 19 tahun di Kabupaten Grobogan semakin meningkat dari tahun-ke tahun. Perkawinan anak menjadi sumber dari berbagai masalah sosial di masyarakat, antara lain salah satu penyebab tingginya angka perceraian, berdampak buruk pada kualitas sumber daya manusia, berpotensi menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menimbulkan isu kesehatan/risiko kehamilan dan stunting.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi bagian penting yang harus dilakukan dengan program akselerasi, Kabupaten Grobogan menjadi daerah dengan ranking 9 di Jawa Tengah yang termasuk memiliki kasus kekerasan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Grobogan selain mendukung gerakan jo kawin bocah yang merupakan program Provinsi Jawa Tengah, juga akan menindaklanjuti dengan gerakan “Jo Kawin Ndisik” yaitu mendorong anak-anak memiliki kesempatan tumbuh kembang yang optimal, terjaga kesehatannya baik fisik maupun mental serta terutama terpenuhi haknya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang tinggi. Gerakan ini menfokuskan pada nilai-nilai moralitas, agama yang terus dibangun dan dikembangkan hingga sampai ke keluarga.

Selain itu, gerakan pencegahan kekerasan juga dilakukan dengan basis keluarga, mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kejadian kekerasan akan menjadi “pengetahuan dan pembelajaran” baru bahwa kekerasan tidak dapat lagi ditolerir. Gerakan cegah kekerasan akan mendorong meningkatnya kualitas keluarga. Peningkatkan peran ulama, tokoh masyarakat dan forum anak untuk juga akan menjadi sasaran dalam mendukung program unggulan ini.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

4) Penuntasan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan penggerak perekonomian daerah. Pembangunan Infrastruktur yang dibangun secara masif di seluruh wilayah akan memiliki dampak positif bagi seluruh masyarakat termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, serta mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan mengintegrasikan dengan kelestarian lingkungan dimana dampak pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terelakkan, diharap keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

Adapun program unggulannya adalah Pembangunan jalan pada setiap wilayah untuk akses perekonomian daerah, pengelolaan sungai dan irigasi untuk mendukung sektor pertanian menuju kedaulatan pangan, pengembangan angkutan umum terpadu untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan penciptaan daya tarik masyarakat luar Grobogan untuk berkunjung ke Grobogan, sehingga peningkatan aksesibilitas dapat dengan langsung mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dimana menjadi salah satu tolok ukur tingkat kemiskinan, pengelolaan persampahan dengan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah (1 desa 1 bank sampah) dan PETSa (Pembangkit Energi Tenaga Sampah) yaitu gerakan ini mengkonversi sampah yang ada menjadi alternatif energi (briket) yang nilai kalorunya 50% dari Batu Bara. Selain itu, permasalahan Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun adalah banyaknya desa rawan kekeringan yg mengajukan dropping air bersih. Potensi Sumber Daya Air (SDA) yg ada belum dikelola dengan optimal sehingga perlu upaya dalam pengelolaan SDA air yg lebih baik melalui pembangunan penampungan air hujan (embung, sumur resapan dll) serta konservasi DAS berbasis desa dan Gerakan Memanen Air (GEMAR) di Kabupaten Grobogan dengan metode Biopori, sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam.

5) Peningkatan kualitas penataan ruang dan ketahanan bencana

Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal dan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya. Meskipun demilian kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Grobogan cukup kompleks dari aspek geografis, geologis, hidrologis, maupun meteorologis yang dapat menghasilkan potensi kekayaan alam cukup melimpah tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung.

Peningkatan kualitas penataan ruang diwujudkan melalui pengimplementasian RTRW dan penyusunan RDTR, sebagai acuan pemanfaatan serta pengendalian pemanfaatan ruang. Penguatan forum penataan ruang serta pendayagunaan organisasi digital penataan ruang menjadi bagian pengimplementasian RTRW. Dalam hal ketahanan bencana, pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) diharap dapat membangun



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dan meningkatkan aspek kehati-hatian khususnya dalam upaya tanggap bencana dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

6) Pemberdayaan petani, modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian

Potensi Pertanian menjadi komoditas unggulan Kabupaten Grobogan dengan komoditas utama tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan produsen tanaman pangan terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini yang menjadi salah satu fokus pembangunan agar potensi ini tetap terjaga bahkan ditingkatkan.

Pemberdayaan Petani dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Selain dari segi pemberdayaan, modernisasi juga harus menjadi aspek penting mengingat perkembangan zaman yang tidak terhindarkan. Optimalisasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang telah terimplementasi beberapa tahun ini serta pembangunan Subterminal Agro diharapkan meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang muaranya kepada kesejahteraan petani Kabupaten Grobogan mengingat sektor pertanian menjadi tumpuan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Meskipun demikian juga akan dibangun *cool storage* di setiap wilayah / kecamatan yang mempunyai komoditas hortikultura untuk mengantisipasi saat panen raya tetapi harga pasar sedang kurang menguntungkan bagi petani.

7) Peningkatan investasi dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan serta kemandirian desa

Investasi yang masuk ke Kabupaten Grobogan diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan realisasi investasi harus diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam skala desa. Potensi unggulan yang dimiliki desa sangat besar dan perlu ada dorongan dalam bentuk *branding* maupun promosi produk unggulan. Program 1 desa 1 BUMDesa akan terus dikawal agar tidak sekedar berorientasi *output* (keluaran) semata, tetapi harus sampai dengan *outcome* (hasil) maupun *impact* (dampak) dalam rangka kemandirian desa.

Permasalahan UMKM tidak hanya pada sisi *Branding* saja, tapi juga permasalahan pemasaran/*marketing*, peningkatan kualitas produk (*packaging*), akses permodalan, penggunaan teknologi digital dan tepat guna yang dapat menurunkan biaya produksi. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui peningkatan kolaborasi pentahelix. Ekonomi kreatif merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi yg besar terutama di masa pandemi Covid-19. Pelaku ekonomi kreatif membutuhkan wadah / sarana / program untuk menampung kreatifitas/inovasi dengan memasukkan unsur pengembangan ekonomi pada kegiatan di setiap Perangkat Daerah.



8) Pelayanan publik yang inovatif, perwujudan smart ASN dan Grobogan Smart City

Pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman menjadi tuntutan dan harapan masyarakat. Kondisi pandemi Covid-19 menuntut penyesuaian dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik yang smart, cepat dan akuntabel. Kondisi yang tidak memungkinkan masyarakat bertatap muka mendorong upaya baru yang mengedepankan kualitas layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Masyarakat juga semakin melek informasi berbasis teknologi, sehingga kepentingan ke dua belah pihak yaitu pemerintah daerah dan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

Implentasi dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik yang telah terbangun tahun 2020, menjadi salah satu bentuk program unggulan yang ada. Terintegrasinya seluruh pelayanan di Kabupaten Grobogan diharap dapat menghapus stigma buruk birokrasi yang masih melekat pada masyarakat. Kualitas ASN juga menjadi faktor utama dalam pelayanan masyarakat, dengan digitalisasi birokrasi, reformasi birokrasi akan terwujud agar pelayanan publik yang semakin dinamis, efektif, efisien serta transparan termasuk juga penguatan program kegiatan inovasi sebagai data dukung indeks inovasi daerah.

Upaya mewujudkan Smart City berpedoman pada master plan Smart City yang telah disusun. Implementasi Satu Data Indonesia dan Pengembangan Simpul Data Jaringan Spasial di Kabupaten Grobogan sebagai bagian dari peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan smart city, menjadi salah satu program unggulan. Demikian juga halnya pembangunan *command center*, menjadi salah satu prioritas untuk mendukung pelayanan publik dan digitalisasi birokrasi.

9) Peningkatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama

Perkembangan lingkungan kemasyarakatan di Indonesia pada umumnya dewasa ini tidak terlepas dengan isu-isu keberagaman dan keagamaan. Hal yang menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat ini yang perlu dijaga agar konflik sosial dapat dihindari. Peningkatan wawasan kebangsaan dengan menitikberatkan pada beberapa kelompok masyarakat menjadi sasaran dari Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Bentuk konkritnya adalah dengan jambore lintas agama dengan sasarannya adalah pada tokoh agama pada setiap kelompok masyarakat dan wilayah. Selain itu pembentukan kampung bhinneka akan menjadi bukti bahwa dalam keberagaman pun seluruh masyarakat dapat hidup secara berdampingan tetap berasaskan persatuan Indonesia.



10) Pengembangan dan internalisasi nilai, seni budaya dan sejarah lokal Grobogan

Pengembangan budaya merupakan suatu proses meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Grobogan dimana seni budayanya cukup beragam dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pelaksanaan festival budaya dengan skala regional atau nasional menjadi target Pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pelaksanaan festival mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi Covid-19 agar pelaksanaannya dapat diimplementasikan secara optimal dengan melibatkan seluruh pegiat budaya pada setiap wilayah.

4.5 Program Inovasi Daerah

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Grobogan terus berupaya untuk melakukan inovasi kebijakan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung tema pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2024, maka beberapa inovasi yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN LIMBAH UKM TAHU UNTUK KONSERVASI AIR DAN ENERGI SERTA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL

Produksi tahu di Desa Sugihmanik, Tanggunharjo, Grobogan telah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir dengan adanya sekitar 30 UKM. Proses produksi tahu menghasilkan limbah cair dalam jumlah yang besar. Kandungan protein yang besar pada limbah cair ini sangat banyak manfaatnya namun karena dibuang di Sungai tanpa diolah maka menyebabkan kerusakan sungai dan bau menyengat yang mengganggu lingkungan.

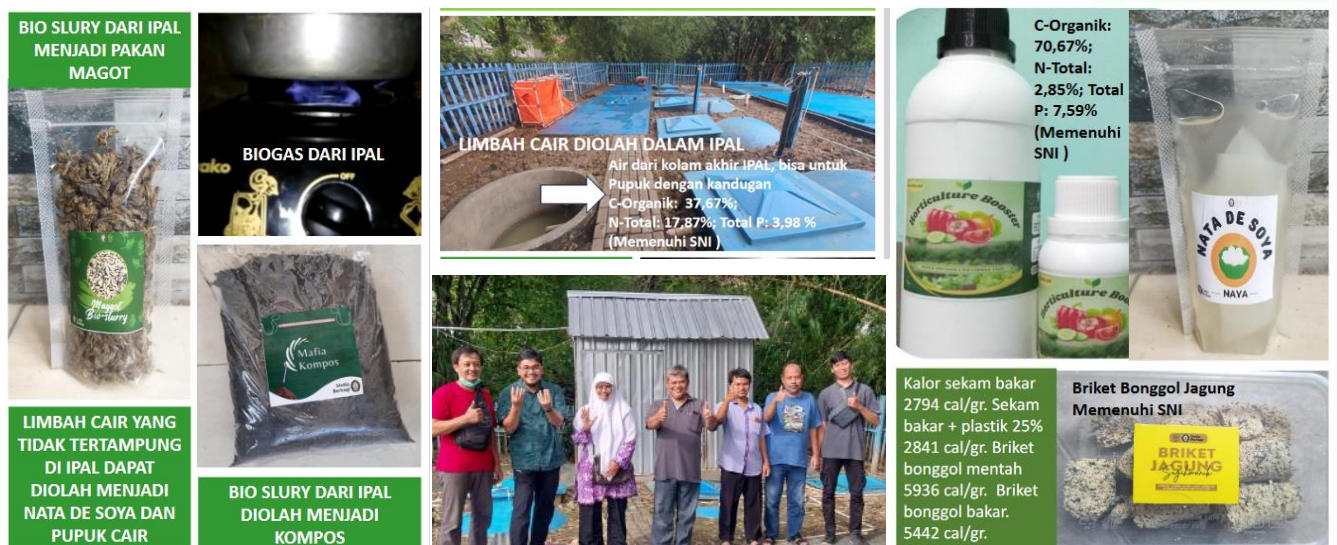
Sejak Tahun 2021, Perjanjian Kerjasama antara UNDIP dan PemKab Grobogan telah dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan memaksimalkan manfaat limbah cair tahu melalui skema Iptek untuk Desa Binaan UNDIP yang dikelola oleh LPPM UNDIP. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu telah dibangun dalam program Matching Fund Kedaireka Tahun 2022. IPAL tersebut menampung limbah dari 22 UKM Tahu di Dusun Sendang Mudal. IPAL menghasilkan biogas yang dimanfaatkan untuk memasak. Tahun 2023, Tim melakukan proses daur ulang limbah lainnya menjadi produk yang bermanfaat, antara lain mengolah limbah cair tahu menjadi pupuk organik dan nata de soya dan limbah padat menjadi kompos.

Untuk mengoptimalkan biogas yang dihasilkan dan limbah lain seperti kotoran sapi yang ada di sekitarnya, Pemkab Grobogan mengajak Tim UNDIP untuk menambah satu instalasi digester untuk mengolah campuran limbah tahu dan limbah ternak sapi. Potensi biogas yang tinggi dimanfaatkan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

untuk menambah 5 pemanfaat kompor biogas sekaligus konversi biogas menjadi energi Listrik yang digunakan untuk lampu penerangan jalan umum. Tim UNDIP diketuai oleh Prof Dr. Sri Hartini, S.T., M.T. beranggotakan Dr. Muchammad, S.T., M.T., Dr. Diana Puspita Sari dan Dr. Cahya Setya Utama, S.Pt., M.Si. Pada kesempatan ini, Tim UNDIP juga menggandeng Tim dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Dr. Suroto Munahar, ST., M.T. dan Bagiyo Condro Purnomo, ST, M.Eng.



Gambar 4.11 Hasil Inovasi Program Pengelolaan Limbah UKM Tahu untuk Konservasi Air dan Energi serta Peningkatan Ekonomi Lokal

2. DALMADI CENTER PUSAT PROMOSI PRODUK LOKAL GO INTERNATIONAL

Dalmadi Center merupakan pusat promosi produk – produk UMKM yang ada di Kabupaten Grobogan. Dalmadi Center ini berada dibawah binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan. Promosi di Dalmadi Center yaitu menawarkan berbagai produk UMKM Kabupaten Grobogan dan juga untuk mengenalkan kepada masyarakat serta membantu dalam penjualan produk tersebut.

Terdapat 134 UMKM yang terdiri dari 11 sektor berbeda yang produknya berada di Dalmadi Center. Sektor tersebut terdiri dari sektor makanan, tas, sandal/sepatu, pande besi, kain batik, baju, rajutan, kerajinan tangan, kaligrafi, homemade, dan minyak aroma terapi. Agar produk UMKM bisa dipromosikan oleh Dalmadi Center, maka syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM adalah punya produk sendiri, penomoran P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) jika belum akan dibantu, kemasan yang sesuai tertera expired, dan tidak dipungut biaya atau gratis.

Dalmadi Center dalam mempromosikan produk – produk UMKM di Kabupaten Grobogan menggunakan beberapa teknik promosi. Teknik promosi yang digunakan yaitu personal selling melalui market Dalmadi Center dengan mendisplaykan produk serta event event dan pameran, advertising promosi melalui media sosial atau iklan, publicity melalui pemberitaan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

perkembangan Dalmadi Center sebagai sarana promosi, dan sales promotion yaitu promosi dengan diskon melalui event great sale serta dalmadi center. Aplikasi dalmadi center ini merupakan sarana promosi bagi pelaku industri kecil menengah (IKM) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya.



Gedung Dalmadi Center



Dalmadi Center sebagai tempat diskusi tentang UMKM



Lounging aplikasi Dalmadi Center



Dalmadi Center Market

Gambar 4.12 Hasil Inovasi Dalmadi Center Pusat Promosi Produk Lokal Go International

3. Sistem Invormasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, telah diidentifikasi isu strategis pembangunan yaitu: (1) Menumbuhkan dan menguatkan kembali potensi ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal yang terdampak pandemi Covid 19; (2) Menguatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu berdaya saing dan mandiri; (3) Pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata sesuai dengan potensi daerah dan peningkatan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan; (4) Menguatkan kembali nilai-nilai budaya yang menjadi landasan hidup bermasyarakat; dan (5) Memperkuat upaya pencapaian reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan modern.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Arah pembangunan tersebut dirumuskan dalam Visi “Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya”. Dalam upaya mencapai Visi tersebut, telah ditetapkan 5 misi pembangunan yaitu : (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; (2) Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana; (3) Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing; (4) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik; (5) Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data rilis dari Provinsi Jawa Tengah dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 18 – 19 November 2020, jumlah suspect ATS di Kabupaten Grobogan berdasarkan data Statistik Pendidikan BPS Tahun 2020 sebanyak 40,51% dari anak usia 16-18 tahun dan 4% dari anak usia 13-15 tahun. Dalam rapat koordinasi sebelumnya yang diadakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah di Ungaran pada tanggal 4-5 November 2020, disampaikan bahwa jumlah suspect ATS di Kabupaten Grobogan berdasarkan data Susenas Tahun 2018 sebanyak 28.381 anak. Perbedaan data yang ada perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Angka ATS yang masih tinggi akan berakibat pada rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM), yang mempengaruhi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai komponen pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu isu strategis Kabupaten Grobogan. IPM Kabupaten Grobogan sebesar 71,49% berada di urutan 23 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dan masih tertinggal berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39% dan Nasional sebesar 74,39%.

Fenomena ATS bukan semata menjadi urusan sektor pendidikan tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama multi sektor dan seluruh stakeholder yang perlu dikoordinasikan secara khusus dan komprehensif dalam mengurai masalah serta mendayagunakan jejaring kerja. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda sebagai koordinator perencanaan harus mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan semua sektor, sesuai dengan kebutuhan/isu pembangunan di tingkat Kabupaten, serta sinkron antar sektor, antar wilayah, pusat dan daerah. Berdasarkan dokumen Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bappenas di Tahun 2019, Bappeda bertindak sebagai Ketua Tim Teknis Penanganan ATS di tingkat Kabupaten, sehingga menuntut peningkatan upaya pelibatan seluruh



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

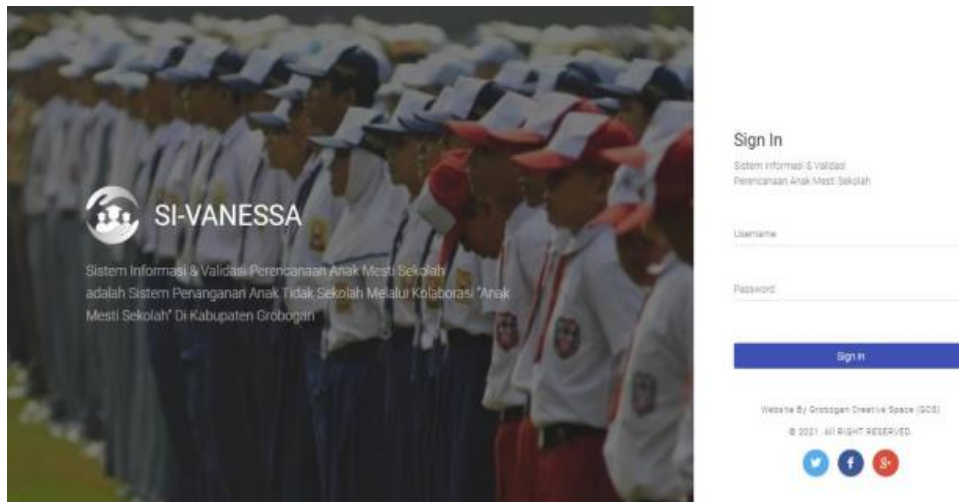
stakeholder termasuk terpenuhinya unsur pentahelix dalam jejaring kerjanya, melalui sistem koordinasi terintegrasi.

Pengelolaan dan pendayagunaan jejaring kerja yang baik mulai dari purpose, design, grow dan performance, akan membuat tim semakin efektif dalam mencapai tujuan bersama. Pembangunan jejaring kerja akan menjadi lebih efektif jika didahului dengan perencanaan yang terpadu dan terintegrasi. Pengembangan teknologi digital sangat diperlukan dalam menangani perencanaan dan kelitbangan, diantaranya dalam perbaikan dan pengembangan database. Database perencanaan masih ada yang mempunyai banyak versi dan tidak ter-update, antara lain database terkait jumlah ATS yang masih simpang siur dikarenakan ada beberapa versi data Dispendukcapil, Dapodik maupun EMIS Kementerian Agama. Perbedaan versi data memerlukan proses verifikasi, validasi maupun rekapitulasi data dan akan lebih efektif dan efisien secara otomatis melalui sistem. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan aplikasi digital sistem informasi. Oleh karena itu inovasi ini dinamakan dengan Integrasi Perencanaan Penanganan Anak Tidak Sekolah Melalui Kolaborasi “Anak Mesti Sekolah” di Kabupaten Grobogan.

Tujuan dari inovasi daerah ini adalah terwujudnya integrasi penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi “Anak Mesti Sekolah” di Kabupaten Grobogan sehingga dihasilkan database Anak Tidak Sekolah (ATS) hasil verifikasi dan validasi, serta mengembalikan ATS hasil verifikasi ke sekolah sesuai jenjang terakhirnya, termasuk memberikan bantuan personal melalui APBD maupun CSR.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Laman SI-VANESSA (sivanessa.bappeda.grobogan.go.id)



Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi SI-VANESSA Secara Daring



Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS) oleh Desa

Gambar 4.13 Dokumentasi Inovasi Sistem Informasi dan Validasi Perencanaan Anak Mesti Sekolah (SI – VANESSA)



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

4. GERAKAN CEGAH *STUNTING* (GECEG *STUNTING*)

Berdasarkan Riskesdas Tahun 2013 dan Buku “100 Kab/Kota Prioritas Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*)”, Grobogan menjadi salah satu lokus Nasional dan Provinsi, dengan prevalensi 54,9% atau 62.847 balita *stunting*. Kondisi prevalensi *stunting* Grobogan berdasarkan Riskesdas 2018 masih sebesar 39,2%, sehingga menempatkan Grobogan di posisi ke-2 tertinggi se-Jawa Tengah. Selain Riskesdas, data hasil SSGBI 2019 menunjukkan prevalensi cukup tinggi yaitu sebesar 29,13%. Permasalahan lain berupa data ePPGBM yang tidak dapat dijadikan rujukan dikarenakan cakupan entri datanya dibawah 80% sehingga dianggap belum bisa mewakili sasaran. Hal-hal tersebut nyatanya selaras dengan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Grobogan Tahun 2020 dan 2021, menempatkan Grobogan di peringkat terendah se- Jawa Tengah. Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

- Belum dilakukan penanganan *stunting* secara komprehensif, integratif dan kolaboratif;
- Keterbatasan Petugas Gizi Puskesmas dalam entri data ePPGBM yang belum terintegrasi NIK, sedangkan datanya mencapai 2000 s.d 6000 balita per petugasnya, serta keterbatasan alat antropometri di desa/posyandu sehingga berdampak pada lambatnya proses entri serta akurasi data yang menyebabkan intervensi kurang tepat sasaran.

Kelompok yang menjadi sasaran inovasi dari bagian hulu adalah remaja putri, catin dan bumil diintervensi pemenuhan kesehatannya, contoh : edukasi risiko terjadinya bayi *stunting* jika melakukan pernikahan dini kepada remaja putri, sedangkan dari bagian hilir adalah busui dan anak usia 0-59 bulan, yang diintervensi terkait pemenuhan serta perbaikan gizinya.

Inovasi GECEG *STUNTING* bertujuan untuk mempercepat penurunan *stunting* secara komprehensif, integratif dan kolaboratif, melibatkan stakeholder dari hulu hingga hilir yang didukung dengan data berkualitas dengan target capaian utama inovasi adalah penurunan prevalensi *stunting* sampai dengan 14,5%.



Rakor *Stunting* bersama UNICEF



Rakor TPPS Kab. Grobogan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



RKT Aksi Integrasi *Stunting* Tahun 2022



Pertemuan P2K2 Tahun 2022



Rembug *Stunting* Tahun 2022

Gambar 4.14 Dokumentasi Inovasi GECEG STUNTING

5. LUMBUNG PANGAN REBORN MENJAGA KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI PETANI

Permasalahan yang sering terjadi pada saat panen raya adalah hasil panen melimpah tetapi sebagian besar dijual langsung ke pedagang luar daerah dan hanya sebagian kecil yang disimpan sebagai cadangan pangan. Hal ini mengakibatkan fungsi lumbung pangan masyarakat belum berjalan secara optimal.

Lumbung pangan yang selama ini hanya berperan sebagai gudang pangan untuk mengatasi masalah kekurangan pangan pada masa paceklik. Dengan lumbung pangan reborn ini Pemerintah Kabupaten Grobogan melahirkan kembali lumbung pangan masyarakat yang secara efektif telah meningkat fungsinya.

Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya membangkitkan keberadaan lumbung pangan masyarakat dengan mengembangkan fungsinya selain sebagai tempat cadangan pangan juga sebagai unit Pengumpul Zakat Pertanian, unit usaha dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang memiliki produk yang telah teregistrasi, dan menjadi bagian dari Sistem Resi Gudang di desa.

Untuk strategi sosial dilaksanakan kolaborasi antar stakeholder terkait dalam rangka pelaksanaan ini, diantaranya melaksanakan perjanjian kerjasama pendampingan dengan Bank Jateng, Dinas Perdagangan dan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Perindustrian, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Baznas Kabupaten Grobogan. Selain itu akan dilakukan kerjasama dengan jaringan toko pemasaran dengan Paguyuban Sampoerna Retail Community (SRC) dan jaringan pemasaran lainnya untuk memasarkan beras dari Lumbung yang sudah memiliki ijin edar PSAT.



Suasana ketika panen datang



Salah satu bangunan lumbung pangan



Petani bekerjasama dengan Bank
Jateng



Lumbung pangan

Gambar 4.15 Dokumentasi Inovasi Lumbung Pangan Reborn Menjaga Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Petani

6. RAT HUNTER

Tikus merupakan musuh bagi para petani. Untuk mengurangi populasi tikus di persawahan maka Pemerintah Kabupaten Grobogan mengembangkan inovasi RAT HUNTER. Inovasi ini terdiri dari 3 metode yaitu :

- Penyediaan burung hantu (*Tyto alba*). *Tyto alba* memangsa tikus 6-9 ekor dalam satu malam. Dimana sepasang *Tyto alba* bisa mengamankan 5–10 ha sawah.
- Dibuat kandang karantina. Kandang karantina ini berfungsi untuk perawatan burung sakit atau anakan, dan setelah sembuh akan dilepasliarkan ke alam.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Pembuatan Rumah burung hantu (Rubuha) di persawahan. Rubuha ini merupakan sarang buatan yang berfungsi sebagai rumah burung hantu di areal persawahan.



Burung hantu (*Tyto Alba*)



Kandang karantina *Tyto alba*



Rubuha

Gambar 4.16 Dokumentasi Inovasi RAT HUNTER

7. RUMAH KREATIF GROBOGAN (RKG)

Rumah kreatif grobogan (RKG) sebagai Sarana untuk berkreasi dan berinovasi masyarakat Grobogan khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif. Berdasarkan uji petik yang dilakukan oleh PMK3I, Kabupaten Grobogan ditetapkan oleh Be Kraf / Kemenparekraf sebagai Kabupaten kreatif pada Sub Sektor Kuliner / Gastronomi. Kegiatan utama yang ada di rumah kreatif Grobogan ini adalah workshop berbagai kuliner dengan chef. Peserta yang datang dari berbagai kalangan mulai dari anak – anak TK, berbagai komunitas ibu – ibu, kalangan muda, kalangan pejabat untuk belajar praktker tentang per kulineran. Rumah kreatif Grobogan juga sering dijadikan tempat studi tiru dari berbagai komunitas atau kalangan dari penjuru Indonesia. Fasilitas tersedia *Workshop* Kuliner, *Gallery Room*, *Meeting Room*, *Creative Consultasi*, kantor & Mushola.

Ruang galeri digunakan untuk memajang berbagai produk ekonomi kreatif tidak hanya dari Sub Sektor kuliner saja. Tetapi produk dari sub sektor kriya dan fashion juga ditampilkan disana. Setiap periode tertentu ada pertemuan dari pengurus KEK (Komite Ekonomi Kreatif) untuk membahas permasalahan dan perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Grobogan.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Rumah Kreatif Grobogan



Workshop Kuliner



Produk Ekraf Sub Sektor Kuliner

Gambar 4.17 Dokumentasi Inovasi Rumah Kreatif Grobogan (RKG)

8. DESWITA BERGERAK (DESA WISATA UNTUK GERAKAN EKONOMI RAKYAT)

Merupakan inovasi di bidang pariwisata dengan memadukan pesona wisata desa dan kegiatan budaya adat istiadat lokal (kearifan lokal) sehingga terwujud pariwisata berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberdayakan warga masyarakat dalam penyediaan cinderamata, makanan minuman, dan homestay. Dukungan dari unsur ABCGM baik untuk promosi, peningkatan produk pariwisata, dan peningkatan SDM pariwisata sudah dilakukan.

a. Desa Wisata Penadaran

Dengan daya tarik Goa Maria Sendang Jati, Rumah Budaya, Omah Gong, Situs Jembangan, Situs Kandangan, Tugu Lumpang, Bukit Mbayang Kaki, Sendang Sumber serta yang tak kalah menarik adalah Upacara Ngunduh Banyu Udan. Pada tahun 2021, desa wisata Penadaran menjadi peserta sekaligus telah masuk ke dalam 300 besar nominasi ADWI (anugrah Desa Wisata Indonesia) tahun 2021 oleh kemenparekraf.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Prosesi pada acara Apitan



Menikmati hamparan sawah
dengan ditemani secangkir teh



Goa maria



Seni pertunjukan di depan omah gong

Gambar 4.18 Dokumentasi Inovasi Deswita Bergerak (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat) di Desa Wisata Penadaran

b. Desa wisata Kradenan

Dengan Daya Tarik Wisata Waduk Nglangon, Pasar kalangon, Taman Labirin, Nglangon Lestari Camp (NLC). Pasar kalangon merupakan daya Tarik tersendiri karena system jual belinya menggunakan kreweng (pecahan genteng). Yang diperjual belikan di pasar ini adalah makanan minuman tradisional.



Waduk nglangon



Pasar Kalangon



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025



Nglangon Lestari Camp (NLC)



Taman labirin

Gambar 4.19 Dokumentasi Inovasi Deswita Bergerak (Desa Wisata Untuk Gerakan Ekonomi Rakyat) di Desa Wisata Kradenan

9. PENGUATAN ONE VILLAGE ONE PRODUCT SENTRA INDUSTRI PANDE BESI DESA PUTATSARI UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT



Gambar 4.20 Proses Produksi di Industri Kecil Pande Besi di Desa Putatsari

Pande besi merupakan sebuah inovasi dalam ranah keterampilan. Keterampilan yang dibuat yaitu membentuk besi menjadi perkakas tajam seperti pisau, sabit, cangkul, golok, keris, dan lain sebagainya. Di sejumlah kecamatan di Kabupaten Grobogan, tepatnya di Dusun Tahunan, Desa Putatsari, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa tersebut dijuluki sebagai “Kampung Sentra Pande Besi” yang mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pande besi. Terdapat lebih dari 300 warga yang berprofesi sebagai pande besi. Kemahiran menempa besi menjadi alat-alat dapur dan pertanian itu, merupakan warisan budaya dari leluhur mereka, yang diwariskan dari generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lampau. Bermodal peralatan sederhana tangan-tangan trampil ini mampu menjadikan besi padat menjadi



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

suatu peralatan kerja yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama yang bekerja di bidang pertanian.

Usaha pande besi ini dilakukan jadi satu dengan rumah. Biasanya, lokasi usaha ditempatkan di teras rumah atau mendirikan gubukan di pekarangan. Berdasarkan salah satu keterangan dari pengrajin, setiap harinya mampu menghasilkan 20 buah sabit dan alat-alat pertanian lainnya yang kemudian dijual kepada tengkulak seharga Rp. 20.000. Sabit hasil produksi di desa yang dijuluki sebagai desa pandai besi tersebut telah merambah pasar seluruh Indonesia. Rata-rata penghasilan perharinya bisa mendapatkan Rp 150 ribu sampai Rp 200. Namun, besaran pendapatan tersebut didapatkan ketika tidak mengalami kendala. Permasalahan yang dihadapi adalah penanganan manajemen usahanya, yaitu belum melakukan pembukuan keuangan sederhana, terbatasnya tempat pemasaran, belum memperhatikan K3 (kesehatan, keselamatan dan keamanan) kerja dan kontinuitas produksi yang sangat tergantung dengan sumber daya manusianya terutama di bagian panjak/penempa besi dimusim tanam dan panen padi.

Pengembangan pande besi dapat memberikan harapan baru bagi kelompok usaha pande besi untuk meningkatkan hasil produksi dan memberikan terobosan-terobosan baru guna proses produksi menggunakan teknologi tepat guna sehingga cara-cara tradisional yang terlalu memakan waktu dan tenaga membuat hasil kurang maksimal, dengan adanya pengembangan sentra nantinya juga dapat memberdayakan masyarakat, dapat menampung tenaga kerja, dan mengurangi pengangguran masyarakat melalui kegiatan ekonomi, agar menjadi produktif dan berperan aktif sehingga dapat memicu laju perkembangan yang kian hari kian meningkat. Pemerintah hadir melalui DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Grobogan dalam bentuk pemberian alat produksi, berbagai macam pelatihan dan fasilitasi perijinan.

10.GO KASMARAN (GROBOGAN KELOLA SAMPAH MANDIRI BERKELANJUTAN)

Merupakan Inovasi di bidang Persampahan dengan memberikan sosialisasi tentang pentingnya mengolah sampah secara mandiri atau melalui kelompok swadaya masyarakat di tingkat RT/RW saat pertemuan rutin bulanan; memberikan bukti nyata hasil pengelolaan sampah di TPS 3R dan terus mencari terobosan/kreativitas sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dari daur ulang sampah seperti mengganti penggunaan pupuk anorganik menjadi pupuk organik (kompos), penggunaan pot bunga, tas, bunga hiasan, maupun kerajinan yang lainnya dari bahan daur ulang sampah. Penggunaan Magot sebagai pakan lele untuk menggantikan pellet dan/atau limbah dari *Day Old Chick (DOC)* yang mati, *DOC Grade Out* dan Kerabang telur merupakan salah satu solusi yang perlu terus dilakukan karena pakan lele yang selama ini digunakan memerlukan biaya yang tinggi. Penggunaan Magot sebagai pakan lele



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

selain membantu pemecahan permasalahan sampah juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



Sosialisasi di pertemuan RT/
RW/PKK / Karang Taruna



Pengangkutan sampah ke TPS
3R



Pemilahan Sampah



Pengolahan Sampah

Gambar 4.21 Dokumentasi Inovasi Go Kasmaran (Grobogan Kelola Sampah Mandiri Berkelanjutan)

11. BUMDESA BIMO SUCI, WIROSARI, GROBOGAN

Badan usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa) Bumi Suci merupakan program pendampingan tim pengabdian Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) yang dilakukan sejak awal 2022, dimana program tersebut sudah menyentuh lebih dari 50 peternak dan pelaku UMKM yang berada di empat desa di Kecamatan Wirosari (Desa Karangasem, Tambakselo, Dokoro dan Tegalrejo). Program pendampingan tersebut adalah wujud sinergisme antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian warga.

Kecamatan Wirosari memiliki potensi di sektor peternakan dan pertanian, dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani dan peternak. Kegiatan peternakan biasanya dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dan turun menurun, jauh dari sentuhan bisnis.

Program Bumdesa menggandeng Departemen Peternakan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro (FPP UNDIP) agar mendapatkan teknologi tepat guna, dengan tujuan utama meningkatkan perekonomian keluarga petani peternak sehingga akan mendorong



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

tercapainya tujuan SDGs khususnya No Poverty (Tanpa kemiskinan), Zero Hunger (Tanpa kelaparan), Good Health and Well-being (Hidup sehat dan sejahtera), Affordable and Clean Energy (Energi bersih dan terjangkau).

Program Bumdesa tersebut memiliki unit usaha produksi pakan ternak ruminansia yang telah berhasil memproduksi konsentrat (pakan) secara mandiri. Bahan produksi perdana yang mencapai tiga ton langsung terjual habis. Kegiatan peternakan yang dilakukan adalah menjadikan komoditas ternak ruminansia dan non ruminansia menjadi usaha berternak yang menguntungkan.



Gambar 4.22 Kegiatan Pendampingan Tim FPP Undip kepada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan

Penanganan permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pilihan program dan kegiatan yang tepat, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, juga didukung partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Program dan kegiatan Pendanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Grobogan, tetapi juga APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Perusahaan Daerah. Oleh karena itu dalam RKPD dicantumkan berbagai program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Belanja daerah yang akan dialokasikan pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.865.584.252.400,00 dengan perincian pengalokasian masing-masing jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	URAIAN	TAHUN 2025
2	BELANJA DAERAH	2.865.584.252.400
2. 1	BELANJA OPERASI	2.050.294.460.451
2. 1. 1	Belanja Pegawai	1.210.961.528.582
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	730.709.643.719
2. 1. 3	Belanja Bunga	
2. 1. 4	Belanja Subsidi	944.645.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	93.085.125.150
2. 1. 6	Belanja bantuan Sosial	14.593.518.000
2. 2	BELANJA MODAL	337.941.697.949
2. 2. 1	Belanja Tanah	
2. 2. 2	Belanja Peralatan dan Mesin	73.757.242.200
2. 2. 3	Belanja Bangunan dan Gedung	144.972.666.900
2. 2. 4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.037.442.849
2. 2. 5	Belanja Irigasi dan Jaringan	14.374.346.000
2. 2. 6	Belanja Aset Tetap Lainnya	800.000.000
2. 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.000.000.000
2. 3. 1	Belanja Tidak terduga	14.000.000.000
2. 4	BELANJA TRANSFER	463.348.094.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	30.523.946.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	432.824.148.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.050.000.000)



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

5.2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program dan kegiatan RKPD Tahun 2025 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
1.01	Pendidikan	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
		Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
1.02	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			
		Pelayanan Kesehatan Balita			
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif			
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			
		• Pelayanan kesehatan penderita hipertensi • Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus • Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat			



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis			
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.04	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota			
1.05	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota	Satpol PP
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Urusan	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Perangkat Daerah Pelaksana SPM
1	2	3	5	6	4
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
1.06	Bidang Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti			
		Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap & Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kab/Kota			

5.3 Program yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan sebagai berikut:



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Tabel 5.3
Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
1	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun		
	Indikator SDGs 1.2.1 *) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.3.1 (b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Dinas Sosial



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
	Indikator SDGs 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
	Program 1: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
	Indikator SDGs 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Indikator SDGs 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan		
	Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.1 (a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.2 *): Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 2.1.2 (a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.1*) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2*) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
	Indikator SDGs 2.3.1*) Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan
3	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia		
	Indikator SDGs 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Dinas Kesehatan



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Dinas Kesehatan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	KESEHATAN MASYARAKAT	Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		
	Indikator SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun.)		
	Indikator SDGs 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Dinas Pendidikan



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.(Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat)		
	Indikator SDGs 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan		
	Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Indikator SDGs 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.		
	Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan	Dinas Pemberdayaan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS)		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	tentang metode kontrasepsi modern.		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan		
	Indikator SDGs 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.1.1.(b) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau		
	Indikator SDGS 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.		
	Indikator SDGs 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau		
	Tidak ada		
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua		
	Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGS 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Indikator SDGs 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.		
	Indikator SDGs 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara & nusantara)		
	Indikator SDGs 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan		
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
		Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Indikator SDGs 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.		
	Indikator SDGs 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Indikator SDGs 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi		
	Indikator SDGs 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan		
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.		



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan		
	Indikator SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	Indikator SDGs 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 11.6.1.(b) Pengembangan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan		
	Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya		
	Indikator SDGs 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	terkena dampak bencana per 100.000 orang.		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications.		
	13.2.2*Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.		
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan 16 : Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan		
	Indikator SDGs 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Sekretariat Daerah
14	Tujuan 14. Ekosistem lautan		
	Tidak ada		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
15	Tujuan 15. Ekosistem daratan		
	Tidak ada		
16	Indikator SDGs 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.		
	Indikator SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.		
	Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
			Keuangan dan Asset Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Pemerintah Daerah (Kota).		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.6.2.(a) Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Kota).		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penataan Organisasi	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	Sekretariat Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	
	Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).		
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.		
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan		
	Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi		



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Instansi Pelaksana
	terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika

5.4 Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025

Program prioritas yang berhubungan dengan permasalahan, tugas dan fungsi tiap Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program dan kegiatan tersebut disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, tingkat kemendesakan, kesesuaian dengan sasaran Perangkat Daerah, dan keselarasan dengan prioritas RKPD, dan keselarasan dengan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah.

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2025 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

5.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program dan kegiatan pengelolaan Pendidikan difokuskan pada pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah melalui upaya pemenuhan layanan pendidikan PAUD dan Dikdas dan penguatan PKBM. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pendidikan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

2. Kesehatan

Program dan kegiatan urusan Kesehatan difokuskan pada penguatan pembangunan kesehatan masyarakat, pengurangan kematian ibu dan anak, dan percepatan penurunan stunting. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kesehatan yaitu:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada kegiatan; Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah TanggaPenerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan yang berdampak strategis pada penguatan daya saing masyarakat, infrastruktur SDA penanganan genangan air dan banjir, dan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna peningkatan investasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- h. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman difokuskan pada pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan PSU kawasan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan kab/kota untuk dapat memperhatikan dukungan penanganan RTLH dari APBD dan juga optimalisasi potensi pendanaan lainnya (CSR). Perbaikan kualitas kawasan permukiman untuk mengurangi Kawasan Kumuh melalui pendekatan perbaikan dan pencegahan utamanya dibawah 10 Ha.

Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perumahan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Relokasi Program Kabupaten/Kota, Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

- b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat

Program dan kegiatan urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan penegakan Perda dan Perkada, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta mitigasi dan penanganan bencana. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yaitu:

- a. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, di fokuskan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
- c. Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Program dan kegiatan urusan social difokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) dan penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat dan peningkatan rasa kesetiakawanan sosial. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Rehabilitasi Sosial, difokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penanganan Bencana, difokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja

Program dan kegiatan pada urusan tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial, di fokuskan pada kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak difokuskan pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan pemenuhan hak anak. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, difokuskan pada kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. Pangan

Program dan kegiatan pembangunan pangan difokuskan pada peningkatan diversifikasi pangan mengarah pada konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman, serta penguatan ketahanan pangan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program dan kegiatan urusan pertanahan difokuskan pada tertib administrasi pertanahan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanahan yaitu:

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, difokuskan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program penatagunaan tanah difokuskan pada kegiatan, difokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota



5. Lingkungan hidup

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian kualitas lingkungan hidup, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD dan RPJPD, peningkatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan peningkatan layanan persampahan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), difokuskan pada kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- h. Program Pengelolaan Persampahan, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah

6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil difokuskan pada peningkatan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil dan penyediaan grand design pembangunan kependudukan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- b. Program Pencatatan Sipil, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, difokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program dan kegiatan difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perekonomian desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu:

- a. Program Penataan Desa, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa, difokuskan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa, difokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana difokuskan pada peningkatan partisipasi KB, penguatan Lembaga tribina keluarga dan UPPKS. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) , di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9. Perhubungan

Program dan kegiatan pada urusan perhubungan difokuskan pada pengembangan jaringan transportasi antar kawasan strategis (khususnya Kawasan strategis ekonomi, dan pusat-pusat kegiatan yang telah ditetapkan), dan dukungan lanjutan revitalisasi terminal tipe C (Gubug dan Godong), dan rerouting angkutan untuk diperankan sebagai angkutan lanjutan (feeder). Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perhubungan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) difokuskan pada kegiatan : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

10. Komunikasi dan informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika difokuskan pada upaya mengembangkan konsep smart governance dan pencapaian SPBE sebagai pendukung smart city. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Program dan kegiatan urusan koperasi dan usaha kecil menengah difokuskan pada pengembangan produk unggulan dan potensial UMKM. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, difokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, difokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- g. Program Pengembangan UMKM, difokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

12. Penanaman modal

Program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal difokuskan pada pemetaan potensi investasi dan promosi untuk menarik minat investasi. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- b. Program Promosi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

13. Kepemudaan dan olah raga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada upaya mendorong prestasi olahraga dan peningkatan SDM melalui organisasi kepemudaan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

14. Statistik

Program dan kegiatan urusan statistic difokuskan pada pengelolaan satu data dan penyediaan dokumen statistik sektoral. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan statistik yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik di fokuskan pada kegiatan penyediaan statistik sektoral.

15. Persandian

Program dan kegiatan urusan persandian difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan persandian. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan persandian yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi difokuskan pada kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan

Program dan kegiatan urusan kebudayaan difokuskan pada peningkatan implementasi nilai-nilai budaya dan pelestarian kesenian. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan, difokuskan pada kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pembinaan Sejarah, difokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, difokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Permuseuman, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

17. Perpustakaan

Pembangunan urusan perpustakaan difokuskan pada program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan indeks literasi dan mengoptimalkan program gemar membaca dengan optimalisasi taman baca masyarakat selain meningkatkan layanan perpustakaan kabupaten. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

18. Kearsipan

Program dan kegiatan urusan kearsipan difokuskan pada pengelolaan arsip sesuai dengan standar. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota.
- c. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

5.5.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan difokuskan pada peningkatan produksi perikanan dan pengembangan usaha pengolahan ikan. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Pariwisata

Program dan kegiatan pembangunan urusan pariwisata difokuskan pada pengembangan kawasan wisata dan industri kreatif. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program dan kegiatan urusan pertanian difokuskan pada penguatan usaha pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan penyuluhan dan pengendalian OPT, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- d. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- i. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
- j. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program dan kegiatan urusan perdagangan difokuskan pada pengembangan usaha perdagangan, pengembangan ekspor, pengendalian harga dan perlindungan konsumen. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
- c. Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, difokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota,



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

5. Perindustrian

Program dan kegiatan urusan perindustrian difokuskan pada pengembangan kawasan dan sentra industri. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
- c. Kabupaten/Kota
- d. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan urusan transmigrasi difokuskan pada fasilitasi pemberangkatan transmigrasi. Program dan kegiatan tahun 2025 pada urusan transmigrasi yaitu

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, di fokuskan pada kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5.4.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Program dan kegiatan fungsi penunjang perencanaan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait perencanaan pembangunan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Pembangunan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan penelitian dan pengembangan difokuskan pada kegiatan kelitbangan yang terintegrasi dengan melibatkan unsur pentahelik sehingga efektif dan efisien, mendorong pemanfaatan hasil penelitian, serta pengembangan inovasi daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait penelitian dan pengembangan yaitu:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, difokuskan pada kegiatan: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Keuangan

Program dan kegiatan penunjang urusan keuangan difokuskan pada peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, difokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Program dan kegiatan penunjang urusan kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan difokuskan pada peningkatan manajemen ASN dan penerapan manajemen talenta ASN. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah difokuskan pada kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

5. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan sekretariat daerah difokuskan pada upaya peningkatan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Program dan kegiatan tahun 2025 pada sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, difokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, Fasilitasi Kerja Sama Daerah
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

6. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan sekretariat DPRD difokuskan pada peningkatan kualitas layanan terhadap DPRD. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait sekretariat DPRD yaitu:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD difokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Fasilitasi Tugas DPRD.

7. Pengawasan

Program dan kegiatan pengawasan difokuskan pada penguatan kualitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan difokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi.

8. Kewilayahan

Program dan kegiatan fungsi penunjang kewilayahan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Kecamatan, Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,

- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, di fokuskan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

9. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Program dan kegiatan pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri difokuskan pada penguatan kondusivitas kehidupan bermasyarakat, dan mendorong penguatan fungsi Kesbangpol dalam persiapan Pilser Tahun 2025 dan optimalisasi dukungan FORKOPIMDA dalam antisipasi konflik sosial. Program dan kegiatan tahun 2025 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, , di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, difokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

5.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah

Program dan kegiatan tahun 2025 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota difokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Target kinerja indikator program yang akan dicapai pada tahun 2025 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Target Kinerja Indikator Program Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
Pendidikan				
Pogram Pengelolaan Pendidikan	Prosentase Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	%	100	Dinas Pendidikan
	APS PAUD	%	87,69	
	APS SD/ M I	%	98,96	
	APS SMP/MTS	%	89,68	
Progam Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan Pendidikan Dasar yang telah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	Dinas Pendidikan
Progam Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio ketersediaan PTK yang kompeten	rasio	21,05	Dinas Pendidikan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pendidikan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	Dinas Pendidikan
Kesehatan				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	per 1.000 pddk	0,09	Dinas Kesehatan
	Persentase capaian hasil Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	100	
	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	%	4	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	93,33	Dinas Kesehatan



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Persentase ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai kebutuhan	%	70,55	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	70	Dinas Kesehatan
	Presentase industri rumah tangga yang mempunyai izin	%	65	
	Prosentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Memenuhi Syarat Berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)	%	80	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	%	48	Dinas Kesehatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Kesehatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	persentase areal irigasi terairi dengan baik	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	persentase daerah bebas banjir	%	92,48	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	%	88,9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	%	80,89	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase kondisi baik	%	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan TPS3R di Kecamatan	%	68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penataan Bangunan Gedung	bangunan gedung yang memiliki IMB	%	83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	88,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	75,09	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Penataan Ruang	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Perumahan dan Kawasan Permukiman				
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	
	Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan*	%	0,33	
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	44,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	%	3,91	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat				BPBD, Satpol PP
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase cakupan patroli petugas satpol PP	%	80	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan Penegakan Perda/Perkada di Kabupaten/Kota	%	85	
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	0,34	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	74	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase penilaian area manajemen resiko	level	Level 3	
Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Persentase Kelompok Relawan bencana yang aktif	%	70	
	Cakupan Desa yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	75	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Sosial				
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	%	100	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	%	100	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	57	Dinas Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	42,77	Dinas Sosial
Program Penanganan Bencana	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	100	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana makam pahlawan yang memenuhi standart	%	84	Dinas Sosial
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Sosial
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				
Tenaga Kerja				
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	69	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar Negeri)	%	76,75	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota			
Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	%	25,32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan Kesetaraan gender	%	84	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kekerasan terhadap anak	%	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	%	75	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tingkat Capaian KLA / Indeks PUHA	Kategori	Madya	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	

Pangan				DKPD
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Energi dan protein Terhadap Standar	%	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	%	10	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	%	30	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Ketahanan Pangan Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pertanahan				
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pmbangunan yang selesai tepat waktu	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Persentase dokumen inventarisasi obyek redistribusi tanah yang tersusun	%	42	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program penatagunaan tanah	Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun	%	71,43	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Lingkungan Hidup				
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	Dinas Lingkungan Hidup



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup				
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	
	Presentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	%	9,94	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pembentukan kader lingkungan tingkat desa/ kelurahan yang terbentuk	%	50	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	%	30	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	%	9	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	%	75	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Lingkungan Hidup



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Kependudukan dan Catatan Sipil				DISPENDUKCAP IL
Program Pendaftaran Penduduk	Rasio Perekaman KTP	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan KTP	%	99	
	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	%	99,9	
	Rasio Kepemilikan KIA	%	93	
Program Pencatatan Sipil	Rasio Kepemilikan akta kelahiran 0-5 Tahun	%	99	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	43,5	
	Rasio Kepemilikan akta 0-18 tahun	%	98	
	Rasio kepemilikan akta 0 - 17 tahun	%	98	
	Presentase kepemilikan akta kematian	%	100	
	Presentase kepemilikan akta perkawinaan	%	100	
	prosentase kepemilikan akta perceraian	%	100	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengakuan Anak	%	0	
	Prosentase kepemilikan Akta Pengesahan Anak	%	0	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase database yang valid dan update	%	98,75	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	dokumen	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
Program Penataan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	55,68	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%	88,89	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan desa dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tepat waktu	%	100	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Level	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Persentase BUMDes yang Mampu Meningkatkan Omset Usaha	%	9,16	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya angka kelahiran	%	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan peserta KB Aktif	%	79	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	%	90	Dinas Pemberdayaan Perempuan,



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Keluarga Sejahtera (KS)				Perlindungan Anak dan KB
Perhubungan				
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	73	Dinas Perhubungan
	Prosentase angkutan umum yang berkualitas baik	%	99	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Perhubungan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Komunikasi dan Informatika				
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	%	98	Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Koperasi dan UKM				
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif	%	50,66	Dinas Koperasi UMKM
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP Sehat	%	52,56	Dinas Koperasi UMKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi yang mengikuti pelatihan	%	52,56	Dinas Koperasi UMKM
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang diberdayakan	%	1,6	Dinas Koperasi UMKM



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	1,6	Dinas Koperasi UMKM
Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	1,6	Dinas Koperasi UMKM
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Koperasi UMKM
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Penanaman Modal				
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Investor	395	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	%	100	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan	%	100	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	%	76,02	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	%	72,37	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	DPMPTSP
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pemuda dan Olahraga				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (yang pernah mengikuti pelatihan)	%	37	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	%	0,28	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	16,67	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	%	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Statistik				Diskominfo
Program Penyelenggaraan Statistik	Persentase Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Persandian				Diskominfo
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	Dinas Komunikasi dan Informasi
Kebudayaan				
Program Pengembangan Kebudayaan	Prosentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	82	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengembangan kesenian Tradisional	%	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%	53,19	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%	100	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Perpustakaan				



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	5,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kearsipan				
Program Pengelolaan Arsip	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	96	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Presentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	%	89	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Presentase peningkatan pengguna arsip atau pengunjung arsip	%	74	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Urusan Pilihan				
Kelautan dan Perikanan				
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	1462,6	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	3208,5	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi produk olahan ikan	ton	322,57	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pariwisata				
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase penambahan destinasi wisata	%	10	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	5	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	%	3	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	3	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	3	
Pertanian				Dinas Pertanian
Dinas Pertanian				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemanfaatan sarana pertanian	%	2	Dinas Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan pemenuhan prasarana pertanian	%	3	Dinas Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	%	5	Dinas Pertanian
	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan	%	9	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase rekomendasi perizinan usaha pertanian yang diberikan	%	100	Dinas Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pertumbuhan kelompok tani yang naik kelas	%	2	Dinas Pertanian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Pertanian
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Dinas Peternakan dan Perikanan				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana peternakan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase produksi bibit ternak	%	45	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase angka kesembuhan hewan	%	76	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Persentase Bahan Pangan Asal Hewan yang ASUH	%	57,5	



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit usaha produksi peternakan	%	100	Dinas Peternakan dan Perikanan
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani ternak terbina	%	75	Dinas Peternakan dan Perikanan
Perdagangan				Disperindag
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (SHP, SIP)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%	75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	%/thn	16,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	nilai	20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%	0,072	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Perindustrian				
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (PMDN 18/2020)	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM masuk dalam SIIKa	%	61,54	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Transmigrasi				
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Fungsi Penunjang				
Perencanaan				
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	%	100	Bappeda
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%	88	Bappeda
	Persentase capaian kinerja RPJMD Infrastruktur dan Kewilayahan	%	88	
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	84	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Bappeda
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Keuangan				
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah	%	100	BPPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan pengelolaan barang milik daerah	%	100	BPPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	3	BPPKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	BPPKAD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Kepegawaian				
Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pegawai ASN yang terlayani administrasi kepegawaian	%	100	BKPPD
Pendidikan dan Pelatihan				
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi bagi setiap PNS paling sedikit 20 JP/ tahun	%	100	BKPPD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	BKPPD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Penelitian dan Pengembangan				
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	Bappeda
Sekretariat Daerah				
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Status Kinerja LPPD	Kategori	Tinggi	Sekretariat Daerah
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan bidang Perekonomian	%	100	Sekretariat Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Sekretariat Daerah
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Sekretariat DPRD				
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	100	Sekretariat DPRD



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Sekretariat DPRD
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Pengawasan				
Program Penyelenggaraan Pengawasan	persentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	%	60	Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan area penilaian manajemen resiko	%	62	Inspektorat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Inspektorat
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Kewilayahan				
Kecamatan				
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	%	100	Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan	%	100	Kecamatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	%	100	Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	Kecamatan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	Kecamatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Kecamatan
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	
Kesatuan Bangsa Dan Politik				
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase kelompok masyarakat (organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan) yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan/	%	100	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	%	>64	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	20	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	%	100	Badan Kesbangpol
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	%	100	Badan Kesbangpol
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	%	100	
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2025	Target RKPD 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,60
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,01	87,01
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	81,30	81,30
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	79,55
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140)	Sedang (140)
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5±1	4,80-5,80
7.	Angka Kemiskinan	%	9, 76 – 10,24	10,90-10,40
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73)	BB (73)
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,40	78,40
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100

6.2 Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Grobogan tertuang pada Tabel 6.2.



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2025	2025	
A.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72,27	72,60	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	87,01	87,01	
3.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur Daerah	%	81,30	81,30	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	79,55	79,55	
5.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	Sedang (140)	Sedang (140)	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5+1	4,80-5,80	
7.	Angka Kemiskinan	%	9, 76 – 10,24	10,90-10,40	
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (73)	BB (73)	
9.	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan Kesenian Tradisional yang Dilestarikan	%	78,40	78,40	
10.	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran ketertiban umum	%	100	100	
B.	Aspek Pelayanan Umum				
	Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar				
	Urusan Pendidikan				
1.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,35	12,35	Dinas Pendidikan
2.	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,07	7,07	Dinas Pendidikan
	Urusan Kesehatan				
3.	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,22	75,22	Dinas Kesehatan
4.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000	146,74 (32 kasus)	146,74 (32 kasus)	Dinas Kesehatan
5.	Angka Kematian Bayi	per 1.000	12,29 (268 kasus)	12,29 (268 kasus)	Dinas Kesehatan
6.	Prevalensi stunting pada balita	%	14	14	Dinas Kesehatan
7.	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi	%	65	65	Dinas Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
8.	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	88,31	88,31	DPUPR
9.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	92,62	92,62	DPUPR
10.	Persentase pemenuhan air minum, sanitasi dan rumah layak huni	%	76,18	76,18	Disperakim
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
11.	Persentase rumah layak huni	%	64,00	64,00	Disperakim



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2025	2025	
	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;				
12.	Persentase Gangguan Trantibum Linmas yang dapat ditangani	%	100	100	Satpol PP
13.	Persentase Penegakan PERDA	%	85	85	Satpol PP
14.	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	85	85	Satpol PP
	Urusan Konkuren Penanggulangan Bencana				
15.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,70	0,70	BPBD
	Urusan Sosial				
16.	Persentase Penurunan PPKS	%	1,4	1,4	Dinsos
	Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar				
	Urusan Tenaga Kerja				
17.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,1	3,90-3,50	Disnakertrans
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak				
18.	Tingkat Capaian APE	Kategori	Utama (0,7725 – 0,9074)	Utama (0,7725 – 0,9074)	DP3AKB
19.	Tingkat capaian KLA/Indeks PUHA	kategori	Madya	Madya	DP3AKB
	Urusan Pangan				
20.	Skor Pola Pangan Harapan	skor	90	90	Dinas Ketahanan Pangan
	Urusan Pertanahan				
21.	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	76,92	76,92	Disperakim
	Urusan Lingkungan Hidup				
22.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,51	80,51	DLH
23.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	87,49	87,49	DLH
24.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	63,20	63,20	DLH
25.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks	48,00	48,00	DLH
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
26.	Tingkat Pemenuhan Administrasi Kependudukan	Kinerja cukup (72,4%)	Kinerja sangat tinggi (95,17%)	Kinerja sangat tinggi (95,17%)	Dispendukcapil
	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
27.	Indeks desa membangun	Indeks	0,71	0,71	Dispermasdes
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				



**RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2025	2025	
28.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,32	2,32	BP3AKB
	Urusan Perhubungan				
29.	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B (0,20-0,44)	B (0,20-0,44)	Dishub
	Urusan Komunikasi dan Informatika				
30.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,4	3,4	Diskominfo
	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
31.	Prosentase KSP/USP Sehat	%	65	65	Dinkop UMKM
	Urusan Penanaman Modal				
32.	nilai investasi di daerah	Miliar rp	931,400	931,400	DPMPTSP
	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga				
33.	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indek	0,47	0,47	Disporabudpar
	Urusan Statistik				
34.	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100	Diskominfo
	Urusan Persandian				
35.	Indeks KAMI	Indeks	III	III	Diskominfo
	Urusan Kebudayaan				
36.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	82	82	Diskominfo
	Urusan Perpustakaan				
37.	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	63	63	Disarpus
	Urusan Kearsipan				
38.	Persentase pengolahan arsip secara baku	%	96	96	Disarpus
	Urusan Pilihan				
	Urusan Kelautan dan Perikanan				
39.	Persentase Pertumbuhan produksi perikanan	%	5,38	5,38	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Pariwisata				
40.	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,47	1,47	Disporabudpar
	Urusan Pertanian				
41.	Pertumbuhan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%/tahun	1,7	1,7	Dispertan
42.	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%/tahun	2	2	Dinas Peternakan dan Perikanan
	Urusan Perdagangan				
43.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	1,15	1,15	Disperindag



RKPD Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Target RKPD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			2025	2025	
	Urusan Perindustrian				
44.	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,57	1,57	Disperindag
	Urusan Transmigrasi				
45.	Prosentase terpenuhinya kuota pemberangkatan transmigran	%	100	100	Disnakertrans
	Urusan Penunjang				
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				
46.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Bappeda
	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah				
47.	Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	100	Bappeda
	Urusan Keuangan Daerah				
48.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	BPPKAD
	Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan				
49.	Indeks penilaian mandiri sistem merit	Indeks	Kategori III (255)	Kategori III (255)	BKPPD
	Sekretariat Daerah				
50.	Nilai SAKIP	Nilai	BB (72)	BB (72)	SETDA
	Sekretariat DPRD				
51.	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	80	80	Setwan
	Pengawasan				
52.	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,12)	Level 3 (3,12)	Inspektorat
53.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 3	Level 3	Inspektorat
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik				
54.	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100	Badan Kesbangpol
	Urusan Kewilayahan/Kecamatan				
55.	IKM	Nilai	B (83,58)	B (83,58)	Kecamatan
C.	Aspek Daya Saing				
56.	Indek Daya Saing Daerah	Indek	3,3	3,3	Bappeda
57.	Nilai Tukar Petani	Nilai	102,33	102,33	Dinas Pertanian
58.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	40,29	40,29	Dispermasdes
59.	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	9,33	9,33	Disperindag
60.	Rasio ketergantungan	%	41,56	41,56	Dispendukcapil



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 merupakan implementasi dari tahun keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2025 mengambil tema pembangunan **“Pemantapan Perekonomian Daerah dan Daya Saing SDM didukung Penguatan Reformasi Birokrasi Serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya”**. Tema pembangunan tersebut telah dijabarkan kedalam prioritas dan pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disertai dengan kerangka pendanaan. Pengimplementasian RKPD selanjutnya akan dijabarkan kedalam dokumen penganggaran dalam bentuk APBD yang akan didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka memastikan RKPD tahun 2025 dapat terimplementasikan dengan baik, terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani, meliputi sebagai berikut:

1. Dokumen RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025.
2. Dokumen RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS, dan RKA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban mengawal penganggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
4. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2025.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 untuk memastikan pelaksanaan RKPD tahun 2025 berjalan dan memperoleh hasil yang baik.
6. Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam rangka Perubahan APBD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2025;



RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Kolaborasi seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Grobogan diperlukan untuk memastikan rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengarah pada pencapaian Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 yaitu: ***“Terwujudnya Grobogan Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman Dan Berbudaya”***.

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI